

PROSIDING SEMINAR NASIONAL



TATA KELOLA EKOSISTEM GAMBUT BERKELANJUTAN BERBASIS MASYARAKAT

Penerbit:
Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP UNRI
Kerjasama Laboratorium FISIP UNRI
dan PT. Pertamina RU II Sungai Pakning

ISBN : 978-602-50161-2-7

KOHESIFITAS AKTOR NON NEGARA DALAM TATA KELOLA EKOSISTEM GAMBUT BERKELANJUTAN

Alfian¹, Tito Handoko², Nursiwan²

¹Program Studi Ilmu Administrasi – Program Pascasarjana Universitas Riau

²Jurusan Ilmu Pemerintahan – Universitas Riau

Email: alfian1764@grad.unri.ac.id, tito.handoko@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Tata kelola ekosistem gambut masih menuai banyak persoalan, sebab menyangkut banyak kepentingan khususnya kepentingan masyarakat yang tinggal di atasnya. Tulisan ini menelaah tata kelola ekosistem gambut dari sudut pandang aktor non Negara, berkenaan dengan peran dan strateginya dalam arena lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kohesifitas aktor non Negara dalam tata kelola ekosistem gambut berkelanjutan berdampak pada menguatnya tekanan pada pemerintah untuk menerbitkan kebijakan pengelolaan gambut secara simultan. Aktor-aktor tersebut dapat diidentifikasi seperti Jikalahari, WALHI, Cifor, WWF, Green Peace dan lain-lain. Kajian ini mengungkap bahwa hadirnya para aktor non Negara itu mampu memobilisasi keluhan kolektif publik dan struktur politik sehingga meningkatkan tekanan kepada pemerintah. Aktor non Negara juga mampu berperan sebagai gerakan sosial yang mendorong kesetaraan relasi kuasa, dengan mempengaruhi kebijakan, penegakan hukum, perilaku pasar dan sektor swasta, serta mempromosikan pengelolaan lahan gambut di tingkat lokal dalam rangka penguatan tata kelola sumberdaya alam di Indonesia.

Kata kunci: aktor non negara, tata kelola lingkungan, gambut, kohesifitas dan tekanan politik

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai tata kelola gambut akan terus menghiasi ruang-ruang diskusi masa kini maupun masa yang akan datang. Ekosistem gambut yang dikenal sebagai ekosistem lahan basah tidak dapat disamakan pengelolannya dengan ekosistem lahan mineral. Karakteristik gambut berbeda secara spesifik dengan lahan mineral mulai dari tumbuhan yang ada di atasnya, cara pemanfaatannya hingga dampak yang ditimbulkan jika mengalami kerusakan. Lahan Gambut mengandung akumulasi bahan organik dalam kurun waktu yang lama berupa sisa-sisa tanaman dan jaringan tanaman yang melapuk. Lahan gambut menyimpan karbon sebesar 30% karbon dunia dan memiliki daya tanah air yang tinggi sehingga berfungsi sebagai penyangga hidrologi areal disekelilingnya. Lahan gambut tidak hanya memiliki fungsi lingkungan dan produksi saja, namun juga terdapat fungsi dan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi, Indonesia bahkan meratifikasi konvensi iklim PBB sebagai wujud keberpihakan Negara dalam mengembalikan ekosistem gambut seperti sedia kala.

Kerusakan lahan gambut akibat eksploitasi berlebihan pada dua dekade terakhir memantik perhatian masyarakat global. Bagaimana tidak, kebakaran hutan dan lahan gambut bahkan mengancam keselamatan populasi manusia karena pelepasan biosfer dan meningkatnya karbondioksida yang sangat berbahaya bagi masa depan generasi. Bicara soal kebakaran hutan dan gambut, maka Riau adalah laboratorium yang paling pas untuk melihat bagaimana regulasi dan implementasi di lapangan berakibat fatal selama berdekade. Tanpa menyebut kejadian terparah tahun 1997 lalu, kepulan asap kebakaran hutan gambut parah yang terjadi pada 2015 misalnya, telah menutupi hampir 80% wilayah pulau Sumatera. Dan nilai kerugiannya diperkirakan mencapai 221 triliun rupiah se-Indonesia, dan hampir 20 triliun rupiah dari kebakaran hutan di Riau saja. Berdasarkan data dari Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDDL), luas lahan gambut Riau pada 2019 yakni 3.564.948,39 hektar atau sekitar 40% dari luas Provinsi Riau 8.702.400. Sehingga gambut secara fungsi sosial, kultur

dan ekonomi mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sementara dari sisi fungsi ekologi dan iklim, gambut dengan kekayaan hayati di dalamnya serta kandungan karbon emisi yang diserap bisa berperan menghambat laju pemanasan global penyebab perubahan iklim (<https://pantaugambut.id>).



Gambar 1. Foto Kebakaran Lahan Gambut

Sumber: <https://www.ranahriau.com/berita-1513-perbaiki-933000-hektare-kerusakan-gambut-riau.html>

Pada Januari 2016, Presiden Jokowi mendirikan Badan Restorasi Gambut (BRG), yang diberi mandat untuk merestorasi dua juta hektar lahan gambut sebelum tahun 2020. Upaya restorasi tersebut mencakup pemetaan pada provinsi-provinsi yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan, peningkatan muka air lahan gambut, penciptaan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat lokal, dan pengembangan tanaman alternatif untuk lahan gambut. Kompleksitas restorasi gambut menekankan pentingnya peran serta aktor non-pemerintah dalam mendukung upaya pemerintah. Beberapa lembaga sosial masyarakat (LSM), universitas, dan perwakilan pihak swasta telah melakukan kegiatan restorasi gambut, termasuk di provinsi-provinsi prioritas BRG. Kegiatan-kegiatan seperti ini melengkapi upaya Tim Restorasi Gambut Daerah (TRG), yang menjadi ujung tombak pelaksanaan proyek-proyek restorasi gambut pemerintah di daerah (<https://wri-indonesia.org>).

METODE

Tata kelola ekosistem gambut tidak dapat diukur hanya dengan mengkuantifikasi upaya-upaya pemerintah, anggaran yang telah digelontorkan hingga kelembagaan yang ditugaskan. Namun, melihat tata kelola dari sudut pandang tindakan para aktor non Negara menjadi lebih menarik karena mampu mendorong perubahan sikap Negara terhadap ekosistem gambut. Maka untuk melihat peran aktor non Negara itu, kajian ini dilakukan secara mendalam melalui pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan ketersediaan data secara empiric yang diperoleh dari studi dokumentasi dan telaah data sekunder lainnya. Guna menganalisis data tersebut, digunakan teknik interpretative yang memungkinkan memberi makna secara mendalam terhadap tindakan-tindakan para aktor berkepentingan dalam tata kelola ekosistem gambut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata kelola ekosistem gambut memerlukan campur tangan banyak pihak, tujuannya ialah agar timbul kesepahaman bersama mengenai pentingnya tata kelola

ekosistem gambut untuk generasi yang akan datang. Ekosistem gambut mestinya tidak hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi melainkan sebagai budaya masyarakat yang tinggal di atasnya. Masyarakat dalam kawasan gambut telah beradaptasi sejak lama dan tidak ada tanda-tanda kerusakan signifikan akibat aktifitas mereka di atasnya. Kerusakan ekosistem gambut justru terjadi ketika Negara hadir dengan dalih pembangunan dan kesejahteraan dengan memberikan kuasa perusahaan kepada korporasi dan aktor-aktor ekonomi tertentu yang memiliki akses regulatori kepada Negara. Oleh sebab itu, kampanye mengembalikan fungsi ekosistem gambut menjadi titik balik kepedulian Negara pada ekosistem gambut. Pembahasan berikut ini dimulai dengan melihat posisi negara dalam tata kelola ekosistem gambut dan selanjutnya membahas mengenai kohesifitas aktor non Negara dalam tata kelola ekosistem gambut di Riau.

Posisi Negara Dalam Tata Kelola Ekosistem Gambut

Kasus kerusakan lahan gambut telah menyadarkan berbagai pihak utamanya negara. Negara memandang bahwa pengelolaan ekosistem gambut perlu diatur untuk menjamin keberlanjutannya dimasa yang akan datang. Kasus kerusakan lahan gambut akibat eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh korporasi maupun perseorangan berdampak luas dan memantik perhatian dunia internasional. Pemerintah Indonesia menempatkan persoalan ini sebagai prioritas sehingga penanganan kerusakan lahan gambut dapat sesegera mungkin dilakukan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, merupakan jawaban atas keseriusan pemerintah dalam menata ekosistem gambut di Indonesia. Terbitnya peraturan pemerintah itu menandakan dimulainya babak baru dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.



Gambar. 2 Luas Gambut Indonesia dan Sebaran Gambut Berdasarkan Provinsi
Sumber: katadata, 2017

Tidak dapat dipungkiri bahwa penerbitan izin pemanfaatan lahan gambut untuk kepentingan industri kertas dan perkebunan kelapa sawit di masa silam disinyalir menjadi penyebab utama rusaknya ekosistem gambut ditambah dengan aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat di atas lahan gambut seperti penambangan kayu secara liar, pembukaan lahan dengan cara bakar dan alih fungsi lahan yang berdampak besar terhadap perubahan ekosistem gambut. Berdasarkan data Global

Wetlands, Indonesia memiliki lahan gambut terbesar kedua di dunia dengan luas mencapai 22,5 juta hektare (ha). Sedangkan urutan pertama ditempati Brazil dengan luas lahan gambut sebesar 31,1 juta ha. Adapun di Indonesia, provinsi pemilik lahan gambut terbesar adalah Papua dengan luas 6,3 juta ha. Disusul kemudian Kalimantan Tengah (2,7 juta ha), Riau (2,2 juta ha), Kalimantan Barat (1,8 juta ha) dan Sumatera Selatan (1,7 juta ha). Selain itu ada Papua Barat (1,3 juta ha), Kalimantan Timur (0,9 juta ha) serta Kalimantan Utara, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan yang masing-masing memiliki 0,6 juta ha. Berikut infografis luasan gambut Indonesia dan sebarannya berdasarkan provinsi (Handoko et al., 2020).

Hadirnya negara dalam pengelolaan lingkungan hidup mesti dipahami sebagai keharusan negara yang tercermin pada kebijakan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Kebakaran hutan dan lahan merupakan contoh nyata ketidakmampuan negara dalam mengelola dirinya sendiri. Pemberian izin pemanfaatan hutan dan lahan pada korporasi seringkali tidak disertai dengan kontrol negara terhadap pemanfaatan kawasan hutan dan lahan secara ketat. Contoh nyata lemahnya kontrol negara terhadap korporasi ialah pada kasus pembukaan lahan konsesi korporasi pada ekosistem gambut. Kerusakan ekosistem gambut akibat aksi korporasi dalam pembukaan lahan serta pemanfaatan yang tidak sesuai dengan karakteristik ekosistem gambut telah berdampak pada berubahnya ekosistem gambut secara drastis.

Pemerintah Indonesia telah merancang Strategi Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan di Indonesia berdasarkan SK Deputi III MenLH Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan No. 347 Tahun 2006. Strategi nasional ini disusun pada tahun 2012 dengan tujuan untuk menyediakan payung bagi penyusunan rencana aksi di tingkat regional atau daerah yang dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan kekhasan dan prioritas Daerah untuk mensejahterakan masyarakat, sepanjang tetap memperhatikan keseimbangan antara fungsi ekologis dan nilai ekonominya. Namun aksi dalam wujud regulasi baru diterbitkan pada tahun 2014 sesuai dengan PP No. 71 Jo PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Lahan gambut sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup. Yurisprudensi internasional telah menetapkan bahwa ekosistem gambut berfungsi penting bagi kehidupan dunia, sehingga harus dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang berakibat hilangnya keseimbangan ekosistem. Kerugian yang harus ditanggung oleh Indonesia akibat kebakaran hutan (termasuk kebakaran hutan pada lahan gambut) tahun 1997 saja diperkirakan mencapai Rp. 5,96 triliun atau sekitar 70,1 % dari nilai PDB sektor kehutanan pada tahun 1997. Malaysia yang juga terkena dampak kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 1997 mengalami kerugian US\$ 300 juta di sektor industri dan pariwisata, sedangkan Singapura mengalami kerugian sekitar US\$ 60 juta di sektor pariwisata. Sementara kurun waktu 2014 dan 2015 terjadi peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia termasuk wilayah Riau. Kebakaran hutan dan lahan tersebut menimbulkan dampak yang luar biasa dan kabut asap yang ditimbulkan bahkan mengganggu penerbangan internasional serta mengganggu jalur pelayaran dunia di Selat Malaka, sehingga pemerintah menetapkan status darurat bencana kabut asap nasional pada tahun 2015. Kerugian bagi Indonesia akibat kebakaran tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp 221 triliun (16,1 miliar dolar AS). Untuk wilayah Riau saja misalnya berdasarkan pantauan satelit NOAA 18 diketahui bahwa daerah di Riau yang rutin mengalami kebakaran hutan dan lahan yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Berikut gambar sebaran titik api dan arah angin kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau tahun 2015.



Gambar 3. Peta Sebaran Lahan Gambut Pulau Sumatera

Sumber: KLHK, 2017

Sementara menyoal kerusakan gambut akibat pemanfaatan yang tidak ramah seolah sulit untuk dihentikan. Persoalan penerbitan izin usaha disektor perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri telah mereduksi fungsi gambut. Provinsi Riau dan sebaran gambutnya tidak bisa dipisahkan dari perjalanan invasi ekonomi dan ekspansi industri yang menyebabkan terjadinya degradasi kualitas gambut. Berdasarkan olahan data spasial yang dilakukan WALHI Riau, diketahui bahwa hingga tahun 2012, $\pm 1,5$ juta hektar lahan gambut telah beralih fungsi maupun telah dibebani izin baik peruntukannya sebagai HGU sektor Perkebunan Kelapa Sawit maupun Hutan Tanaman Industri (Walhi Riau, 2019). Sedangkan terkait ruang-ruang ekologis bagi rakyat tidak sebanding jumlah dan luasannya dengan yang diberikan negara kepada korporasi melalui perizinan dan investasi. Berdasarkan data 1,42 juta hektar Peta Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial di Provinsi Riau, implementasinya masih berada diangka 6% (kurang dari 100.000 ha) yang memperoleh izin dengan skema Perhutanan Sosial untuk masyarakat.

Pemanfaatan lahan gambut secara luas telah menimbulkan polemik di lingkungan sekitar masyarakat lokal (Moore et al., 2013; Page et al., 2009). Prudensius Maring, dkk (2011) mencatat setidaknya Empat Provinsi di Sumatera (Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan Sumatera Barat) menunjukkan persoalan yang sama, sama dalam pengertian sepanjang bentangan Pulau Sumatera konflik agraria menimpa kelompok yang sama, tumpang tindih lahan yang sejenis, korban yang luas, dan peminggiran oleh pelaku usaha dan negara secara masif. Catatan empat provinsi itu menunjukkan akar masalah yang hampir sama, yakni:

1. Tumpang-tindih kebijakan pemerintah tentang pengelolaan SDA;
2. Ekspansi penguasaan lahan untuk kepentingan HTI/HPH dan perkebunan;
3. Kegagalan pengaturan tataruang secara adil;
4. Ekspansi penguasaan lahan berbasis adat oleh pemerintah dan perusahaan;
5. Ketidakadilan tatakelola sumberdaya alam oleh pemerintah dan perusahaan;
6. Kegagalan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan lahan baik gambut maupun mineral oleh masyarakat juga dihadapkan pada persoalan yang hampir serupa yaitu isu lingkungan. Masyarakat selalu dituding sebagai pihak yang paling sering melakukan pembukaan hutan dan lahan dengan cara bakar. Tuduhan itu juga relevan dengan aktifitas penegakan hukum yang lebih banyak menyasar aktifitas masyarakat dalam pembukaan kawasan hutan dan lahan. Kasus kebakaran hutan dan lahan tahun 2014-2015 menunjukkan bahwa

pihak masyarakat yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan sementara perusahaan hanya sedikit. Namun jika dilihat dari sebaran area kebakaran hutan dan lahan mayoritas lahan yang terbakar berada di sekitar area konsesi perusahaan. Khusus untuk lahan gambut diketahui bahwa karakteristik lahan gambut mempunyai sifat mudah rusak, sehingga fungsi lahan gambut sebagai penghasil jasa lingkungan, yaitu sebagai penyimpan karbon, penyimpanan air, dan konservasi keragaman hayati dikhawatirkan menurun bahkan hilang setelah hutan gambut beralih fungsi menjadi lahan pertanian atau perkebunan.

Pertumbuhan pemanfaatan lahan gambut untuk lahan pertanian atau perkebunan pada sepuluh tahun terakhir ini didominasi pada perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Transformasi ini diyakini menjadi salah satu sumber utama gas rumah kaca (GRK) dari sektor berbasis lahan (Septicorini, 2006; Suwondo, Sabiham, Sumardjo, & Paramudya, 2012; Wahyunto et al., 2014). Menurut Hooijer, selama periode 1985 hingga 2000 sebanyak 20% atau rata-rata sebesar 1,3% per tahun hutan gambut alami telah ditebang dan/atau dikonversi untuk penggunaan lain (Hooijer et al., 2012). Berdasarkan data BBSDLP terlihat bahwa dari 14,9 juta hektar luas lahan gambut Indonesia, yang masih tersisa sebagai hutan adalah seluas 8,3 juta hektar atau sekitar 55,5%, sedangkan yang telah berubah menjadi semak belukar, kebun kelapa sawit dan areal pertanian masing-masing adalah 3,8 juta hektar (25,5%), 1,54 juta hektar (10,3%), dan 0,7 juta hektar.

Upaya restorasi/ perbaikan lahan gambut terus dilakukan guna menekan laju kerusakan gambut. Pemerintah bahkan menetapkan restorasi lahan gambut sebagai skala prioritas. Tugas utama restorasi lahan gambut itu dibebankan kepada Badan Restorasi Gambut yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Badan Restorasi Gambut yang selanjutnya disingkat menjadi BRG memiliki tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di tujuh provinsi, salah satunya adalah Provinsi Riau. Sejalan dengan tugas tersebut, BRG juga melaksanakan mandat lain yang diberikan oleh Presiden, salah satunya adalah tugas tambahan untuk masuk ke dalam konsep perhutanan sosial di kawasan gambut. Rekomendasi yang disampaikan oleh BRG dan aktivis lingkungan berbuah positif dengan diterbitkannya moratorium izin pembukaan hutan dan lahan gambut. Moratorium izin hutan dan gambut merupakan kebijakan transisi guna perbaikan tata kelola hutan dan gambut. Moratorium izin telah berjalan berjilid-jilid sejak era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai sekarang. Mulai Inpres No.10/2011 tertanggal 20 Mei 2011 diperpanjang dengan Inpres No 6/2013. Terakhir, Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla melanjutkan moratorium dengan Inpres No.8/2015.

Sudah dua rezim pemerintahan atau enam tahun berjalan kebijakan moratorium dengan hasil kurang memuaskan. Tata kelola hutan dan gambut masih jauh dari baik. Hal ini, setidaknya terkonfirmasi dari dua fakta. *Pertama*, masih ada pemberian izin kehutanan dan perkebunan oleh pemerintah melalui revisi-revisi areal moratorium dan pelepasan kawasan hutan. Revisi areal moratorium sejak 2011-2013, mengurangi 5.055.089 hektar. Pada 2015, dengan menambah kembali areal moratorium 2.353.151 hektar. Inkonsistensi penerapan areal moratorium ini membuka peluang pemberian izin baru, baik izin usaha kehutanan maupun perkebunan melalui pelepasan kawasan hutan. *Kedua*, masih terjadi pembakaran hutan dan lahan masif dalam pembukaan perkebunan sawit, terutama di tiga pulau utama Indonesia, Sumatera, Kalimantan dan Papua. Sementara pada tahun 2019, kebijakan moratorium izin hutan dan gambut kembali diperpanjang dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya berhasil karena tak menyentuh persoalan mendasar tata kelola hutan dan gambut, yaitu soal tumpang

tindih regulasi dan sektoralisme pengelolaan hutan dan gambut (Nurul Firmansyah, 2017).

Sebagai kebijakan transisi, moratorium sejatinya upaya intervensi negara yang bersifat penting (prioritas) dengan jangka waktu tertentu guna memastikan persoalan mendasar tata kelola hutan dan gambut terpecahkan. Urgensi kebijakan moratorium memerlukan indikator terukur dan progresif mengatasi persoalan itu. Oleh sebab itu, kebijakan moratorium sejatinya bukanlah upaya permanen dalam pengelolaan lahan gambut, namun demikian penghindaran gambut dari aktivitas penebangan dan hutan tanaman industri ini berkaitan dengan konsekuensi logis akibat aktivitas produksi yang menyebabkan penurunan simpanan karbon di lahan gambut itu sendiri. IFCA merekomendasikan strategi teknis bagi Indonesia untuk berhati-hati pada HTI dan lahan gambut, rekomendasi tersebut adalah (Rochmayanto, dkk, 2013):

1. Mengurangi konversi hutan alam yang dapat dikonversi menjadi hutan tanaman industri atau perkebunan melalui pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan yang sudah mengalami degradasi berat sehingga biaya pembangunan hutan tanaman dan perkebunan tidak lagi dimungkinkan diambil sebagian dari hasil penjualan kayu.
2. Mengalihkan sebisa mungkin operasi penebangan, konversi hutan menjadi hutan tanaman industri dan perkebunan ke luar dari hutan gambut, merestorasi hutan gambut yang sudah rusak dengan memperbaiki kondisi hidrologinya, mendorong kegiatan penghijauan dan reforestasi serta mempercepat laju regenerasi hutan gambut melalui kegiatan pengayaan.

Kegiatan restorasi gambut yang dilaksanakan secara serentak sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 menysasar seluruh wilayah yang memiliki ekosistem gambut khususnya daerah-daerah yang pemanfaatannya gambutnya sudah sangat kritis. Untuk lebih memfokuskan kegiatan restorasi gambut itu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, yang diberi mandat untuk merestorasi dua juta hektar lahan gambut sebelum tahun 2020. Upaya restorasi tersebut mencakup pemetaan pada provinsi-provinsi yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan, peningkatan muka air lahan gambut, penciptaan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat lokal, dan pengembangan tanaman alternatif untuk lahan gambut.

Tata Kelola Ekosistem Gambut dan Kohesifitas Aktor Non Negara

Pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) tidak lepas dari saran dan masukan aktivis lingkungan (WALHI) dan Perguruan Tinggi sebab penanganan kerusakan gambut harus dilakukan secara terarah, terukur dan berkelanjutan. Khusus Provinsi Riau saja, kegiatan restorasi gambut yang telah dilakukan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mencapai lebih dari 900ribu hektar lebih. Dari luasan tersebut, tanggungjawab utuh BRG diperkirakan mencapai 109 ribu hektar. Sementara sebanyak 600 ribu hektar merupakan lahan gambut di areal Hutan Tanaman Industri (HTI), sisanya 200 ribu hektar berada di areal perkebunan atau pemilik Hak Guna Usaha (HGU). Persoalan itulah yang menjadi tantangan berat BRG mengingat Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang berada dalam lahan konsesi nyatanya lebih luas dibanding yang lepas. Sementara dampak kerusakan KHG terbesar justru dalam lahan konsesi bukan di lahan milik perseorangan.

Restorasi lahan gambut yang dilakukan di Riau dianggap masih fokus pada lahan-lahan milik masyarakat. Kasus restorasi gambut di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti misalnya, dengan kedatangan Presiden Joko Widodo ke Desa ini pada tahun 2016 menjadi titik balik peningkatan kesadaran masyarakat dan fokus

restorasi gambut pada lahan masyarakat. Sejak tahun 2016, Desa Sungai Tohor telah tumbuh menjadi desa sadar api dan tercatat tidak mengalami kebakaran dan capaian restorasi 3R di Desa ini cukup signifikan mengatasi kerusakan gambut. Hingga tahun 2019, sejumlah 14 (empat belas) sekat kanal telah dibangun dan satu diantaranya adalah sekat kanal permanen. Selain itu untuk revegetasi sudah ada ratusan bibit pohon yang telah ditanam dilahan gambut diantaranya kayu alam geronggang, meranti, jelutung, jangkang dan lain sebagainya yang ditanam berdampingan dengan pohon sagu gunanya agar sagu tetap teduh agar tumbuh kembang sagu menjadi lebih baik. Pengarusutamaan tata kelola berbasis masyarakat memang amat dibutuhkan mengingat gambut sebagai tradisi masyarakat dan menjaga kelestariannya juga mesti melibatkan masyarakat secara simultan.

Program restorasi gambut juga dapat dianggap sebagai wujud tindakan pemerintah mendukung implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Seperti diketahui, SDG's mengintegrasikan, memahami dan bertindak dalam kesalinghubungan yang kompleks dalam aspek lingkungan, ekonomi dan aspek sosial dan menjadi tiga pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan (Gupta & Vegelin, 2016; McInnes, 2018). Dari 17 target SDG's yang akan berlaku hingga 2030, salah satu dari target tersebut berkaitan dengan konsep penelitian yang diusung, yaitu *Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystem, sustainably manage forest, combat desertification, and halt and reverse land* yang mana hal ini sangat erat kaitannya dengan kesinambungan lingkungan, ekonomi dan sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka beberapa aspek yang akan menjadi *focus goals* dalam penelitian berbasis SDG's ini adalah aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Dalam aspek lingkungan, lahan gambut memiliki beberapa nilai penting, baik yang bersifat ekstraktif maupun non ekstraktif. Sebagai bahan ekstraktif, gambut dapat dimanfaatkan sebagai bahan energi (misal arang briket), diambil asam humatnya, media semai dan media untuk reklamasi lahan kering. Sedangkan sebagai bahan non ekstraktif dapat berfungsi sebagai habitat pendukung keanekaragaman hayati, sebagai lahan kehutanan, perkebunan, dan pertanian. Selain itu karena kemampuannya menyimpan air yang sangat besar (90% dari volume) maka lahan gambut dapat diharapkan berfungsi sebagai penyangga hidrologi bagi kawasan sekitarnya yaitu mencegah banjir dan intrusi air laut.

Kepedulian banyak pihak pada ekosistem gambut tentu beralasan, paling tidak para pihak itu menilai bahwa kualitas ekosistem gambut yang buruk akan mempercepat laju kerusakan populasi manusia secara luas. Hadirnya aktor non Negara dalam memperjuangkan perbaikan ekosistem gambut nyatanya mampu menekan dan mendorong Negara untuk bertindak lebih konkrit. Perbaikan-perbaikan regulasi menjadi contoh konkrit upaya aktor non Negara itu dalam memperjuangkan perbaikan ekosistem gambut. Bekerjanya para aktor non Negara tentu simultan dan tidak particular, hal ini ditandai dengan menguatnya partisipasi publik dalam berbagai arena perjuangan tata kelola ekosistem gambut berkelanjutan. Suara-suara dari aktor non Negara (baca – Walhi, Jikalahari, WWF, Green Peace dll) telah dengan nyata mampu mengubah arah kebijakan Negara dalam pemanfaatan dan pengusahaan ekosistem gambut di Riau dan Indonesia.

KESIMPULAN

Aktor non Negara telah dengan nyata mampu menghadirkan perubahan dalam tata kelola ekosistem Gambut di Riau dan Indonesia. Dorongan dari aktor non Negara itu juga mampu menyadarkan Negara untuk bertindak secara sistematis dengan membentuk lembaga Negara yang khusus menangani perbaikan ekosistem gambut (BRG). Bekerjanya aktor non Negara dalam tata kelola ekosistem gambut disambut dengan baik oleh masyarakat yang tinggal di atas lahan gambut dan bahkan banyak

pula yang turut menjadi bagian dari aktor non Negara itu untuk memperbaiki kualitas kehidupan pada ekosistem gambut.

Ucapan Terima Kasih

Apresiasi disampaikan kepada pihak-pihak yang telah berkomitmen dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Riau dan Indonesia. WALHI, Jikalahari, WWF dan pihak-pihak lainnya yang telah berkontribusi secara nyata dalam tata kelola ekosistem gambut dan juga telah berkontribusi dalam memberikan informasi mengenai perjuangan memperbaiki ekosistem gambut sebagaimana termuat dalam tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhian, D., Adiwibowo, S., & Sri Wahyuni, E. (2016). NGO's Roles and Strategies in the Environmental Politic Arena. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(3), 210–216. <https://doi.org/10.22500/sodality.v4i3.14429>
- Efendi, H. N., Yulianto, Y., & Prihantika, I. (2019). Dinamika Peran Civil Society dalam Ruang Publik: Studi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 1(1), 19–28. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v1i1.2>
- Gupta, J., & Vegelin, C. (2016). Sustainable development goals and inclusive development. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*. <https://doi.org/10.1007/s10784-016-9323-z>
- Handoko, T., Tiyas Tinov, Achmad Fajri Febrian, Risky Arya Putri, Frini Karina Andini, & Ogi Rifansyah. (2020). Peatlands Restoration As A Potential Solution To Resolve Peatlands Damage Based On Sustainable Development Goals (SDGS) In Sungai Tohor, Indonesia. *Jurnal Niara*, 13(1), 123–131. <https://doi.org/10.31849/niara.v13i1.3876>
- Hooijer, A., Page, S., Jauhiainen, J., Lee, W. A., Lu, X. X., Idris, A., & Anshari, G. (2012). Subsidence and carbon loss in drained tropical peatlands. *Biogeosciences*. <https://doi.org/10.5194/bg-9-1053-2012>
- Marlina, S. (2017). Pengelolaan Ekosistem Gambut Pasca Kebakaran Lahan Gambut di Provinsi Kalimantan Tengah. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan*, 2(1), 26–30. <https://doi.org/10.33084/mitl.v2i1.129>
- McInnes, R. J. (2018). Sustainable development goals. In *The Wetland Book: I: Structure and Function, Management, and Methods*. https://doi.org/10.1007/978-90-481-9659-3_125
- Moore, S., Evans, C. D., Page, S. E., Garnett, M. H., Jones, T. G., Freeman, C., Hooijer, A., Wiltshire, A. J., Limin, S. H., & Gauci, V. (2013). Deep instability of deforested tropical peatlands revealed by fluvial organic carbon fluxes. *Nature*, 493(7434), 660–663. <https://doi.org/10.1038/nature11818>
- Page, S., Hosiolo, A., Wösten, H., Jauhiainen, J., Silvius, M., Rieley, J., Ritzema, H., Tansey, K., Graham, L., Vasander, H., & Limin, S. (2009). Restoration ecology of lowland tropical peatlands in Southeast Asia: Current knowledge and future research directions. *Ecosystems*. <https://doi.org/10.1007/s10021-008-9216-2>
- Pangaribuan, N. (2018). Pengelolaan lahan gambut berkelanjutan dengan budidaya tanaman pangan dan sayuran. *Seminar Nasional FMIPA Universitas Terbuka 2018*, 10, 329–350. http://repository.ut.ac.id/7474/1/15_NurmalaPangaribuan.pdf
- Rakhman, M. A., & Haryadi, H. (2020). Dinamika Peran Ngo Lingkungan Hidup Dalam Arena Politik Lokal Di Provinsi Jambi. *JISIP (Ilmu Sosial Dan ...)*, 4(4). <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1468>
- Septicorini, E. P. (2006). Studi Penentuan Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi *Jurnal Sumatera Selatan*. In *Skripsi*.

- Suwondo, Sabiham, S., Sumardjo, & Paramudya, B. (2012). Efek Pembukaan Lahan terhadap Karakteristik Biofisik Gambut pada Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Natur Indonesia*.
- Wahyunto, Nugroho, K., Ritung, S., & Sulaeman, Y. (2014). Indonesian Peatland Map: Method, Certainty, and Uses. Peta Lahan Gambut Indonesia: Metode Pembuatan, Tingkat Keyakinan, dan Penggunaan. In *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Berkelanjutan Lahan Gambut Terdegradasi, 18-19 Agustus 2014*.
- Wicaksono, A. (2019). Kolaborasi Multi Aktor dalam Program Restorasi Gambut di Provinsi Riau. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 99–113. <https://doi.org/10.25077/jakp.4.2.111-125.2019>
- Yuliani, F. (2018). Implementasi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 37–44.

KEANEKARAGAMAN HAYATI DI ARBORETUM GAMBUT MARSAWA SUNGAI PAKNING TAHUN 2021

Wahyu Purwanto¹, David Marchelino Haryanto², Arini Kusuma Putri³

¹CSR PT Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning, Bengkalis

Email: wahyup.geo09@gmail.com

^{2,3}HSSE PT Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning, Bengkalis

Abstrak

Arboretum Gambut Marsawa merupakan salah satu program keanekaragaman hayati PT Pertamina RU II Sungai Pakning yang berada di Kampung Jawa, Kelurahan Sungai Pakning, Kabupaten Bengkalis. Didalamnya dilakukan konservasi perlindungan flora dan fauna khas gambut. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan menjabarkan mengenai keanekaragaman hayati yang ada di sana. Variabel pengamatan, yaitu: jumlah jenis dan jumlah individu flora dan fauna yang teramati. Pengamatan dilakukan pada tahun 2019 hingga 2021 secara berkala. Pengamatan dilakukan dengan metode *square line sampling* dan *transect sampling*, lalu dihitung indeks keanekaragaman hayati dengan indeks Shannon-Wiener. Hasilnya adanya kenaikan jumlah flora dan fauna yang ada di Arboretum Gambut Marsawa dan nilai indeks keanekaragaman hayati dari tahun ke tahun.

Kata kunci: arboretum, gambut, keanekaragaman hayati

PENDAHULUAN

Lahan gambut merupakan ekosistem khas yang terbentuk dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan, baik yang sudah lapuk maupun belum, yang proses penguraianannya sangat lambat, sehingga tanah gambut memiliki kandungan bahan organik. Lahan gambut pada dasarnya adalah hutan hujan dataran rendah yang tumbuh di atas tanah-tanah basah dibentuk dari sisa-sisa angkatan hujan sebelumnya (tanah gambut).

Lahan gambut memiliki fungsi sebagai penyimpan karbon (C) dan memiliki daya resapan air yang tinggi, sehingga menyangga hidrologi area di sekelilingnya dan berfungsi pula sebagai penambat (*sequester*) karbon, sehingga mengurangi efek gas rumah kaca. Secara umum perairan gambut mempunyai pH masam sampai netral, yaitu 3,5-7 dengan kecerahan sedang. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap keragaman dan kekayaan jenis-jenis flora, fauna dan mikroorganisme.

Indonesia memiliki lahan gambut yang cukup luas dan tersebar di beberapa wilayahnya antara lain Pulau Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Salah satu lahan gambut yang cukup luas berada di wilayah Provinsi Riau. Di Riau sering ditemui lahan gambut yang telah mengalami kondisi yang rusak atau kritis serta hampir setiap tahun terjadi bencana baik itu kebakaran hutan dan lahan, banjir, hingga penurunan muka tanah.

Salah satu upaya konservasi lahan gambut di Riau diinisiasi oleh PT Pertamina RU II Sungai Pakning. Dalam upaya konservasi di lahan gambut mereka bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk melaksanakan program CSR kampung gambut berdikari, yang terdiri dari program Masyarakat Peduli Api (MPA), pertanian nanas terintegrasi, sekolah cinta gambut, budidaya madu hutan gambut dan lainnya (Hidayat, Rahmad dkk, 2021). Khusus dalam konservasi flora dan fauna khas gambut, PT Pertamina RU II Sungai Pakning membuat program Arboretum Gambut yang tujuannya ialah untuk sarana edukasi gambut sekaligus konservasi flora dan fauna khas gambut seperti *Nepenthes sp* (kantong semar) dan simpai hitam. Sekaligus sebagai sarana pencegahan kebakaran lahan dan hutan di wilayah gambut sungai pakning (Purwanto, Wahyu dkk, 2021) Untuk itu dalam penelitian ini akan dihitung indeks keanekaragaman hayati flora dan fauna di Arboretum Gambut Marsawa. Indeks

keanekaragaman hayati ini merupakan nilai tunggal yang mencerminkan karakteristik dari hubungan kelimpahan individu antar spesies dalam komunitas (Ludwig & Reynold, 1988)

METODOLOGI

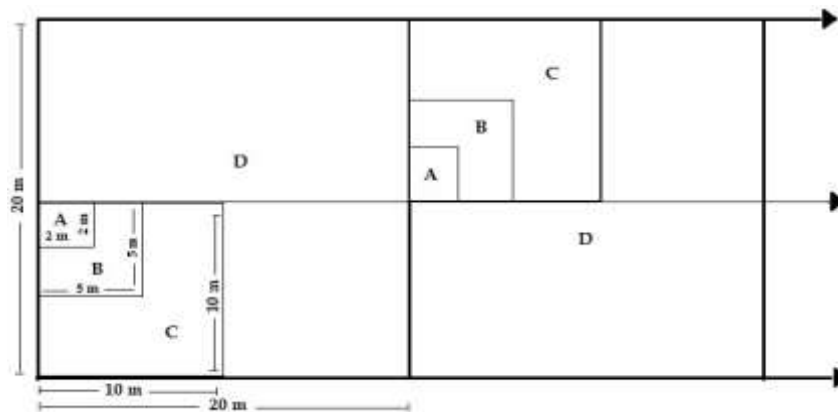
Pengumpulan data vegetasi alam dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapang (observasi lapang) secara diskriptif dengan mencatat jenis-jenis yang ditemukan dan dengan menggunakan metoda jalur berpetak (*square line sampling*). Pengukuran di lapangan dilakukan dengan Metode Jalur Berpetak dengan panjang 60 m dan lebar 20 m. Setiap jarak 20 m dilakukan pengamatan terhadap vegetasi pada berbagai tingkat pertumbuhan. Untuk tingkat semai dan pancang dicatat jenis dan jumlah, sedangkan untuk tingkat tiang dan pohon dicatat jenis, tingkat dan diameter. Kriteria yang digunakan untuk masing-masing pertumbuhan adalah sebagai berikut.

Semai : Mulai dari anakan sampai tanaman yang tingginya kurang dari 1,5 m.

Pancang : Mulai dari tinggi 1,5 m – berdiameter 10 cm

Tiang : Berdiameter diantara 10 cm – 19 cm pada ketinggian 1,3 m

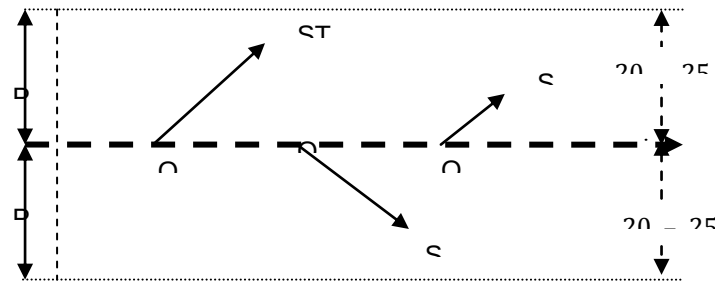
Pohon : Berdiameter ≥ 20 cm pada ketinggian 1,3 m



Gambar 1. Plot Pengukuran: (A) Tingkat Semai dan Tumbuhan Bawah, (B) Tingkat Pancang, (C) Tingkat Tiang, (D) Tingkat Pohon

Pengamatan fauna, dilakukan melalui pengamatan langsung dan studi literatur. Pengamatan langsung dilakukan dengan metode perjumpaan langsung dan membuat transek jalur (*line transect sampling*) (SCNP 1981). Metode tersebut dipadukan dengan metode *road sampling*, *Visual Encounter Survey* dan *Time Search*.

Data fauna didekati dengan metode transek jalur adalah suatu metode pengamatan populasi fauna melalui pengambilan contoh dengan bentuk unit contoh berupa jalur pengamatan (Gambar 2). Panjang dan lebar Jalur pengamatan harus ditentukan terlebih dahulu. Perencanaan tata letak jalur pengamatan dapat dilakukan di atas peta kerja, sebelum kegiatan pengamatan dilakukan. Letak jalur pengamatan selanjutnya digambarkan pada peta dan selanjutnya setiap titik awal jalur pengamatan ditandai di lapangan.



Gambar 2. Bentuk Transek Jalur Pengamatan Fauna. P = Jarak Pandang Rata-Rata Bagi Pengamat di Lokasi Tertentu. O = Posisi Pengamat. St = Posisi Fauna.

Pengamatan burung menggunakan teropong (binokuler), kamera, *handycam*, roll meter, dan GPS. Dalam Odum, 1971 data dianalisis secara deskriptif dan analisis kuantitatif menggunakan indeks keanekaragaman hayati Shannon-Wiener (H') dihitung dengan rumus :

$$H' = - \left(\sum \left(\frac{n_i}{N} \right) \ln \left(\frac{n_i}{N} \right) \right)$$

H' = Indeks Shannon-Wiener; n_i = Jumlah individu masing-masing jenis;

N = Jumlah total individu semua jenis

Tingkat keanekaragaman ditentukan berdasarkan nilai indeks keanekaragaman jenis (H') dengan kriteria (Krebs, 1989) sebagai berikut: Tinggi jika $H' > 3$; Sedang jika $2 < H' < 3$, dan Rendah jika $0 < H' < 2$.

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan pengamatan dan identifikasi flora dan fauna di lokasi, dapat dijabarkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Indeks *Biodiversity* Vegetasi di Arboretum Gambut Marsawa

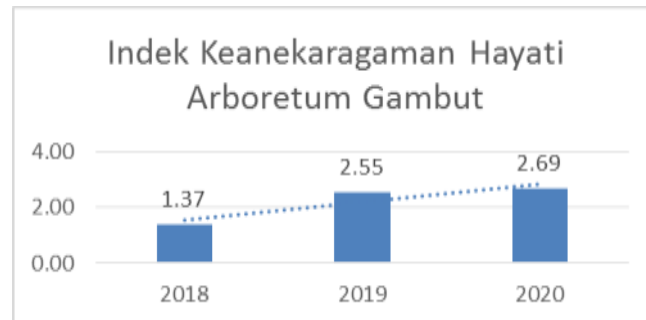
No.	Nama Ilmiah	Jumlah	Pi	ln (Pi)	H'
1	<i>Nepenthes ampullaria</i> Jack	56	0,05	2,95	0,15
2	<i>Nepenthes rafflesiana</i> Jack	70	0,07	2,72	0,18
3	<i>Nepenthes bicalcarata</i> Hook	54	0,05	2,98	0,15
4	<i>Nepenthes mirabilis</i> (Lour) Druce	50	0,05	3,06	0,14
5	<i>Nepenthes sumatrana</i>	15	0,01	4,26	0,06
6	<i>Nepenthes spectabilis</i>	20	0,02	3,98	0,07
7	<i>Nepenthes albomarginata</i>	32	0,03	3,51	0,11
8	<i>Gomphandra capitulata</i>	3	0,00	6,06	0,01
9	<i>Aquilaria malacensis</i>	8	0,01	4,96	0,03
10	<i>Melaleuca leucadendron</i>	30	0,03	3,57	0,10
11	<i>Cratogeomys arbores</i>	13	0,01	4,45	0,05
12	<i>Syzygium aqueum</i>	23	0,02	3,86	0,08
13	<i>Syzygium malaccense</i>	3	0,00	6,06	0,01
14	<i>Citrus</i> sp.	3	0,00	6,06	0,01
15	<i>Hevea brasiliensis</i>	58	0,05	2,92	0,16
16	<i>Syzygium leptostemonum</i>	80	0,08	2,59	0,19
17	<i>Vitex pubescens</i>	38	0,04	3,33	0,12
18	<i>Macaranga trilobata</i>	8	0,01	4,89	0,04
19	<i>Gomphandra capitulata</i>	176	0,17	1,80	0,30
20	<i>Dimocarpus longan</i>	15	0,01	4,26	0,06
21	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	5	0,00	5,36	0,03
22	<i>Nephelium lappaceum</i>	3	0,00	5,87	0,02
23	<i>Shorea leprosula</i>	100	0,09	2,37	0,22
24	<i>Setulang</i>	193	0,18	1,71	0,31
25	<i>Asplenium nidus</i>	3	0,00	5,87	0,02
26	<i>Dendrobium bigibbum</i>	10	0,01	4,67	0,04
Jumlah		1066	0,99	104,10	2,68

Sumber : Pengamatan Lapangan

Berdasar hasil perhitungan tersebut indeks keanekaragaman hayati Arboretum Gambut Marsawa pada tahun 2020 ialah 2,68, yaitu tergolong sedang. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 1,37 dan 2019 sebesar 2,55, maka dapat disimpulkan terjadi peningkatan indeks kehati sebesar 0,14.

Tabel 2. Indeks Kehati Arboretum Gambut 2018 - 2020

Tahun	2018	2019	2020
Indeks Kehati	1,37	2,55	2,69



Gambar 3. Grafik Peningkatan Indeks Kehati (H')

Berdasarkan grafik diatas terdapat dua spesies baru yang ada di Arboretum Gambut Marsawa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3 . Daftar Flora di Arboretum Gambut Marsawa

No.	Nama Ilmiah	Jumlah		
		2018	2019	2020
1	<i>Nepenthes ampullaria</i> Jack	51	56	56
2	<i>Nepenthes rafflesiana</i> Jack	49	60	70
3	<i>Nepenthes bicalcarata</i> Hook	34	42	54
4	<i>Nepenthes mirabilis</i> (Lour) Druce	40	43	50
5	<i>Nepenthes sumatrana</i>	5	7	15
6	<i>Nepenthes spectabilis</i>	10	11	20
7	<i>Nepenthes albomarginata</i>	32	32	32
8	<i>Gomphandra capitulata</i>		3	3
9	<i>Aquilaria malacensis</i>		8	8
10	<i>Melaleuca leucadendron</i>		30	30
11	<i>Cratoxylon arbores</i>		13	13
12	<i>Syzygium aqueum</i>		23	23
13	<i>Syzygium malaccense</i>		3	3
14	<i>Citrus</i> sp.		3	3
15	<i>Hevea brasiliensis</i>		58	58
16	<i>Syzygium leptostemonum</i>		80	80
17	<i>Vitex pubescens</i>		38	38
18	<i>Macaranga trilobata</i>		8	8
19	<i>Gomphandra capitulata</i>		176	176
20	<i>Dimocarpus longan</i>		15	15
21	<i>Artocarpus heterophyllus</i>		5	5
22	<i>Nephelium lappaceum</i>		3	3
23	<i>Shorea leprosula</i>		3	100
24	<i>Setulang</i>		193	193
25	<i>Asplenium nidus</i>			3
26	<i>Dendrobium bigibbum</i>			10
Jumlah		221	913	1066

Selain penambahan jumlah individu vegetasi, di Arboretum Gambut Marsawa juga mengalami penambahan spesies yaitu *Asplenium nidus* dan *Dendrobium bigibbum*. Meskipun tidak terlalu banyak tetapi hal tersebut menandakan bahwa program konservasi keanekaragaman hayati di Arboretum Gambut Marsawa memiliki dampak yang positif terhadap lingkungan. Selain itu masih ada flora yang dilindungi menurut *red list IUCN* yaitu *Nepenthes sumatrana* (*critically endangered / CR*) dan *Nepenthes spectabilis* (*vulnerable/VU*).



Gambar 4. *Nepenthes sumatrana* (CR) dan *Nepenthes spectabilis* (VU), sumber dokumentasi perusahaan

Hasil pengamatan fauna di Arboretum Gambut “Marsawa” menemukan 3 jenis mamalia, dan 21 jenis burung dari 25 famili. Fauna yang ditemukan tersebar di dalam plot pengamatan maupun di luar plot pengamatan. Secara tabulasi ditampilkan pada tabel berikut yang berisi jenis fauna yang ditemukan di Arboretum Gambut Marwasa. Mamalia yang ditemukan merupakan mamalia yang ditemukan secara langsung maupun dari keterangan pengelola ataupun masyarakat.

Hasilnya menunjukkan bahwa Arboretum Gambut Marsawa merupakan habitat yang penting bagi keberadaan beberapa spesies penting. Spesies penting merupakan spesies yang memiliki keunikan berupa jenis migrasi, jenis endemik, dan jenis yang memiliki status konservasi. Hal tersebut dikarenakan kawasan ini merupakan area lahan gambut yang penting dan unik di tengah kelurahan Sungai Pakning. Selain itu hutan ini memiliki tutupan lahan yang beragam mulai arboretum yang terdiri dari berbagai macam koleksi tegakan, dan perkebunan karet masyarakat dan semak belukar. Sehingga Arboretum Gambut Marsawa ini dijadikan tempat ruang hidup berbagai jenis fauna. Pada hutan ini menjadi tempat mencari makan, tempat tinggal, dan segala unsur kebutuhan fauna yang tinggal di dalamnya. Kemudian berikut hasil perhitungan indeks keanekaragaman hayati fauna di Arboretum Gambut Marsawa .

Tabel 4. Indeks keanekaragaman hayati fauna di Arboretum Gambut Marsawa

No.	Nama Ilmiah	Jumlah	Pi	ln (Pi)	H'
1	Punai gading	51	0,11	2,25	0,24
2	Tekukur biasa	33	0,07	2,68	0,18
3	Paruh-kodok jawa	13	0,03	3,61	0,10
4	Walet sapi	71	0,15	1,92	0,28
5	Cekakak sungai	15	0,03	3,47	0,11
6	Cekakak belukar	17	0,04	3,35	0,12
7	Layang-layang loreng	14	0,03	3,54	0,10
8	Cipoh kacat	7	0,01	4,23	0,06
9	Cucak kutilang	12	0,02	3,69	0,09
10	Merbah cerukcuk	13	0,03	3,61	0,10
11	Sikatan bubuk	13	0,03	3,61	0,10
12	Kipasan belang	24	0,05	3,00	0,15
13	Kehicap ranting	3	0,01	5,26	0,03
14	Remetuk laut	3	0,01	5,26	0,03
15	Cinenen belukar	58	0,12	2,13	0,25
16	Burung-madu pengantin	38	0,08	2,54	0,20
17	Burung-madu sriganti	42	0,09	2,44	0,21
18	Pentis pelangi	18	0,04	3,29	0,12
19	Cabai bunga api	17	0,04	3,35	0,12
20	Simpai Hitam Sumatera	22	0,05	3,09	0,14
Jumlah		483	1,00	66,33	2,73

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka indeks keanekaragaman hayati fauna di Arboretum Gambut memiliki nilai sebesar 2,73 sehingga termasuk ke dalam kategori sedang. Dan terdapat satu spesies dalam kategori *endangered* menurut *red list IUCN* yaitu *Presbytis melalophos* atau Simpai hitam sumatera.



Gambar 5. *Presbytis melalophos* atau simpai hitam Sumatra (EN),
sumber dokumentasi perusahaan

KESIMPULAN

Hasil Identifikasi jenis tumbuhan yang ada di Arboretum Gambut "Marsawa" sebanyak 26 jenis (Species) tumbuhan. Dengan indeks keanekaragaman hayati flora sebesar 2,69 atau dalam kategori sedang. Lalu di Arboretum Gambut Marsawa juga dijumpai 3 jenis mamalia dan 21 jenis burung. dengan indeks keanekaragaman faunanya bernilai 2,73 juga dalam kategori sedang. Status konservasi fauna yang ditemukan untuk taksa burung 1 jenis berstatus NT. Taksa mamalia 1 jenis termasuk pada berstatus EN dan Appendix II CITES. Jenis yang dilindungi Pemerintah RI untuk

taksa burung kipasan belang dan Simpai hitam sumatera. Dan 1 jenis flora masuk kedalam kategori *critically endangered* yaitu *Nepenthes sumatrana* serta 1 flora dengan status *vulnerable* yaitu *Nepenthes spectabilis*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Tim Keanekaragaman Hayati PT Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning atas dukungan dalam penulisan makalah ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pengelola Arboretum Gambut yang telah merawat Arboretum Gambut dengan baik sehingga layak untuk dijadikan tempat penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alikodra HS. 1990. Pengelolaan Satwa Liar. Bogor : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Pusat Antar Universitas Ilmu Hayati. Institut Pertanian Bogor.
- Hidayat. Rahmad, dkk. (2021). Sinergi Atasi Pandemi. Surakarta: Arjuna Wijaya.
- Krebs. C.J. 1989. *Ecological methodology*. New York : Harper Collins Publisher.
- Ludwig, J.A. & J.F. Reynolds. 1988. *Statistical ecology : A primer on methods and computing*. New York : John Wiley & Son.
- Odum, E.P. 1971. *Fundamental of Ecology*. Philadelphia : W.E Sounders.
- Partomihardjo T, Syahirsyah Albertus dan H Soedjito. 1999. Flora pohon dan tipe hutan Taman Nasional Bentuang Karimun Kalimantan Barat. Prosiding Lokakarya Rencana pengelolaan T.N. Bentuang Karimun: Usaha mengintegrasikan konservasi keanekaragaman hayati dengan pembangunan Propinsi Kalimantan Barat. WWF Indonesia, PHPA, ITTO. Hal. 261-281.
- PT Mapala Rabda. 1994. Laporan Studi Evaluasi Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan
- Purwanto, W., Hidayat, R., Marcelino, D.H., & Widhagdha, M.F. (2021). Land and forest fire disaster management through the arboretum gambut and community empowerment of Masyarakat Peduli Api (MPA) CSR Program PT Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning. IOP Conferences Series: Earth and Environment Science 683 (2021) 012082
- Purwanto, W., Hidayat, R., & Utami, A. (2020). Disaster Management of Forest and Peatland Fire Through the Berdikari Gambut Village in Sungai Pakning, Bengkalis District. SHEs: Conferences Series 3 (1) (2020) 124 – 132.
- Widhagdha, Miftah, dkk. 2018. CSR: Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Surakarta : Arjuna Wijaya Karya.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMTASI JEJARING ANTAR ORGANISASI (*INTER-ORGANIZATIONAL NETWORK*) BAGI PENGENDALIAN KARHUTLA PADA LAHAN GAMBUT

Febri Yuliani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru

Email: febri.yuliani@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam Implementasi inter-organizational network dalam Pengendalian Karhutla pada lahan Gambut Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir. Metode yang dilakukan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebakaran Hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir lebih banyak terjadi pada perkebunan perusahaan dan selebihnya dari kebun masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam Implementasi inter-organizational network dalam Pengendalian Karhutla pada lahan Gambut Kabupaten Rokan Hilir adalah berupa : Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penyempurnaan Prosedur ,Penumbuhan Kapasitas Sistem Rekomendasi dari penelitian ini adalah pengendalian karhutla di Kabupaten Rokan Hilir, mulai dari pencegahan, pemadaman, hingga pemulihan pasca kebakaran maka pemerintah daerah haruslah mensosialisasikan secara massif pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi membuka lahan tanpa membakar (metode tanpa bakar/zero burning), serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mencegah, menanggulangi dan per-baikkan pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat Peduli Api (MPA) seharusnya lebih meningkatkan kualitas internalnya dengan melengkapi sistem operasionalnya agar Lem-baga MPA memiliki sistem adminitrasi yang rapi. Pihak pemerintah seharusnya lebih mem-perhatikan lagi MPA seperti diberikan fasilitas kesehatan gratis dan biaya asuransi bila terjadi kecelakaan saat bekerja, pemerintah bekerjasama dengan pihak asuransi swasta seperti BPJS sebagai motivasi yang menjadi penyemangat untuk anggota MPA dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Kata kunci: implementasi kebijakan, jejaring antar organisasi, lahan gambut, kebakaran hutan dan lahan

PENDAHULUAN

Lembaga kemasyarakatan merupakan lembaga yang telah dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dibentuk dan ditetapkan berdasarkan peraturan Desa. Lembaga kemasyarakatan juga merupakan bentuk kerjasama pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Fungsi dari kelembagaan masyarakat itu sendiri adalah sebagai wadah penampungan dan penyaluran berbagai aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017, 9 Februari 2017, Pasal 1, ayat 1). Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017, 9 Februari 2017, Pasal 1, ayat 2).

Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menlhk/Setjen/ Kum.1/2/2017, 9 Februari 2017, Pasal 1, ayat 3). Fungsi Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon penghasil oksigen, penyeimbang

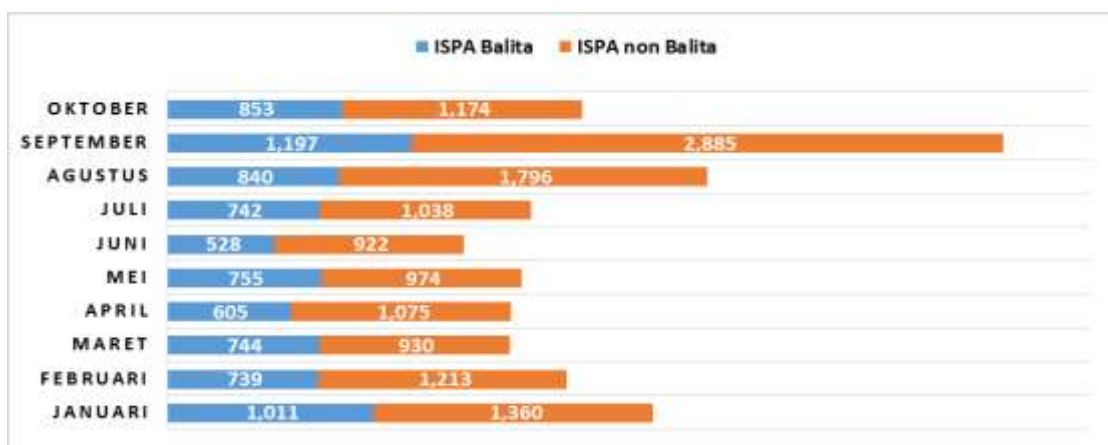
iklim yang terbagi menjadi fungsi lindung Ekosistem Gambut dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017, 9 Februari 2017, Pasal 1, ayat 6).

Kawasan Hutan Gambut Indonesia dikenal dengan sebutan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan gambut terluas di dunia. Luas lahan gambut di Indonesia diperkirakan 20,6 juta hektar atau sekitar 10,8 persen dari luas daratan Indonesia (Subajo, 1998; Wibowo dan Suyatno, 1998 dalam Wetlands International-Indonesia Programme (WI-IP), 2004). Indonesia merupakan negara yang memiliki kawasan gambut terluas diantara negara tropis, kawasan gambut ini tersebar di Kalimantan, Sumatera dan Papua (BB Litbang SDLP, 2008 dalam Agus dan Subiksa, 2008). Laporan WI-IP menyatakan bahwa dari luasan kawasan gambut yang dimiliki Indonesia sekitar 5,7 juta ha atau 27,8% terdapat di Kalimantan.

Fenomena gambut yang terjadi di Provinsi Riau berdampak negative terhadap kondisi lingkungan akibat dari adanya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan ekosistem gambut yang diluar kendali dan tidak bertanggung jawab. Misalnya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi memberikan dampak berupa kabut asap yang melanda wilayah Riau dan Sumatera.

Terjadinya bencana berupa kabut asap yang melanda negara kita yang dampaknya begitu besar bagi lingkungan baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan sebagainya tidak luput dari factor-faktor yang mempengaruhinya terutama dari segi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan gambut tersebut. Bencana kabut asap yang terjadi di Pulau Sumatera khususnya di Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan telah mengakibatkan dampak kerugian luar biasa, kemudian beberapa wilayah lain di Indonesia telah mulai memperlihatkan kondisi yang sama, walaupun pemerintah belum menetapkan situasi gawat ini sebagai bencana nasional.

Di samping dampak kesehatan yang muncul akibat kebakaran hutan dan lahan, yang tidak kalah pentingnya adalah rusaknya ekosistem penting bagi keberlangsungan hidup manusia berupa udara dan air bersih. Selain itu terganggunya ekosistem bagi satwa liar yang dilindungi, maupun hilangnya habitat tempat keanekaragaman hayati flora dan fauna berada. Akibat kebakaran hutan, satwa langka seperti gajah dan harimau semakin berkurang jumlahnya. Dapat dipastikan bahwa kebakaran hutan dan lahan, lambat laun akan mengancam punahnya keragaman hayati, dan terganggunya kesehatan masyarakat baik Balita ataupun dewasa.

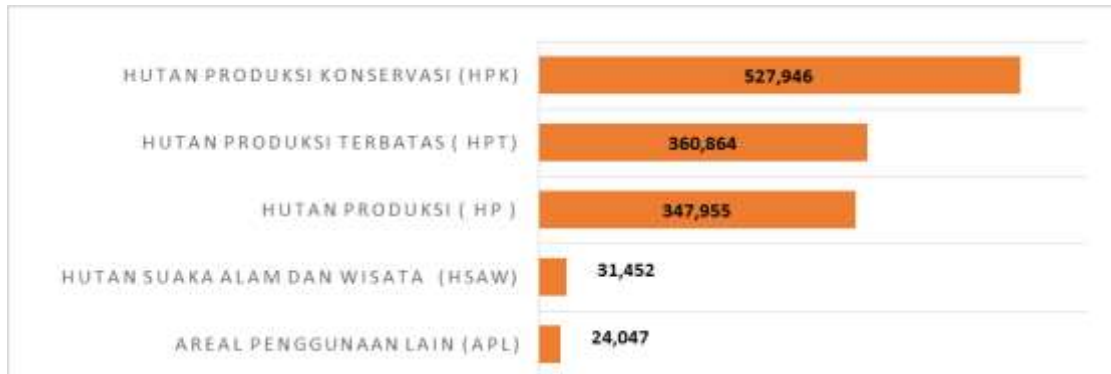


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau, tahun 2019

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa untuk golongan balita maupun non balita, penderita ISPA pada bulan September 20 mencapai puncaknya. Untuk penderita golongan balita sejumlah 1197 penderita, sedangkan non balita mencapai 2885 penderita. Pola peningkatan jumlah pengunjung baik golongan balita dan non balita juga sama,

yaitu dimulai pada bulan Juni hingga September 2019. Dan kembali turun pada bulan Oktober 2019, sebab kebakaran yang terjadi pun semakin berkurang.

Luas wilayah Hutan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) seluruhnya mencapai 1.292.264 Ha. Wilayah hutan tersebut telah dibagi menjadi Hutan tanaman Industri (HTI), Hutan Suaka Alam dan Wisata (HSAW) dan Areal Penggunaan Lain (APL). Dan pembagian luas hutan di Kabupaten Pelalawan, seperti yang terlihat pada gambar grafik 1.2 di bawah ini.



Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir, 2020

Beberapa dampak yang telah diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan, juga mengakibatkan lumpuhnya pendidikan di Provinsi Riau pada umumnya, termasuk di Kabupaten Rokan Hilir. Akibat kabut asap, sekolah-sekolah diliburkan hingga beberapa pekan. Dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap sektor ekonomi juga sangat jelas, bahwa sumber devisa negara dari produk hutan kayu dan non-kayu, serta ekowisata menjadi berkurang. Bank Dunia menyebutkan bahwa total kerugian Indonesia akibat bencana kabut asap tahun 2015 telah melampaui 16 miliar dolar AS. Angka ini dua kali lebih besar dari kerugian Indonesia saat dilanda tsunami di Aceh tahun 2004 lalu. (Alexander Haryanto - 7 September 2016, tirto.id)

METODE

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dengan metode eksploratif. Adapun lokasi dilakukannya penelitian ini adalah di Kabupaten Rokan Hilir. Informan penelitian meliputi pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat yang memberikan informasi yang relevan dalam penelitian ini. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan dan pengumpulan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi secara umum merupakan kegiatan *check*, *re-check*, dan *crosscheck* antara data dengan observasi penelitian di lapangan yang selanjutnya selanjutnya hasil observasi ini dilakukan *crosscheck* melalui persepsi peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Jejaring Antar Organisasi (*Inter Organizational Network*) Bagi Pengendalian Karhutla Pada Lahan Gambut Kabupaten Rokan Hilir antara lain :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu rangkaian kegiatan organisasi atau institusi yang dilaksanakan dalam interval waktu tertentu dan di desain untuk melahirkan perubahan sikap mental dan keahlian pekerja sehingga mereka mampu menyelesaikan penugasan yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawabnya di masa depan. pelatihan yang diikuti oleh Anggota Lembaga MPA untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia berupa : Pelatihan, Penyuluhan/sosialisasi. Selain itu pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan melalui pemberdayaan sumber daya manusia dengan melakukan penyuluhan/sosialisasi yang dilakukan oleh MPA kepada masyarakat Kampung Dayun, agar masyarakat sadar akan bahaya kebakaran hutan dan lahan dan kegiatan tersebut dapat mengembangkan sumber daya manusia yang memotivasi masyarakat untuk ikut menjadi anggota MPA jika mereka sering mendapatkan penyuluhan tentang kebakaran hutan dan lahan.

2. Penyempurnaan Prosedur

Penyempurnaan prosedur dinilai dari pengadaan Standar Operasional Prosedur dan tertib administrasi yang mereka miliki serta prosedur pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh lembaga MPA. Berdasarkan hasil penelitian, prosedur pemadaman kebakaran hutan dan lahan oleh MPA di buat langsung oleh Penghulu Kampung, walaupun itu tidak tertulis MPA sangat mematuhi dan mengikuti prosedur yang dibuat oleh Penghulu Kampung dan prosedur itulah yang selama ini di terapkan oleh MPA Kampung.

3. Penumbuhan Kapasitas Sistem

Kapasitas adalah kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang sesuai secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Kapasitas memiliki sifat yang memungkinkan sebuah lembaga atau organisasi atau sistem untuk bertahan hidup, tumbuh, diversifikasi dan menjadi lebih kompleks yang memungkinkan sistem untuk melakukan, memberi nilai, membangun hubungan, dan untuk memperbaharui diri. Kapasitas terdiri dari sejumlah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai, hubungan, tingkah laku, sumber dan kondisi yang memungkinkan individu, organisasi/lembaga untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan mencapai tujuan-tujuan mereka sepanjang waktu.

Penumbuhan kapasitas sistem yang akan dilihat pada penelitian ini adalah bagaimana anggota Masyarakat Peduli Api melakukan tugas-tugas nya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ketika MPA sudah tidak bisa menangani kebakaran yang besar mereka langsung menginformasikan kepada Manggala Agni untuk meminta bantuan mereka dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan, koordinasi itu dilakukan selalu oleh mereka untuk memastikan keadaan di wilayah kebakaran di Desa sudah bisa di atasi sendiri oleh MPA atau belum.

Koordinasi itu terjalin lewat telepon dan kalau pun mereka bisa atasi sendiri mereka juga melapor bahwasanya kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kampung mereka sudah bisa diatasi sendiri. Selain koordinasi dengan instansi pemerintahan Masyarakat Peduli Api (MPA) kerjasama juga dilakukan dengan perusahaan swasta tidak dengan instansi pemerintah saja karena mereka sama-sama menjaga lingkungan mereka agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan dimana.

4. Pertumbuhan Sistem Kesadaran

Pertumbuhan system kesadaran yaitu dinilai dari kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota MPA secara suka rela bekerja tanpa digaji, karena menjadi anggota MPA adalah orang yang memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap Kampung nya yang bilamana sering terjadi kebakaran hutan dan lahan.

5. Peraturan yang Kondusif

Peraturan yang kondusif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bahwa penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Rokan Hilir, MPA telah diatur dalam peraturan kampung yang telah dibuat oleh Penghulu Kampung untuk menguatkan kelembagaan MPA kampung.

6. Pengelolaan Sistem Lingkungan

Pengelolaan sistem lingkungan yaitu MPA melakukan patroli untuk meninjau ada atau tidaknya titik api (*hotspot*) di wilayah hutan dan lahan. MPA juga mengajak dan menghimbau masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian lingkungan hidupnya yaitu dengan cara patroli ke hutan dan lahan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa pengelolaan sistem lingkungan dilakukan dengan cara patroli ke lahan-lahan yang rawan akan kebakaran. Patroli tersebut dilaksanakan secara rutin dan bekerjasama dengan pihak instansi pemerintah dan pihak swasta juga. Kerjasama antara mereka terjalin dengan sangat baik, dengan saling melaporkan lewat media sosial mereka. Selain itu Lembaga MPA juga mendapatkan beberapa bantuan konsumsi dari pihak terkait.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam implemtasi jejaring antar organisasi (*inter-organizational network*) bagi pengendalian karhutla pada lahan gambut kabupaten rokan hilir dapat disimpulkan : sudah optimal karena mereka sumber daya manusia dalam hal ini anggota MPA terbukti telah mengikuti beberapa pelatihan dari pihak instansi pemerintah maupun arahan dari pihak swasta untuk mengembangkan potensi dan keterampilan mereka. Kegiatan lain yang termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia adalah pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan melalui penyuluhan terhadap masyarakat, dan penyempurnaan prosedur dalam Lembaga MPA masih belum optimal karena mereka tidak memiliki kantor, tertib administrasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan. Indikator yang ketiga yaitu penumbuhan kapasitas sistem dalam kelembagaan MPA masih kurang baik karena anggota MPA tidak melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi struktur lembaganya. Secara keseluruhan penguatan kelembagaan MPA masih belum optimal karena masih banyak kekurangan dalam segi internalnya.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah pengendalian karhutla di Kabupaten Rokan Hilir, mulai dari pencegahan, pemadaman, hingga pemulihan pasca kebakaran maka pemerintah daerah haruslah mensosialisasikan secara massif pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi membuka lahan tanpa membakar (metode tanpa bakar/zero burning), serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mencegah, menanggulangi dan perbaikan pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat Peduli Api (MPA) seharusnya lebih meningkatkan kualitas internalnya dengan melengkapi sistem operasionalnya agar Lembaga MPA memiliki sistem administrasi yang rapi. Pihak pemerintah seharusnya lebih memperhatikan lagi MPA seperti diberikan fasilitas kesehatan gratis dan biaya asuransi bila terjadi kecelakaan saat bekerja, pemerintah bekerjasama dengan pihak asuransi swasta seperti BPJS sebagai motivasi yang menjadi penyemangat untuk anggota MPA dalam menjalankan tugasnya dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- BRG. (2016). Laporan Triwulan Badan Restorasi Gambut RI Kepada Presiden Republik Indonesia Juli – September 2016
- Badan Restorasi Gambut R.I (Tanpa Tahun). Restorasi Gambut untuk Masa Depan Indonesia. Jakarta
- Calik, M and & Sozbilir, M. (2014). Parameters of Content Analysis Education and Science 39 (174), 33-38
- Carmenta, R, Zabala, A, and Phelps, J. (2015). Indonesian Peatland Fires: Perceptions of solutions. Center for International Forestry Research (CIFOR), November 2015

- Global Pulse, (2016). Haze Crisis Analysis and Visualization Tool: Tracking the impact of Indonesia's forest and peatland fires (www.unglobalpulse.org. info@unglobalpulse.org. May 2016)
- Guidelines for Developing and Managing Ecological Restoration Projects. June 24, 2000. SER : Society for Ecological Restoration
- Mitsuru Osaki, Dedi Nursyamsi, Muhammad Noor, Segah, H. (2006). Peatland in Indonesia in Osaki, M and Tsuji, N. (2016,Eds). Tropical Peatland Ecosystems, pp.49-58. Springer, Tokyo
- Nazir, Foad. (2017). Peatland Restoration In Indonesia. Cafe Crossfire Debate. Deorestation – A Sustainable Dilemma 21 March 2017
- Palvia, P, Kakhki, m.d, Ghoshal, T, Uppala, V and Weian , W (2015). Methodological and Topic Trend in Information System Research: A Meta-Analysis of Is Journals, " Communications of the Association for Information Systems: Vol. 37, Article 30. Available at: <http://aisel.aisnet.org/cais> vol 13, 7 issl 30

PENGELOLAAN WILAYAH GAMBUT MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI PROVINSI RIAU

Dio Prama Sutra, Adnan Aban

Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas Riau, Pekanbaru

Email: pramasutradio@gmail.com, adnanaban@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut. Provinsi Riau merupakan daerah yang termasuk dalam zona merah kebakaran hutan dan lahan. Padahal keberadaan kawasan ini sangat strategis dalam pemeliharaan ekosistem lahan basah karena sebagian kawasan tersebut merupakan hutan rawa gambut. Jika pemanfaatan ekosistem rawa gambut tidak dilakukan dengan bijak, maka akan menyebabkan kerusakan ekosistem dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, sekaligus mengurangi kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut di beberapa kabupaten di Provinsi Riau. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik *purpose sampling*. Penelitian ini menemukan bahwa dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut di Provinsi Riau telah dilakukan beberapa kabupaten di Provinsi Riau. Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut yang dilakukan yaitu berbasis budidaya pertanian, budidaya perikanan dan sebagainya.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, lahan gambut, budidaya

PENDAHULUAN

Gambut adalah suatu ekosistem yang terbentuk karena adanya produksi biomassa yang melebihi proses dekomposisinya. Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, gambut didefinisikan sebagai material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa. Ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya (Setneg. 2014a).

Tanah gambut disebut juga sebagai Histosols (*histos* = tissue = jaringan; *Sols* = Tanah), sedangkan dalam sistem klasifikasi tanah nasional tanah gambut disebut Organosols (tanah yang tersusun dari bahan organik). Menurut BBPPSLP (2011) tanah gambut didefinisikan sebagai tanah yang terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum. Tanah gambut mengandung maksimum 20 % bahan organik apabila kandungan bagian tanah berbentuk clay mencapai 0 %; atau maksimum 30 % bahan organik, apabila kandungan clay 60 %, dengan ketebalan lahan organik 50 cm atau lebih.

Di Indonesia kerusakan fungsi ekosistem gambut ini umumnya terjadi akibat dari pengelolaan lahan yang keliru berupa pemilihan aktivitas di kawasan gambut yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan gambut, seperti perkebunan sawit dan konversi lahan gambut menjadi sawah. Hal ini mengakibatkan pengurasan air di kawasan gambut yang berakibat kekeringan (*kering tak balik*) pada tanah gambutnya dan membuat tanah tersebut menjadi rentan akan kebakaran.

Kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa tahun ini menjadi salah satu bencana nasional yang ada di Indonesia. Khusus pada lahan gambut, proses pemadaman berla-ngsung sulit karena api yang menyebar melalui bawah tanah pada lapisan gambut. Salah satu kawasan gambut yang sering mengalami kebakaran lahan dan hutan berada di Provinsi Riau. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Riau memiliki luas hutan dan lahan terbakar yang cukup luas, pada tahun 2015 saja, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau

mencapai 183.808 ha. Kebakaran hutan yang terjadi umumnya diakibatkan dua hal, secara sengaja dan tidak sengaja. Kebakaran secara sengaja kebanyakan dipicu oleh pembakaran untuk membuka lahan dan pembakaran karena eksploitasi sumber daya alam. Sedangkan kebakaran tak disengaja lebih disebabkan oleh cuaca yang panas, pembakaran sampah, membuang puntung rokok, dan tindakan kelalaian lainnya. Zulkarnaini & As'ari (2019) menjelaskan bahan lahan gambut harus dioptimalisasikan sebagai bentuk cara pandang masyarakat terhadap lahan yang tidak bisa dikelola menjadi lebih produktif.

Riau merupakan provinsi dengan lahan gambut terluas di Pulau Sumatera yaitu $\pm$ 4,04 juta Ha atau 56,1 % dari total lahan gambut di Sumatera (Wahyunto dkk., 2003). Riau juga mempunyai lapisan gambut terdalam di dunia yaitu mencapai 16 meter terutama di wilayah Kuala Kampar (Anonymous, 2006). Namun demikian selama dua dasawarsa terakhir, konversi lahan gambut terutama menjadi lahan pertanian, perkebunan, perkebunan kelapa sawit dan kayu kertas (pulp wood) diperkirakan telah merusak lahan gambut dengan segala fungsi ekologisnya.

Masyarakat yang tinggal di sekitar ekologi lahan gambut mempunyai ketergantungan yang sangat besar terhadap ekosistem setempat. Karena itulah keberadaan mereka dapat berperan ganda sebagai penjaga sekaligus perusak dari ekosistem tersebut. Untuk itu perlu dibangun suatu pola pengelolaan ekosistem yang melibatkan semua pihak, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara nyata, dan seterusnya keberadaan mereka diharapkan dapat menjaga ekosistem tersebut (Pramana, 2012). Tujuannya adalah agar masyarakat ikut memiliki kepentingan untuk menggunakan segala sumber daya yang tersedia secara bertanggung jawab dan berkesinambungan.

Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi masyarakat yang ada secara partisipatif. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh kesinambungan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang asing dalam komunitasnya (Suhendra, 2006). Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/ kemandirian, dan keberlanjutan (Najiyati dkk, 2005).

Dalam menerapkan prinsip tersebut, dibutuhkan strategi dimana pemberdayaan tidak bersifat dalam jangka pendek dan benar-benar harus melibatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam dari masyarakat yang merupakan subjek dan objek dari pemberdayaan tersebut. Hatu (2005) menyatakan bahwa untuk dapat memberdayakan masyarakat, maka masyarakat seharusnya diberikan kesempatan untuk menentukan jenis usaha sesuai dengan kondisi wilayah dan usaha yang biasa yang dilakukan warga setempat. Hal ini akan mendorong perkembangan masyarakat sehingga menjadi cukup kuat untuk mendirikan kelompok yang akan berpartisipasi dalam membangun serta mengentaskan kemiskinan di sekelilingnya. Pola pemberdayaan masyarakat untuk mengubah kehidupan masyarakat yang dimaksud adalah melalui pendekatan bottom up, yaitu melalui inisiatif dan aspirasi kelompok masyarakat sehingga mereka dapat menjadi masyarakat mandiri (Suhartini dkk, 2005).

Menurut (Suharto, 2005) Pemberdayaan diartikan sebagai proses yang memiliki makna dalam setiap perubahannya, Pertama enabling menciptakan ruang potensi untuk masyarakat bisa berkembang secara normal serta membebaskan masyarakat, kedua empowering yaitu memberikan penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat, ketiga protecting melindungi masyarakat yang tergolong menjadi kelompok lemah untuk berdaya, keempat supporting, setiap proses pemberdayaan harus memberikan bimbingan dan dukungan kepada kelompok lemah dan terakhir adalah fostering memelihara kondusifitas/semangat masyarakat untuk memelihara program pemberdayaan tersebut. Pendapat diatas sejalan dengan (Sidiq, 2020) yang

mengartikan pemberdayaan sebagai upaya membuka aksesibilitas bagi masyarakat miskin untuk memanfaatkan perlindungan dan jaminan sosial dari setiap program.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka perlu dilakukan kegiatan serta kajian untuk memberi gambaran menyeluruh tentang konsep dan strategi pemberdayaan masyarakat di lahan gambut yang diintegrasikan dengan tujuan pelestarian lingkungan

METODE

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Provinsi Riau mempunyai lahan gambut terluas di Pulau Sumatera yaitu $\pm 4,04$ juta Ha dan dengan pertimbangan yaitu; Pertama, lahan gambut sering terjadi kebakaran hutan maka akan memberikan dampak buruk bagi ekonomi Provinsi Riau. Kedua, di sebagian wilayah Provinsi Riau ini masih banyak masyarakat yang masih mempunyai kesadaran rendah terhadap kegunaan lahan gambut. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang mana penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dan terlibat dalam dan telah di tentukan sebelumnya. Selain itu juga beberapa aktor yang terlibat dalam pihak Pemerintahan. Untuk mendapatkan data penulis melakukan observasi deskriptif dan juga wawancara secara mendalam pada informan inti dan informan pendukung. Sehingga akan didapatkan data yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mata pencaharian penduduk desa di Provinsi Riau umumnya masih terkait dengan subsistem pertanian, terutama perkebunan sawit dan karet, perikanan, dan sebagian kecil perdagangan. Masyarakat lokal berkebun kelapa sawit baru diintroduksi beberapa puluh tahun terakhir ini oleh para pendatang yang umumnya berasal dari etnis Batak dan Jawa lebih memilih menanam sawit dengan luas berkisar antara 2-3 Ha. Oleh karenanya, masyarakat berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya dengan bergantung pada kawasan perkebunan. Perkebunan terdiri dari perkebunan milik perusahaan dan perkebunan milik masyarakat. Sebagian kecil lahan perkebunan tersebut berada di lahan basah (gambut).

Masyarakat di lahan gambut sebenarnya hidup dalam ekosistem yang rapuh, hampir di sebagian besar wilayah di Provinsi Riau, terutama di daerah pedesaan. Karena rapuh dan marjinalnya lahan gambut inilah yang menyebabkan sebagian besar masyarakat mengalami kemiskinan. Antara kemiskinan dan ekosistem yang rusak ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita dapat saja mengatakan minimnya teknologi, pendidikan petani rendah, dan segudang alasan klasik lainnya yang menyebabkan mereka miskin, namun fakta hari ini menyebutkan bahwa ternyata belum banyak orang yang memberikan perhatian terhadap keberdayaan mereka.

Lahan gambut merupakan sumber daya alam yang unik, yang memiliki peran yang kompleks dan sifatnya fragil. Kondisi itu sebenarnya dapat menjadi peluang bagi tumbuhnya beragam partisipasi masyarakat sekaligus kesempatan kerja dan usaha. Berikut beberapa bentuk partisipasi dan kegiatan yang berpeluang menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha yang memungkinkan dilakukan oleh masyarakat di lahan gambut.

a. Partisipasi dalam menanggulangi kebakaran lahan

Kebakaran lahan gambut sangat mudah meluas dan menimbulkan dampak yang sangat merusak. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah dihimbau memiliki satuan pemadam kebakaran lahan dan hutan. Dalam hal, ini masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut dapat berperan sebagai anggota satuan pemadam kebakaran di tingkat desa seperti yang dilakukan. Tim ini selain memiliki struktur organisasi yang jelas, ia juga diberikan tehnik pelatihan pencegahan dan pemadaman api, termasuk cara-cara menggunakan peralatan pemadaman

kebakaran milik pemerintah, sehingga ia senantiasa siap dilibatkan pada setiap kegiatan pemadaman kebakaran.

b. Partisipasi dalam kegiatan rehabilitasi lahan

Upaya rehabilitasi hutan memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak terutama di bidang pembibitan tanaman, penanaman, dan pemeliharaan. Masyarakat di lahan gambut dapat mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan semacam itu. Peningkatan keterampilan teknis dan manajemen, permodalan, serta mediasi dengan sektor-sektor terkait dan mitra kerja lain, sangat diperlukan oleh masyarakat agar mereka dapat mengisi kesempatan kerja tersebut. Namun dari kegiatan ini dapat ditarik suatu proses pembelajaran yang berarti dimana masyarakat dapat dilibatkan untuk ikut berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesadaran mereka bahwa kecerobohan dalam menggunakan api berdampak parah terhadap kerusakan hutan dan sangat sulit untuk diperbaiki.

c. Pemanfaatan lahan melalui agroforestry

Sistem agroforestry yang saat ini sedang gencar dikembangkan oleh pemerintah akan membuka kesempatan kerja petani untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan lahan hutan (gambut) bagi komoditas pertanian yang lebih produktif dengan system wanatani. Di samping itu, perkebunan swasta di lahan gambut dangkal, membuka peluang kerja bagi masyarakat terutama petani di sekitar perkebunan.

d. Pemanfaatan lahan melalui Usaha Tani Terpadu

Usaha tani terpadu seperti tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, yang berkelanjutan cukup berpeluang untuk dikembangkan di lahan gambut. Hal ini dimungkinkan karena sebagian lahan gambut (khususnya yang dangkal) merupakan lahan yang sesuai bagi pengembangan berbagai komoditas pertanian. Tanaman kehutanan dan perkebunan dapat dipanen dalam jangka panjang. Sementara tanaman pangan dan hortikultura dapat dipanen dalam jangka pendek. Perairan di lahan gambut dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan. Demikian pula, komoditas ternak seperti ayam, itik, kerbau, dan sapi dapat dipelihara untuk cash income atau tabungan. Sementara kotoran ternak tersebut dapat digunakan sebagai pupuk atau bahan pembuat kompos.

Sebagian desa di lahan gambut yang ada di Provinsi Riau telah melakukan beberapa macam pemberdayaan masyarakat untuk ketersediaan peluang ekonomi dan mata pencaharian yang berkelanjutan. Berikut ini jenis-jenis bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Provinsi Riau.

Tabel 1.1 jenis-jenis program pemberdayaan masyarakat di lahan gambut Provinsi Riau

No	Nama Desa	Jenis-jenis program pemberdayaan masyarakat
1	Desa Rimbo Panjang	Program Restorasi lahan gambut berbasis budidaya pertanian dan perikanan
2	Desa Sungai Kayu Ara, Kab. Siak	Program Peduli Gambut berbasis budidaya tanaman bawang
3	Desa Bantalan, Kab. Indragiri Hulu	Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) berbasis budidaya pertanian dan perikanan serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
4	Desa Batu Besurat, Kab. Kampar	Program Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) berbasis budidaya pertanian, perikanan dan peternakan
5	Sungai Pakning, Kab. Bengkalis	Program Kampung Gambut Berdikari PT Pertamina RU II

Dari tabel 1.1 diatas memperlihatkan bahwa beberapa desa di Provinsi Riau memilih program pemberdayaan masyarakat yang bersifat praktis atau merujuk kepada pilihan adaptasi masyarakat untuk dapat bertahan hidup. pilihan bertahan

hidup merujuk pada jaminan konsumsi harian dan konsumsi massal. Pola usaha tani sudah diteliti oleh Noor (2013) yang memaparkan bahwa ada dua pola pengelolaan lahan gambut, yaitu pertama, pemanfaatan yang terdiri dari (1) system mata pencaharian (2) sistem pemilihan tempat usaha bertani, dan (3) pola usaha tani dan komoditas pilihan yang dipengaruhi oleh persepsi individual atau kelompok dalam menyikapi kondisi lahan dan lingkungannya; dan kedua, kearifan lokal pengelolaan lahan dan air meliputi (1) sistem penyiapan lahan dan pengolahan tanah, (2) penataan lahan, (3) pengelolaan kesuburan tanah, dan (4) sistem pengelolaan air yang dipengaruhi oleh komoditas tanaman yang dikembangkan dan persepsi individual atau kelompok dalam menyikapi kondisi lahan dan lingkungannya. Pada tulisan ini saya sederhanakan menjadi empat yang merupakan rangkain dari dua kearifan lokal yang disampaikan Noor menyesuaikan dengan kondisi desa-desa penelitian.

Pemanfaatan ekosistem lahan gambut, tujuan pemberdayaan tidak semata-mata peningkatan kesejahteraan rakyat. Ide dasarnya adalah terciptanya keseimbangan antara keberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan dalam hal ini, tidak semata-mata untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara umum tetapi juga dimaksudkan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat di kawasan lahan gambut. Tanpa lingkungan yang dapat menjamin kehidupan dan penghidupan yang layak, keberdayaan masyarakat di lahan gambut sulit untuk diwujudkan. Dengan kata lain, keberdayaan harus dicapai melalui peningkatan kapasitas dan masyarakat serta kelestarian lingkungannya. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat di lahan gambut ditujukan untuk membangun motivasi, partisipasi, dan kontribusi masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dan pelestarian lingkungan. Aktivitas tersebut harus merupakan tindakan sistematis dan terencana yang dimaksudkan untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri sehingga secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus mampu menjaga lingkungannya dengan penuh kesadaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang program pemberdayaan masyarakat dilahan gambut yang ada di Provinsi Riau pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh beberapa daerah yang ada di Provinsi Riau namun dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih kurang digencarkan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah setempat. Pemanfaatan lahan gambut di Provinsi Riau kebanyakan berbasis budidaya pertanian, perikanan dan peternakan.

Disarankan kepada pemerintah daerah setempat khususnya untuk meningkatkan motivasi, partisipasi dan kontribusi masyarakat dilahan gambut untuk dampak ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya motivasi, partisipasi dan kontribusi masyarakat mengembangkan kapasitas dan kompetensi masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri sehingga secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus mampu menjaga lingkungannya dengan penuh kesadaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amady, M.R.E. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat Desa gambut di Provinsi Riau. Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, 6(2).
- Hidayat, R dan Widhagdha, M.P. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi Resolusi Konflik Sosial. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 8(1).
- Lubis, E.E dan Zulkarnaini. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut Secara Berkelanjutan. Jurnal Kebijakan Publik, 9(2), 61-124.

- Padil, Yuslizar, Rikawati dan Antin, T. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Dengan Konsep Kawasan Ekonomi Masyarakat (Kem) Pada Lahan Gambut Di Kampung Bantalan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. *Jurnal Sinergitas PkM & CSR*, 2(2).
- Padil dan Olivia, M. (2018). Pemberdayaan Masyarakat pada Lahan Marjinal dengan Konsep Kawasan (Studi Kasus Kelurahan Batu Bersurat, Kabupaten Kampar dan Kampung Bantalan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. *Jurnal Sinergitas PKM & CSR*, 1(1).
- Purwanto. W, Hidayat, R dan Utami, A. (2020). Disaster Management of Foresst and Peatland Fire Through The Berdikari Gambut Village program in Pakning River, Bengkalis District. Seminar Nasional Manajemen Bencana PSB (SMBPSB 2020)
- Syafrizal dan Resdati. (2020). Restorasi Gambut Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat V Tahun 2020. LPPM-Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

STRATEGI PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT UNTUK PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Elida Sahni Siregar

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

Email: elidasahni@gmail.com

Abstrak

Gambut merupakan material organik (mati) yang terbentuk dari bahan-bahan organik, seperti dedaunan, batang dan cabang serta akar tumbuhan, yang terakumulasi dalam kondisi lingkungan yang tergenang air, sangat sedikit oksigen dan keasaman tinggi serta terbentuk di suatu lokasi dalam jangka waktu geologis yang lama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang baik dalam pengelolaan lahan gambut. Pengelolaan lahan gambut harus mem-persatukan antara kepentingan sosial ekonomi dan kepentingan pelestarian sumber daya alam secara seimbang dan adil agar masyarakat disekitar lahan gambut tersebut mendapatkan kesejahteraan yang baik dalam permasalahan ekonominya. Strategi yang dilakukan dengan top down tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sistem pengelolaan pada top down ini secara berkelanjutan. Karena masyarakat di sekitar lahan gambut masih mempertahankan budaya yang ada pada daerahnya sendiri sehingga seringkali bertentangan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah setempat dalam hal pengembangan perekonomian masyarakat di lahan gambut. Penelitian ini merupakan jenis pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan internet searching. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi dalam pengembangan lahan gambut secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan mensinergikan upaya-upaya dalam pengolahan lahan gambut dengan meningkatkan produkti-vitas usaha tani pada lahan gambut yang telah dikonservasi terlebih dahulu. Untuk pengem-bangan lahan gambut yang berkelanjutan kita juga harus dapat meminimalisir emisi gas karbon yang disumbangkan oleh lahan gambut sehingga dalam produktivitas pertanian dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci : strategi pengolahan, pengembangan ekonomi, lahan gambut

PENDAHULUAN

Gambut merupakan material organik (mati) yang terbentuk dari bahan-bahan organik, seperti dedaunan, batang dan cabang serta akar tumbuhan, yang terakumulasi dalam kondisi lingkungan yang tergenang air, sangat sedikit oksigen dan keasaman tinggi serta terbentuk di suatu lokasi dalam jangka waktu geologis yang lama (*Central Kalimantan Peatlands Project (2008)*). Gambut juga dapat diartikan sebagai suatu tanah yang mengandung berat kering bahan organik > 65% dengan ketebalan 0,5 m.

Lahan gambut mengandung dua kali lebih banyak karbon dari hutan tanah mineral yang ada di seluruh dunia. Tetapi, karbon yang tersimpan dalam lahan gambut akan terlepas ke udara dan menjadi sumber utama emisi gas rumah kaca ketika terganggu atau mengalami kekeringan. Gambut sudah terbentuk Ketika bumi menjadi hangat sekitar tahun 9.600 sebelum Masehi. Gambut di daerah delta (daratan sekitar sungai) dan pantai terbentuk seiring meningkatnya permukaan laut. Pada gambut pedalaman yang mengandung kandungan mineral dari air sungai dan pantai terbentuk akibat pasang surut air laut dan air sungai.

Lahan Gambut sebagai ekosistem merupakan anasir (*component*) lingkungan lokal, regional, bahkan global. Keanekaragaman sifat fisik, kimia dan hayati gambut pada aras lokal menjadikan tanah gambut suatu bagian dan system lingkungan lokal. Fungsi gambut dalam pemendaman (*sequestering*) karbon dan pendauran air menjadikan lahan gambut suatu bagian dan system lingkungan regional-global bersama dengan atmosfer dan hidrosfer. Jadi, dampak pengembangan lahan gambut tidak hanya dapat mengenai lahan gambut sendiri, akan tetapi juga dapat mengenai lingkungan secara luas. Maka persyaratan kehati-hatian dalam mengembangkan lahan gambut bertambah penting.

Soil Survey Staff, USDA (2003) dan Andriesse (1988) telah mendefinisikan lahan gambut secara detail. Berdasarkan “Hasil Rumusan Semiloka Nasional Pemanfaatan Lahan Gambut Berkelanjutan di Bogor tanggal 28 Oktober 2010”; ada dua point penting yang perlu disapaikan, sebagai berikut : 1) Lahan gambut dibatasi sebagai suatu area yang ditutupi edapan bahan organik dengan ketebalan >50 cm yang sebagian besar belum terlapuk secara sempurna dan tertimbun dalam waktu lama serta mempunyai kandungan C-organik >18 %. 2) Lahan gambut yang mempunyai ketebalan >3m, berada di luar Kawasan hutan dan bukan sebagai kubah gambut serta luasan pemanfaatannya berada di dalam satuan pemanfaatan lahan sesuai dengan kebijakan penggunaan lahan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, masih dapat digunakan untuk keperluan lain terutama untuk pertanian/perkebunan.

Indonesia memiliki luas lahan gambut sekitar 14,9 juta hektar. Indonesia termasuk salah satu negara yang berperan penting dalam bidang mitigasi perubahan iklim. Jika Indonesia mampu mempertahankan lahan gambut sesuai kondisi alamnya, maka Indonesia akan diposisikan sebagai kontributor utama dalam hal penyerapan karbon. Tetapi pada kondisi lain, jika Indonesia tidak dapat mengelola lahan gambut yang sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan, Indonesia berpontesi sebagai kelompok lima terbesar dalam penyumbangan emisi gas rumah kaca disebabkan karbon yang terkandung dalam gambut tersebut.

Dalam pengelolaan lahan gambut harus memiliki strategi yang baik. Pengelolaan lahan gambut harus mempersatukan antara kepentingan sosial ekonomi dan kepentingan pelestarian sumber daya alam secara seimbang dan adil agar masyarakat disekitar lahan gambut tersebut mendapatkan kesejahteraan yang baik dalam permasalahan ekonominya. Strategi yang dilakukan dengan top down tidak dapat dilaksanakan jika direncanakan sistem pengelolaan pada top down ini secara berkelanjutan. Karena masyarakat di sekitar lahan gambut masih mempertahankan budaya yang ada pada daerahnya sendiri sehingga seringkali bertentangan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah setempat dalam hal pengembangan perekonomian masyarakat di lahan gambut.

Sebaliknya pada pendekatan bottom up yang dibuat oleh pemerintah juga tidak mampu memberikan solusi yang terbaik dalam hal pengelolaan lahan gambut untuk pengembangan perekonomian masyarakat, karena dinamika lingkungan sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan di atas, maka penulis akan membahas mengenai strategi pengelolaan lahan gambut untuk pengembangan perekonomian masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur dan *internet searching*. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Menurut Danial dan Warsiah (2009:80), Studi literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan penelitian serta mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan. *Internet searching* atau pencarian secara online adalah pencarian dengan menggunakan computer yang dilakukan melalui internet dengan alat atau software pencarian tertentu pada sever-server yang tersambung dengan internet yang tersebar di berbagai penjuru dunia. (Sarwo, 2005:229). Penggunaan internet sebagai salah satu sumber dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dikarenakan

dalam internet terdapat banyak informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Beragam informasi ini tentunya sangat berguna bagi penelitian, serta dilengkapi dengan beragam literatur yang berasal dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dari berbagai belahan dunia. Aksesibilitas yang fleksibel dan aplikasi yang mudah juga menjadi point penting untuk menjadikan pencarian data dalam internet sebagai salah satu Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengembangan Kawasan Lahan Gambut

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem yang sangat khas dari segi struktur, fungsi dan kerentanan yang besar terhadap usikan (*disturbance*). Kekhasannya berasal dari sejarah kemajuannya (*history of existence*). Kegiatan yang memberikan gangguan yang paling besar, paling luas dan paling sulit untuk diatasi adalah pertanian. Gangguan paling besar dikarenakan oleh sector pertanian, apalagi pertanian yang mengarah kepada industrialisasi, melibatkan pengolahan tanah yang secara men-dalam. Gangguan paling luas karena pertanian bekerja dengan sejumlah besar satuan produksi dalam Kawasan yang sangat luas untuk pemanfaatan sektor per-tanian. Gangguan yang paling sulit untuk diatasi adalah dampak pencemaran dari sector pertanian yang mengarah kepada industrialisasi. Maka pengembangan lahan gambut untuk pertanian, khususnya untuk tanaman pangan, memerlukan perencanaan sistem dan perancangan teknik yang sangat hati-hati agar bisa menciptakan perekonomian masyarakat disekitar lahan gambut semakin baik.

Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan Gambut:
Pembatasan berdasarkan regulasi terkait dengan UU No. 41/1999

UU No. 41 Tahun 1999 (Pa. 6 ayat 2): Fungsi Pokok Hutan	Kaitannya dengan Fungsi Kawasan Hutan sesuai dengan PP No. 44 Tahun 2004, Pa. 24 ayat 1	Rekomendasi untuk Pemanfaatan
HUTAN LINDUNG	Hutan Lindung	NoR
HUTAN KONSERVASI	Hutan Suaka Alam	NoR
	Hutan Pelestarian Alam	NoR
HUTAN PRODUKSI	Taman Buni	NoR
	Hutan Produksi Biasa	CSN
	Hutan Produksi Terbatas	CSN
	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	S(nr)
Area Hutan untuk Penggunaan Lain (APL) ¹⁾		S(nr)

¹⁾ Area yang sudah dikeluarkan dari fungsi kawasan hutan
NoR= Tidak dapat dimanfaatkan; CSN = Dapat dimanfaatkan setelah mendapat izin dari Kemhut; S(nr) = Dapat dimanfaatkan, akan tetapi perlu perbaikan lahan sesuai kebutuhan

Gambar 1. Kebijakan pengembangan dan pemanfaatan lahan gambut

Terlihat pada Gambar 1. Hutan rawa gambut yang berada dalam Kawasan hutan produksi dapat dimanfaatkan dan dikonversikan kedalam usaha pertanian dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat sekitar lahan gambut. Tetapi hutan produksi biasa dan hutan produksi terbatas bila diperlukan untuk mengolah lahan gambut tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kementerian Kehutanan. Namun demikian yang sering menjadi persoalan dalam pemanfaatan lahan gambut produksi adalah perbatasan wilayah lahan gambut yang seringkali tidak jelas didalam peta administrasi. Tetapi dalam pengelolaan lahan gambut tersebut tidak berpacu kepada peta administrasi melainkan didasarkan kepada kepentingan masing-masing masyarakat yang berada di sekitar lahan tersebut. Misalnya masyarakat yang berada disekitar lahan gambut produksi mereka akan memanfaatkan lahan tersebut untuk perekonomian mereka tanpa melihat batas adminstrasi dari lahan tersebut.

Pengembangan tanaman perkebunan di lahan sawit lebih pesat hasil yang didapatkan dibanding dengan tanaman pangan. Dikarenakan hasil yang didapatkan dari tanaman perkebunan lebih banyak dibandingkan dengan tanaman pangan. Sehingga dengan mengembangkan sawit di lahan gambut akan membuat perekonomian masyarakat semakin bagus dan meningkat, dan banyak sekali masyarakat khususnya petani di lahan gambut yang mengkonversikan tanaman pangan ke tanaman perkebunan di lahan sawit.

Lahan gambut sebagai ekosistem merupakan komponen dari lingkungan lokal, regional bahkan sampai global. Keanekaragaman dari sifat fisik dan kimia lahan gambut menjadikan tanah gambut sebagai suatu bagian dari sistem lingkungan lokal. Fungsi lahan gambut dalam penyimpanan karbon dan pendauran air menjadikan lahan gambut suatu bagian dan sistem lingkungan regional - global bersama dengan atmosfer dan hidrosfer. Dampak pengembangan lahan gambut tidak hanya dapat mengenai lahan gambut sendiri, akan tetapi juga dapat mengenai lingkungan secara luas. Maka persyaratan kehati-hatian dalam mengembangkan lahan gambut bertambah penting dalam pengelolaannya.

Pengembangan lahan gambut memerlukan strategi yang baik. Menurut Hornby, dkk. (1984) etika merupakan suatu sistem asas-asas moral atau kaidah perilaku. Inti pembuatan keputusan etika yang baik adalah kedewasaan moral yang terbentuk berdasarkan motivasi dalam menyukuri hidup. Pertanian yang menghimpun kearifan adalah pertanian yang mengolah teknologi daur ulang maupun konservasi air dalam usaha tani yang dilaksanakan. Berbeda dengan pertanian industrialisasi yang sangat ekstraktif yang menilai pada tingginya hasil panen dan perekonomian yang ada.

Pengembangan lahan gambut secara terus menerus masih dapat memberikan hasil perekonomian bagi masyarakat beberapa tahun kedepan. Akan tetapi lahan gambut tersebut akan rusak dan tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari pertanian di Kawasan lahan gambut yang sudah rusak. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dinilai sangat penting dalam pengembangan lahan sawit untuk perekonomian masyarakat. AMDAL lahan gambut dan lingkungan dapat diselamatkan, pertanian dapat diamankan dan perekonomian dapat dikembangkan.

2. Urgensi Pengelolaan Lahan Gambut Yang Berkelanjutan

Melihat peran lahan gambut dalam perekonomian dan nasional yang sangat strategis maka sejumlah berita negative sering muncul dengan perkembangan agribisnis kedua komoditas tersebut perlu ditangani secara bijaksana. Pertama, isu negatif yang terkait dengan emisi gas rumah kaca yang disebabkan adanya konversi lahan dari lahan gambut menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Kedua, isu negatif yang terkait dengan konflik-konflik penguasaan lahan antara perkebunan besar dengan kelompok tani setempat. Ketiga, isu negatif yang terkait dengan menurunnya kapasitas produksi pangan akibat konversi lahan pangan menjadi lahan sawit dan atau karet.

Nilai ekonomi yang ditawarkan dari pengelolaan lahan gambut sangat tinggi dan dalam jangka Panjang. Tetapi persoalan jangka Panjang tidak dapat diatasi sedangkan jangka pendek dan jangka menengah tidak dapat diatasi. Maka dari itu pemerintah harus selalu mencari bagaimana pengelolaan lahan gambut yang secara berkelanjutan dan tetap dapat menciptakan ekonomi yang tinggi. Dalam sistem pengelolaan lahan gambut jangka pendek harus memperhatikan ekonomi yang ditawarkan, sedangkan untuk sistem pengelolaan jangka Panjang dan menengah harus memperhatikan lingkungan sekitar. Pengelolaan lahan gambut harus berbasis kepada prinsip-prinsip pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dimana sebisa mungkin emisi gas rumah kaca ikut berkontribusi dalam sekuestrasi karbon, namun pada saat yang sama

kepentingan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian harus berjalan dengan selayaknya.

Salah satu permasalahan yang sangat mendasar dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan adalah masalah pertanahan dan lahan. Masih banyak sekali daerah di luar Jawa dijumpai dualisme tentang kelembagaan penguasaan tanah. Sangat banyak sekali dilihat pertentangan antara kelembagaan pertanahan dengan hukum adat yang berada di sekitar masyarakat lahan gambut. Dalam mengatasi permasalahan pertanahan ini belum dapat diformulasikan dalam suatu mekanisme hukum yang berlaku umum karena paradigma yang dianut dalam masyarakat adat yang dimiliki sangat beragam dan terkadang diametral dengan sudut pandang yang dianut dalam hukum formal.

Dalam sistem pengelolaan gambut berkelanjutan, konflik yang telah terjadi maupun sumber-sumber konflik tersebut harus diposisikan sebagai bagian integral dari strategi kebijakan. Justifikasinya adalah sebagai berikut. Pertama, sistem pengelolaan berkelanjutan berpijak pada paradigma peningkatan produktivitas berbasis prinsip kelestarian. Dalam konteks demikian itu, konflik penguasaan tanah kontraproduktif untuk introduksi teknologi dan kelembagaan sistem pengelolaan berkelanjutan. Kedua, konflik penguasaan tanah menyebabkan keuntungan ekonomi dari pengembangan agribisnis (misalnya sawit) menjadi lebih rendah bahkan mungkin merugi. Akibatnya, akumulasi manfaat yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung aksi-aksi mitigasi menipis bahkan mungkin menjadi nol. Ketiga, eskalasi konflik yang tidak tertangani dengan baik adalah munculnya penjarahan atas aset-aset produktif termasuk sumberdaya alam (lahan gambut) yang belum dimanfaatkan.

Minimalisir konversi lahan gambut kepada lahan kelapa sawit sangat dirasakan urgensinya. Tidak semua rumah tangga disekitar lahan sawit merupakan petani kelapa sawit tetapi semua rumah tangga membutuhkan pangan. Meningkatnya ketergantungan pangan dari masyarakat sekitar lahan gambut terhadap daerah luar tidak menjadi masalah sepanjang daya beli masyarakat tersebut masih tinggi. Fakta yang sering ditemui di lapangan konversi lahan sawah di sejumlah daerah penghasil beras maka produksi beras yang dihasilkan akan semakin lambat, akibatnya daerah yang semula pemasok beras juga menurun. Kondisi demikian menyebabkan ketahanan pangan di suatu daerah akan buruk disebabkan adanya konversi lahan sawah kepada lahan perkebunan kelapa sawit.

3. Strategi Pengembangan Lahan Gambut Yang Berkelanjutan

Strategi dalam pengembangan lahan gambut secara berkelanjutan dengan mensinergikan upaya-upaya meminimalkan lahan gambut dengan meningkatkan produktivitas usaha tani pada lahan gambut yang telah dikonservasi terlebih dahulu.

Pembangunan dalam pemanfaatan lahan gambut ke depan perlu diarahkan untuk mencapai keberlanjutan dan sekaligus meminimalkan dari dampak negatif yang ditimbulkan. Diantara dampak negatif yang bisa di minimalisir adalah penurunan emisi gas rumah kaca. Sekarang ini sudah banyak kita lihat lahan-lahan yang sering dimanfaatkan untuk produksi pertanian dialihfungsikan ke pembangunan perkotaan dan perumahan, maka dari itu untuk memenuhi produk pertanian kita harus memanfaatkan lahan gambut dalam membuat usaha tani pertanian sehingga mencukupi bagi masyarakat di Indonesia.

Pengurangan dalam emisi gas rumah kaca melalui pengurangan deforestasi dan pengurangan degradasi hutan dan dari berbagai sektor yang bisa mengurangi emisi gas rumah kaca di lahan gambut tersebut. Dari pengurangan emisi gas karbon yang terdapat dalam lahan gambut akan memperbaiki dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan rendahnya emisi gas karbon yang terdapat di lahan gambut akan

membuat produk pertanian lebih banyak berproduksi di lahan tersebut dan membuat perekonomian di Indonesia semakin meningkat.

Dalam pengurangan emisi GRK terutama karbon dioksida, Indonesia melakukannya tanpa mengorbankan pembangunan di sektor lain serta kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pertanian yang dilakukan dengan prinsip "*pro-growth, pro job, pro-poor, and pro-environment*" kesempatan ini mempunyai urgensi untuk penurunan tingkat kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan perkembangan ekonomi sebesar 7% per tahun.

Tabel 1. Strategi pengembangan lahan gambut dalam lingkup teknis, sosial ekonomi dan kelembagaan

No	Tujuan Pengembangan	Strategi dalam Pengembangan
1.	Meningkatkan Produktivitas melalui penguasaan sains dan teknologi	1. Pengumpulan dan penyusunan informasi dasar tentang lahan gambut 2. Pengumpulan Informasi berbagai jenis tanaman dan varietas dalam lahan gambut 3. Perbaikan system pengelolaan air dalam lingkup makro dan mikro untuk pencapaian produktivitas tanaman yang dibudidayakan
2.	Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sebagai pendukung bioindustry	1. Pembentukan kelompok tani dan gapoktan 2. Pendirian kios saprodi yang didirikan oleh Lembaga yang terkait dalam usaha tani pertanian 3. Pembentukan dan revitalisasi koperasi unit desa untuk melayani petani dalam pembelian gabah
3.	Meningkatkan pendapatan petani dengan menambah nilai dari produk pertanian	1. Pengembangan integrasi tanaman dan ternak untuk meningkatkan pendapatan petani 2. Pengembangan industri rumah tangga dari hasil produk pertanian perikanan dan peternakan. 3. Perluasan pasar dalam menjual produk pertanian yang dihasilkan oleh petani di lingkungan lahan gambut tersebut.
4.	Penurunan Emisi gas rumah kaca dan mitigasi terhadap perubahan iklim	1. Pembuatan saluran drainase untuk menyimpan air pada musim kemarau 2. Penggunaan Varietas Rendah emisi 3. Penggunaan Varietas adaptif terhadap polder mini dalam mengendalikan musim hujan maupun kemarau.

Proses pertumbuhan tanaman, terutama tanaman tahunan (tanaman pohon-pohonan) menyerap CO₂ dari atmosfer melalui proses fotosintesis dan menjadikannya sebagai bagian dari jaringan tanaman menyimpan senyawa karbon organik. Melalui rehabilitasi lahan padang alang-alang dan semak belukar dengan penanaman tanaman tahunan seperti tanaman karet, kelapa sawit dan kakao, sektor pertanian dapat merupakan penambat karbon (karbon sink).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan yaitu:

1. Pengembangan lahan gambut untuk pertanian, khususnya untuk tanaman pangan, memerlukan perencanaan sistem dan perancangan teknik yang sangat hati-hati agar bisa menciptakan perekonomian masyarakat disekitar lahan gambut semakin baik. Hutan rawa gambut yang berada dalam Kawasan hutan produksi dapat dimanfaatkan dan dikonversikan kedalam usaha pertanian dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat sekitar lahan gambut.

Pengembangan tanaman sawit di lahan gambut akan membuat perekonomian masyarakat semakin bagus dan meningkat. Sudah banyak masyarakat khususnya petani di lahan gambut yang mengkonversikan tanaman pangan ke tanaman perkebunan di lahan sawit.

2. Urgensi dalam mengelola lahan gambut adalah emisi gas rumah kaca yang disebabkan adanya konversi lahan dari lahan gambut menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Dalam sistem pengelolaan lahan gambut jangka pendek harus memperhatikan ekonomi yang ditawarkan, sedangkan untuk sistem pengelolaan jangka Panjang dan menengah harus memperhatikan lingkungan sekitar. Urgensi yang lain dalam pengelolaan lahan gambut dalam pembukaan lahan gambut sering sekali dibakar sehingga membuat lahan gambut tidak bisa berproduksi Kembali.
3. Strategi dalam pengembangan lahan gambut secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan mensinergikan upaya-upaya dalam pengolahan lahan gambut dengan meningkatkan produktivitas usaha tani pada lahan gambut yang telah dikonser-vasi terlebih dahulu. Untuk pengembangan lahan gambut yang berkelanjutan kita juga harus dapat meminimalisir emisi gas karbon yang disumbangkan oleh lahan gambut sehingga dalam produktivitas pertanian dapat berjalan dengan baik.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih disampaikan kepada pihak Universitas Riau dan PT. Pertamina RU II Sungai Pakning yang telah bekerjasama dalam menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- IFCA. 2007. Peatland Use in Indonesia. Dalam Anggraeni, L (2011). Analisis Ekonomi Mitigasi Penurunan Emisi di Lahan Gambut. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Miettinen, J., A. Hooijer, D. Tollenaar, S. Page, C. Malins, R. Vernimmen, C. Shi, and S. C. Liew. 2012. Historical Analysis and Projection of Oil Palm Plantation Expansion on Peatland in Southeast Asia. White Paper Number 17. The International Council on Clean Transportation. www.theicct.org
- Notohadiprawiro, Tejoyuwono. 2006. Etika Pengembangan Lahan Gambut Untuk Tanaman Pangan. Yogyakarta. UGM Press.
- Soil Survey Staff. 2003. Keys to Soil Taxonomy. Ninth Edition. Natural Resources Conservation Service. United States Department of Agricultural.
- Strack, M. 2008. Peatlands and Climate Change. International Peat Society, Vapaudenkatu 12, 40100 Jyväskylä, Finland. 227.
- Sumaryanto. Et., al. 2010. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lahan Gambut. Bogor. Badan Litbang Pertanian.
- UNEP and UNESCO 2007. The last stand of the orangutan, 2007. State of emergency: illegal logging, fire and palm oil in Indonesia's National Parks

PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS LINGKUNGAN GAMBUT

Helda Khairiyah

Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Pekanbaru

Email: helda.khairiyah2011@grad.unri.ac.id

Abstrak

Indonesia memiliki sumber daya alam berupa gambut yang dapat dikatakan cukup luas sekitar 21 Ha. Lahan ini tersebar di beberapa daerah di Indonesia yaitu, di Kalimantan, Sumatera dan Papua. Gambut memiliki manfaat yang sangat banyak terutama dalam bidang ekonomi. Gambut dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dapat mengurangi efek rumah kaca. Gambut juga bermanfaat bagi kehidupan flora dan fauna sebagai siklus hidrologi. Dan bagi masyarakat sekitar, lahan gambut dapat meningkatkan pendapatan apabila gambut tersebut dikelola dan dimanfaatkan dengan cara yang tepat. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat gambut dan juga cara mengelola lahan gambut yang baik. Lahan gambut memiliki karakter yang kering dan juga mudah terbakar, oleh sebab itu banyak yang mempersalahkan mengenai pemberdayaan lahan gambut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Konsep teori yang digunakan yaitu konsep pemberdayaan ekonomi dari Samuel Paul. Hasil dari penelitian ini yaitu, Pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut yang tepat, dipandang sebagai solusi pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci : pemberdayaan, lahan gambut, ekonomi

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki lahan gambut dengan luas sekitar 21 ha yang tersebar terutama disekitar Sumatera, Kalimantan, dan Papua (BB Litbang SDLP, 2008). Lahan gambut memiliki variabilitas yang sangat tinggi, baik dari segi ketebalan gambut, kematangan dan kesuburannya, menjadikan tidak semua lahan gambut cocok untuk pertanian. Dari 18,3 ha lahan gambut di Indonesia, hanya sekitar 6 ha lahan gambut yang layak untuk pertanian.

Sebagian besar lahan gambut masih berupa tutupan hutan dan menjadi habitat bagi berbagai spesies fauna dan tanaman langka. Selain itu, lahan gambut menyimpan karbon (C) dalam jumlah besar. gambut juga memiliki daya menahan air yang tinggi sehingga dapat berfungsi sebagai penyangga hidrologi area sekelilingnya. Perluasan pemanfaatan lahan gambut meningkat pesat di beberapa provinsi yang memiliki area lahan gambut yang luas seperti, Riau, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi lahan gambut disekitar daerah di Indonesia, Presiden membentuk sebuah lembaga yang disebut Badan Restorasi Gambut (BRG). Badan ini merupakan salah satu lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Badan Restorasi Gambut berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin langsung oleh seorang kepala. BRG mempunyai tugas mengkoordinasi dan memfasilitasi restorasi gambut pada beberapa wilayah yaitu pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.

Lahan gambut memiliki potensi besar untuk meningkatkan potensi masyarakat. Jika lahan gambut ini dikelola dengan baik, maka akan berdampak positif bagi ekonomi, ekologi dan biodiversitas. Saat ini, pemerintah berupaya mendorong pemulihan ekonomi dengan cara pengalokasian anggaran Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) pada 2021. Sejalan dengan program pemulihan ekonomi tersebut, Badan Restorasi Gambut (BRG) gencar meningkatkan ekonomi warga yang tinggal di sekitar area lahan gambut melalui program revitalisasi ekonomi masyarakat. Bentuk program revitalisasi ini disesuaikan dengan kondisi karakteristik dan potensi desa. Selain menjaga agar lahan gambut agar tidak terbakar, masyarakat juga harus memanfaatkan lahan gambut dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari itu.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Creswell (2016), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna-makna yang-oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manfaat Lahan Gambut Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Indonesia adalah negara terbesar ke-2 di dunia yang memiliki lahan gambut. Akan tetapi, sayangnya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal apa itu gambut dan manfaat daripada gambut tersebut.

Gambut memiliki peran yang penting dalam menunjang perekonomian masyarakat disekitarnya. Berbagai tanaman dan hewan yang habitatnya di lahan gambut dapat menjadi sumber pangan dan pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut. Karena itu, menjaga lahan gambut berarti juga menjaga keberlangsungan perekonomian masyarakat disekitarnya.

Pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya yang dilakukan secara benar dan tepat dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi, ekologi dan biodiversitas. Lahan gambut merupakan salah satu sumber daya alam yang sejak awal berperan dalam membantu kesejahteraan kehidupan manusia serta sudah dikelola dan dimanfaatkan.

Lahan gambut dapat digunakan sebagai bahan bakar dan juga untuk kegiatan budidaya perkebunan yang dapat memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya. Lahan gambut juga memiliki peran terhadap ekologis yang vital untuk mendukung biodiversitas dan sangat bagus sebagai penyimpan karbon. Gambut mampu menampung hingga 30% jumlah karbon dunia agar tidak terlepas ke atmosfer.

Di berbagai negara di Eropa, lahan gambut juga banyak dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, seperti pembuatan briket, lahan pertanian dan juga hortikultural.

Degradasi lahan gambut dapat mengganggu sumber penghidupan masyarakat yang tinggal disekitarnya. Jutaan masyarakat bergantung pada lahan gambut untuk menggembala ternak, membudidayakan ikan, dan juga bertani.

Lahan gambut merupakan ekosistem alami bagi beberapa tanaman yang mempunyai nilai ekonomi bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah lahan gambut. Beberapa jenis tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di lahan gambut yaitu rumbia, rotan, karet, nanas, padi, mahang, pisang, tebu, kelapa, sagu, singkong, jelutong, punak, resak, dan kapur naga. Namun, tidak sedikit juga masyarakat Indonesia yang membuat perkebunan kelapa sawit diatas lahan gambut, hal ini juga memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, lahan gambut juga cocok untuk mengembangkan beberapa jenis ikan, seperti ikan patin siam, lele dumbo dan juga nila.

Oleh karena itu, lahan gambut dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat yang ingin mengelola dan mengembangkan lahan gambut.

Pengelolaan Lahan Gambut Yang Tepat Sehingga Dapat Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Lingkungan Gambut

Pengelolaan lahan gambut membutuhkan strategi yang secara komprehensif dapat mempertemukan kepentingan sosial ekonomi dan kepentingan pelestarian sumberdaya alam yang seimbang dan adil. Nilai ekonomi pelestarian sumberdaya lahan

gambut sangat tinggi dari nilai eksploitasinya. Indonesia terus berupaya mencari berbagai terobosan dan dalam rangka penyempurnaan model pengelolaan lahan gambut berkelanjutan.

Strategi umum pengembangan sistem pengelolaan gambut berkelanjutan adalah mensinergikan upaya-upaya minimalisasi konversi lahan gambut alami dan peningkatan produktivitas usaha tani pada lahan gambut yang telah tergarap berbasis teknologi ramah lingkungan dan pengurangan emisi karbon.

Tanah gambut memiliki karakter cepat kering dan mudah terbakar pada musim kemarau. Tapi hal itu dapat diantisipasi dengan pembangunan sistem drainase yang baik. Caranya dengan membuat sistem kanal berserta parit-parit dan juga pintu-pintu air yang berfungsi membuang kelebihan air ketika musim hujan dan menahan air saat musim kemarau. Dengan begitu, air tanah akan terjaga sehingga tidak mudah terjadi kebakaran.

Kuncinya adalah pengelolaan yang benar, disiplin dan berkesinambungan dalam menjaga lahan gambut agar tetap lembap dan kedalaman muka air tanah tidak lebih dari 40 cm, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Banyak lahan gambut yang salah dalam penanganannya sehingga tidak jarang menyebabkan kebakaran. Banyak yang memperlakukan lahan gambut yang dijadikan perkebunan kelapa sawit adalah pemicu dari terjadinya kebakaran sehingga, pemanfaatan lahan gambut menjadi berkurang. Sejatinya, pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit tidak merusak lingkungan asalakan dikelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara perusahaan sawit, pemerintah dan juga masyarakat setempat dalam mencegah kebakaran dilahan gambut. Pemerintah harus melakukan pengawasan secara tepat dan konsisten. Sekalipun restorasi lahan gambut dilakukan, hal itu sepatutnya tidak menghilangkan sumber pendapatan atau keuntungan ekonomi bagi masyarakat disekitarnya. Sebab, lahan gambut sudah menjadi sumber kehidupan bagi sebagian masyarakat di beberapa wilayah seperti di Kalimantan.

Selain pengawasan pengelolaan lahan gambut diperketat, tetapi juga dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan lahan dan menyebabkan kawasan gambut terdegradasi. Untuk mengembalikan lahan gambut sesuai fungsinya, maka diperlukan kehati-hatian pada setiap tahapannya.

Prinsipnya, pemanfaatan lahan gambut yang disertai dengan pengelolaan yang tepat tidak akan menyebabkan kebakaran, sebaliknya akan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat.

Pengelolaan lahan gambut dengan teknologi yang tepat dinilai dapat menjadi salah satu lokomotif penggerak ekonomi di daerah, seperti di daerah Riau. Luas lahan gambut yang mencapai 4,6 juta ha, atau sekitar 56% total luas wilayah Provinsi Riau, bisa menjadi potensi untuk alat pengembangan komoditas yang menghasilkan.

Saat ini, pemerintah bukan tidak melakukan pengelolaan, hanya saja dalam pengelolaan tersebut perlu dilakukannya perbaikan. Contohnya seperti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki pemetaan yang berbeda dalam tata kelola hutan. Oleh karena itu, kedepannya harus ada kebijakan *"one map"* atau satu peta yang sama dan tidak adanya perbedaan lagi yang merugikan.

Pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut yang tepat, dipandang sebagai solusi pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah dituntut bagaimana menciptakan keseimbangan yang kemudian harus menjadi pelajaran. Sehingga upaya pertumbuhan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan saling mendukung. Contohnya seperti pemanfaatan tanaman sagu atau sawit yang dikombinasikan dengan sistem tumpang sari bersama nanas bisa menjadi lebih optimal. Kata kunci untuk mewujudkan hal itu adalah inovasi dan teknologi.

Dalam mendukung pemberdayaan gambut di Indonesia pemerintah membentuk sebuah lembaga yang disebut Badan Restorasi Gambut (BRG). Badan ini merupakan salah satu lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Badan Restorasi Gambut berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin langsung oleh seorang kepala. BRG mempunyai tugas mengkoordinasi dan memfasilitasi restorasi gambut pada beberapa wilayah yaitu pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.

Badan Restorasi Gambut (BRG) gencar meningkatkan ekonomi warga yang tinggal di sekitar area lahan gambut melalui program revitalisasi ekonomi masyarakat. Bentuk program revitalisasi ini disesuaikan dengan kondisi karakteristik dan potensi desa. Selain menjaga agar lahan gambut agar tidak terbakar, masyarakat juga harus memanfaatkan lahan gambut dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari itu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan gambut, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Lahan gambut merupakan salah satu sumber daya alam yang sejak awal berperan dalam membantu kesejahteraan kehidupan manusia serta sudah dikelola dan dimanfaatkan. Lahan gambut memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sekitarnya. Lahan gambut dapat dijadikan sebagai penggerak ekonomi karena memiliki manfaat yang banyak.
2. Pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut yang tepat, dipandang sebagai solusi pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan lahan gambut membutuhkan strategi yang secara komprehensif dapat mempertemukan kepentingan sosial ekonomi dan kepentingan pelestarian sumberdaya alam yang seimbang dan adil.
3. Dalam pengelolaan lahan gambut, pemerintah telah membentuk sebuah lembaga yang mengkoordinasi dan memfasilitasi restorasi gambut di beberapa wilayah di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak PT. PERTAMINA RU II Sungai Pakning dan juga Universitas Riau yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam penulisan penelitian mengenai Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat dengan sub topik Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Lingkungan Gambut. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada PT. PERTAMINA dan juga Universitas Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Pangaribuan, Nurmala. (2019). *"Restorasi Lahan Gambut untuk Mencegah Bencana Ekosistem Global"*. Vol.53, No. 9, 2019. Pp.1689-1699.
- Santosa, Purwanto Budi. (2013). *"Perlindungan Hutan Rawa Gambut Berbasis Ekosistem"*. Balai Penelitian Kehutanan Banjar Baru.
- Syafrizal, Resdati. (2020). *"Restorasi Gambut berbasi Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Menuju Masyarakat Madani Berkearifan Lokal, LPPM, Universitas Muhammadiyah Purwokerto"*. P.596-601.
- Syahza, Almasdi. (2005). *"Pemberdayaan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kelembagaan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit"*. Universitas Riau.

PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS LINGKUNGAN GAMBUT

Mela Wirga Astika

FISIP Universitas Riau, Pekanbaru
Email: melawirgaastika@gmail.com

Abstrak

Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang termasuk dalam zona merah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Padahal keberadaan daerah ini sangat strategis dalam pemeliharaan ekosistem lahan basah karena sebagian wilayahnya adalah hutan rawa gambut. Bila pemanfaatan ekosistem rawa gambut tidak dilakukan secara bijaksana, maka akan menyebabkan kerusakan ekosistem dan sumberdaya yang terdapat didalamnya, sekaligus akan menurunkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut. Tujuan penelitian ini menganalisis pola dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ekosistem rawa gambut di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini merupakan jenis pendekatan kualitatif dengan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah snowball sampling. Informan penelitian adalah aparat yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat di lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dan observasi, setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penting adanya usaha pemberdayaan dengan sasaran utama adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa pemberdayaan masyarakat diyakini dapat memotivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik sehingga meningkatkan sosial ekonomi keluarga, menumbuhkan budaya kerja, serta memupuk semangat untuk bekerjasama. Topik pendidikan dan penyuluhan yang diperlukan masyarakat di lahan gambut adalah pendidikan lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan sosialisasi peraturan yang berhubungan dengan perlindungan ekosistem.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, perlindungan ekosistem, lahan gambut berkelanjutan

PENDAHULUAN

Masyarakat yang tinggal di sekitar ekologi lahan basah mempunyai ketergantungan yang sangat besar terhadap ekosistem setempat. Karena itulah keberadaan mereka dapat berperan ganda: sebagai penjaga sekaligus perusak dari ekosistem tersebut. Untuk itu perlu dibangun suatu pola pengelolaan ekosistem yang melibatkan semua pihak, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara nyata, dan seterusnya keberadaan mereka diharapkan dapat menjaga ekosistem tersebut (Pramana, 2012). Tujuannya adalah agar masyarakat ikut memiliki kepentingan untuk menggunakan segala sumber daya yang tersedia secara bertanggung jawab dan berkesinambungan. Aktivitas pemanfaatan ekosistem pada beberapa kawasan lahan basah di Indonesia memang memprihatinkan karena seringkali dilakukan secara eksploitatif dan destruktif. Akibatnya laju kerusakan (degredasi) lahan tidak dapat dihindarkan. Fenomena degradasi lahan ini terus berlangsung sampai sekarang, bahkan disinyalir telah memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang besar di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Riau pada khususnya, terutama dalam rentang waktu 5 tahun terakhir (2013-2017).

Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada kurun waktu tersebut kebakaran hutan dan lahan terutama kawasan rawa gambut hampir terjadi sepanjang tahun. Tahun 2013 terjadi kebakaran 20 Ha yang merupakan areal perkebunan kelapa sawit. Berikutnya tahun 2014 sedikitnya 250 Ha lahan gambut yang masing-masing kosong ludes dilalap si jago merah. Lahan kosong tersebut diduga kuat sengaja dibakar dan kemungkinan akan ditanami kelapa sawit. Tahun 2015 terjadi peningkatan kebakaran lahan gambut menjadi 100 Ha. Selanjutnya tahun 2016 kondisi kebakaran lahan semakin parah karena areal yang terbakar mencapai 75 Ha. Dan tahun 2017, walaupun peristiwa kebakaran agak sedikit mereda, namun tidak kurang 30 Ha lahan gambut habis dilalap api. Pemanfaatan secara eksploitatif ini telah menyebabkan ekosistem

mengalami kehancuran yang secara kuantitas dan kualitas akan menurunkan fungsi sosial, ekologis maupun ekonomis. Apalagi dengan banyaknya kepentingan dari berbagai pihak yang memanfaatkan ekosistem sering menimbulkan konflik dan mengarah pada pengelolaan dengan pertimbangan sempit. Kondisi ini diperparah lagi dengan tidak adanya perhatian dan kegiatan nyata terhadap pengelolaan ekosistem yang dilakukan oleh pemerintah maupun LSM, yang membuat pemanfaatan ekosistem ini menjadi sangat membahayakan keberlanjutan kehidupan masyarakat pada masa mendatang.

Suratmo, dkk (2015) menyebutkan, dalam konteks berkelanjutan pengelolaan ekosistem rawa gambut di cagar biosfer, maka aspek pencegahan kebakaran merupakan hal penting dan lebih utama untuk dilakukan sebagai tindakan awal karena jauh lebih baik daripada melakukan proses pemadaman. Hal ini dikarenakan proses pemadaman api dan rehabilitasi pasca terbakar akan membutuhkan biaya dan waktu sangat besar nilainya. Untuk itu, kegiatan pencegahan kebakaran harus terus-menerus atau berkelanjutan dilakukan, karena merupakan cara yang lebih ekonomis untuk mengurangi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan. Bila pengelolaan ekosistem rawa gambut ini tidak dilakukan secara bijaksana, maka akan menyebabkan kerusakan ekosistem itu sendiri dan sumberdaya yang terdapat didalamnya sekaligus akan menurunkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut (Gunarso, dkk, 2013). Maka perlu adanya usaha pemberdayaan dengan sasaran utama adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa pemberdayaan masyarakat diyakini dapat memotivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik, sehingga meningkatkan sosial ekonomi keluarga, menumbuhkan budaya kerja, serta memupuk semangat untuk bekerjasama (Rohmah, 2014).

Pola pengembangan kelembagaan masyarakat yang dibutuhkan pada masa sekarang adalah menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya (Permatasari, 2014). Bentuknya berupa intervensi bottom-up yang menghormati dan mengakui bahwa masyarakat bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan masalah, dan dapat melakukan usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan (Sulistiyan, 2004). Dari pemikiran ini dapat dinyatakan, baik buruknya ekosistem tidak terlepas dari masyarakat yang berdiam di kawasan tersebut, artinya masyarakatlah yang memiliki peranan penting bagi kelestarian ekosistem rawa gambut tersebut.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka perlu dilakukan kegiatan serta kajian untuk memberi gambaran menyeluruh tentang konsep dan strategi pemberdayaan masyarakat di lahan gambut yang diintegrasikan dengan tujuan pelestarian lingkungan. Kegiatan tersebut tentunya membahas uraian mengenai ekosistem lahan gambut dan permasalahannya untuk memperoleh kesepahaman tentang pentingnya menjaga sumberdaya alam ini dari kerusakan. Kegiatan yang dilakukan perlu juga dirangkai dengan pemaparan rinci tentang strategi pemberdayaan masyarakat, serta hikmah yang diperoleh dari pengalaman memberdayakan masyarakat tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis pendekatan kualitatif dengan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah snowball sampling. Informan penelitian adalah aparat yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat di lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dan observasi, setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Untuk tercapaian tujuan yang diharapkan, maka dilakukan langkah-langkah: Pertama, mengidentifikasi dan memahami tentang kondisi-kondisi yang ada (das sein). Berupaya mengidentifikasi dan memahami tentang kondisi-kondisi yang ada pada lokasi pengabdian tersebut secara keseluruhan. Aturan dan pedoman komponen-komponen dan faktor-faktor yang sesuai dengan model, serta menganalisa pola pemberdayaan

masyarakat di ekosistem rawa gambut. Kedua, Mengidentifikasi tentang kondisi yang diinginkan (das dollen). Berisi berbagai faktor yang mungkin perlu perubahan dan perkembangannya dengan catatan perubahan yang diinginkan itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi yang diinginkan harus keadaan yang mungkin dapat dicapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mata pencaharian penduduk desa di Kecamatan Balai Jaya umumnya masih terkait dengan subsistem pertanian, terutama perkebunan sawit dan karet, perikanan, dan sebagian kecil perdagangan. Masyarakat lokal berkebun kelapa sawit baru diintroduksi beberapa puluh tahun terakhir ini oleh para pendatang yang umumnya berasal dari etnis Batak dan Jawa lebih memilih menanam sawit dengan luas berkisar antara 2-3 Ha. Oleh karenanya, masyarakat berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya dengan bergantung pada kawasan perkebunan. Perkebunan terdiri dari perkebunan milik perusahaan dan perkebunan milik masyarakat. Sebagian kecil lahan perkebunan tersebut berada di lahan basah (gambut). Kelapa sawit merupakan komoditas paling banyak produksinya. Total luas tanaman kelapa sawit mencapai 47.301,40 Ha yang menghasilkan 114.845,28 ton CPO. Sedangkan tanaman karet seluas 1.351,00 Ha dan menghasilkan 1.035,14 karet kering. Kakao seluas 3,00 Ha menghasilkan 0,53 ton biji kering kakao. Namun kecamatan ini tidak termasuk daerah potensi pertanian tanaman pangan maupun palawija karena lahan sebagian besarnya adalah lahan bukan lahan sawah. Walaupun semua pertanian tanaman pangan dapat dihasilkan, namun jumlahnya tidak terlalu besar. Luas panen jagung mencapai 202 Ha dengan produksi jagung mencapai 452,48 ton. Di kecamatan ini juga cukup banyak ditemukan usaha peternakan. Jumlah sapi tahun 2015 mencapai 3.121 ekor dan kambing/domba 668 ekor. Selain itu juga terdapat peternak/usaha ayam buras/kampung mencapai 6.192 ekor dan itik 671 ekor. Fasilitas perekonomian berskala kecil cukup tersedia di setiap desa/kelurahan, walaupun masih ada desa yang belum memiliki pasar sendiri. Atas kondisi demikian, maka penduduk desa/kelurahan yang wilayahnya tidak tersedia pasar atau kelompok pertokoan harus mengunjungi desa/kelurahan lain yang tersedia pasar apabila ingin melakukan transaksi ekonomi di pasar. Jumlah restoran / rumah makan ada 27 unit, warung makan 641 unit hotel/penginapan 1 unit, warung kelontong 263 unit yang terdapat di semua desa/kelurahan, pasar permanen sudah ada 7 unit dan pasar tanpa bangunan 2 unit. Infrastruktur yang tersedia masih sangat terbatas. Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, listrik, pasar ataupun perbankan masih kurang untuk mendukung aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Di beberapa desa, kurangnya infrastruktur yang tersedia telah mendorong inisiatif penduduk untuk membangun infrastruktur dengan kondisi dan kualitas seadanya. Misalnya saja di beberapa desa, seperti Bagan Bakti dan Balam Jaya, penduduk telah berhasil membangun pasar yang beroperasi seminggu sekali dengan difasilitasi dan barang dagangan dijual oleh pedagang dari luar desa.

Masyarakat di lahan gambut sebenarnya hidup dalam ekosistem yang rapuh, termasuk di Kecamatan Balai Jaya. Karena rapuh dan marjinalnya lahan gambut inilah yang menyebabkan sebagian besar masyarakat mengalami kemiskinan. Antara kemiskinan dan ekosistem yang rusak ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita dapat saja mengatakan minimnya teknologi, pendidikan petani rendah, dan segudang alasan klasik lainnya yang menyebabkan mereka miskin, namun fakta hari ini menyebutkan bahwa ternyata belum banyak orang yang memberikan perhatian terhadap keberdayaan mereka.

Masyarakat di lahan gambut umumnya berada di lokasi yang jauh dari pusat perekonomian di Kecamatan Balai Jaya. Dari 14 desa/kelurahan yang ada, 3 desa yang

memiliki lahan gambut cukup luas, memang jaraknya jauh dari ibukota kecamatan apalagi ibukota kabupaten. Desa Balam Jaya yang memiliki gambut terluas di Kecamatan Balai Jaya, jaraknya mencapai 18 KM ke ibukota kecamatan dan 133 KM ke ibukota kabupaten, Desa Balam Sempurna Jaya berjarak 11 KM ke ibukota kecamatan dan 135 KM ke ibukota kabupaten, dan Balam Sempurna berjarak 14 KM ke ibukota kecamatan dan 120 KM ke ibukota kabupaten.

Diperlukan biaya yang relatif besar bagi masyarakat ketiga desa untuk mencapai pusatpusat pertumbuhan ekonomi terdekat. Dampaknya adalah harga kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian menjadi lebih tinggi akibat biaya transportasi mahal. Selain itu, mahalnya biaya transportasi ini, juga menyebabkan sulitnya menjangkau layanan pemerintah seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan informasi. Akibatnya sekalipun penghasilan petani terkadang meningkat, nilainya lebih rendah dan biaya hidup menjadi lebih tinggi karena tingginya harga kebutuhan pokok serta biaya pendidikan dan kesehatan.

Kondisi eksisting masyarakat tersebut membutuhkan perhatian yang mutlak bagi semua pihak. Tindakan yang mendesak perlu dilakukan adalah kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumberdaya alam tanpa merusak lingkungan. Keterbatasan daya dukung ekonomi lahan gambut dari sisi pertanian, harus menjadi tantangan dalam mencari solusi agar masyarakat memiliki pilihan sumber penghidupan yang layak dan ramah lingkungan. Dengan demikian, peningkatan kemampuan ekonomi juga harus disertai dengan peningkatan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan. Tanpa hal itu, peningkatan kondisi ekonomi justru dapat berbalik menjadi faktor perusak karena dapat menjadi modal bagi sebagian masyarakat yang tidak sadar untuk lebih banyak lagi melakukan kerusakan lingkungan. Pelaku usaha di pedesaan lahan gambut, terutama petani pada umumnya, melakukan usaha secara subsistem. Mereka belum dapat mengembangkan budaya memupuk modal. Pada musim-musim panen, mereka memang kerap mengalami surplus produksi. Namun sebagian besar masih dihabiskan untuk membeli asset-aset yang tidak produktif yang bersifat konsumtif, akibatnya mereka hampir selalu kesulitan modal setiap kali akan mengawali proses produksi. Bila dihitung hanya berkisar 5-10% pendapatan yang dialokasikan kembali untuk modal usaha, sedangkan sisanya untuk konsumsi dan membeli aset non produktif tadi. Mereka juga jarang menjual hasil produksinya ke pasar karena memang pasar yang permanen tidak ada, kalau pasar diibukota kecamatan jaraknya jauh dari tempat tinggal. Hasil produksi disimpan untuk konsumsi sendiri, akibatnya perputaran modal menjadi semakin terbatas.

Rendahnya produksi dan tingkat perekonomian menjadi salah satu indikator dari rendahnya kompetensi sumberdaya manusia masyarakat desa di lahan gambut. Kondisi ini didukung oleh minimnya akses terhadap informasi dan teknologi baru. Sulitnya mengakses pengetahuan atau keterampilan dari para ahli atau praktisi membuat mereka hanya menggantungkan pada proses trial and error (coba-coba). Proses ini tidak hanya mengakibatkan lambatnya perkembangan kemampuan mereka, melainkan juga tidak mampu mengantisipasi kondisi lingkungan lahan gambut yang rentan.

Ditambah lagi dalam kondisi subsistem, petani tidak memiliki "pengaman", sehingga rentan terhadap gejolak yang terjadi dalam hidupnya. Ketika sakit berat, mereka tidak memiliki tabungan yang cukup untuk berobat. Ketika gagal panen secara massal, desa menjadi rawan pangan. Jika hal ini terjadi berulang, masyarakat menjadi semakin tidak berdaya dan kemiskinan pun semakin dalam. Nyatanya lagi tingkat kesadaran masyarakat untuk menyisihkan sebagian pendapatan untuk kegiatan produktif masih sangat rendah. Mereka tidak menyadari bahwa pola pengeluaran

semacam itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kondisinya terus terpuruk dan terkungkung dalam belenggu kemiskinan.

Secara garis besarnya dapat dikatakan pentingnya pemberdayaan masyarakat di lahan gambut memiliki dua pertimbangan. Pertama, karena kemiskinan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di lahan gambut. Kondisi ini seringkali menjadi penyebab ketidakpedulian mereka terhadap kualitas lingkungan. Kedua, upaya penyadaran dan penumbuhan motivasi untuk berpartisipasi dalam konservasi lahan terbukti sulit dilakukan apabila kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi. Kedua hal di atas didasari kenyataan bahwa masyarakat miskin dan terbelakang adalah ketidaktersediaan peluang ekonomi dan mata pencaharian yang berkelanjutan. Karena itu, pemberdayaan masyarakat di lahan gambut harus dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Keterbatasan daya dukung ekonomi lahan gambut dari sisi pertanian, harus menjadi tantangan dalam mencari potensi lain agar masyarakat memiliki pilihan sumber penghidupan yang layak dan ramah lingkungan. Dengan demikian, peningkatan kemampuan ekonomi juga harus disertai dengan peningkatan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan. Tanpa hal itu, peningkatan kondisi ekonomi justru dapat berbalik menjadi faktor perusak karena dapat menjadi modal bagi sebagian masyarakat yang tidak sadar untuk lebih banyak lagi melakukan kerusakan lingkungan.

Gambut merupakan sumber daya alam yang unik, memiliki peran yang kompleks dan sifat fragil. Kondisi itu sebenarnya menjadi peluang bagi tumbuhnya beragam partisipasi masyarakat sekaligus kesempatan kerja dan berusaha. Berikut beberapa bentuk partisipasi dan kegiatan yang berpeluang menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha yang memungkinkan dilakukan oleh masyarakat di lahan gambut.

- a. Partisipasi dalam menanggulangi kebakaran lahan Kebakaran lahan gambut sangat mudah meluas dan menimbulkan dampak yang sangat merusak. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah dihimbau memiliki satuan pemadam kebakaran lahan dan hutan. Dalam hal, ini masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut dapat berperan sebagai anggota satuan pemadam kebakaran di tingkat desa seperti yang dilakukan. Tim ini selain memiliki struktur organisasi yang jelas, ia juga diberikan tehnik pelatihan pencegahan dan pemadaman api, termasuk cara-cara menggunakan peralatan pemadaman kebakaran milik pemerintah, sehingga ia senantiasa siap dilibatkan pada setiap kegiatan pemadaman kebakaran.
- b. Partisipasi dalam kegiatan rehabilitasi lahan Upaya rehabilitasi hutan memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak terutama di bidang. pembibitan tanaman, penanaman, dan pemeliharaan. Masyarakat di lahan gambut dapat mengambil peran dalam kegiatankegiatan semacam itu. Peningkatan keterampilan teknis dan manajemen, permodalan, serta mediasi dengan sektor-sektor terkait dan mitra kerja lain, sangat diperlukan oleh masyarakat agar mereka dapat mengisi kesempatan kerja tersebut. Namun dari kegiatan ini dapat ditarik suatu proses pembelajaran yang berarti dimana masyarakat dapat dilibatkan untuk ikut berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesadaran mereka bahwa kecerobohan dalam menggunakan api berdampak parah terhadap kerusakan hutan dan sangat sulit untuk diperbaiki.
- c. Pemanfaatan lahan melalui agroforestry Sistem agroforestry yang saat ini sedang gencar dikembangkan oleh pemerintah akan membuka kesempatan kerja petani untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan lahan hutan (gambut) bagi komoditas pertanian yang lebih produktif dengan system wanatani. Di samping itu, perkebunan swasta di lahan gambut dangkal, membuka peluang kerja bagi masyarakat terutama petani di sekitar perkebunan.

- d. Pemanfaatan lahan melalui Usaha Tani Terpadu Usaha tani terpadu seperti tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, yang berkelanjutan cukup berpeluang untuk dikembangkan di lahan gambut. Hal ini dimungkinkan karena sebagian lahan gambut (khususnya yang dangkal) merupakan lahan yang sesuai bagi pengembangan berbagai komoditas pertanian. Tanaman kehutanan dan perkebunan dapat dipanen dalam jangka panjang. Sementara tanaman pangan dan hortikultura dapat dipanen dalam jangka pendek. Perairan di lahan gambut dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan. Demikian pula, komoditas ternak seperti ayam, itik, kerbau, dan sapi dapat dipelihara untuk cash income atau tabungan. Sementara kotoran ternak tersebut dapat digunakan sebagai pupuk atau bahan pembuat kompos.

Tujuan pendampingan pada dasarnya mencakup dua elemen pokok, yaitu tumbuhnya kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat. Pertama, kemandirian merupakan kemampuan untuk pelepasan diri dari keterasingan, atau kemampuan untuk bangkit kembali pada diri manusia yang mungkin sudah hilang karena adanya ketergantungan, eksploitasi, dan sub ordinasi. Kemandirian merupakan cermin adanya kepercayaan seseorang pada kemampuan sendiri yang menjadi suatu kekuatan pendorong untuk kreativitas manusia, otonomi untuk mengambil keputusan, bertindak berdasarkan keputusan sendiri, dan memilih arah tindakan yang tidak terhalang oleh pengaruh luar seperti keinginan orang lain. Kedua, partisipasi merupakan proses aktif dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan yang dibimbing oleh cara berpikir masyarakat sendiri, sehingga mereka dapat melakukan kontrol efektif. Partisipasi aktif merupakan proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah yang bertolak dari kemampuan memutuskan, bertindak, dan berefleksi atas tindakan mereka sebagai subyek yang sadar.

Berbeda dengan partisipasi aktif, dalam partisipasi pasif, masyarakat dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan, dirancang, dan dikontrol oleh orang lain. Setelah jangka waktu tertentu, masyarakat dianggap sudah mencapai tahap mandiri sehingga proses pemberdayaan harus diakhiri. Namun demikian, pendamping harus yakin bahwa proses pemberdayaan akan terus berlanjut meskipun masyarakat tidak lagi didampingi. Dalam hal ini, kelompok harus dapat secara mandiri menjadi pendamping bagi masyarakat. Kriteria masyarakat yang sudah mandiri sehingga pendampingan perlu diakhiri antara lain: a) Masyarakat sudah sadar bahwa proses kapasitas (animasi dan fasilitasi) dari orang luar (pendamping) tidak dibutuhkan lagi; b) Kelompok masyarakat dampingan sudah mandiri dan mampu bertindak sebagai pendamping bagi anggotanya (pendamping internal), dan c) Kelompok sudah mampu menjadi fasilitator bagi kegiatan usaha dan pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh anggota.

KESIMPULAN

Kebutuhan pelestarian lahan gambut dari kerusakan bisa dikatakan “dibiayai” oleh kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat di sekitar di lahan gambut itu sendiri. Oleh sebab itu, semua pihak berkepentingan dalam bentuk yang berbeda memberikan “imbalan” kepada mereka yang hidup dalam kemiskinan demi terjaganya kelestarian lahan gambut. Jika masyarakat luas dapat menikmati hidup karena ekosistem lahan gambut terjaga oleh petani yang miskin, berapakah yang sudah mereka kembalikan atau bayar dan insentif apa yang diterima oleh masyarakat jika mereka dapat menjaga lahan gambut. Semua pihak harus memberikan perhatian yang utuh kepada masyarakat yang telah menjaga ekosistem lahan gambut melalui kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat di lahan gambut harus dibiayai oleh setiap orang yang menikmati manfaat langsung maupun tidak langsung atas ketidakrusakan lahan itu. Pemberdayaan masyarakat tersebut perlu dimulai oleh sebuah pemahaman bersama bahwa kesejahteraan petani gambut adalah demi kelangsungan hidup dan

kemakmuran seluruh isi bumi. Kerja besar tersebut juga harus dibangun dalam sudut pandang yang lebih besar, yaitu menyadarkan masyarakat luas dan dunia agar peduli terhadap kelangsungan ekosistem lahan gambut, sama persis seperti tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri dalam menjaga ekosistem lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasi dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora – IKAPI.
- Darmawan, Budi. 2015. *Rancang Bangun Model Pencegahan Kebakaran Ekosistem Hutan Rawa Gambut*. Pekanbaru: Pascasarjana Universitas Riau
- Kartika, Ray Septianis. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, Vol. 4 No. 3.
- Najiyati, Sri., Agus A., I Nyoman N.S., 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International.
- Noor, Muhammad. 2001. *Pertanian Lahan Gambut; Potensi dan Kendala*. Yogyakarta: Kanisius
- Noor, Muhammad. 2016. *Lahan Gambut; Pengembangan, Konservasi, dan Perubahan Iklim*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nugrianti, Oni dan Zulkarnaini. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Alokasi Dana*. *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol. 4, No. 1
- Pranarka dan Onny S. Prijono., 1996., *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS.
- Pramana Y. 2012. “Bentuk dan Tingkat Partisipasi Stakeholder dalam Pengelolaan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu Provinsi Riau”.
- Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Rohmah, Siti. 2014. “Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Grassroot Microfinance Syariah” *Jurnal SAWWA – Volume 10, Nomor 1*.
- Rushayati B, Sunkar A, Hermawan R, Masganti, Meliani R. 2014. “Model Public Private Partnership dalam Mengatasi Degradasi dan Deforestasi Hutan.” *Laporan Penelitian*. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.

PELAKSANAAN INOVASI SISTEM PEMANTAUAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (SI PEKA) DI KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI

Nanda Aristika, Ulil Amri, Wan Dodi Ihsan

Magister Ilmu Administrasi Universitas Riau

Email: nanda.aristika7666@grad.unri.ac.id, ulil.amri1790@grad.unri.ac.id,
wan.dodi1788@student.unri.ac.id

Abstrak

Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai termasuk ke dalam wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan, dan kasus karhutla di wilayah kecamatan ini menjadi permasalahan rutin tahunan. Langkah pengendalian karhutla di Kota Dumai sebagaimana diatur dalam Perda Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2005 dan bahkan menjadi salah satu uraian tugas Kasi Trantib Kecamatan sebagaimana Perwako Dumai Nomor 72 Tahun 2016. Dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi tersebut, maka Pemerintah Kecamatan Dumai Barat melaksanakan Inovasi SI PEKA (Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan) mulai Februari 2020 lalu. Dalam pelaksanaannya, inovasi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat dalam pengendalian karhutla di wilayah Kecamatan Dumai Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan inovasi SI PEKA yang diukur dengan menggunakan teori faktor kunci keberhasilan inovasi sektor publik Bugge et al, yaitu *Governance and innovation* (tata kelola inovasi), *sources of the ideas for innovation* (sumber ide-ide untuk inovasi), *innovation culture* (budaya inovasi), *capabilities and tools* (kemampuan alat-alat), *objectives, outcomes, drivers, and obstacles* (tujuan, hasil, pendorong, dan penghambat), *collecting innovation data for single innovation* (mengumpulkan data inovasi untuk inovasi tunggal). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data baik data primer maupun sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari masalah penelitian yang ada. Hasil penelitian yaitu bahwa inovasi ini sudah berjalan dengan baik, meskipun ada kendala dalam pelaksanaannya namun masih dapat diatasi dengan baik, dan telah dilakukan upaya-upaya oleh Pemerintah Kecamatan Dumai Barat agar inovasi ini dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kata kunci: Inovasi, kebakaran hutan dan lahan, SI PEKA

PENDAHULUAN

Persoalan kabut asap yang melanda Kota Dumai pada beberapa tahun belakangan ini telah menjadi sorotan dari berbagai pihak, dikarenakan dampak dari kabut asap ini bukan hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, namun merambah kesemua sektor. Persoalan kabut asap juga menjadikan hubungan antara Indonesia dengan negara tetangga menjadi kurang harmonis akibat kabut asap kiriman karena memang posisi Kota Dumai yang langsung berhadapan dengan negara Malaysia dan Singapura, bahkan persoalan ini telah menjadi perhatian internasional karena dapat berakibat pada perubahan iklim di dunia dan bahayanya bagi kesehatan. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu dilakukan dengan serius dan secara terpadu dengan melibatkan seluruh komponen yang ada, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pemantauan keberadaan titik panas (*hotspot*) untuk kegiatan pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan, karena tindakan penanggulangan yang dilakukan setelah kebakaran menjadi besar akan sangat sulit dilakukan dan memerlukan biaya yang sangat tinggi, disamping juga dampak negatif yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tersebut.

Langkah-langkah pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. Dalam Pasal 12 Peraturan Daerah tersebut dinyatakan bahwa untuk pengawasan dan pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,

selain satuan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai, Camat dapat membentuk Satuan Tugas pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan di wilayah kerja camat yang bersangkutan, serta Lurah dan penanggung jawab usaha membentuk Regu Pemadam (Regdam) Kebakaran Hutan/Lahan di wilayah Kelurahan atau di tempat operasional usahanya. Hal tersebut juga tercantum dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa dalam uraian tugas pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan diantaranya adalah melaksanakan kesiapsiagaan bencana di wilayah kecamatan, melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana meliputi tanggap darurat dan pasca bencana di wilayah kecamatan, dan menyusun peta rawan bencana di wilayah kecamatan.

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Dumai Barat yaitu salah satunya adalah kasus kebakaran hutan dan lahan. Penyebab kasus kebakaran hutan dan lahan ini selain karena kondisi tanah di sebagian wilayah Kecamatan Dumai Barat adalah tanah gambut dengan kedalaman 1 sampai 2 meter sehingga rentan kebakaran, tetapi juga karena ulah manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja, seperti dengan sengaja membakar semak untuk pembersihan lahan namun menjadi tidak terkendali sehingga api lompat dan menyebar ke wilayah yang lebih luas, tahap awal pembakaran untuk pembukaan lahan perkebunan, ataupun aktivitas pembuatan kanal atau saluran oleh pemilik lahan perkebunan tanpa dilengkapi dengan pintu kontrol yang memadai air sehingga menyebabkan gambut menjadi kering dan mudah terbakar.

Berdasarkan hasil penelitian Ria Viviyanti, dkk dalam jurnal Media Komunikas Geografi Vol. 20, No.2, Desember 2019, diperoleh tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kota Dumai dengan skor kelas yang digunakan, bahwa 80,20% luas wilayah Kota Dumai termasuk kedalam kelas tinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan, sisanya 19,20% termasuk kedalam kelas sedang bahaya kebakaran hutan dan lahan, dan Kecamatan Dumai Barat berada di kawasan yang tinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Dilansir dari data hasil rekapitulasi dan laporan harian tim reaksi cepat (TRC) BPBD Kota Dumai, dari Januari hingga 2 Maret 2020, dalam kurun waktu 2 bulan, telah terjadi kasus kebakaran lahan di Kota Dumai dengan luas lahan yang terbakar mencapai 55,3 hektar. Sebaran areal kebakaran lahan tersebut berada di Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, dan juga di Kecamatan Dumai Barat. Kejadian kebakaran lahan di Kota Dumai dapat dikatakan sebagai bencana tahunan, pada tahun 2019 juga mengalami kebakaran lahan dengan luas lahan sekitar 192,25 hektare dengan cakupan wilayah kecamatan Sungai Sembilan, Dumai Barat, Dumai selatan, Medang Kampai, Dumai Timur dan Bukit Kapur.

Dalam rangka membantu pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai, Kecamatan Dumai Barat sebagai salah satu instansi penyelenggara pelayanan publik telah mengembangkan inovasi SI PEKA atau Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan. Inovasi ini dikategorikan sebagai Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yaitu merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

Inovasi SI PEKA mulai dilaksanakan pada awal tahun 2020 berdasarkan Keputusan Camat Dumai Barat Nomor: Kpts.40 Tahun 2020 Tanggal 10 Februari 2020 tentang Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Kecamatan Dumai Barat

Tahun Anggaran 2020. SI PEKA adalah sistem deteksi dini keberadaan titik panas yang memanfaatkan sumber data/informasi yang diperoleh dari berbagai satelit antara lain Terra/Aqua, NOAA. Adapun hasilnya yaitu dapat memberikan informasi secara akurat untuk mendeteksi titik koordinat *hotspot* atau titik api yang muncul yang masuk dalam wilayah Kecamatan Dumai Barat secara *real time* (terkini).

Inovasi SI PEKA dipergunakan pihak Kecamatan sebagai peringatan dini letak lokasi titik *hotspot* yang ada berdasarkan pantauan satelit penginderaan jauh yang diterima pada akun kecamatan yang terdaftar. Apabila selama ini informasi titik *hotspot* diperoleh kecamatan langsung dari BMKG dan BPBD Kota Dumai, maka dengan SI PEKA kecamatan dapat memperoleh data *hotspot* secara langsung, yang kemudian dapat langsung dianalisis menggunakan *Geographic Information System (GIS)*. Adapun tahapan kegiatan analisis pengolahan data titik panas (*hotspot*) dan areal kebakaran hutan dan lahan oleh SI PEKA Kecamatan Dumai Barat yaitu sebagai berikut:

- a. titik panas (*hotspot*) harian diterima oleh sistem
- b. Melakukan proses tumpangtumpukan (*overlay*) dan identity data titik panas (*hotspot*) dengan batas wilayah dan data lain yang dibutuhkan.
- c. Pengolahan dan analisis hasil tumpang susun (*overlay*)
- d. Penyajian hasil perhitungan data dalam bentuk grafik, tabel dan layout peta data titik panas.

Pada proses olah data titik *hotspot* yang terdeteksi satelit, operator Kecamatan melakukan sinkronisasi dengan *database* pertanahan yang ada dalam sistem administrasi pertanahan di Kecamatan Dumai Barat, yaitu dengan *overlay* atau tumpang susun titik *hotspot* ke dalam peta satelit dengan data batas wilayah, peta kehutanan, dan data-data lain yang dibutuhkan, guna menentukan koordinat persisnya dimana lokasi yang terbakar tersebut, dan mencari akses jalan terdekat yang paling memungkinkan untuk dilalui oleh petugas pemadaman dan kendaraan yang mengangkut peralatan pemadaman ataupun alat berat yang didatangkan khusus untuk membantu proses pemadaman di lokasi tersebut.

Meskipun pihak Kecamatan telah memiliki sistem pemantau kebakaran dini, namun pihak Kecamatan tetap melaporkan kepada BPBD Kota Dumai setiap pergerakan yang dilakukan, karena pihak Kecamatan tugasnya hanya terbatas pada kegiatan pemadaman dini saja, mengingat keterbatasan jumlah personil pemadaman dan peralatan yang masih seadanya, dengan tujuan mencegah perluasan areal kebakaran.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Camat Dumai Barat untuk mencegah dan mengurangi kejadian kebakaran hutan dan lahan ini, adalah dengan membuat kebijakan untuk tidak memberikan pelayanan administrasi pertanahan di atas lahan yang terbakar tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek kesadaran bagi para pemilik lahan untuk lebih peduli dan mengawasi lahan miliknya, karena sebagian besar lokasi yang terbakar itu kondisinya adalah lahan terlantar yang sangat rentan dengan api akibat kondisi cuaca panas. Setiap lokasi kejadian kebakaran hutan dan lahan dalam wilayah Kecamatan Dumai Barat akan dipetakan menjadi satu peta daerah rawan karhutla dan juga data-data kasus bencana kebakaran hutan dan lahan dihimpun dalam satu data kasus karhutla Kecamatan Dumai Barat.

Dari pelaksanaan inovasi SI PEKA di Kecamatan Dumai Barat, telah terekam data dalam *database* Kecamatan Tahun 2020 yaitu rekapitulasi jumlah sebaran titik panas (*hotspot*) pantauan Satelit TERRA/AQUA sebanyak 10 titik panas, dan pantauan Satelit NOAA sebanyak 20 titik panas, dan telah ditindaklanjuti dengan kegiatan pemadaman dini oleh petugas pemadaman Kecamatan/Kelurahan dan dibantu oleh BPPD Kota Dumai serta lintas sektoral lainnya. Adapun hasil dari pelaksanaan inovasi ini adalah menurunnya angka kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Dumai Barat, dan penanganan kebakaran hutan yang lebih terkendali sehingga wilayah yang

terbakar tidak bertambah luas dan tidak menimbulkan bencana kabut asap di Kota Dumai sepanjang tahun 2020.

Inovasi SI PEKA pada tahap awal pelaksanaannya menghadapi tantangan yang cukup berarti, mengingat bahwa inovasi ini memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dengan satelit, yang membutuhkan koneksi dengan server penyedia layanan untuk mendapatkan akses izin penggunaannya, serta harus didukung dengan kemampuan personil dalam penggunaan sistem GIS untuk pemetaan lokasi di lapangan. Selain itu, agar dapat berjalan secara maksimal inovasi ini harus didukung dengan sarana prasarana yang lengkap, seperti perangkat komputer yang dapat mendukung sistem GIS dan alat navigasi GPS (*Global Positioning System*). Tak kalah pentingnya adalah anggaran untuk mendukung pelaksanaan inovasi tersebut serta persoalan komunikasi agar terbentuk kesepemahaman dalam penerapan inovasi tersebut. Tentunya dalam tahap pengembangan kedua inovasi ini terdapat hal-hal yang menjadi kendala namun dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan baik sehingga inovasi ini dapat dirasakan manfaatnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan metode ini diharapkan mampu menggali data secara lebih mendalam untuk mendapatkan gambaran inovasi SI PEKA di Kecamatan Dumai Barat. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu data verbal yang merupakan informasi responden tentang pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Kecamatan Dumai Barat. Setelah data terkumpul dipisahkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Pola umum analisis dengan mengikuti Analisis Model Interaktif menurut Miles dan Huberman dengan melakukan tiga kegiatan analisis data secara menyeluruh yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan

Pemerintah Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana yang terjadi dalam wilayah kerjanya. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahunnya di Kota Dumai secara luas, dan khususnya di wilayah Kecamatan Dumai Barat menjadikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini sebagai salah satu prioritas tugas di Kecamatan Dumai Barat karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan aspek-aspek lainnya. Dengan adanya inovasi SI PEKA yang dikembangkan di Kecamatan Dumai Barat, dapat membantu pemerintah kecamatan dalam menangani permasalahan kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin, agar kebakaran hutan dapat terkendali sehingga tidak menjadi lebih besar dan meluas dan semakin sulit dalam pemadaman serta dapat menghindari dampak-dampak buruk lainnya yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai inovasi SI PEKA, maka dapat dilakukan analisis dengan teori faktor-faktor keberhasilan menurut Bugge et al, (2021), dengan atribut sebagai berikut:

Governance and Innovation

Tata kelola inovasi SI PEKA yaitu sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan dimana melalui inovasi SI PEKA dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yang diantaranya adalah melaksanakan kesiapsiagaan bencana di wilayah kecamatan, melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana meliputi tanggap darurat dan pasca bencana di wilayah kecamatan, dan menyusun peta rawan bencana

di wilayah kecamatan. Dengan inovasi SI PEKA, pelaksanaan kesiapsiagaan bencana di wilayah Kecamatan Dumai Barat dapat lebih efektif dan efisien, dan tentunya dengan adanya kesiapsiagaan bencana ini dapat membantu Pemerintah Kota Dumai dalam penanganan bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Di dalam pelaksanaan inovasi SI PEKA ini telah diatur dalam Keputusan Camat Dumai Barat Nomor: Kpts.40 Tahun 2020 Tanggal 10 Februari 2020 tentang Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Kecamatan Dumai Barat Tahun Anggaran 2020, dan juga telah menerapkan *Standart Operasional Prosedur* (SOP) yang berlaku. Dari indikator tata kelola inovasi, dapat dinyatakan bahwa pengelolaan inovasi SI PEKA di Kecamatan Dumai Barat sudah bisa dikategorikan baik.

Sources of the Ideas for Innovation

Ide ataupun konsep munculnya inovasi SI PEKA bersumber dari permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Dumai Barat yaitu wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan. Ide-ide yang bersumber dari fenomena yang dilihat, dan dari inilah yang akhirnya memunculkan suatu inovasi yang ingin mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Innovation Culture

Inovasi SI PEKA dinilai baik bagi masyarakat karena dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan bagi aparatur pemerintah kecamatan itu sendiri serta dapat mengubah budaya baru bagi masyarakat dan aparatur kecamatan yaitu budaya untuk lebih responsif dalam menangani permasalahan yang terjadi dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Dumai Barat, dengan ditundanya pemberian pelayanan administrasi pertanahan di areal kebakaran hutan dan lahan, menjadikan efek jera bagi pemilik lahan yang terbakar, dan menimbulkan kesadaran masyarakat secara umum bahwa penting untuk menjaga dan memelihara lahan milik pribadi bukan malah menelantarkan lahan yang sangat berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran.

Capabilities and Tools

Kemampuan alat-alat yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Dumai Barat sudah mendukung dan memadai untuk pengelolaan inovasi SI PEKA, meskipun dalam masih sangat terbatas dan dibantu oleh peralatan milik kelurahan. Sedangkan untuk kemampuan yang dimiliki oleh aparatur kecamatan dalam pengelolaan inovasi SI PEKA ini sudah semakin baik, karena telah dilakukan pelatihan dalam penggunaan peralatan seperti GPS dan aplikasi pemetaan melalui sistem GIS, meskipun belum maksimal.

Objective, Outcome, Drivers, and Obstacle

Tujuan dari inovasi SI PEKA adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam kesiapsiagaan bencana di wilayah kecamatan, melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana meliputi tanggap darurat dan pasca bencana di wilayah kecamatan, dan menyusun peta rawan bencana di wilayah kecamatan. Dengan SI PEKA pelaksanaan tugas tersebut dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien, dan hasilnya juga langsung dirasakan oleh masyarakat dengan pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Dumai Barat, sehingga tidak berdampak buruk yang lebih besar lagi.

Dalam hal pendorong pelaksanaan inovasi SI PEKA, peran kepemimpinan Camat sebagai inovator dalam mengembangkan inovasi ini sangat berpengaruh besar dalam mengubah organisasi kecamatan dan kelurahan menjadi lebih responsif dalam menanggapi suatu persoalan yang terjadi di masyarakat, dan menjadikan aparatur kecamatan dan kelurahan dapat berpikir secara inovatif lagi dalam mengembangkan potensi yang ada.

Meskipun dalam pelaksanaan inovasi SI PEKA ini sudah bisa berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa hambatan yang dirasakan oleh pihak Kecamatan Dumai Barat dalam pengelolaan inovasi ini, yaitu keterbatasan kemampuan aparatur

kecamatan dalam menguasai teknologi khususnya sistem GIS yang digunakan dalam pemetaan, meskipun sudah dilakukan pelatihan singkat untuk pengoperasian sistem GIS tersebut, namun dirasakan belum maksimal dan masih ketergantungan pada kemampuan satu orang sebagai operator saja, sehingga untuk itu diperlukan perlu dilakukan pelatihan khusus secara langsung ke Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia, dengan mengirimkan beberapa orang staf kecamatan dan kelurahan yang memiliki bakat dan minat serta kemampuan dalam pemetaan.

Collecting Innovation Data for Single Innovation

Inovasi SI PEKA di Kecamatan Dumai Barat merupakan inovasi tunggal yang telah direncanakan oleh pihak Kecamatan Dumai Barat itu sendiri berdasarkan pengamatan dan fenomena yang dilihat dan dirasakan sendiri, dan inovasi SI PEKA ini hanya ada di Kecamatan Dumai Barat dan tidak dimiliki oleh Kecamatan lain yang ada di Kota Dumai.

Upaya Meningkatkan Inovasi SI PEKA

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan inovasi SI PEKA ini, yaitu keterbatasan sarana prasarana seperti alat GPS atau komputer yang mendukung aplikasi pemetaan, serta keterbatasan kemampuan personil Kecamatan Dumai Barat dalam mengoperasikan sistem GIS dalam pengolahan data hotspot yang diterima oleh akun kecamatan untuk kemudian diproses dan digitasi serta proses tumpangtindih (*overlay*) dan identity data titik panas (*hotspot*) dengan batas wilayah dan data lain yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka Pemerintah Kecamatan Dumai Barat telah menganggarkan pembelian peralatan GPS dan tambahan peralatan komputer yang mendukung aplikasi pemetaan dengan versi terbaru. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan personil kecamatan dalam pengoperasian sistem GIS tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2021 pemerintah Kecamatan Dumai Barat telah menganggarkan biaya pendidikan dan pelatihan langsung ke pusat pelatihan BIG (Badan Informasi Geospasial) Republik Indonesia untuk 3 (tiga) orang staf yang dipandang memiliki minat, bakat serta kemampuan dalam mengembangkan inovasi SI PEKA ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas mengenai Inovasi SI PEKA di Kecamatan Dumai Barat, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu setelah masing-masing indikator dijelaskan maka selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa inovasi SI PEKA di Kecamatan Dumai Barat sebagai upaya dalam kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di dalam wilayah kecamatan sudah berjalan dengan cukup baik. Dalam hal *Governance and Innovation* (tata kelola inovasi), bahwa inovasi ini SI PEKA sudah terkelola dengan baik dengan adanya SK Camat dan SOP dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan; *Sources of the Ideas for Innovation* (Sumber ide-ide untuk inovasi), inovasi muncul dari fenomena yang terjadi di wilayah Kecamatan Dumai Barat yaitu Kecamatan Dumai Barat termasuk dalam wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan; *Innovation Culture* (Budaya Inovasi), inovasi ini menciptakan budaya aparatur kecamatan dan kelurahan menjadi lebih responsif dan inovatif sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi; *Capabilities and Tools* (Kemampuan dan Alat-alat) yaitu kemampuan personil kecamatan yang sudah bisa menggunakan sistem GIS secara dasar dan dukungan peralatan pendukung seperti GPS dan perangkat komputer; *Objective, Outcome, Drivers, and Obstacle* (Tujuan, hasil, Pendorong dan Penghambat) yaitu inovasi ini telah memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung dalam upaya

pengecahan kebakaran hutan dan lahan, meskipun masih ada kendala dalam pelaksanaannya; *Collecting Innovation Data for Single Innovation* (Mengumpulkan Data Inovasi untuk Inovasi Tunggal) yaitu bahwa Inovasi SI PEKA di Kecamatan Dumai Barat merupakan inovasi tunggal yang telah direncanakan oleh pihak Kecamatan Dumai Barat itu sendiri berdasarkan pengamatan dan fenomena yang dilihat dan dirasakan sendiri, dan inovasi SI PEKA ini hanya ada di Kecamatan Dumai Barat dan tidak dimiliki oleh Kecamatan lain yang ada di Kota Dumai.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terhadap kendala dalam pelaksanaan inovasi SI PEKA ini yaitu keterbatasan peralatan dan kemampuan personil yang masih kurang, maka Pemerintah Kecamatan Dumai Barat telah menganggarkan pembelian peralatan GPS dan tambahan peralatan komputer yang mendukung aplikasi pemetaan dengan versi terbaru pada Tahun Anggaran 2021. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan personil kecamatan dalam pengoperasian sistem GIS tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2021 ini juga pemerintah Kecamatan Dumai Barat telah menganggarkan biaya pendidikan dan pelatihan langsung ke pusat pelatihan yaitu BIG (Badan Informasi Geospasial) Republik Indonesia untuk 3 (tiga) orang staf yang dipandang memiliki minat, bakat serta kemampuan dalam mengembangkan inovasi SI PEKA ini.

Ucapan terima kasih

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada PT. Pertamina RU II Sungai Pakning dan Laboratorium FISIP Universitas Riau yang telah melaksanakan Seminar Nasional Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adianto, 2020, *Inovasi Sosial Praktek Adopsi Inovasi yang Memberikan Dampak Kesejahteraan*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Ancok, Djameludin, 2012. *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fathurrahman, Tarigan, 2020. *Inovasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Ideal*. Malang: Citra Intrans Selaras (Citila).
- Makmur dan Thahier, 2015. *Inovasi dan Kreativitas Manusia Dalam Administrasi dan Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi, Gedeona dan Nurafandi, 2018. *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Noor, Irwan, 2017. *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Nurharyono, Gogor Eko, et.al, 2020. *Inovasi Birokrasi: Membuat Kerja Birokrasi Lebih Bermakna*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Riris dan Robert, 2020. *Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Bogor Indonesia
- Sakanah, Winda, 2021. *Inovasi Pelayanan Kesehatan di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau*. Pekanbaru.
- Sinambela, Rochadi, dkk, 2019. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibowo, 2019. *Manajemen: Dari Fungsi Dasar ke Inovasi*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Widodo, Tri, 2020. *Inovasi Harga Mati Sebuah Pengantar Inovasi Administrasi Negara*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Yusuf, Muri, 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

RESTORASI GAMBUT BERBASIS PEMBEDAYAAN MASYARAKAT

Netalia Marliza

Program Magister Ilmu Administrasi FISIP Universitas Riau

Email: netaliamarliza5@gmail.com

Abstrak

Kebakaran merupakan masalah besar di Riau. Metode penelitian menggunakan kualitatif pendekatan deskriptif. Badan Restorasi Gambut Indonesia (BRG) menerapkan strategi 3R untuk merestorasi gambut. 3R adalah rewetting, revegetation, dan revitalization. Restorasi gambut berbasis pemberdayaan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Femanfaatan lahan gambut bisa dengan pembudidayaan perkebunan nenas dan perkebunan kelapa sawit. Restorasi melahirkan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang bertujuan untuk meningkatkan monitoring pencegahan kebakaran hutan.

Kata kunci: restorasi, lahan gambut, pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat di lahan gambut sangat penting artinya dalam menunjang keberhasilan konservasi lahan gambut. Sedikitnya terdapat tiga pertimbangan yang dapat dikemukakan. Pertama, pelestarian ekosistem gambut adalah salah bentuk kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Kedua, karena kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di lahan gambut, seringkali menjadi penyebab ketidakpedulian mereka terhadap kualitas lingkungan. Ketiga, upaya penyadaran dan penumbuhan motivasi untuk berpartisipasi dalam pelestarian lahan terbukti sulit dilakukan apabila kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi.

Kebakaran hutan di Provinsi Riau selalu terjadi setiap musim kemarau tiba, menurut laporan Badan Restorasi Gambut tahun 2016 kebakaran hutan di Provinsi Riau disebabkan oleh perubahan cuaca sedangkan menurut data Provinsi Riau, 2.6 ha hutan dan lahan terbakar pada tahun 2015-2016 dan mengakibatkan masyarakat menderita penyakit saluran pernapasan dan kerugian material (Dalam Surwano, 2017 Dinas Kehutanan, 2016). Lahan gambut merupakan lahan yang sering kali terbakar dan tidak dikelola sebagaimana mestinya, menurut (Zulkarnaini & As'ari, 2019) menjelaskan bahan lahan gambut harus dioptimalisasikan sebagai bentuk cara pandang masyarakat terhadap lahan yang tidak bisa dikelola menjadi lebih produktif.

Tahun 2016 Badan Restorasi Gambut-Kemitraan bersama Provinsi Riau membuat program bersama untuk menjaga dan memperbaiki Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) yang ada di Riau komitmen bersama dalam memperbaiki kawasan gambut. Total luasan lahan yang masuk dalam tahap restorasi di Riau 867.887 hektar areal gambut. Ada pun berbagai upaya strategis dalam merestorasi diantaranya pembangunan sumur bor, sebagaiantisipasi awal sumber air ketika mendeteksi kebakaran hutan.

Restorasi adalah tertuju pada usaha pemulihan atau perbaikan sesuatu, baik itu alam, bangunan, benda berharga, keadaan sosial, serta bermacam hal lainnya, supaya kembali ke kondisi semula. Menurut (Suharto, 2005) Pemberdayaan adalah proses yang memiliki makna dalam setiap perubahannya, Pertama Enabling menimbulkan ruang potensi untuk masyarakat dapat berkembang secara baik dan membebaskan masyarakat, kedua empowering yaitu memberikan kekuatan akan pengetahuan dan kemampuan bagi masyarakat, ketiga protecting melindungi masyarakat yang tergolong menjadi kelompok lemah untuk berdaya, keempat supporting, setiap proses pemberdayaan harus memberikan bimbingan dan dukungan kepada kelompok lemah dan terakhir adalah Fostering memelihara kondusifitas/semangat masyarakat untuk memelihara program pemberdayaan tersebut. Pendapat diatas sejalan dengan (Sidiq, 2020) yang menyebutkan pemberdayaan sebagai upaya membuka aksesibilitas bagi

masyarakat miskin untuk memanfaatkan perlindungan dan jaminan sosial dari setiap program.

Restorasi lahan gambut bukan hanya upaya memulihkan lahan yang telah rusak. Namun, program ini dapat mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan (Karlhut) di kawasan gambut. Program restorasi gambut merupakan upaya pemerintah mengembalikan lingkungan, dan mencegah Karlhut, terutama di musim kering. Saat terbakar, diakuinya, kawasan gambut berpotensi mengeluarkan karbon yang bahaya bagi kesehatan manusia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitina kualitatif fokus pada pengamatan yang mendalam. Hasil dari penelitian ini memutuhkan analisi yang mendalam. Data penelitian ini diperoleh dari pengamatan/observasi,wawancara dan dokumen. Tujuan penelitian Kualitatif adalah memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian dengan mendeskripsikan pernyataan- pernyaataan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorasi adalah suatu perbuatan atau cara untuk mengembalikan, memulihkan, memperbaiki sesuatu ke kondisi dan bentuk awalnya. Tujuan Restorasi adalah untuk memulihkan kondisi hutan yang rusak sehingga hutan tersebut kembali pada kondisi semula sehingga berfungsi sebagaimana mestinya.

Badan Restorasi Gambut Indonesia (BRG) menerapkan strategi 3R untuk merestorasi gambut. 3R adalah kepanjangan dari *rewetting*, *revegetation*, dan *revitalization*. Rewetting adalah pembasahan kembali dengan pembangunan sekat kanal, pembangunan sumur bor dan upaya lain yang mendorong basahnya lahan gambut. Sementara revegetation adalah penanaman kembali melalui persemaian, penanaman dan regenerasi alami. Sedangkan revitalization adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian, perikanan dan ekowisata.

Pemberdayaan Masyarakat dalam program restorasi gambut di Riau lahir dari seluruh lapisan masyarakat, program pemberdayaan ini juga melahirkan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang bertujuan untuk meningkatkan monitoring pencegahan kebakaran hutan.

Pemberdayaan masyarakat membuat masyarakat sadar akan kebakaran hutan. Dimusim panas lahan gambut akan mengalami rawan akan kebakaran dikarenakan banyak pihak yang tidak bertanggungjawab ingin membuka lahan dengan cara yang instan yaitu dengan membakar lahan. Dalam hal ini pihak MPA memerlukan perlengkapan dan peralatan yang memadai untuk persiapan jika ditemukan titik api dilahan gambut.

Lahan gambut juga bisa dimanfaatkan sebagai wadah budidaya buah nenas yang bisa diproduksi menjadi makanan.



Gambar 1. Perkebunan nenas



Gambar 2. Perkebunan kelapa sawit

Sumber : <https://www.pupuksawit.web.id/2016/01/8-cara-pengelolaan-kebun-kelapa-sawit-pada-lahan-gambut.html>

Lahan gambut punya peranan penting dilihat dari segi ekonomi dan ekologi. Dalam melakukan budidaya tanaman sawit diperlukan pertimbangan yang matang apakah lahan tersebut sesuai untuk kelapa sawit.

KESIMPULAN

Lahan gambut di Indonesia merupakan ekosistem yang sangat penting, oleh karenanya perlu dikelola secara berkelanjutan. Masyarakat melakukan restorasi gambut berbasis pemberdayaan masyarakat melalui upaya menanam lahan gabut dengan tanaman yang cocok, perkebunan nenas dan kelapa sawit dibisa menjadi contoh dalam pembudidayaan dilahan gambut. Badan Restorasi Gambut Indonesia (BRG) menerapkan strategi 3R untuk merestorasi gambut. 3R adalah kepanjangan dari *rewetting*, *revegetation*, dan *revitalization*. Rewetting adalah pembasahan kembali dengan pembangunan sekat kanal, pembangunan sumur bor dan upaya lain yang mendorong basahnya lahan gambut. Sementara revegetation adalah penanaman kembali melalui persemaian, penanaman dan regenerasi alami. Sedangkan revitalization adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian, perikanan dan ekowisata.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.infosawit.com/news/4720/bpbd-rohul-dukung-restorasi-gambut>
<https://www.pupuksawit.web.id/2016/01/8-cara-pengelolaan-kebun-kelapa-sawit-pada-lahan-gambut.html>
Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia. (2016). *Rencana Strategis Restorasi Gambut 2016-2020*. Jakarta.
Gambut, B. R. (2016). Laporan Tahunan Mengawali Restorasi Gambut Indonesia. Badan RestorasiGambut.

KARAKTERISTIK SPASIAL DAN TEMPORAL KEBAKARAN LAHAN GAMBUT DI KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT (KHG) PULAU RANGSANG

Nur Hidayati, Sigit Sutikno, Nurul Qomar

Program Studi Pascasarjana Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Riau, Pekanbaru

Email: nur.hidayati6965@grad.unri.ac.id

Abstrak

KHG Pulau Rangsang merupakan lahan gambut yang berada di wilayah kepulauan dan memiliki peran ekologis yang sangat penting, namun memiliki tingkat kerawanan terhadap kekeringan yang dapat mengakibatkan peningkatan kejadian kebakaran. Mengingat sangat sulitnya kebakaran lahan gambut untuk dipadamkan, upaya pencegahan kebakaran sebaiknya mengambil pembelajaran dan sejarah terjadinya kebakaran yang hampir setiap tahun terjadi, dengan analisis karakteristik kejadian kebakaran lahan gambut dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh secara spasial dan temporal. Salah satu metode analisa karakteristik kebakaran yaitu dengan menggunakan data titik panas (*hotspot*) MODIS dengan satelit Terra dan Aqua bulanan dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) >60% selama kurun waktu 20 tahun (2001–2020). Data *hotspot* digunakan sebagai data awal untuk menentukan periode kejadian kebakaran. Analisis data *hotspot* secara temporal menghasilkan 2 periode kejadian kebakaran yaitu Periode I dan Periode II yang masing-masing terjadi pada bulan Januari–April dan bulan Juni–Oktober. Data hasil analisis *hotspot* tersebut di tumpang-susunkan dengan teknik *on-off layer* citra Landsat yang sebelumnya telah dilakukan *composite band* untuk dilakukan proses *deleniasi* dengan menggunakan GIS (*Geographic Information System*). Hasil *deleniasi* tersebut dijadikan dasar untuk memperoleh karakteristik kebakaran lahan gambut pada KHG Pulau Rangsang. Pada penelitian ini menunjukkan total luasan areal kebakaran terparah terjadi pada tahun 27.714,96 Ha yang terjadi pada tahun 2005 dengan durasi kebakaran terlama yaitu selama 44 hari yang terjadi di Periode I dengan laju kebakaran sebesar 4.456,17 Ha/hari.

Kata kunci: kebakaran, titik panas (*hotspot*), satelit MODIS, citra landsat, spasial dan temporal

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki lahan gambut tropis yang terbesar di kawasan tropika yaitu sekitar 21 juta ha. Saat ini degradasi lahan gambut di Indonesia telah terjadi dalam skala besar, sehingga hanya tersisa kurang dari 4% lahan gambut yang masih asli (*pristine peat swamp forest*) yang selalu tergenang sepanjang tahun, sementara 37% lainnya sudah mengalami degradasi dengan berbagai tingkatan. Selanjutnya, lebih dari 20% lahan gambut di Indonesia dalam kondisi sebagai lanskap terdegradasi yang tidak dikelola (Koh et al., 2011). Penyebab utama terjadinya degradasi pada lahan gambut yaitu terjadinya kebakaran lahan yang hampir disetiap tahun dan dalam skala besar yang merupakan permasalahan serius yang sulit untuk diatasi.

Sejarah membuktikan bahwa hanya hujan yang mampu memadamkan api ketika terjadi kebakaran lahan gambut. Akibatnya kondisi lahan gambut hampir di seluruh kawasan Sumatera khususnya di Provinsi Riau sudah tertekan dan berubahnya fungsi lahan. Tertekan dalam artian bahwa lahan gambut tersebut telah terbakar berulang kali, bahkan lebih dari 3 kali yaitu 7 hingga 10 kali. Mengingat sangat sulitnya kebakaran lahan gambut untuk dipadamkan, pencegahan kejadian kebakaran lahan menjadi sangat serius untuk digalakkan. Rekomendasi upaya pencegahan sebaiknya dari pembelajaran dan sejarah terjadinya kebakaran yang hampir setiap tahun terjadi, agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan pasca kebakaran lahan gambut yaitu dengan melakukan analisis data titik panas (*hotspot*) dengan menggunakan satelit penginderaan jauh yaitu MODIS Terra/Aqua.

KHG Pulau Rangsang merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut yang berada di daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut atau disebut juga dengan

gambut pesisir/kepulauan. Lahan gambut yang berada di wilayah kepulauan memiliki peran ekologis yang sangat penting sebagai penyimpan karbon, penyimpanan air, konservasi biodiversitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Lahan gambut kepulauan memiliki tingkat kerawanan terhadap kekeringan yang dapat mengakibatkan peningkatan kejadian kebakaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi areal bekas terbakar pada lahan gambut di KHG Pulau Rangsang secara spasial dan temporal dengan menggunakan data citra satelit Landsat dengan melakukan deleniaasi selama kurun waktu 20 tahun (2001–2020). Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data terkait karakteristik kebakaran lahan gambut yang ada di KHG Pulau Rangsang diantaranya yaitu luasan areal bekas terbakar, durasi kebakaran dan laju kebakaran. Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran dan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan upaya penanggulangan kebakaran lahan gambut di KHG Pulau Rangsang, agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

METODE

Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi fokus penelitian ini yaitu wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Pulau Rangsang yang terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan dugaan bahwa KHG Pulau Rangsang mengalami pengatusan lebih cepat karena memiliki *catchment area* yang kecil dan dibatasi oleh laut, menyebabkan air cepat mengalir ke laut, sehingga mudah kering dan cepat terbakar.

Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa data satelit yang mencakup wilayah KHG Pulau Rangsang dengan rincian data sebagai berikut:

a. Hotspot MODIS Terra/Aqua

Data *hotspot* yang diperoleh dari sensor MODIS (Terra dan Aqua) dengan selang kepercayaan (*confidence level*) >60%. Pemilihan tingkat kepercayaan >60% pada data *hotspot* berdasarkan pada metode perekaman yang dilakukan oleh satelit Terra dan Aqua, dimana suatu *hotspot* di wilayah tertentu telah dilalui dan direkam secara bergantian oleh kedua satelit tersebut yaitu satelit Terra dan Aqua (Prayoga et al., 2017). Data *hotspot* yang digunakan mencakup wilayah KHG Pulau Rangsang dengan rincian data sebagai berikut:

- Resolusi temporal : Siang & malam (16 hari)
- Sensor satelit : Terra MODIS/Aqua MODIS
- Penyedia : *Fire Information for Resource Management System*, NASA (FIRMS, NASA)
- Produk : FIRMS MODIS *Fire Archive*
- Rentang waktu : Tahun 2001–2020
- Sumber : NASA <https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/download>

LAPAN (2016) membagi tingkat kepercayaan dalam informasi data *hotspot* yang ditampilkan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Arti tingkat kepercayaan dalam informasi data *hotspot*

Tingkat Kepercayaan (C)	Kelas	Tindakan
$0\% \leq C < 30\%$	Rendah	Perlu diperhatikan
$30\% \leq C < 80\%$	Nominal	Waspada
$80\% \leq C \leq 100\%$	Tinggi	Segera penanggulangan

(Sumber: LAPAN, 2016)

b. Data Citra Landsat

Setelah diidentifikasi periode-periode kejadian kebakaran lahan, selanjutnya dikumpulkan data citra satelit Landsat pada masing-masing kondisi yaitu sebelum dan sesudah terjadinya kebakaran pada pada tiap periode kejadian kebakaran. Penelitian ini menggunakan citra Landsat generasi II diantaranya yaitu:

- a. Landsat-5 TM (*Thematic Mapper*)
- b. Landsat-7 ETM+ (*Enhanced Thematic Mapper+*)
- c. Landsat-8 OLI/TIRS (*Onboard Operational Land Imager/Thermal Infrared Sensor*)

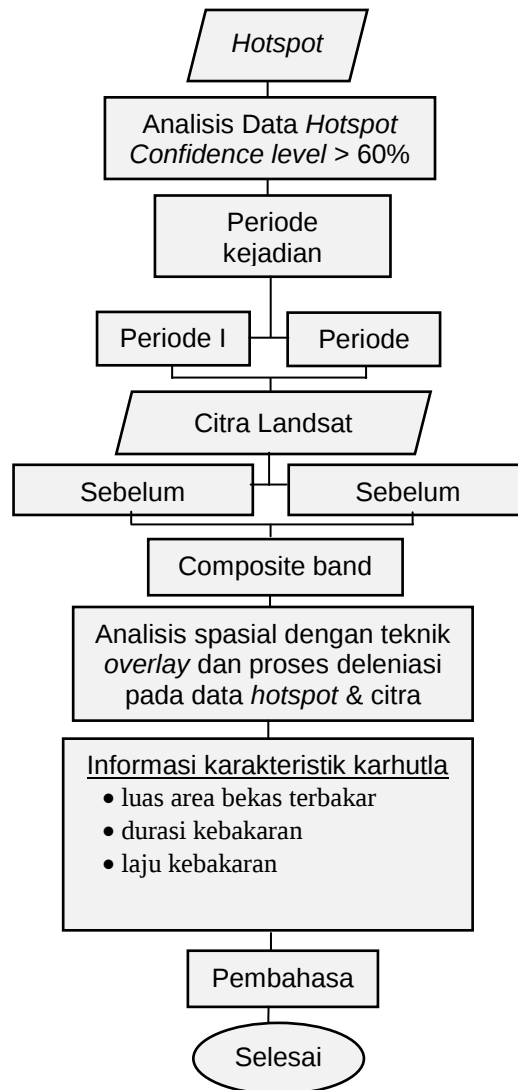
Penelitian ini menggunakan berbagai jenis citra Landsat dengan alasan ketersediaan data pada tahun atau periode yang diinginkan. Pada tahun 2001 hingga tahun 2012 menggunakan citra Landsat 5/7, sedangkan pada tahun 2013 hingga tahun 2020 menggunakan citra Landsat 8. Masing-masing citra satelit Landsat tersebut memiliki resolusi spasial yang cukup baik yaitu 30 meter untuk analisis terkait dengan perubahan fenomena alam, serta resolusi temporal 16 harian. Citra Landsat tersebut berasal dari USGS (*United States Geological Survey*) yang dapat diunduh pada *website* (<http://earthexplorer.usgs.gov/>)

Pada Penelitian ini analisis spasial difokuskan pada lokasi poligon dengan kerapatan titik (*point density*) pada data *hotspot*, selanjutnya dilakukan deleniasi pada objek yang diduga sebagai areal bekas terbakar (Elvidge & Baugh, 2014; Candra & Kustiyo, 2014).

Analisis spasial dilakukan dengan menggunakan GIS (*Geographic Information System*) kemudian diolah menggunakan metode *image processing* dengan cara melakukan *overlay* pada data *hotspot* dan data satelit Citra Landsat untuk mendapatkan penyebaran dan *trend* kejadian kebakaran lahan gambut dari tahun ke tahun. Dengan menggunakan GIS juga didapat data-data karakteristik kebakaran seperti luas areal bekas terbakar, durasi kebakaran, laju kebakaran dan lokasi kebakaran untuk masing-masing periode kejadian kebakaran.

Proses identifikasi karakteristik kejadian kebakaran dilakukan dengan mengkombinasikan 3 kanal (*band*), diantaranya untuk kombinasi band citra Landsat-5 TM dan Landsat-7 ETM adalah 321 dan 543. Sedangkan pada citra Landsat-8 OLI/TIRS menggunakan kombinasi band 753 dan 654. Areal bekas terbakar dapat digambarkan sebagai kenampakan objek yang berwarna merah kehitaman atau coklat, terdapat perubahan kenampakan pada citra Landsat pada periode sebelum terjadinya kebakaran. Indikasi luas areal yang terbakar dihasilkan dengan digitasi yang dilakukan secara visual dengan citra Landsat terhadap titik panas (*hotspot*) yang mengelompok.

Proses deleniasi dilakukan dengan menggunakan vektor poligon pada GIS (*Geographic Information System*) dengan cara mengetahui perubahan kondisi tutupan lahan pada saat sebelum dan sesudah terjadinya kebakaran pada lokasi yang terdapat titik panas. Penelitian ini menggunakan metode yang dijelaskan secara ringkas dalam bagan alir yang ditunjukkan pada Gambar 1. Proses deleniasi pada GIS dengan menggunakan teknik *on-off layer* citra Landsat seperti yang dimaksud dalam Gambar 1, bertujuan untuk memudahkan melihat perubahan kondisi tutupan lahan yang telah dikombinasikan RGB (*Red Green Blue*) yang diindikasikan oleh perubahan warna dari kehijauan menjadi kemerahan bahkan kehitaman (LAPAN, 2015).



Gambar 1. Bagan alir analisis karakteristik areal bekas kebakaran hutan dan lahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

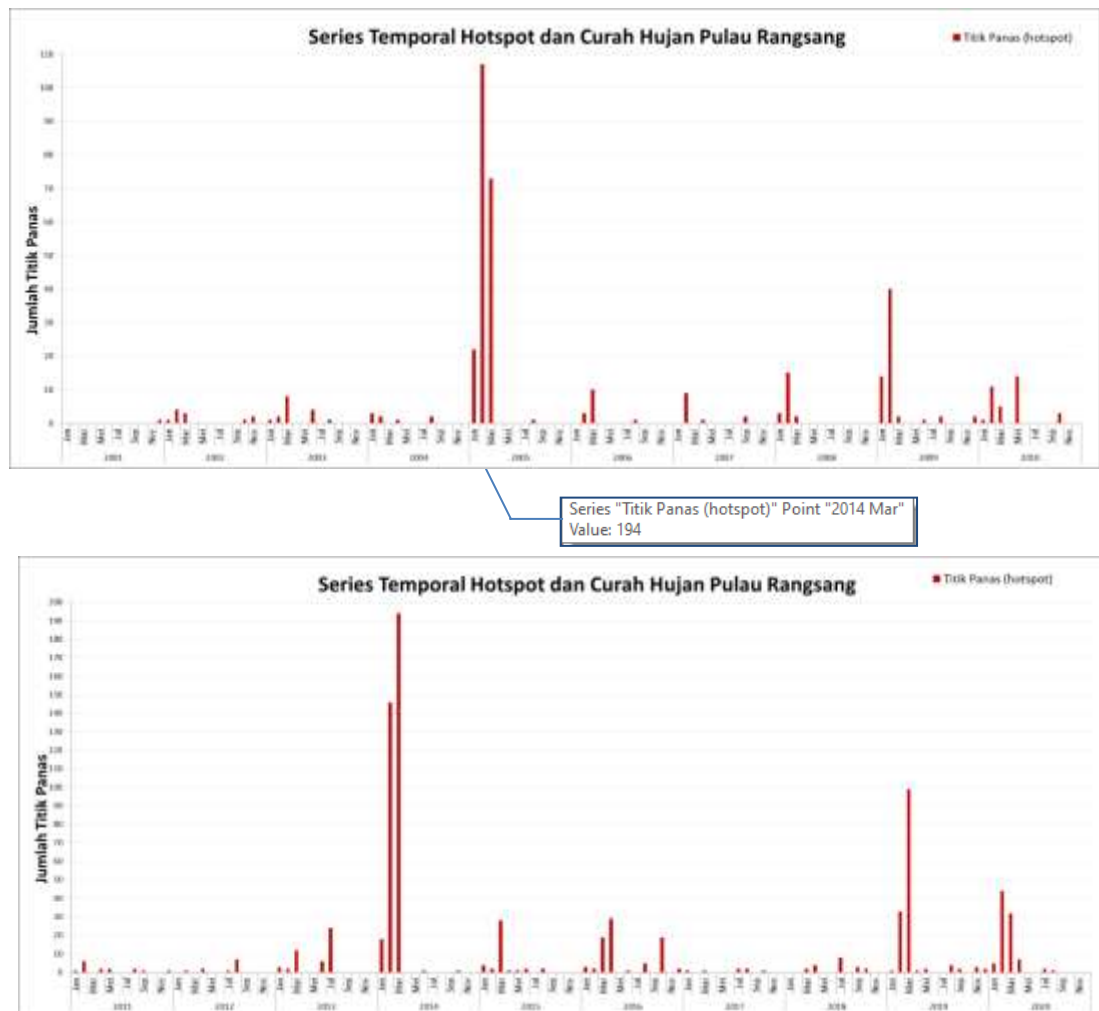
Analisis Sebaran Data Hotspot

Hotspot merupakan suatu indikator yang ada pada suatu tempat yang dapat diartikan sebagai daerah yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah disekitarnya berdasarkan ambang batas suhu tertentu yang terpantau oleh satelit penginderaan jauh (LAPAN, 2014). Hasil pemetaan spasial dengan kumulatif data titik panas selama kurun waktu 20 tahun di KHG Pulau Rangsang dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Visualisasi *hotspot* KHG Pulau Rangsang tahun 2001-2020

Pada Gambar 2 tersebut dapat dilihat posisi sebaran *hotspot* cenderung berada di wilayah pesisir pulau Rangsang. Sebaran data titik panas *hotspot* yang berulang dan bergerombol pada suatu lokasi dapat dijadikan sebagai penanda adanya kejadian kebakaran (LAPAN, 2016). Sebaran data *hotspot* di KHG Pulau Rangsang secara temporal dari tahun 2001 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar. 3 di bawah ini.



(a) Data Hotspot MODIS tahun 2001-2010

(b) Data Hotspot MODIS tahun 2011-2020

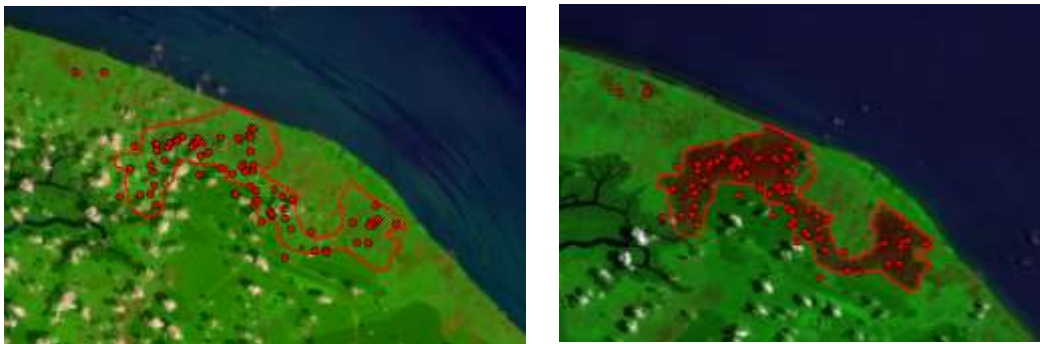
Gambar 3. Grafik time series data hotspot bulanan di KHG Pulau Rangsang

Pada grafik yang tersaji pada Gambar 3, terlihat adanya titik hotspot melalui pantauan satelit MODIS selama kurun waktu 20 tahun cenderung mengalami naik-turun. Terlihat bahwa pada setiap tahunnya KHG Pulau Rangsang mengalami dua kali kejadian kebakaran dalam setahun. Jumlah deteksi hotspot tertinggi terlihat pada bulan Maret tahun 2014 yang mencapai 194 *hotspot*. Deteksi *hotspot* yang terpantau oleh satelit MODIS dimulai pada tahun 2001–2020 berada pada bulan Januari hingga bulan April disebut sebagai Periode I yang berhubungan dengan jatuhnya musim kemarau di Provinsi Riau. Namun pada bulan Juni hingga bulan Oktober jumlah *hotspot* relatif menurun, periode ini disebut dengan Periode II. Banyaknya jumlah *hotspot* sangat dipengaruhi dengan intensitas curah hujan yang terjadi pada suatu wilayah tersebut.

Analisis Karakteristik Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut

Penentuan fokus wilayah pengamatan berdasarkan pada informasi sebaran data *hotspot* yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses identifikasi areal

bekas terbakar pada citra Landsat. Kenampakan *hotspot* dan areal kebakaran di KHG Pulau Rangsang pada citra Landsat dapat dilihat pada Gambar 4 berikut. Selain dipengaruhi oleh karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar, sebaran titik panas diduga mengikuti pola tertentu yang sangat berhubungan dengan kondisi tutupan lahan (Setiawan et al, 2017). Hasil digitasi digambarkan dengan polygon berwarna merah yang dilakukan terhadap citra Landsat 8 dengan kombinasi band 753 untuk periode kebakaran tahun 2020. Proses deleniasi secara visual dilakukan dengan menarik garis poligon yang merupakan daerah bekas terbakar dan sebelum terbakar.



Gambar 4. Kenampakan *hotspot* dan areal bekas terbakar KHG Pulau Rangsang

Kebakaran hutan dan lahan terjadi akibat adanya unsur dan perilaku api yang dipengaruhi oleh beberapa faktor alam, yaitu bahan bakar, iklim/cuaca, dan topografi. Perilaku kebakaran merupakan dasar dalam mempelajari dampak kebakaran lahan terhadap lingkungan sebagai penilaian kerusakan yang ditimbulkan serta menentukan strategi dalam penentuan upaya pengendaliannya (Syaufina, 2008). Data *hotspot* yang telah dianalisis bertujuan untuk mengetahui *trend* sebaran *hotspot* pada tiap tahunnya. Selanjutnya, dilakukan deleniasi areal kebakaran berdasarkan citra Landsat yang sesuai dengan data titik panas (*hotspot*) pada periode tertentu. Gambar 5 merupakan salah satu hasil analisis secara spasial pada areal bekas terbakar dan sebelum terbakar pada tahun 2005 berdasarkan citra Landsat 5 dengan teknik *on-off layer* yang telah dilakukan kombinasi pada band 543. Gambar 5 menjelaskan bahwa pada bulan Maret di tahun 2005 tutupan lahan pada poligon KHG Pulau Rangsang masih berupa vegetasi hijau dan kebakaran yang ada belum meluas, sedangkan pada analisis citra bulan Mei tahun 2005 terlihat jelas bahwa adanya penambahan areal bekas terbakar.



Gambar 5. Perubahan luas areal terbakar di KHG Pulau Rangsang

Berdasarkan hasil tumpang susun dan deleniasi visual dengan menggunakan *software* Arc GIS 10.3 yang menghasilkan Gambar 5 di atas, maka diperoleh areal bekas terbakar terparah dengan luasan yang mencapai 27.714,96 Ha yang terjadi pada tahun 2005 dengan durasi kebakaran terlama yaitu selama 44 hari yang terjadi di Periode

kebakaran pertama dengan laju kebakaran sebesar 4.456,17 Ha/hari. Selanjutnya, karakteristik kejadian kebakaran yang terkait dengan luas areal bekas terbakar, durasi kebakaran dan laju kebakaran selama kurun waktu 20 tahun disajikan dalam Tabel 2.

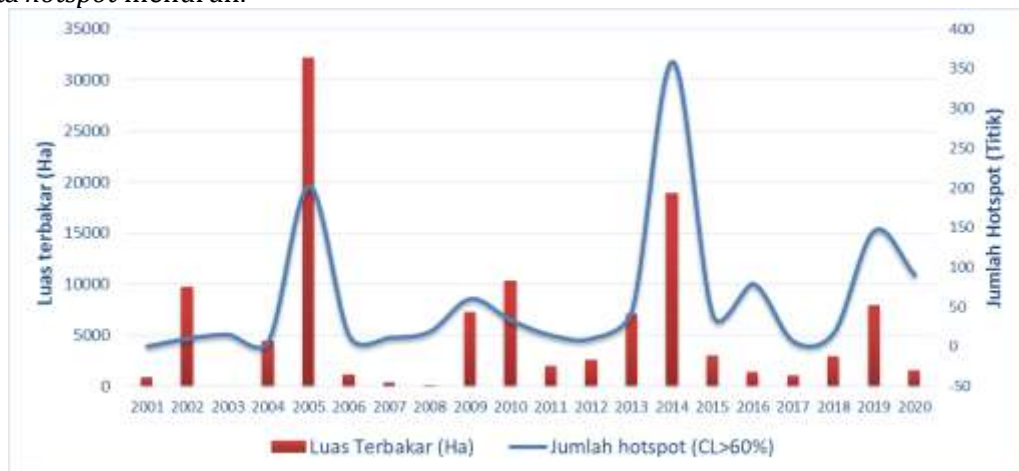
Tabel 2 menggambarkan total luas areal kebakaran yang terjadi pada KHG Pulau Rangsang dalam kurun waktu 20 tahun mencapai 114.982,71 ha. Luas kebakaran lahan di KHG Pulau Rangsang cenderung mengalami penurunan seiring dengan upaya pemerintah pusat serta daerah dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut yang kian membaik. Sebaran luas areal bekas terbakar yang cenderung berada di wilayah pesisir KHG Pulau Rangsang dan terjadi pada bulan Januari hingga April tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam mengambil keputusan terkait upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut.

Tabel 2. Karakteristik areal bekas terbakar di KHG Pulau Rangsang hasil deleniasi citra Landsat tahun 2001–2020

Tahun	Periode Kebakaran	Luas Area Kebakaran	Durasi Kebakaran	Laju Kebakaran
		(Ha)	(hari)	(Ha/hari)
2001	I	878,10	1	878,10
	II	0,00	0	0,00
2002	I	6470,36	6	1078,39
	II	3239,74	2	1619,87
2003	I	0,00	5	0,00
	II	0,00	3	0,00
2004	I	2845,11	5	569,02
	II	1594,96	2	797,48
2005	I	27714,96	44	629,89
	II	4456,17	1	4456,17
2006	I	1134,08	4	283,52
	II	0,00	0	0,00
2007	I	272,44	3	90,81
	II	147,96	3	49,32
2008	I	164,83	6	27,47
	II	0,00	0	0,00
2009	I	1211,13	13	93,16
	II	6022,89	5	1204,58
2010	I	1607,55	12	133,96
	II	8769,37	5	1753,87
2011	I	460,34	7	65,76
	II	1558,89	5	311,78
2012	I	449,34	2	224,67
	II	2154,44	6	359,07
2013	I	689,24	8	86,15
	II	6382,84	9	709,20
2014	I	13332,29	28	476,15
	II	5561,76	2	2780,88
2015	I	1587,64	13	122,13
	II	1408,61	5	281,72
2016	I	837,39	23	36,41
	II	532,24	5	106,45
2017	I	68,65	2	34,33
	II	1008,22	4	252,06
2018	I	2292,21	4	573,05
	II	653,12	7	93,30
2019	I	2511,82	19	132,20
	II	5423,37	9	602,60
2020	I	1364,71	23	59,34
	II	175,95	7	25,14
Jumlah		114982,71	308	20998,01

Keterkaitan Karakteristik Kebakaran di KHG Pulau Rangsang

Dari analisis yang dilakukan selama kurun waktu 20 tahun, dengan menggunakan bantuan citra Landsat, hubungan antara luas area kebakaran terhadap banyaknya jumlah *hotspot*, durasi kebakaran dan laju kebakaran adalah signifikan. Hal tersebut berarti bahwa banyaknya jumlah *hotspot* dan durasi kebakaran terhadap luas areal bekas terbakar dan laju kebakaran. KHG Pulau Rangsang mengalami kondisi kering yang mengakibatkan terjadinya kebakaran gambut pada periode I. Pada **Gambar 6** menunjukkan bahwa luas area kebakaran meningkat setelah jumlah *hotspot* juga meningkat. Grafik pada Gambar 6 tersebut dapat dilihat bahwa pola luas area kebakaran akan mengikuti pola data *hotspot*. Luas area kebakaran akan menurun saat intensitas data *hotspot* menurun.

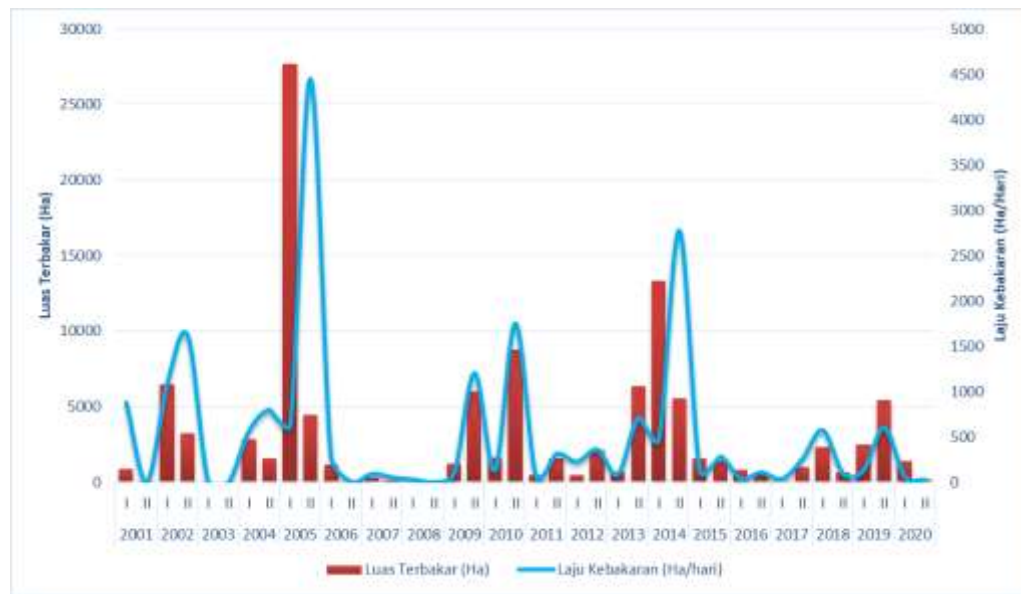


Gambar 6. Grafik hubungan luas areal kebakaran dan jumlah *hotspot*



Gambar 7. Grafik hubungan luas areal kebakaran dan durasi kebakaran

Selain hubungan luas areal kebakaran dan jumlah *hotspot*, terdapat juga hubungan antara luas areal kebakaran dan durasi kebakaran yang dapat dilihat pada **Gambar 7** di atas. Grafik tersebut menjelaskan bahwa hubungan durasi kebakaran dan luas areal kebakaran adalah berbanding lurus, dimana semakin lama jumlah hari terbakar maka semakin bertambah pula luas areal kebakaran yang terjadi di KHG Pulau Rangsang.



Gambar 8. Grafik laju kebakaran lahan di KHG Pulau Rangsang (2001-2020)

Kejadian kebakaran yang terparah di tahun 2005 dapat mengindikasikan bahwa titik panas (*hotspot*) yang meningkat sejak awal tahun 2001 yang diperparang dengan durasi kebakaran terlama selama kurun waktu 20 tahun yaitu 44 hari. Berdasarkan hasil analisis durasi kebakaran yang disajikan pada **Gambar 8**, yaitu bertambahnya luas kebakaran berbanding lurus dengan lamanya durasi kebakaran. Laju kebakaran mengalami penurunan sejak 5 tahun terakhir menandakan adanya keberhasilan pemerintah maupun *stakeholder* dalam upaya pencegahan kebakaran lahan gambut dan pemulihan lahan gambut yang terbakar.

KESIMPULAN

Analisis pemantauan area bekas terbakar pada lahan gambut di KHG Pulau Rangsang dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, yang memanfaatkan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Metode deleniasi yang digunakan pada penelitian ini masih memiliki beberapa kendala diantaranya yaitu kendala tutupan awan pada citra Landsat dan adanya *haze*, selain itu ketersediaan data citra Landsat dengan resolusi temporal 16 hari harus disesuaikan dengan kejadian kebakaran yang ada. Analisis data penelitian ini menggunakan data satelit yang merupakan sumber data yang memiliki kekurangan, salah satunya yaitu tutupan awan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonn. A, T. Allott, M. Evans, H. Joosten, and R. Stoneman, "Peatland restoration and ecosystem services: Nature-based solutions for societal goals," *Peatl. Restor. Ecosyst. Serv. Sci. Policy Pract.*, no. July 2018, pp. 402–417, 2016.
- B. Wasis, E. I. Putra, and B. H. Saharjo, "Impacts of peat fire on soil flora and fauna, soil properties and environmental damage in Riau Province , Indonesia," *B I O D I V E R S I T A S*, vol. 20, no. June, pp. 1770–1775, 2019.
- Candra. D.S.. Kustiyo. 2014. Near Real Time Detection of Burned Scar Area Using Landsat-8 Imageries. GOF-C-GOLD GHG Workshop Vietnam. Vietnam
- D. Murdiyarso, K. Hergoualc'h, and L. V. Verchot, "Opportunities for reducing greenhouse gas emissions in tropical peatlands," *Proc. Natl. Acad. Sci.*, Vol 107 No 46, pp. 19655–19660, 2010.
- Elvidge. C.D.. K. Baugh. 2014. Burn Scar Mapping from Landsat 8. Sumber Daring

- G. E. . B. Susilo, K. . Yamamoto, T. . Imai, Y. . Ishii, H. . Fukami, and M. . Sekine, "The effect of ENSO on rainfall characteristics in the tropical peatland areas of Central Kalimantan, Indonesia," *Hydrol. Sci. J.*, vol. 58, no. 3, pp. 539–548, 2013.
- J. Holden, M. G. Evans, T. P. Burt, and M. Horton, "Impact of Land Drainage on Peatland Hydrology," *J. Environ. Qual.*, 2006.
- J. Jaenicke, H. Wösten, A. Budiman, and F. Siegert, "Planning hydrological restoration of peatlands in Indonesia to mitigate carbon dioxide emissions," *Mitig. Adapt. Strateg. Glob. Chang.*, vol. 15, no. 3, pp. 223–239, 2010.
- Kayama, M., K. Takahashi and S.H. Limin, 2000, water Balance of a peat swamp forest in the upper catchment of Sebangau River. Proc. Int. Symp. On Tropical Peatlands. *Siraduate school of environmental earth sciences Hokkaido University-RDC for Biology LIPI, Bogor.*
- L. P. Koh, J. Miettinen, S. C. Liew, and J. Ghazoul, "Remotely sensed evidence of tropical peatland conversion to oil palm," *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.*, vol. 108, no. 12, pp. 5127–32, 2011.
- [LAPAN] Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. 2016. Informasi Titik Panas (*Hotspot*) Kebakaran Hutan/Lahan. Jakarta.
- M. Osaki and N. Tsuji, *Tropical Peatland Ecosystems*. Sapporo: Springer Tokyo Heidelberg New York Dordrecht London, 2015.
- M. Simil, K. Aapala, and J. Penttinen, *Ecological restoration in drained peatlands*. Helsinki: Metsähallitus – Natural Heritage Services.
- Purbowaseso, B. 2004. Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan. Rineka Cipta. Jakarta.
- Syaufina. 2008. Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia . Bayumedia Publishing. Malang.
- S. Sutikno, A. Sandhyavitri, M. Haidar, and K. Yamamoto, "Shoreline Change Analysis of Peat Soil Beach in Bengkalis Island Based on GIS and RS," *Int. J. Environ. Sci. Dev.*, Vol 7 No 12, 2016. W. Giesen and E. Nirmala, "Tropical Peatland Restoration Report : the Indonesian case," 2018.

PEMETAAN LAHAN GAMBUT RAWAN KEBAKARAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SUNGAI PAKNING RIAU

Parasian Manurung

Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru

Email: parasianmanurung294@gmail.com

Abstrak

Provinsi Riau salah satu daerah penyumbang asap di Indonesia. Menurut Data kebakaran hutan dan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sekitar 49 Ribu Hektar lahan di Provinsi Riau terbakar pada tahun 2019. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau terjadi saat musim kemarau setiap tahunnya, hal ini mendapat perhatian publik dan ditetapkan sebagai bencana Nasional oleh Negara. Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan 80% lahan di Provinsi Riau merupakan lahan gambut. Selain itu, factor lainnya adalah tradisi “merun” atau tradisi yang digunakan masyarakat local ketika membuka lahan pertanian dengan cara dibakar. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak dari tradisi mereka menyebabkan semakin banyaknya musibah kebakaran di wilayah ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif. Setelah penelitian lapangan strategi mitigasi yang dilakukan masyarakat Kelurahan Sungai Pakning dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan di daerah mereka yaitu bekerjasama dengan PT. Pertamina RU II Sungai Pakning membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA) sebagai wadah komunikasi MPA ditingkat Kecamatan, peningkatan inovasi sumur hidran, membangun embung penampungan air dan memaksimalkan lahan kosong sebagai lahan pertanian nanas dan Arboretum Gambut.

Kata Kunci: strategi mitigasi, Karhutla, pemberdayaan masyarakat.

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan konsumsi beras, namun hal ini belum diimbangi dengan peningkatan produksi padi. Dalam sepuluh tahun terakhir, produksi komoditas pangan bertumbuh secara berfluktuatif karena dipengaruhi berbagai faktor, antara lain konversi lahan pertanian ke nonpertanian, keterbatasan lahan untuk perluasan areal, infrastruktur pertanian yang belum memadai, anomali iklim, dan fluktuasi harga. Selama periode 2015-2018 kenaikan produksi padi mengalami peningkatan mencapai 3,28%/tahun. Peningkatan produksi ini didukung oleh peningkatan luas panen sebesar 4,27%/tahun. Peningkatan ini lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan luas panen pada tahun 2016 yang mencapai 7,36%/tahun. Pada tahun 2018 peningkatan luas panen hanya sebesar 1,79%. Bertambahnya luas panen berhubungan erat dengan peningkatan luas tanam. Pada tahun 2018, program Upaya Khusus yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian berhasil meningkatkan luas panen sebesar 5,5% atau sekitar 18,27 juta ha dari capaian 2017 seluas 17,32 juta ha.

Salah satu alternatif dan upaya untuk mengatasi permasalahan keterbatasan luas lahan, antara lain dengan memaksimalkan potensi lahan yang ada dan optimalisasi pengelolaan potensi lahan gambut. Indonesia menempati posisi negara keempat setelah Kanada, Uni Soviet, dan Amerika Serikat yang memiliki potensi lahan gambut yang luas. Luas lahan gambut di Indonesia diperkirakan mencapai 14,95 juta hektare berada di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua serta sebagian kecil di Sulawesi. Kondisi di Pulau Jawa, dengan kepadatan penduduk yang tinggi telah mengakibatkan semakin masifnya proses alih fungsi lahan pertanian subur yang selama ini memasok sekitar 60% kebutuhan pangan penduduk. Oleh karena itu, perlu memikirkan pemanfaatan potensi lahan gambut untuk pembangunan pertanian di Indonesia agar di masa yang akan datang diharapkan bisa menjadi pendukung lumbung pangan Indonesia. Hal tersebut cukup beralasan, bahwasanya Indonesia sebagai negara tropis di Asia memiliki lahan gambut terbesar. Lahan gambut di Indonesia, dengan luas area sekitar 21 juta ha,

tersebar di beberapa pulau yaitu di Sumatera (6,24 juta ha), Kalimantan (5,07 juta ha), Papua (7,01 ha), dan sisanya berkisar 2,68 juta ha. Berdasarkan hasil analisis potensi lahan yang dilakukan BBSDLP (2014), dari sekitar 14,99 juta ha (74,96%) lahan gambut memiliki potensi seluas 3,17 juta ha (15,84%) untuk tanaman pangan dan sekitar 1,84 juta ha (9,20%) dapat dimanfaatkan untuk tanaman tahunan (kelapa, kelapa sawit, dan karet). Lahan gambut yang dapat digunakan untuk pertanian dan perkebunan hanya di bagian yang subur dengan ketebalan kurang dari 1 m (Wildayana 2015). Sedangkan, gambut sangat dalam (>3 m) memiliki tingkat kesuburan yang sangat rendah dan berfungsi untuk menjaga kualitas lingkungan sehingga lebih direkomendasikan sebagai lahan konservasi agar tidak merusak lingkungan. Pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan pertanian banyak menimbulkan kontroversi.

Kebakaran hutan dan lahan dewasa ini mampu mencuri perhatian pemerintah, sehingga pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu bencana nasional yang memerlukan perhatian khusus dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan setiap tahun terjadi di Indonesia, hal ini diakibatkan dari berbagai factor salah satunya adalah beberapa wilayah di Indonesia memiliki lebih dari 80% struktur tanah gambut seperti Provinsi Riau. Provinsi Riau salah satu daerah penyumbang asap di Indonesia. Menurut Data kebakaran hutan dan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sekitar 49 Ribu Hektar lahan di Provinsi Riau terbakar pada tahun 2019 (Sumber: <http://sipongi.menlhk.go.id>).

Kebakaran umumnya disebabkan dua hal, secara sengaja dan tidak sengaja. Kebakaran secara sengaja biasanya dipicu oleh pembakaran untuk membuka lahan dan eksploitasi sumber daya alam dengan cara instan. Sedangkan kebakaran secara tidak sengaja lebih disebabkan oleh cuaca panas, tindakan kelalain seperti membakar sampah dan puntung rokok atau merun yang merupakan tradisi masyarakat sekitar dalam membuka lahan pertanian. "Merun" merupakan tradisi masyarakat Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis yang dilakukan sejak zaman nenek moyang mereka terdahulu.

Merun adalah proses pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar. Masyarakat berpendapat dengan memerun tanah gambut yang secara struktur susah dijadikan lahan pertanian menjadi subur ketika diperun. Kurangnya pengawasan masyarakat pada saat membakar lahan menjadi peluang terjadinya kebakaran yang lebih besar. Hingga saat ini tradisi "memerun" sudah dilarang oleh pihak berwajib karena berpeluang meluas, walaupun masyarakat sendiri mengakui masih sulit untuk meninggalkan tradisi tersebut. Selain itu, menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi, penyebab kebakaran hutan dan lahan di Riau lebih besar disebabkan oleh factor kesengajaan membakar hutan dan lahan bertujuan untuk membersihkan lahan dalam hal persiapan pengembangan perkebunan yang terjadi setiap tahun.

Sepanjang tahun 2015-2018 terjadi kebakaran hebat di wilayah Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, sehingga banyak korban dari kejadian tersebut, baik secara materil maupun tidak. Dengan demikian, upaya penangan kebakaran hutan dan lahan di Riau tidak hanya menjadi fokus Pemerintah Provinsi saja, namun juga menjadi perhatian pihak swasta yang berada di wilayah tersebut, salah satu pihak swasta nasional yang memiliki peran penting dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau adalah PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) II Sungai Pakning. Sebagai salah satu perusahaan yang berada di wilayah Provinsi Riau khususnya di Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Pertamina juga ikut andil dalam upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR), PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) II Sungai Pakning bekerjasama dengan Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, melalui program Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat terutama pada Ring 1 perusahaan.

Dalam penelitian ini akan menjelaskan strategi PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) II Sungai Pakning dalam strategi mitigasi kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) melalui pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Pakning.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang kemudian dijelaskan secara deskriptif. Metode ini melihat pengalaman individu/kelompok secara utuh. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yang melihat lebih fokus dan kasuistik mengenai Strategi Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Pemberdayaan Masyarakat oleh CSR PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) II Sungai Pakning di Kelurahan Sungai Pakning. Kurun waktu yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini mulai Agustus 2019-Februari 2020.

Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan fokus group discussion (FGD). Informan penelitian dipilih snowball sampling, dimana peneliti mendapatkan informasi tentang Strategi Mitigasi KARHUTLA Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dari informan pertama dan terus berlanjut ke informan berikutnya sampai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terpenuhi. Informan dalam penelitian ini adalah Lurah Sungai Pakning, ketua dan para tokoh Masyarakat Peduli Api (MPA), Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA) Kecamatan Bukit Batu, Koperasi Tani Tunas Makmur dan CSR PT. Pertamina RU II Sungai Pakning.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA)

Masyarakat Peduli Api (MPA) merupakan kelembagaan milik Desa. Tujuan dibentuknya MPA adalah sebagai garda terdepan ketika terjadi bencana kebakaran ditingkat desa, MPA sudah ada sejak lama. Namun, lemahnya ikatan sosial dan kelembagaan diantara MPA mengakibatkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Terbatasnya sumber daya manusia dan peralatan pemadaman kebakaran juga menjadi permasalahan tersendiri dalam strategi mitigasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kelurahan Sungai Pakning.

Upaya PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) II Sungai Pakning dalam membina kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kelurahan Sungai Pakning adalah dengan memberikan pembelajaran dan pengetahuan tentang tata cara pemadaman api dengan baik, kegiatan ini dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan gabungan dengan berbagai sector seperti, MPA Se-kecamatan Bukit Batu, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI/POLRI dan pihak Perusahaan sendiri, meningkatkan hubungan sosial antar anggota dengan membentuk forum komunikasi, keterampilan dan alat pemadaman yang memadai sehingga anggota MPA Kelurahan Sungai Pakning dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tetap terlindungi dari bahaya.

PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) II Sungai Pakning tidak hanya membina MPA Kelurahan Sungai Pakning saja, melainkan membina Masyarakat Peduli Api (MPA) di empat Desa Lainnya. Antara lain, Desa Batang Duku, Desa Sejangat, Desa Pakning Asal, dan Desa Sungai Selari. Setelah adanya pembinaan, Jaringan sosial dari kelembagaan MPA membaik. Terlihat dari bagaimana komunikasi dan kerjasama antara anggota dalam melaksanakan tugas pemadaman di tingkat desa. Untuk mempermudah komunikasi dan kerjasama MPA tidak hanya diempat Desa dan Satu Kelurahan, melainkan se-Kecamatan Bukit Batu, maka dibentuklah Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA). Forum ini bertujuan sebagai wadah komunikasi bagi para anggota MPA. Jika ada salah satu wilayah terbakar di Kecamatan Bukit Batu, maka anggota MPA yang tergabung dalam FORKOMPA akan saling berkomunikasi dengan berbagai pihak seperti DAMKAR, TNI/POLRI saling berkerjasama walau tidak di Desa

mereka. Sebagai contoh, ketika terjadi kebakaran di Desa Sungai Selari, anggota MPA langsung melakukan koordinasi dengan berbagai sector pendukung dan sesama anggota MPA lainnya untuk proses pemadaman.

Dengan adanya forum tersebut, komunikasi menjadi lebih lancar dan titik api cepat dapat dipadamkan. Selain komunikasi yang lancar dengan berbagai stakeholder, beberapa prestasi MPA dalam melaksanakan tugasnya menjaga dan memadamkan api adalah, menurunnya tingkat kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bukit Batu pada tahun 2015 dari sebanyak 2972 menjadi 156 titik api (sumber: www.bpbdkabbengkalis.go.id). Kemudian FORKOMPA juga mendapatkan penghargaan dari KODIM 0303 Kabupaten Bengkalis sebagai Forum Masyarakat Peduli Api terbaik dan percontohan dalam strategi mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan Se-Kabupaten Bengkalis. Keberhasilan beberapa Anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) yang tergabung dalam FORKOMPA sudah menjadi narasumber di beberapa daerah, mulai dari tingkat Desa hingga Nasional dan beberapa daerah di Provinsi Riau melakukan duplikasi mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan milik MPA

Kecamatan Bukit Batu untuk diterapkan di daerah mereka, seperti, Kecamatan Siak Kecil dan Bandar Laksamana Bengkalis, Kota Dumai bahkan sampai Pulau Rupat. Keberhasilan-keberhasilan tersebut tak lepas dari modal sosial yang dimiliki masyarakat, yaitu kepercayaan (Trust). Kepercayaan antara masyarakat di Kelurahan Sungai Pakning masih sangat baik. Begitu juga kepercayaan anggota MPA dengan PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) II Sungai Pakning. Masyarakat mempercayai upaya-upaya yang dilakukan PT. Pertamina dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sehingga mampu bekerjasama dengan baik oleh PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) II Sungai Pakning sebagai mitra binaan program Corporate Sosial Responsible (CSR) Perusahaan.

Fukuyama (2002) mengatakan kepercayaan (trust) adalah sebuah harapan-harapan dari keteraturan, kejujuran, perilaku kooperatif yang muncul dalam sebuah kelompok atau komunitas yang didasarkan atas norma-norma kebudayaan yang dianut Bersama anggota kelompok. Maka dari itu, keberhasilan Lembaga FORKOMPA dalam meningkatkan kepercayaan (trust) sesama anggota kelompok, masyarakat, dan struktur pemerintah lainnya sangatlah baik. Terlihat dari komunikasi yang terjalin antara stakeholder dan prestasi yang diterima seperti telah dijelaskan di atas.

2. Restorasi Lahan Gambut

a. Pertanian Nanas

Masyarakat Daerah Kampung Jawa Kelurahan Sungai Pakning dahulunya memiliki pekerjaan sebagai petani sayur, sayur yang dihasilkan dari daerah ini menjadi suplay terbesar kebutuhan sayur masyarakat Kelurahan Sungai Pakning, namun pada tahun 2015 terjadi kebakaran di daerah Kampung Jawa. Kampung Jawa menjadi daerah terbakar terluas di Kecamatan Bukit Batu. Hal ini disebabkan masih banyak lahan kosong yang tidak terpelihara. Akibat dari kebakaran tersebut, rusak sumber-sumber air disekitar perkebunan masyarakat, sehingga banyak kebun sayur masyarakat mati, sehingga masyarakat Kampung Jawa tidak memiliki pekerjaan.

Berawal dari musibah kebakaran yang merugikan masyarakat Kampung Jawa, masyarakat mencoba bangkit dari permasalahan tersebut. Maka masyarakat bekerjasama dengan Corporate Sosial Responsible (CSR) PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) II Sungai Pakning untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan dan dapat memperbaiki perekonomian mereka, masyarakat dan PT. Pertamina melakukan restorasi lahan gambut menjadi pertanian nanas.

Hal ini dilakukan setelah melalui penelitian dan didukung kemampuan masyarakat sebagai seorang petani. Pertamina mengajak Koperasi Tani Tunas Makmur dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Sungai Pakning dalam kegiatan restorasi lahan

gambut. Hingga saat ini restorasi lahan gambut menjadi pertanian nanas dimulai dari 0,5 Ha pada tahun 2017 hingga saat ini sudah mencapai 14,5 Ha. Selain tanaman nanas pertama juga mengajak masyarakat untuk menanam pohon khas gambut pada lahan-lahan bekas terbakar bertujuan untuk mengubah semak yang rawan terbakar menjadi lahan pertanian produktif.

Tanaman keras pendamping selain nanas adalah pohon keras lainnya seperti: durian (*Durio Zibethinus*), matoa (*Pometia Pinnata*), jengkol (*Archidendron Pauciflorum*) dan sirsak (*Annona Muricata*). Dipilihnya nanas dan tanaman keras lainnya karena tanaman tersebut tidak perlu dilakukan pengolahan lahan dalam proses penanamannya. Selain itu, nanas juga salah satu tanaman yang dapat memiliki turunan pengolahan bernilai ekonomis. Pada saat ini mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan masyarakat Sungai Pakning dikatakan berhasil. Selain tidak adanya titik api yang terjadi di wilayah Kelurahan, perekonomian masyarakat juga membaik.

Hal ini dikarekan pertanian nanas yang dikelola oleh sekelompok masyarakat Sungai Pakning yang tergabung dalam Koperasi Tunas Makmur. Kelompok ini mampu menghasilkan 5000 buah nanas setiap kali musim panen. Nanas tersebut memiliki beberapa kategori grade (tingkatan) seperti grade A,B, dan C.

Grade A adalah grade terbaik dari buah nanas, grade A ditandai dengan besarnya buah nanas tersebut, biasanya langsung dijual petani kepada pengepul karena memiliki harga yang tinggi dibanding dengan grade lainnya. Sedangkan grade C merupakan grade yang tidak laku dipasaran. Biasanya buah nanas yang masuk dalam kategori grade C diolah oleh Koperasi Tunas Makmur menjadi aneka makanan ringan seperti kerupuk nanas, kerupuk tepung nanas, dodol, sirup, dan manisan nanas. Hasil olahan produk nanas ini juga sudah dipasarkan di beberapa daerah seperti daerah Siak hingga Dumai. Inovasi dari koperasi Tunas Makmur tidak hanya berhenti di pengolahan buah nanas, melainkan sudah menjadikan daun nanas yang terbuang ketika musim panen datang menjadi tas anyaman yang cantik dan bernilai ekonomi. Sehingga mitigasi Kebakaran Lahan dan Hutan melalui pemberdayaan masyarakat petani nanas di daerah Kampung Jawa Kelurahan Sungai Pakning dikatakan berhasil. Tidak hanya upaya mengurangi kebakaran namun juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

b. Arboretum Gambut

Upaya lain restorasi lahan gambut adalah pengembangan Arboretum Gambut. Upaya pengembangan Arboretum Gambut bekerjasama dengan Koperasi Tunas Makmur dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Kelurahan Sungai Pakning. Arboretum Gambut berdiri di atas lahan asli seluas 1,1 Ha yang terselamatkan dari bencana kebakaran. Di Arboretum Gambut masyarakat Bersama PT. Pertamina RU II Sungai Pakning melakukan identifikasi tanaman endemik lahan gambut yang selamat dari musibah kebakaran dan membudidayakan tanaman khas gambut sehingga tidak terancam kepunahan. Hasil dari identifikasi, di Arboretum Gambut ditemukan beberapa tanaman langka, diantaranya Kantong Semar (*nepenthes spectabilis*), Meranti (*Shorea Pinanga*), Jelutung (*Dyera Castula Hook*), dan Palem Merah (*Cryptochachys Lakka*).

Tanamantanaman ini termasuk dalam kategori endemik yang hanya dapat tumbuh dengan baik di lahan gambut. Selain sebagai restorasi lahan gambut, Arboretum Gambut juga berfungsi sebagai taman edukasi bagi pelajar di sekitar wilayah Kecamatan Bukit Batu. Arboretum Gambut juga berfungsi sebagai laboratorium bagi para peneliti dari beberapa Universitas di Provinsi Riau. Arboretum Gambut juga menjadi Arboretum Gambut pertama di Kabupaten Bengkalis yang dikelola oleh swadaya masyarakat. Prestasi lain yang didapat oleh Arboretum Gambut selama berdiri sejak tahun 2018 adalah kunjungan beberapa petinggi daerah, Irjen Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta kunjungan Gubernur Riau pada November 2019 lalu.

3. Inovasi Pemadaman KARHUTLA

Orang pertama yang berperan aktif ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi adalah para Masyarakat Peduli Api (MPA). Lembaga ini didasari rasa tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan mereka. Walaupun tidak disertai gaji dan peralatan yang mempunyai, namun Masyarakat Peduli Api masih tetap melaksanakan tugasnya. PT. Pertamina RU II Sungai Pakning bekerjasama dengan Masyarakat Peduli Api untuk meningkatkan potensi dan kemampuan para anggota dalam menanggulangi kebakaran lahan dan hutan. Hal yang dilakukan dalam meningkatkan potensi kelompok MPA, PT. Pertamina RU II Sungai Pakning memberikan pelatihan gabungan secara rutin seputar pemadaman api, pengajaran lainnya adalah pola komunikasi terarah sehingga informasi seputar lahan terbakar dapat tersampaikan dengan baik kepada stakeholder lainnya seperti Damkar dan TNI/POLRI. Selain itu PT. Pertamina RU II juga pemberian bantuan alat pemadam kebakaran seperti mesin air, selang dan alat pendukung lainnya. Pola komunikasi yang terjalin antara Anggota MPA menggunakan Hand Talking (HT).

Dewasa ini alat komunikasi didominasi oleh Handphone dan internet, namun di Kelurahan Sungai Pakning HT dianggap sebagai alat komunikasi yang tepat. Karena, tingkat ekonomi masyarakat yang menengah kebawah, tidak semua anggota kelompok MPA mampu membeli pulsa ataupun paket internet. Untuk itu, PT. Pertamina RU II Sungai Pakning memberikan bantuan beberapa unit HT kepada kelompok MPA sebagai alat komunikasi mereka. Dengan adanya HT komunikasi Kelompok MPA semakin cepat dan baik. Jika ditemukan titik api di wilayah Kecamatan Bukit Batu, para Anggota MPA langsung berkoordinasi dan menurunkan personil mereka dalam upaya awal pemadaman.

Ketika api semakin besar, maka para anggota MPA segera berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kecamatan untuk saling bekerjasama. Bertambahnya ilmu, keterampilan dan komunikasi para anggota MPA, dan senantiasa mempelajari struktur dan kondisi daerah kebakaran ketika proses pemadaman. Sehingga muncul inovasi baru dalam mendukung pekerjaan mereka. Salah satunya adalah pembuatan sumur portable (Sumur Hydran). Sumur Hydran adalah inovasi berupa sumur portabel yang bisa berpindah titik sesuai dengan titik api. Alat yang dibutuhkan ketika membuat Sumur Hydran adalah mesin air (Robbin), pipa, kayu dan selang. Cara kerja Sumur Hydran adalah dengan memacakkan pipa kedalam tanah gambut sedalam 3-5 meter, lalu air ditarik menggunakan mesin dan air siap untuk memadamkan api.

Sumur Hydran juga dapat dikatakan sebagai sumur portabel karena keberadaan sumur bias menyesuaikan panjang selang air dengan titik api, dengan kata lain sumur hydran bias dibuat dimana saja untuk mempermudah anggota MPA dalam melaksanakan tugas mereka, cara kerja ini cukup mudah karena tidak memerlukan alat berat untuk menggali tanah membuat sumur konvensional. Selain itu, anggota MPA juga membangun embung. Embung berfungsi menampung air yang bias digunakan ketika kebakaran terjadi. Embung kelompok MPA Kelurahan Sungai Pakning biasanya berada disekitar lahan kosong tidak terawat dan jauh dari sumber air, hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi ketika terjadi kebakaran lahan didaerah tersebut.

Semua kegiatan Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam Mitigasi KARHUTLA di Kecamatan Bukit Batu dapat dilihat bahwa pola interaksi sosial sesama anggota MPA dan dengan stakeholder lainnya sangat baik. Interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat menentukan hubungan antar masyarakat. Menurut Soekanto (2006:60) menjelaskan bahwa Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa interaksi sosial tidak ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang-orang perorangan atau kelompokkelompok manusia bekerja sama, saling berbicara, dan seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan persaingan, pertikaian

dan lain sebagainya. dengan kata lain keberhasilan PT. Pertamina RU II Sungai Pakning dalam melakukan mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Riau didukung dengan tingginya modal social dalam masyarakat sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menerangkan bahwa Strategi Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Sungai Pakning dimulai dengan mememberdayakan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai garda terdepan ketika bencana kebakaran terjadi. Selain itu, interaksi social dan kepercayaan yang baik antara anggota dengan pemerintah dan PT. Pertamina RU II Sungai Pakning mendorong terciptanya Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA) sebagai forum Komunikasi lintas Stakeholder dalam proses mitigasi KARHUTLA. Dengan adanya kelembagaan ini Strategi Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan restorative lahan gambut menjadi pertanian nanas dan Arboretum Gambut sebagai lokasi penghijauan tanaman endemic lahan gambut yang terbakar, serta lahirnya inovasi-inovasi dalam Lembaga seperti sumur hidran yang mampu meningkatkan proses pemadaman kala terjadi peristiwa kebakaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho WC, Suryadiputra INN, Saharjo BH, Siboro L. 2005. Panduan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Bogor (ID): Wetlands International. Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada.
- Akbar A. 2011. Studi kearifan lokal penggunaan api persiapan lahan: studi kasus di hutan Mawas. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan 8(3):211-230.
- Anantanyu S. 2011. Kelembagaan petani: peran dan strategi pengembangan kapasitasnya. SEPA 7(2): 102 – 109.
- Arsyad MD, Saidi BB, Enrizal. 2014. Pengembangan inovasi pertanian di lahan rawa pasang surut mendukung kedaulatan pangan. Pengembangan Inovasi Pertanian 7(4):169-176.
- [Balittra]. Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa. 2004. Laporan tahunan penelitian lahan rawa tahun 2003. T. Alihamsyah dan I. Noor (Eds.). Banjarbaru (ID): Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa.
- Baskoro CB, Kusmana C, Kartodihardjo H. 2018. Analisis kebijakan pengelolaan dan budidaya ekosistem gambut di Indonesia: penerapan pendekatan advocacy coalition framework. Jurnal Sosial Humaniora 11(2):95-103.
- Basuno E, Suhaeti RN, Wahyuni S, Sunarja RR, Pranaji T, Budi GS, dan Iqbal M. 2005. Kaji tindak (action research) pemberdayaan masyarakat di wilayah tertinggal. Laporan Penelitian. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- [BBSDL P] Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. 2011a. Pemetaan potensi sumberdaya lahan tingkat tinjau skala 1:250.000 seluas 2,5 juta ha di Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Laporan Akhir Tahun. Dok. No. 22/LA/BBSDL P/ 2011. Bogor (ID): Badan Litbang Pertanian.
- Dariah A, Susanti E, Agus F. 2011. Simpanan karbon dan emisi CO₂ lahan gambut. Pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. Bogor (ID): Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.
- Elizabeth R. 2007. Fenomena sosiologis metamorphosis petani: ke arah keberpihakan pada masyarakat petani di pedesaan yang terpinggirkan terkait konsep ekonomi kerakyatan. Forum Penelitian Agro Ekonomi 25(1):29-42.
- Fachmudin A, Hairiah K, Mulyani A. 2011. Petunjuk praktis: pengukuran cadangan karbon pada tanah gambut. Bogor (ID): World Agroforestry Centre ICRAF SE Asia

- Regional Office dan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.
- Firmansyah H, Yulianti M, Alif M. 2017. Strategi komunikasi dalam penguatan kapasitas kelembagaan pada pengelolaan lahan gambut melalui peningkatan sumberdaya manusia di sektor pertanian Kalimantan Selatan. *Journal of Communication Studies* 2(1):119-131.
- Fauzan, F., Purwanto, W., Widhagdha, M. F., & Pakpahan, D. P. (2017). Pemetaan Kawasan Rawan Karlahut Berbasis Sistem Informasi Geografi dan Partisipasi Masyarakat di Bukit Batu dalam Prosiding Seminar Nasional Geografi: Peran 29 Geografi dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah NKRI di Era Teknologi pp. 895–905.
- Fukuyama, Francis (2002). Social capital and Development: The Coming Agenda. (artikel) *SAIS Review*, Volime 22, Number 1, Winter-spring pp.23-37.
- Haryono. 2013. Strategi dan kebijakan kementerian pertanian dalam optimalisasi lahan sub-optimal mendukung ketahanan pangan nasional. Jakarta (ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Haryono. 2014. Kebijakan Kementerian Pertanian dalam mengembangkan sistem pembangunan pertanian yang inklusif untuk memajukan petani lahan sub optimal. Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2014; Sep 26–27; Palembang,
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK PERTANIAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKALIS

Septi Riana Putri, Uci Wulandari

Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas Riau, Pekanbaru

Email : septirianaputri@gmail.com, uci.wulandari7@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia lahan gambut tersebar luas pada beberapa daerah seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, serta Papua. Di Riau, khususnya Kabupaten Bengkalis lahan gambut merupakan tempat dimana masyarakat sekitar menjadikannya sebagai lahan pertanian. Lahan gambut merupakan Sumber Daya Alam yang memiliki keanekaragaman khas. Dewasanya kini lahan gambut sudah dijadikan sebagai lahan pertanian diberbagai tempat. Lahan gambut berpotensi sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya. Namun sayangnya lahan gambut merupakan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui. Pengelolaan lahan gambut untuk pertanian harus dilakukan dengan baik dan benar sehingga tidak merusak ekosistemnya. Untuk itu diperlukan penyuluhan bagaimana mengelola serta memanfaatkan ekosistem gambut kepada masyarakat yang tinggal dan hidup disekitar ekosistem gambut tersebut.

Kata kunci: lahan gambut, pertanian, ekonomi.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan jumlah penduduk dari waktu kewaktu, maka permintaan akan kebutuhan pangan ataupun kebutuhan pertanian semakin meningkat. Permintaan akan kebutuhan pangan ataupun pertanian ini membutuhkan perluasan lahan sehingga lahan gambut menjadi salah satu sasarannya. Perluasan lahan gambut untuk pertanian membawa dampak positif maupun negatif. Salah satu hal positif dari perluasan lahan gambut untuk pertanian adalah memberi kesempatan kerja untuk masyarakat disekitarnya serta sebagai tambahan devisa bagi negara. Kemudian salah satu dampak negatifnya pembukaan lahan gambut untuk pertanian dapat merusak ekosistem dari gambut itu sendiri. Lahan gambut terluas pada negara tropis berada di Indonesia yaitu sekitar 21 juta ha yang tersebar pada Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua.

Sebagian besar lahan gambut yang tersebar di Indonesia masih tertutupi oleh hutan dan dihuni oleh berbagai macam hewan dan tanaman langka. Kemudian banyak studi yang mengatakan lahan gambut menyimpan karbon dalam jumlah dan juga berfungsi sebagai penahan air yang tinggi. Gambut sendiri memang memiliki kemampuan dalam memelihara air dan menyimpan air dalam jumlah yang besar sehingga dapat menjaga ketersediaan air bersih sepanjang tahun serta untuk pencegahan terjadinya banjir.

Perluasan lahan gambut guna untuk lahan pertanian terjadi di beberapa tempat salah satunya di Riau. Menurut data (WWF, 2008), antara tahun 1982-2007 lahan gambut telah dikonversi sekitar 1,83 juta ha atau sekitar 57% dari luas total hutan gambut 3,2 juta ha di Provinsi Riau. Kemudian dampak lain dari kerusakan ekosistem gambut adalah banjir. Namun hal tersebut tidak menjadi penghambat dalam membuka lahan untuk pertanian meskipun dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang bisa terjadi dan cara pencegahannya.

Produktivitas lahan gambut tergantung bagaimana masyarakat atau petani dalam mengelola lahan gambut tersebut. Lahan gambut terkenal sensitif terhadap perubahan yang tidak menguntungkan, lemah, dan rapuh. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah ketebalan dari gambut. Dikemukakan oleh Harjowigeno (1997), Adimihardja et al. (1998) dan Wahyunto et al. (2014) lahan gambut dengan ketebalan 50-100 cm tergolong lahan gambut dangkal atau tipis. Semakin tebal gambut, semakin rendah potensinya untuk budidaya tanaman pangan.

Riau merupakan Provinsi yang mempunyai lapisan gambut terdalam didunia. Lapisannya mencapai 16 meter terutama diwilayah kuala kampar (Anonymous, 2016). Lahan gambut di Riau digunakan untuk lahan pertanian, kelapa sawit, serta digunakan juga untuk *pulp wood* atau kayu kertas.

Bengkalis merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengelolaan lahan gambut tersebut. Menurut (Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2009) mengatakan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki luas lahan gambut sekitar 856.386 Ha dengan luas lahan perkebunan yang mencapai 102.858,5 Ha. Dengan melihat besarnya lahan pekebunan pada Kabupaten Bengkalis ini dapat disimpulkan bahwa potensi dalam pengelolaan perkebunan ataupun pertanian pada lahan gambut di Kabupaten Bengkalis sangat besar.

Pemanfaatan lahan gambut untuk lahan perkebunan ataupun pertanian terutama di Kabupaten Bengkalis menurut beberapa peneliti, lahan gambut di Kabupaten Bengkalis jika dikelola dengan baik dan benar serta sesuai dapat menjadi lahan yang memiliki sumber daya yang potensial untuk perekonomian baik dari segi pertanian maupun perkebunan. Masyarakat disekitar lahan gambut yang ada di Kabupaten Bengkalis memiliki mata pencarian sebagian besar sebagai petani, baik pada pertanian ataupun perkebunan kelapa sawit. Masyarakat yang tinggal disekitar lahan gambut umumnya sudah paham akan ekosistem lahan gambut tersebut. Mereka biasanya sudah membekali diri akan pengetahuan dasar bagaimana cara mengelola lahan gambut untuk pertanian atau perkebunan yang dikelola sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah yang terbentuk dari bahan organik yang terdapat pada rawa disebut gambut. (Noor,2011) mengatakan proses pembentukan lahan gambut dilalui dengan beberapa tahap yaitu:

- a. Proses pertama diawali pengisian danau dangkal atau cekungan oleh vegetasi lahan basah
- b. Lalu terbentuklah gambut topogen yang mana berdekatan dengan tanah mineral
- c. Dan kemudian terjadilah pembentukan gambut ombrogen diatas gambut topogen.

Karakteristik dan sifat lahan gambut ditentukan oleh komposisi bahan itu sendiri. *Bulk density* atau bobot isi gambut biasanya berkisar 0,05 – 0,40 gr/cm³. Selain sebagai tempat penyimpanan air, gambut juga bisa mengering. Gambut yang sudah mengering bersifat sama dengan ranting kayu yang telah kering yaitu mudah hanyut dibawa air dan mudah terbakar. Jika gambut sudah mengering, maka tidak bisa menyerap air lagi saat dibasahi. Lahan gambut ini umunya memiliki tingkat keasaman yang tinggi dengan kisaran pH 3 sampai 5.

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau. Kabupaten Bengkalis sendiri letaknya tepat berada di muara sungai siak. Kabupaten Bengkalis sendiri merupakan penyumbang terbesar APBD dengan minyak buminya. Kabupaten Bengkalis termasuk salah satu daerah yang memiliki lahan gambut terbesar di Indonesia.

Lahan gambut di Kabupaten Bengkalis diperkirakan memiliki luas sekitar 856.386 Ha dengan 69,68% dari total luas daerah dataran di Kabupaten Bengkalis, dengan luas lahan perkebunan yang mencapai 102.858,5 Ha. Sesuai dengan pembentukannya lahan datar, lahan gambut di Kabupaten Bengkalis lebih didominasi dengan merupakan gambut dataran rendah. Gambut dataran rendah memiliki potensi yang lebih besar untuk pertanian atau perkebunan. Dari data yang didapat dan dikelola oleh Nasrul pada jurnalnya, penyebaran lahan gambut di setiap Kecamatannya adalah sebagai berikut.

- a. Bukit Batu – 120.181,38 ha

- b. Merbau – 110.920,7 ha
- c. Pinggir – 99.778,20 ha
- d. Siak Kecil – 86.455,81 ha
- e. Tebing Tinggi – 74.573,37 ha
- f. Rupert – 66.250,52 ha
- g. Rangsang – 52.489,08 ha
- h. Bengkalis – 41.584,23 ha
- i. Mandau – 40.355,58 ha
- j. Tebing Tinggi Barat – 39.954,09 ha
- k. Bantan – 33.030,86 ha
- l. Rangsang Barat – 20.520,63 ha
- m. Rupert Utara – 13.913,75 ha.

Kemudian berdasarkan tipologi lahan gambut dibagikan atas gambut dangkal, tengahan, dalam, dan sangat dalam yang mana sisanya yaitu lahan bergambut dan tanah mineral. Sebagian dari lahan ini tidak dikembangkan untuk lahan pertanian melainkan untuk hutan suaka alam, hutan lindung, pemukiman, dan lain sebagainya.

Pengembangan & pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian

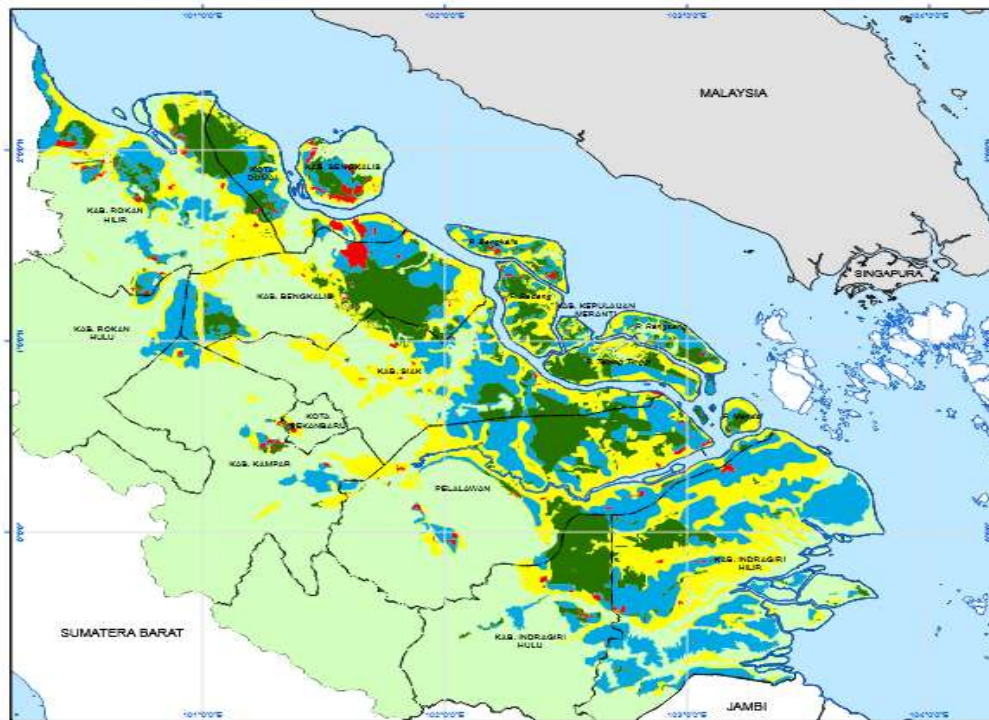
Perlu diketahui, membuka lahan untuk pertanian dilahan gambut membutuhkan proses yang cukup rumit karena harus menjaga ekosistemnya agar tidak rusak dan membutuhkan biaya produksi yang lebih mahal berbanding dengan hasil penjualannya. Sehingga dapat diambil kesimpulan pertanian dilahan gambut dalam jangka panjang tidaklah menguntungkan. Namun tidak menutup kemungkinan tidak adanya potensi pada lahan gambut untuk pertanian. Lahan gambut untuk pengembangan pertanian diperlukan proses pemilihan dengan kehati-hatian serta teliti. Biasanya dipilih pada daerah kubah gambut, yang mana memiliki potensi pengembangan lebih tinggi.

Jika di identifikasikan tanaman apa saja yang cocok ditanam berdasarkan tingkat gambutnya, maka akan seperti berikut. Tanaman pangan seperti padi sawah sangat dianjurkan dibudidayakan pada gambut dangkal. Kemudian tanaman seperti jagung, kedelai, ubi kayu, kacang tanah, dan talas dianjurkan untuk budidaya pada gambut dangkal dan sedang. Untuk tanaman sayur-sayuran seperti cabe, tomat, mentimun, terung, kacang panjang, kacang merah, bayam, kangkung darat, sawi, labu siam dianjurkan dibudidayakan pada gambut dangkal dan gambut sedang. Dan tanaman buah-buahan seperti durian, mangga, rambutan, pokat, duku, jeruk, manggis, semangka, nenas, pisang, dan belimbing dianjurkan budidaya di gambut dangkal, sedang, dan dalam. Dengan keterangan gambut dangkal 50-100cm, gambut sedang 100-200cm, dan gambut dalam 200-300cm.

Jika mencoba menanam padi sawah pada lahan gambut dalam, maka tidak akan terjadi pertumbuhan karena wadahnya tidak cocok. Begitu juga sebaliknya, semua tanaman dan wadahnya harus pas dan sesuai. Semua langkah dalam melakukan pembukaan lahan hingga memulai proses penanaman diperlukan perhitungan dan kehati-hatian.

Berdasarkan keterangan diatas lahan gambut sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk pertanian. Hanya saja dibutuhkan pengetahuan untuk mengelolanya sehingga tidak merugi ataupun merusak ekosistemnya. Pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian sendiri tak dipungkiri menyebabkan beberapa kerusakan pada lahan gambut. Pembukaan lahan gambut untuk pertanian biasanya dilakukan dengan penebangan hutan, penurunan permukaan yang disebabkan oleh drainase yang dilakukan tidak hati-hati, serta pembakaran lahan gambut. Dampak dari pembukaan lahan tersebut membutuhkan restorasi lahan gambut. Restorasi sendiri merupakan pemulihan ekosistem gambut agar kondisi struktur, fungsi, serta hidrologisnya kembali pada kondisi pulih yang dilakukan dengan cara pembasahan kembali lahan gambut.

berikut merupakan peta yang dikemukakan oleh Badan Restorasi Gambut pada tahun 2016 yang memperlihatkan tingkatan restorasi yang di prioritaskan.



Gambar 1.1. Peta Restorasi Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	Kelas Prioritas Restorasi (Ha)				Luas (Ha)
	1	2	3	4	
Kab. Bengkalis	37,141	160,053	194,851	169,973	562,017
Kab. Indragiri Hilir	6,364	486,588	74,006	335,739	902,697
Kab. Indragiri Hulu	4,523	52,146	110,363	39,417	206,449
Kab. Kampar	4,909	43,011	7,016	50,867	105,803
Kab. Kepulauan Meranti	3,865	75,684	126,707	126,209	332,465
Kab. Pelalawan	12,679	223,047	172,452	272,975	681,152
Kab. Rokan Hilir	18,938	131,786	100,111	180,969	431,803
Kab. Rokan Hulu	33	38,092	1,097	13,614	52,836
Kab. Siak	5,114	127,220	92,457	179,101	403,891
Kota Dumai	9,949	59,415	63,319	45,816	178,499
Kota Pekanbaru	784	-	-	3,004	3,789
Riau	104,299	1,397,042	942,378	1,417,682	3,861,401

Keterangan :

- 1 Prioritas Restorasi Pasca Kebakaran 2015
- 2 Prioritas Restorasi Kubah Gambut berkanal (zona lindung)
- 3 Prioritas Restorasi Kubah Gambut tidak berkanal (zona lindung)
- 4 Prioritas Restorasi Gambut berkanal (zona budidaya)

Gambar 1.2. Kelas Prioritas Restorasi Provinsi Riau

Berdasarkan gambar 1 dan 2 dapat dilihat bahwa proritas restorasi lahan gambut untuk Kabupaten Bengkalis dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Prioritas restorasi pasca kebakaran 2015 sekitar 37.141 ha.
- b. Proiritas restorasi kubah gambut berkanal (zona lindung) sekitar 160.053 ha.
- c. Prioritas restorasi kubah gambut tidak berkanal (zona lindung) sekitar 194.851 ha.
- d. Prioritas restorasi gambut berkanal (zona budidaya) sekitar 169.973 ha.

Dengan luas semua lahan gambut untuk restorasi sekitar 562.017 ha (Badan Restorasi Gambut, 2016).

Pengelolaan lahan gambut memerlukan sumber daya manusia yang berpotensi dan bermutu. Sumber daya manusia yang baik, berpotensi, serta memiliki pengetahuan akan lahan gambut lebih diperlukan karena nantinya diharapkan bisa mengelola lahan gambut tanpa harus merusak ekosistemnya. Perlu diketahui untuk mengelola lahan gambut dan menjadikannya lahan perkebunan serta pertanian tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Lahan gambut merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, maka dari itu diperlukan perhatian khusus dalam menanganinya.

Perekonomian masyarakat disekitar lahan gambut

Selain pemerintah serta perusahaan yang mengelola lahan gambut, masyarakat sekitar ikut andil dalam pengelolaannya. Gambut memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian masyarakat disekitarnya. Berbagai tanaman serta hewan yang berada diekosistem gambut bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat sekitar. Banyak juga masyarakat yang membuka lahan untuk pertanian. Pertanian yang dikelola oleh masyarakat biasanya masih menggunakan teknologi sederhana dalam pengelolaannya serta tidak terlalu mencoba merusak ekosistem gambut karena masyarakat yang mengelolanya tinggal disekitar lahan gambut tersebut. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada lahan gambut untuk membudidayakan ikan, berternak, serta bertani.

Selain dikelola untuk pertanian, Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem alami bagi beberapa tanaman berdaya jual tinggi yang dapat dikelola oleh masyarakat yaitu rotan. Serta tanaman lain seperti karet, padi, nenas, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh, masyarakat yang melakukan budidaya rotan serta mengelolanya untuk berbagai keperluan seperti kursi, meja, serta benda-benda lain yang memiliki nilai jual tinggi dapat membantu perekonomian mereka sendiri. Masyarakat yang hidup dan tinggal disekitar lahan gambut memiliki perekonomian stabil jika mampu mengelola lahan gambut dengan baik dan benar. Hal ini juga tak hayal terdapat peran pemerintah juga yaitu dengan melakukan sosialisasi pemanfaatan lahan gambut. Sosialisasi dibutuhkan agar masyarakat mengetahui pengelolaan lahan gambut dan tidak merusak ekosistemnya.

Hambatan lahan gambut untuk pertanian

Dalam peningkatan serta pengelolaan lahan gambut untuk pertanian diketahui memiliki beberapa kendala atau hambatan serta beberapa permasalahan terkait pembukaan lahan gambut. Karakteristik lahan gambut yang telah rusak memiliki daya dukung yang kurang untuk melakukan cocok tanam. Seperti kadar pH yang rendah serta ketergenangan air. Ketergenangan air ini membuat bibit tidak dapat tumbuh pada tahap awal. Kendala lain dipaparkan oleh (Noor,2001) mengatakan bahwa lahan gambut memiliki *bulk density* rendah sehingga membuat kondisi tanah tidak stabil bagi berjangkarnya akar tanaman.

Kemudian penanaman dilahan gambut dihitung memiliki modal yang besar dikarenakan pembukaan lahan yang harus dipilih dengan baik dan sesuai dengan tanamannya, serta melakukan usaha pertanian di lahan gambut memerlukan bibit yang berkualitas tinggi yang sanggup bertahan hidup di ekosistem gambut. dikarenakan kondisi lahan gambut yang memiliki genangan air, masyarakat yang memiliki lahan pertanian biasanya membuat guludan dan surjan yang merupakan teknologi sederhana guna untuk pengaturan tata air. Pengaturan tata air ini bukan hanya bertujuan untuk menghindari genangan air serta banjir di musim hujan saja, namun saat musim kemarau bisa menghindari kekeringan.

Terakhir hambatan yang menjadi sumber masalah utama dalam pembukaan lahan gambut adalah dilakukan dengan cara pembakaran lahan gambut. Pembakaran lahan gambut menyebabkan kerusakan ekosistem serta asap yang terjadi selepas pembakaran menjadi kabut asap yang akhirnya menjadi masalah dari tahun ketahun di Provinsi Riau. Maka dari itu diperlukan sumber daya manusia yang baik dan berpotensi guna melakukan pengelolaan dilahan gambut agar tak salah langkah sehingga merusak ekosistem.

KESIMPULAN

Lahan gambut di Kabupaten Bengkalis diperkirakan memiliki luas sekitar 856.386 Ha dengan 69,68% dari total luas daerah dataran di Kabupaten Bengkalis, dengan luas lahan perkebunan yang mencapai 102.858,5 Ha. Lahan gambut yang disarankan untuk pertanian maupun perkebunan adalah gambut dangkal, gambut sedang, dan gambut dalam. Hasil budidaya pada lahan gambut di Kabupaten bengkalis didominasi oleh pertanian dan perkebunan yang membuat perekonomian di daerah tersebut meningkat. Hambatan-hambatan dalam pembukaan lahan gambut untuk pertanian adalah kadar pH rendah, ketergenangan air, *bulk density* rendah, serta pembakahan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 2006. *Lahan Gambut Terkait dengan Perubahan Iklim*. Fact Sheet.
- Badan Restorasi Gambut. 2016. *Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut*. Jakarta
- Hardjowigeno, S., dan Widiatmaka, 2001. *Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Penggunaan Tanah*. Jurusan Tanah, Fak. Pertanian IPB. Bogor
- Murbekti. 2011. *Studi Pewilayahan dalam Rangka Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan di Provinsi Riau*. Pusat Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam – BPPT.
- Nasrul, Besri. 2010. *Penyebaran dan Potensi Lahan Gambut di Kabupaten Bengkalis untuk Pengembangan Pertanian*. Universitas Riau.
- Noor, M. 2001. *Pertanian Lahan Gambut : Potensi dan Kendala*. Penerbit Kanisius. Jakarta.
- Syaufina, L., dan Hafni. A.F. 2018. *Varibilitas Iklim dan Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau*. Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, IPB

PERAN MODAL SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PETANI DI LAHAN GAMBUT DESA SEPAHAT KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA – BENGKALIS

Tri Gunawan¹, Lie Othman²

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Administrasi UNRI

Email : tri.gunawan@grad.unri.ac.id

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi FISIP - UNRI

Email : lie.othman@lecture.unri.ac.id

Abstrak

Seiring pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, saat ini lahan gambut banyak dimanfaatkan untuk pertanian. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup di sekitar lahan gambut sudah memahami cara-cara pengelolaan lahan gambut untuk usaha pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura dan agroforestry. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kearifan lokal, petani dapat membuktikan bahwa lahan gambut dapat dikelola dan menjadi sumber mata pencarian serta penyedia bahan pangan tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Modal sosial yang tumbuh dalam kelompok sosial, terdiri dari kepercayaan, norma dan partisipasi dalam jaringan sosial memiliki peranan dalam pemberdayaan petani dan mendukung program pertanian yang ramah gambut di Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Kelompok tani dengan modal sosial tinggi akan terbiasa hidup rukun, gotong royong dan bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggalnya, terutama pada masyarakat yang terbiasa hidup dengan rasa saling percaya, bersatu dan memiliki hubungan sosial secara intensif yang didukung oleh semangat kebaikan untuk hidup saling menguntungkan dan saling tolong menolong. Modal sosial menjadi dasar terwujudnya partisipasi dan kerjasama dalam kelompok tani, sehingga menjadi penting dalam upaya penguatan kapasitas masyarakat.

Kata kunci : modal sosial, pemberdayaan, kelompok tani

PENDAHULUAN

Manusia dan alam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berbekal akal budi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki, manusia berinteraksi dengan lingkungan dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam ada yang bersifat terbatas tidak dapat diperbaharui dan adapula yang dapat diperbaharui. Pemanfaatan berlebihan atau over eksploitasi terhadap sumberdaya alam dapat mengakibatkan keruntuhan ekosistem, misalnya konversi lahan tanpa memperhatikan kelestariannya, akan menimbulkan permasalahan lingkungan yang dapat merugikan kehidupan manusia itu sendiri, sehingga antara manfaat dan dampak yang dapat terjadi harus diperhitungkan dengan sebaik-baiknya.

(Pranoto dkk,2016) mengungkapkan bahwa seiring pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam juga terus mengalami peningkatan, salah satu sumberdaya yang dibutuhkan masyarakat adalah sumber daya lahan. Sumberdaya ini adalah salah satu sumber daya yang banyak manfaatnya bagi manusia, sebagai tempat hidup maupun tempat mencari nafkah. Lahan hutan gambut juga dikonversi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konversi lahan gambut dengan cara yang keliru dapat menyebabkan lahan gambut tidak berfungsi sesuai fungsi dan peruntukannya. Hal ini terjadi karena lemahnya koordinasi dan implementasi kebijakan dalam konsistensi perencanaan yang telah dibuat.

Untuk itu maka para pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat dan pengusaha perlu duduk bersama dengan para ilmuwan dan akademisi untuk mencari solusi atau cara yang tepat dalam pemanfaatan sekaligus konservasi lahan gambut. Prinsipnya pemanfaatan lahan gambut yang disertai pengelolaan dan pengawasan yang tepat akan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat (Sabiham S., 2018).

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dibentuk oleh adanya penimbunan/akumulasi bahan organik di lantai hutan yang berasal dari reruntuhan vegetasi di atasnya dalam kurun waktu lama. Akumulasi ini terjadi karena lambatnya laju dekomposisi dibandingkan dengan laju penimbunan bahan organik di lantai hutan yang basah/ tergenang tersebut (Sri Najiyati, 2005). Menurut (Rahim, M.M.A dkk, 2020) Gambut adalah tanah yang terbentuk dari bahan organik, terjadi sejak masa lalu. Bahan organik penyusun lahan gambut ini terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang mati sejak ribuan tahun yang lalu. Berdasarkan data Global Wetlands yang diakses pada 16 April 2019 dan dilansir melalui katadata.co.id, Indonesia memiliki lahan gambut terbesar kedua di dunia dengan luas mencapai 22,5 juta hektare (Ha) dan Provinsi Riau memiliki lahan gambut terluas ketiga di Indonesia (2,2 juta Ha).

Masyarakat Riau sudah lama memanfaatkan lahan gambut, baik langsung untuk bertani dan berkebun maupun tidak langsung untuk kegiatan ekonomi lainnya seperti mengambil kayu, mencari ikan, dan mengambil hasil hutan lainnya. Awalnya, masyarakat yang hidup di sekitar gambut, memanfaatkan lahan gambut untuk menanam pohon karet dan pohon sagu, sedangkan di ekosistem lahan gambut yang lebih dalam masyarakat mengambil hasil-hasil dari gambut yang bisa diambil manfaatnya. Perubahan terjadi dengan luasnya konversi ekosistem gambut untuk perkebunan kelapa sawit dalam skala besar yang masih dominan menimbulkan masalah lingkungan dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar. Kondisi ini disebabkan oleh alih fungsi lahan secara besar-besaran dan masifnya pembuatan saluran drainase untuk pengeringan lahan. Pengeringan ini menyebabkan penurunan permukaan air tanah dan lapisan gambut menjadi cepat kering, sehingga suhu lahan cepat meningkat dan mudah terjadi kebakaran saat musim kemarau.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan upaya pemulihan dan mengembalikan fungsi ekologi lahan gambut melalui program restorasi lahan gambut. Diantara upaya tersebut adalah melakukan *rewetting*, revegetasi dan revitalisasi lahan gambut, yaitu pembasahan kembali, menanam dan pemeliharaan lahan gambut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar ekosistem gambut. Salah satu caranya adalah melakukan pendekatan pembangunan ekonomi di bidang pertanian melalui penanaman lahan gambut dengan tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi namun tetap ramah terhadap gambut, seperti jenis tanaman agroforestry penghasil buah, penghasil kayu dan penghasil getah. Tentunya upaya pemerintah ini akan menjadi lebih mudah bila melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengadopsi kearifan lokal yang terintegrasi dengan aspek sosial ekonomi dan kelembagaan. Bahkan menurut Prof. Lars Hein dari Wageningen University and Research, bahwa integrasi ekonomi dengan seluruh program restorasi gambut sangat dibutuhkan. Malahan, integrasi itu sudah bukan lagi pilihan, seharusnya sudah jadi sebuah program (Rahim, M.M.A dkk, 2020).



Gambar 1. Pembuatan sekat kanal sebagai upaya *rewetting* di lahan Gambut Desa Sepahat (Sumber : foto pribadi, 9 Juli 2021)

Program revitalisasi lahan gambut juga akan efektif bila didukung oleh modal sosial dari masyarakat. Putnam (1993) menyatakan bahwa bangsa yang memiliki modal sosial tinggi cenderung lebih efisien dan efektif dalam menjalankan berbagai kebijakan untuk mensejahterakan dan memajukan kehidupan rakyatnya. Modal sosial dapat meningkatkan kesadaran tentang banyaknya peluang yang dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat terutama dalam hal peningkatan produksi pertanian.

Tantangan usaha pertanian di lahan gambut saat ini adalah selain masalah sumber daya lahan, juga masalah sarana produksi yang semakin mahal, terbatasnya modal, produktifitas yang masih rendah, akses informasi yang masih terbatas, dan keterbatasan pengetahuan serta keterampilan petani. Upaya untuk mengatasi hal ini adalah melakukan perubahan perencanaan dan pengembangan pertanian di lahan gambut, maka sangat penting memahami penggunaan berbagai jenis jaringan dalam akses informasi, berinteraksi terhadap sesama dan melakukan tindakan kolektif dalam adopsi, sebagaimana menurut putnam 1995 dalam Wibisono (2015), yang mendefinisikan modal sosial sebagai karakteristik organisasi sosial, seperti jaringan sosial, saling kepercayaan dan norma yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pemberdayaan masyarakat petani.

Bagi petani yang memanfaatkan lahan gambut di Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, modal sosial yang ada, lembaga sosial dan pemerintah, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberdayaan petani. Namun demikian sebagian pihak belum memandang pentingnya peranan modal sosial, modal ini belum menjadi perhatian para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan termasuk di sektor pertanian. Padahal salah satu modal untuk berhasilnya suatu program pembangunan adalah dengan pemberdayaan masyarakat yang diperkuat oleh modal sosial yang ada di kalangan masyarakat tersebut.

METODE

Untuk melihat peran modal sosial dalam pemberdayaan petani dilahan gambut desa sepahat kecamatan bandar laksmana kabupaten bengkalis, kajian ini dilakukan secara mendalam melalui pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan ketersediaan data secara empiric yang diperoleh dari studi dokumentasi dan telaah data sekunder lainnya. Guna menganalisis data tersebut, digunakan Teknik interpretative yang memungkinkan memberi makna secara mendalam terhadap peran modal social dalam pemberdayaan petani dilahan gambut desa sepahat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Pengertian Modal Sosial (*Social Capital*)

Putnam (1993) menyatakan bahwa modal sosial adalah penampilan organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma-norma (hubungan timbal balik), dan jaringan (dari ikatan-ikatan masyarakat). Penampilan organisasi sosial tersebut dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama.

Menurut Carpenter (2004) modal sosial adalah suatu sumber daya yang ada pada individu-individu yang berasal dari interaksi sosial karena adanya kepercayaan, hubungan timbal balik, dan kerja sama. Modal sosial ini merupakan kemampuan yang muncul dari kelaziman kepercayaan dalam suatu masyarakat atau dalam bagian tertentu dari masyarakat. Masyarakat yang saling percaya akan lebih baik dalam inovasi organisasi karena kepercayaan yang tinggi memungkinkan munculnya rentang hubungan sosial yang lebar. Perluasan modal sosial yang positif, terutama dalam komunitas dengan modal ekonomi yang terbatas, secara konsekuen akan menghasilkan peningkatan kinerja ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan.

Francis Fukuyama (2000) menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu sesuatu yang mendorong masyarakat bersatu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, yang diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh, diyakini dan dipatuhi. Contohnya masyarakat yang hidup di pedesaan telah terbiasa dengan budaya gotong royong dan saling membantu serta bekerjasama dalam suatu kelompok sosial akan mampu secara efisien dan efektif memberikan kontribusi penting bagi usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan tersebut. Hal ini akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan karena melalui dasar kebersamaan dan diikat oleh nilai-nilai yang dipatuhi, pembangunan ekonomi dan kehidupan demokrasi yang dijalani dapat terjaga kestabilannya.

Selanjutnya menurut grootaert (1998) dalam Limon J *et al*, (2012) konsep modal sosial mengacu pada norma-norma yang saling melengkapi, nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang mengatur interaksi antara orang-orang dan lembaga-lembaga dan mempengaruhi mereka untuk kerjasama dan saling membantu. Konsep ini merupakan kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama. Kemampuan bekerjasama dan saling tolong menolong ini muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau dibagian paling kecil dalam masyarakat. Modal sosial ini bisa dilembagakan dalam kelompok yang paling kecil ataupun kelompok masyarakat yang besar.

Berkembangnya modal sosial dalam masyarakat dapat menciptakan suatu situasi masyarakat yang saling toleran, dan mendorong tumbuhnya rasa empati dan simpati terhadap kelompok masyarakat atau orang lain di luar kelompoknya. Hasbullah (2006) memaparkan mengenai Jaringan-jaringan yang memperkuat modal sosial akan dapat memudahkan saluran informasi dan ide-ide dari luar masuk ke dalam kelompok dan merangsang serta mendorong kelompok masyarakat untuk berkembang. Hasilnya adalah munculnya masyarakat yang peduli pada berbagai aspek dan aktifitas kehidupan, dan masyarakat yang saling memberi perhatian serta saling percaya. Situasi ini mendorong terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai, bersahabat, dan tenteram. Demikian juga halnya dalam sektor pertanian, modal sosial yang juga merupakan hubungan sosial (*social relationship*) di pedesaan masih kuat dan mengakar termasuk kesediaan untuk saling membantu dalam pengerjaan usahatani. Pembangunan pertanian akan berhasil apabila petani sebagai subjek pembangunan bergairah dan termotivasi untuk bekerja keras, untuk menumbuhkan daya kreasi dan semangat kegotong-royongan antar mereka yang pada gilirannya menumbuhkan modal sosial yang dapat membantu keberhasilan penerapan teknologi pertanian guna keberlanjutan pembangunan pertanian di masa akan datang.

Ife dan Tesoriero (2008) menjelaskan mengenai modal sosial dalam pengembangan masyarakat dapat dilihat bahwa modal sosial merupakan modal yang dapat digunakan sebagai kekuatan penggerak dalam pemberdayaan.

2. Pemberdayaan petani

Menurut Hendrawati (2018) pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari istilah “*empowerment*”, sehingga dapat jelaskan bahwa pemberdayaan mengandung makna memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah, yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan utama atau kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Memberikan kekuatan atau *power* kepada orang yang kurang mampu atau miskin atau *powerless* memang merupakan tanggungjawab pemerintah, namun seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan pemberdayaan.

Menurut Sri Najiati (2005) Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka mampu bertanggung jawab terhadap sesuatu yang telah dipilihnya. Pada konteks ini, dapat disamakan dengan suatu proses yang aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi, dan kerjasama dalam menguatkan dan memampukan masyarakat untuk memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Proses ini juga perlu dikembangkan kepada para petani sebagai upaya untuk memandirikan mereka lewat perwujudan potensi kemampuan dan kekuatan yang mereka miliki.

Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan Petani (UU nomor 19 tahun 2013). Proses pemberdayaan Petani ini merupakan suatu proses yang melibatkan peranan petani untuk bekerjasama dalam kelompok formal maupun non formal untuk berpartisipasi dalam mengkaji masalah, merencanakan program dan melaksanakannya serta bersama-sama melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakannya.

Petani berdaya adalah petani yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dan tidak terikat oleh pengaruh kekuatan penekan. Mereka bebas untuk mengemukakan pendapat dan terlibat dalam setiap pengambilan keputusan yang berpengaruh kepadanya, tidak kelaparan dan bebas dari kebodohan. Mereka juga mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan penghasilannya dan mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan serta dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan di lingkungannya.

3. Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana - Bengkalis

Desa Sepahat yang terletak di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis memiliki lahan gambut yang luas, dimana lebih dari 80% wilayahnya adalah lahan bergambut dengan kedalaman gambut ditaksir rata-rata diatas 7,5 meter dan tergolong gambut sangat dalam. Kedalaman Gambut ini menyebabkan Desa Sepahat menjadi wilayah yang rawan terjadinya kebakaran lahan.

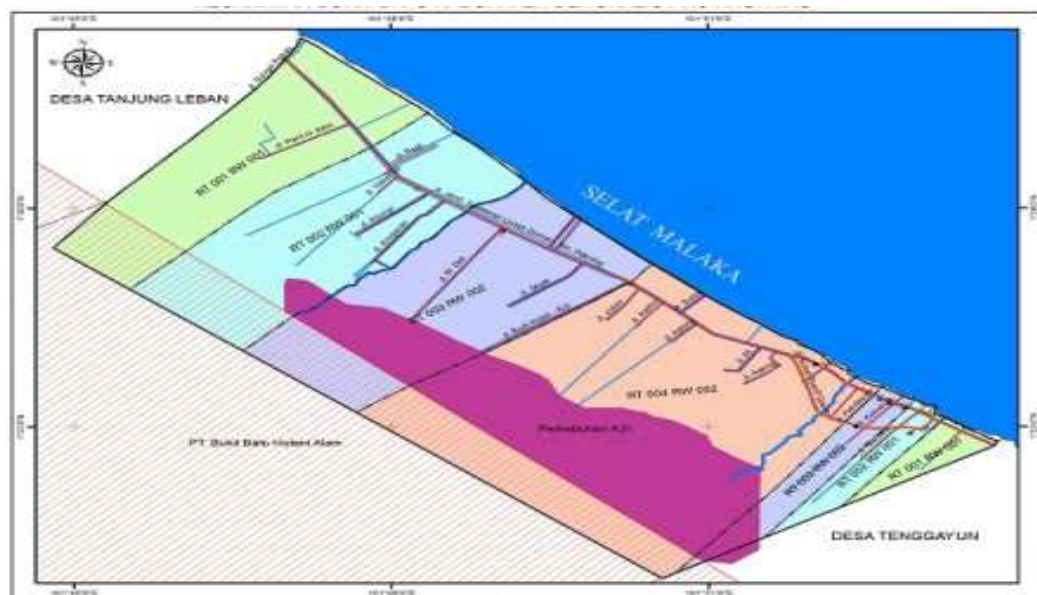


Gambar 2 : Kawasan Revegetasi Desa Sepahat (sumber : foto pribadi, 9 Juli 2021)

Menurut data yang diperoleh dari kantor desa Sepahat, untuk mengantisipasi dan mengatasi hal ini Pemerintah bersama dengan berbagai pihak seperti WWF Riau, Yayasan Mitra Insani dan masyarakat Desa Sepahat telah membangun kanal-kanal sebagai upaya *rewetting* lahan Gambut. Selain itu WWF Riau bersama Pemerintah Desa serta Yayasan Gambut dengan dukungan dana dari Global Environment Centre (GEC)

dan International Fund For Agriculture Development (IFAD) telah melakukan upaya revegetasi lahan gambut dengan melakukan penanaman bibit Pulai, Geringgang dan Sagu.

Desa yang dulu pernah menjadi Desa tertinggal (IDT) ini, luas wilayahnya adalah 25.500 Hektar. Sebagian besar wilayah merupakan lahan perkebunan / pertanian yang terdiri dari 3.425 Ha kebun Kelapa Sawit, 500 Ha kebun karet, 14 Ha kebun kelapa, 2 Ha kebun pinang, 15 Ha kebun nenas, 11,5 Ha kebun rambutan, 15 Ha kebun jagung, 11 Ha kebun ketela pohon, 2 Ha kebun duku, 2 Ha kebun durian, 4 dan Ha kebun buah lainnya. Seiring luasnya wilayah perkebunan dan pertanian maka mata pencarian 62,5 % Penduduknya adalah sebagai petani. Para petani ini sebagian tergabung dalam kelompok-kelompok, baik formal maupun non formal. Kelompok tani yang terdapat di Desa Sepahat terdiri dari : Kelompok Tani Maju bersama, Kelompok Tani Berkat Bersama dan Kelompok Tani Usaha Bersama, Kelompok-kelompok ini tergabung dalam Gapoktan Berkah Bersama yang memiliki anggota 69 kepala keluarga.



Gambar 3 : Peta Desa Sepahat (sumber : <https://www.sepahat.desa.id/profil/>)

Secara geografis desa yang terletak di Jalan raya Dumai – Sungai Pakning ini berhadapan langsung dengan laut Selat Malaka, adapun batas wilayah desa dan detailnya sebagai berikut :

- Batas sebelah utara : Selat Malaka
- Batas sebelah selatan : Kecamatan Mandau
- Batas sebelah Barat : Desa Tanjung Leban
- Batas sebelah timur : Desa Tanggayun

Desa yang memiliki 4 dusun dan 9 RW ini adalah dataran rendah (hanya 1-5 meter dari permukaan laut). Jarak Desa Sepahat ke Tanggayun yang merupakan ibukota Kecamatan adalah 14,2 Km dan jarak ke Bengkalis yang merupakan Ibukota Kabupaten adalah 52 Km dengan menyeberang laut menggunakan perahu dari pelabuhan penyeberangan Sungai Selari.

4. Peran modal sosial dalam pemberdayaan petani

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat Desa Sepahat, modal sosial mulai menjadi perhatian. Modal sosial ini merupakan kekuatan dasar yang dimiliki oleh masyarakat. Tanpa modal sosial yang kuat, masyarakat akan mudah terpengaruh dan terbawa arus yang dapat membawa masing-masing individu pada sikap mementingkan

diri sendiri atau kepentingan yang bersifat pragmatis. Modal sosial ini dapat menjadi modal stimulan yang dimiliki oleh petani untuk terbukanya peluang dan potensi modal lainnya. Konsep modal sosial, yang awalnya dipahami sebagai suatu bentuk dimana masyarakat menaruh kepercayaan terhadap komunitas atau kelompok, dan individu sebagai bagian darinya, mereka membuat kesepakatan bersama sebagai suatu nilai dalam kelompoknya.

Modal sosial adalah segala sesuatu yang membuat setiap orang di masyarakat bergabung dalam kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama atas dasar kebersamaan, didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi. Modal sosial yang dimiliki petani yang mengelola lahan gambut di Desa Sepahat sangat penting untuk keberlangsungan usaha tani. Bagi petani, modal sosial yang terdiri dari : kepercayaan, norma sosial dan partisipasi jaringan sosial berguna terhadap kegiatan kelompok tani dalam hal merencanakan kegiatan bersama, untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu harapan positif atau keyakinan kognitif seseorang yang dipegang dan ditujukan pada pihak lain, bahwa pihak tersebut akan berperilaku sebagaimana yang diharapkan dan dibutuhkan. Ketika seseorang memutuskan untuk mempercayai orang lain, maka harapannya terhadap orang tersebut adalah dapat mewujudkan harapan-harapan dirinya. Parameter kepercayaan terdiri dari rasa keadilan, toleransi dan keramahan.

Setiap anggota dalam kelompok-kelompok tani di Desa Sepahat merasa mendapatkan perlakuan yang sama dengan sikap netral di setiap aktivitas yang dilaksanakan kelompok tani. Rasa keadilan kelompok ini tercermin dari perasaan yang dimiliki anggota terhadap anggota lain, cara pendekatan dan cara berinteraksi antar anggota yang memandang anggota lain sebagai keluarga. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama serta saling menghargai dan toleran terhadap perbedaan yang ada. Bilamana terdapat perbedaan pendapat selalu dimusyawarahkan guna mencapai sebuah kemufakatan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu mereka membangun kebersamaan kelompok dalam hubungan persaudaraan yang erat, dengan komunikasi yang penuh keramahan terutamanya terlihat saat mereka berkumpul, bergaul, berbincang dan bekerjasama atau bergotongroyong. Kepercayaan sebagai parameter modal sosial dalam kelompok tani di Desa Sepahat tercermin dalam ucapan, sikap, perilaku, tindakan, perasaan dan respon serta kesediaan untuk bekerjasama antara anggota kelompok. Hubungan yang didasari oleh perasaan ini memunculkan rasa percaya antar sesama anggota kelompok.

b. Norma sosial

Norma merupakan sekumpulan aturan yang terdiri dari perintah atau larangan yang dirumuskan dan disepakati bersama dalam sebuah kelompok atau masyarakat, yang tegas dan jelas. Norma sosial berisikan sekumpulan pendapat yang disepakati dalam kelompok sosial atau masyarakat Desa Sepahat tentang bagaimana semestinya anggota kelompok/masyarakat tersebut bertingkah laku, bagaimana seharusnya bertindak, dan bagaimana bergaul yang pantas, sehingga keharusan dan kepantasan itu menjadi terbiasa dan selanjutnya dijadikan suatu nilai yang dipertahankan secara turun temurun sampai, diwujudkan menjadi aturan tidak tertulis dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat. Parameter norma sosial ini terdiri dari kesepahaman, nilai sosial dan harapan.

Setiap petani yang menjadi anggota kelompok tani memiliki kesepahaman yang sama tentang tujuan pembentukan kelompok dan nilai-nilai yang diyakini dan menjadi pedoman dalam setiap aktivitas kelompok, sehingga setiap anggota tetap berupaya

melakukan tindakan untuk mencapai tujuan bersama didasari nilai sosial yang baik. Nilai sosial tersebut misalnya saling nasehat menasehati didalam kebaikan dan mengingatkan serta menegur dan menasehati anggota lain yang melakukan kesalahan, terutamanya saling membantu anggota yang mengalami musibah atau kesulitan. Nilai sosial ini diwujudkan dalam kehidupan berkelompok dan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan yang terus dilakukan oleh para petani yang tergabung dalam kelompok. Tentunya kebiasaan yang baik dan pantas untuk dilakukan, seperti tidak melakukan kecurangan dalam melakukan penimbangan hasil panen, atau mungkin memanipulasi berat komoditas. Selanjutnya setiap anggota tentunya memiliki harapan untuk kehidupan yang lebih baik melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Hal ini mendorong para petani untuk memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya serta pengetahuan yang ada untuk merencanakan secara bersama setiap usaha yang dilakukan dan bekerja keras secara bersama-sama melaksanakan setiap rencana dengan sebaik mungkin, demi mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial yang diimpikan bersama. Dengan adanya norma sosial ini maka para petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani di Desa Sepahat memahami dengan baik apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi norma sosial ini menjadi menjadi pedoman atau standar dalam menjalani kehidupan sosial berkelompok atau bermasyarakat sehingga tercipta keteraturan, ketertiban dan kedamaian.

c. Partisipasi dalam jaringan sosial

Partisipasi dalam jaringan sosial merupakan kemampuan para petani dalam melibatkan diri dalam suatu jaringan sosial, melalui berbagai pola hubungan yang saling berdampingan atas dasar kerelaan, kesamaan dan keadaban.

Nilai-nilai positif yang tumbuh dalam kelompok mendorong petani yang berada di lingkungan sekitar kelompok untuk bergabung dan melibatkan diri dalam kelompok secara sukarela tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Kerelaan juga tercermin dari partisipasi setiap petani untuk melaksanakan gotong royong setiap bulan yang dilaksanakan oleh kelompok tani, mulai dari membersihkan saluran air, pemeliharaan jalan ke kebun sampai dengan gotong royong membantu meringankan beban kesulitan anggota kelompok yang ditimpa musibah atau kesulitan. Ikatan yang terbentuk karena kerelaan ini lebih dari sekedar bekerja sama namun membentuk rasa persaudaraan antar anggota. Rasa persaudaraan semakin kuat melalui rasa memiliki dan rasa kebersamaan. Sesama anggota merasa memiliki kesamaan kebutuhan, kesamaan tujuan dan harapan serta kesamaan pandangan. Kesamaan ini membuat para anggota kelompok tani tidak egois dan menjunjung sikap saling menghargai bila terdapat perbedaan pendapat dan menyampaikan pendapat dengan cara yang santun. Santun dalam bertutur dan berperilaku terhadap sesama dalam pergaulan kelompok.

Kerelaan, kesamaan dan keadaban mendorong mereka untuk sama-sama berperan aktif dalam pengambilan bagian atau keterlibatan terhadap setiap keputusan yang diambil demi tercapainya tujuan bersama, dilakukan dengan cara memberikan dukungan pikiran, tenaga, materi dan tanggung jawab.

Modal sosial tersebut di atas mempunyai pengaruh terhadap hubungan diantara para pelaku program. Kelompok tani yang memiliki modal sosial tinggi akan terbiasa hidup dalam suasana rukun, gotong royong dan saling bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggalnya serta berupaya menjadi fasilitator antara masyarakat dengan pihak Pemerintah Desa Sepahat. Hubungan yang terjalin antar anggota kelompok, antara kelompok lainnya / masyarakat dan dengan Pemerintah Desa terjalin dengan baik. Hubungan ini menjadi satu modal sosial yang terbangun dan memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan. Hal ini disebabkan karena modal sosial tersebut menjadi dasar terciptanya partisipasi dan kemandirian dalam masyarakat.

Modal sosial yang menjadi dasar terwujudnya partisipasi dan kerjasama dalam kelompok tani menjadi sangat penting dalam upaya penguatan kapasitas masyarakat, khususnya bagi para petani Desa Sepahat yang masih berpegang teguh pada norma dan nilai-nilai tradisi. Modal sosial memberi dukungan kepada masyarakat untuk melakukan tindakan secara bersama-sama dan menerima dampak secara bersama-sama pula. Selain sebagai modal yang dapat menggerakkan pemberdayaan, modal sosial juga sekaligus merupakan pemberdayaan itu sendiri, dimana bagian dari pemberdayaan modal sosial adalah memperkuat masyarakat madani. Istilah masyarakat madani digunakan untuk struktur-struktur formal atau semiformal yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dengan inisiatif mereka sendiri, bukan sebagai konsekuensi dari sebuah program atau intruksi tertentu dari pemerintah.

Tujuan pemberdayaan petani dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan keberdayaan atau kemampuan petani pada semua aspek. Namun demikian ada aspek-aspek yang dijadikan prioritas dan lebih dulu diperkuat agar petani dapat mengembangkan aspek-aspek lainnya. Dari pengalaman dan dampak kurang baiknya pemberian bantuan modal ekonomi serta kelemahan modal fisik, menunjukkan bahwa kedua jenis modal tersebut kurang tepat untuk dijadikan sebagai modal dasar pemberdayaan. Modal manusia dan modal sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan meskipun keluaran yang dihasilkan berbeda. Modal manusia keluarannya berbentuk pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam bertindak, sedangkan modal sosial merupakan modal yang abstrak dan keluarannya hanya dapat dilihat dalam bentuk aksi-reaksi dan hubungan antar anggota dalam kelompok. Dalam konteks pemberdayaan, penjelasan mengenai modal sosial sangat relevan untuk menjawab pertanyaan siapa yang akan melakukan pemberdayaan, apa yang dilakukan dan bagaimana mereka melakukannya.

Program pemberdayaan yang dilakukan ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir Petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan memiliki daya saing dalam berusaha tani. Beberapa kegiatan yang mampu menstimulasi petani agar lebih berdaya, antara lain, melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran yang luas (berbasis on-line), penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

KESIMPULAN

Modal sosial di kalangan anggota kelompok tani yang melakukan usaha tani di lahan gambut, dibangun melalui kepercayaan, norma-norma, keterlibatan dan partisipasi petani dalam jaringan sosial. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab sosial para petani untuk ikut mempraktekkan pertanian berkelanjutan yang ramah terhadap lingkungan gambut dan berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan. Kelompok tani merupakan kelompok sosial yang muncul sebagai akibat adanya kepercayaan antara individu dan merupakan dasar untuk kepercayaan yang lebih besar sebagai upaya kolektif baru untuk mendukung dan melaksanakan program restorasi lahan gambut. Peranan kelompok sosial yang merupakan perantara dalam implementasi kebijakan publik ini sangat penting dan telah terbukti membantu keberhasilan program pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat khususnya para petani di Desa Sepahat, saat ini tidak lagi cukup melalui introduksi inovasi untuk kebutuhan teknis dalam melaksanakan kegiatan usaha taninya, namun jauh ke depan para petani juga harus diberi akses terhadap program kegiatan pemberdayaan lainnya, sehingga partisipasi petani juga bisa dijadikan modal sosial bagi pemberdayaan petani dan keluarganya.

Ucapan Terima Kasih

Apresiasi disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan artikel ilmiah mengenai peran modal sosial dalam pemberdayaan petani di lahan gambut desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis. Untuk itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada kepala desa Sepahat Muhammad Azli serta kelompok tani Desa Sepahat yakni, kelompok tani maju bersama, kelompok tani berkat bersama, dan kelompok tani usaha bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131
- Carpenter, JP. et.al., 2004, *Social Capital and Trush in South East Asian Cities, Urban Studies* 41 (4), 853-874 April 2004, diakses tanggal 4 Juli 2021. (<https://www.researchgate.net/publication/>)
- Fukuyama, F., (2001). *Social Capital and Civil Society, International Monetary fund Working Paper*, WP/00/74, 1-8, In Elinor Ostrom and TK Ahn 2003, Foundation of Social Capital. Massachusetts, Edward Elgar Publishing
- Hamid, Hendrawati, M, Si, Ir., 2018, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, De La Macca, Makassar
- Hasbullah, J., 2006, *Sosial Kapital, Menuju keunggulan budaya manusia Indonesia*, Jakarta: MR-United Press
- Ife J, Tesoriero F. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Pustaka Pelajar
- Limon, J., Nahapiet, Ghoshal, 2012, *Farmers' Contribution to Agricultural Social Capital: Evidene From Southern Spain, Documentos De Trabajo / Working Paper Series*. Instituto De Estudios Sociales Avanzados
- Mardikanto T dan Poerwoko S, 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Najiyati, S., Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia*. Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor.
- Pranoto D.Y., et.al., (2016). *Penilaian rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG) Provinsi Kalimantan Barat Antara Sistem Pendukung Kebijakan Atau Advokasi*. Pontianak. Universitas Tanjungpura.
- Putnam, RD., 1993, *The Prosperous Community; Social Capital and Public Life*, American Prospect No.13 Spring
- Rahiem, M.M.A., et.al., 2020. *Jelajah Kerja Riset dan Pengembangan Restorasi Gambut. Kedeputan Penelitian dan Pengembangan, Badan Restorasi Gambut, Republik Indonesia*, Jakarta, 2020
- Sabiham, Supiandi, 2018, *Pemanfaatan lahan gambut*, Kolom Tempo.co, 23 Februari 2018
- Supiandi Sabiham, *Guru Besar Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan IPBn, Artikel kolom tempo 23 feb 2018*.
- Wibisono, GM., 2015, *Strategi penguatan modal sosial kelompok tani dalam pengembangan produk sayuran, Skripsi Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro*

CAPACITY BUILDING DALAM PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI DI KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS

Wifa I Lumbangaol, Ruth Aldiz Khatarine, Monica Rosiana Sitorus,
Jefri Fujima Sianturi, Alexius

Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Email: wifa.i3461@student.unri.ac.id; ruth.aldez3621@student.unri.ac.id;
monica.rosiana0263@student.unri.ac.id; fujimajefry13@gmail.com; alexius0428@gmail.com.

Abstrak

Provinsi Riau memiliki luas lahan gambut 3,89 juta hektar akan tetapi sekitar 2,31 juta hektar telah terdegradasi. Luas lahan gambut di Kabupaten Bengkalis diperkirakan sebesar 800.017,67 hektar. Selain masalah lahan gambut terdegradasi, masalah kebakaran lahan gambut dan isu pemanasan global juga menjadi perhatian penting dalam mengelola lahan gambut menjadi lebih baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana *Capacity Building* Dalam Pengelolaan Lahan Gambut Menuju Kemandirian Ekonomi di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis melalui program CSR PT. Pertamina Sei Pakning. Salah satu program yang diteliti yaitu Program Pengembangan Pertanian Kawasan Nenas Terintegrasi di Desa Kampung Jawa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian di luar berbagai tahapan berpikir kritis-ilmiah, di mana seorang peneliti mulai berpikir secara induktif, yang menangkap berbagai fakta atau fenomena sosial, pengumpulan data yang dilakukan secara online, kemudian menganalisisnya dan kemudian mencoba menganalisis teori berdasarkan apa yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Capacity Building* yang dilakukan oleh CSR PT. Pertamina Sei Pakning pada kelompok Tani Tunas Makmur sudah dilakukan dengan optimal. Pertama, dengan dilakukannya pengembangan individu melalui pelatihan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Selain itu, pendapatan individu dari hasil pengolahan nenas sudah dapat dikatakan baik. Kedua, dilakukannya manajemen pengolahan organisasi yang baik. proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap anggota kelompok dengan rapat. Selain itu, berkembangnya kelompok tani dari segi lahan yang dikelola bertambah, bibit yang ditanam bertambah dan anggota kelompok yang bertambah. Ketiga, dalam hal sistem. Sudah mengikuti regulasi dari Dinas Koprasi dan telah terdaftar di Dinas Koprasi.

Kata kunci: *capacity building, corporate social responsibility*, pengelolaan lahan gambut, kemandirian ekonomi

PENDAHULUAN

Ekosistem gambut adalah aset yang dapat diusahakan untuk berbagai kegiatan produksi. Namun, kearifan dari pengelola terkait dengan pemanfaatan lahan tersebut sesuai dengan kemampuan daya dukung lahan menjadi sangat penting. Kemampuan daya dukung lahan gambut untuk penggunaan lain berhubungan erat dengan karakteristik gambutnya. Indonesia merupakan negara ke empat dengan lahan gambut terluas setelah Rusia, Kanada, dan Amerika yaitu seluas 14,6 juta hektar. Riau sendiri merupakan provinsi di pulau Sumatera yang mempunyai lahan gambut terluas, yakni 3,89 juta hektar dari 6,49 juta hektar total luas lahan gambut di pulau Sumatera. Akan tetapi sekitar 2,31 juta hektar telah terdegradasi. Luas lahan gambut di Kabupaten Bengkalis diperkirakan sebesar 800.017,67 hektar.

Meskipun terdegradasi, sebagian lahan gambut atau hampir separuhnya dimanfaatkan masyarakat sebagian besar untuk budidaya tanaman perkebunan meliputi kelapa sawit, karet, disusul tanaman pangan meliputi padi, jagung, kedelai, ubijalar dan ubikayu, selanjutnya tanaman hortikultura buah berupa nanas, pisang, rambutan, cempedak, dan nangka, sayuran buah meliputi cabe, timun, dan tomat, dan sayuran daun terdiri dari kangkung, bayam, sawi, dan selada (Dinas Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 2013).

Pengelolaan gambut untuk pertanian, dalam skala menengah dan luas, merupakan

usaha yang sangat mahal, dimana seringkali terjadi biaya produksi jauh melebihi hasil jual produksi pertaniannya. Sehingga dalam jangka panjang, sama sekali tidak menguntungkan. Pertanian gambut dalam skala kecil oleh petani, tanpa amelioran dan pemupukan yang memadai, hanya akan mampu bertahan beberapa tahun, selama kesuburan asli alami masih ada (Ismail dalam Nasrul B 2010). Selain pemanfaatan pada bidang pertanian, pengelolaan lahan gambut secara tidak bertanggungjawab juga dapat mendatangkan bencana alam yaitu kebakaran lahan yang umumnya terjadi pada lahan gambut. Selama tahun 2015, terdapat 1.632 titik api di Provinsi Riau. Lahan gambut sebagai media tumbuh tanaman telah lama dimanfaatkan petani untuk menghasilkan bahan pangan dan komoditas perkebunan (Masganti 2013). "Jika lahan gambut tidak dikelola dengan baik, maka potensinya untuk melepas karbon ke atmosfer semakin besar. Hal ini menjadi perhatian kita semua mengingat isu pemanasan global yang berkembang (Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian Kementerian Pertanian, Muhrizal Syarwani)".

Banyak masalah terkait dengan lahan gambut di Riau diantaranya adalah lahan gambut terdegradasi, kebakaran lahan gambut dan isu pemanasan global yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan dan juga masyarakat yang tinggal di daerah gambut. Hal tersebut sangat diperlukan peningkatan kemampuan semua pihak yang berkompeten dalam mengelola lahan gambut dengan baik sehingga dibutuhkan adanya pengembangan kapasitas (*capacity building*). *Capacity Building* merupakan bagian penting di berbagai aspek kehidupan, dalam penelitian ini *Capacity Building* dilakukan pada skala kecil yang berperan langsung mengelola lahan gambut yaitu kelompok tani, pengembangan kapasitas penting untuk meningkatkan kemampuan menjadikan lebih baik kinerja kelompok tani dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola lahan gambut.

Capacity Building merupakan istilah yang digunakan untuk membangun suatu masyarakat melalui perubahan pada dirinya, misalnya peningkatan ilmu pengetahuan, skill, pengorganisasian program dan lain-lain. *Capacity Building* merupakan sebuah model proses perubahan, gerak perkembangan dan perubahan yang bertingkat secara individu, kelompok dan organisasi maupun perubahan pada pembentukan frame work sebuah sistem kearah yang lebih baik. Karakteristik *Capacity Building* menurut Gandara dalam Amboningtyas, D. (2018) dicirikan sebagai berikut:

- a. Merupakan sebuah proses yang berkelanjutan
- b. Memiliki esensi sebagai sebuah proses internal
- c. Dibangun dari potensi yang telah ada
- d. Memiliki nilai intrinsik tersendiri
- e. Mengurus masalah perubahan
- f. Menggunakan pendekatan terintegrasi dan holistik

Dari uraian diatas, kesimpulan peneliti bahwa *Capacity Building* sebagai usaha meningkatkan kapasitas, sistem-sistem kemitraan, yaitu komitmen bersama dan dapat terwujud dari program-program, terintegrasi satu dengan lainnya, saling mengisi, sehingga menjadi satu kekuatan masif dari satu sumber rumusan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan lahan gambut akan berbeda, apabila diterapkan tingkat manajemen tinggi (high inputs), seperti yang biasanya dilaksanakan oleh swasta atau perusahaan yang bertujuan komersial. Hal tersebut telah mendorong salah satu perusahaan di Kabupaten Bengkalis tepatnya Kelurahan Sungai Pakning yaitu PT. Pertamina RU II Sei Pakning untuk menginisiasi sejumlah program CSR dalam melestarikan lahan gambut dari kebakaran hutan dan pemanfaatannya. PT. Pertamina RU II Sei Pakning menerapkan CSR melalui empat bidang yaitu, yaitu sumbangan (*charity*), infrastruktur (*infrastructure*), pengembangan kapasitas (*capacity building*), dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

Seiring dengan perkembangan zaman pola perusahaan dalam menerapkan program CSR lebih mengarah kepada pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan kapasitas merupakan bagian penting di berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam penelitian ini pengembangan kapasitas pada kelompok tani, pengembangan kapasitas penting untuk meningkatkan kemampuan atau menjadikan lebih baik kinerja kelompok tani dalam menjalankan tugasnya. Pengelolaan lahan gambut yang didasarkan pada indikator *Capacity Building* dengan menitikberatkan pada fokus kemandirian ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara merata dan berkesinambungan sekaligus mampu mengoptimalkan potensi lingkungan sekitar serta membentuk kapasitas masyarakat yang memiliki ketahanan ekonomi independen.

Penerapan kegiatan CSR sendiri sebenarnya merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dengan konsumen yang kemudian hal itu dapat menjadi keunggulan kompetitif mengingat bagi perusahaan perusahaan besar reputasi atau citra baik perusahaan merupakan aset penting yang harus dijaga dengan baik. Beberapa program CSR PT. Pertamina RU II Sei Pakning yang terealisasi merupakan program yang memanfaatkan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis, yaitu:

- a. Program Pengembangan Pertanian Nenas Terintegrasi
- b. Program Mitigasi Karhutlah Berbasis Masyarakat Peduli Api
- c. Program Arboretum Gambut
- d. Program Kurikulum Cinta Gambut

Berdasarkan program tersebut, Desa Kampung Jawa diberikan sebuah program pengembangan pertanian kawasan nenas terintegrasi yaitu pembinaan terhadap kelompok tani Tunas Makmur. Akibat dari kebakaran hutan dan lahan di Desa Kampung Jawa, banyak lahan yang tidak termanfaatkan dan jika tidak digunakan atau dialihfungsikan akan berpotensi untuk terjadinya kebakaran kembali. Luasnya lahan bekas terbakar menjadi potensi sekaligus permasalahan untuk masyarakat Kampung Jawa dikarenakan kurangnya keterampilan dalam mengolah lahan bekas terbakar agar dapat dimanfaatkan kembali.

Capacity Building dalam pengelolaan lahan gambut yang dimaksud peneliti sendiri ialah pengelolaan lahan gambut oleh skala kecil yaitu kelompok tani Tunas Makmur pada program CSR Pertamina Sei Pakning yaitu program Pengembangan Pertanian Kawasan Nenas Terintegrasi.



Gambar 1.1 Lahan perkebunan nenas Kelompok Tani Tunas Makmur
Sumber: PT. Pertamina RU II Sei Pakning

Pertamina melihat potensi dan semangat dari masyarakat membantu untuk mengubah lahan tersebut agar dapat menjadi lahan perkebunan dengan tujuan memperkecil potensi kebakaran dan meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya petani nanas Kampung Jawa. Oleh karena itu, masyarakat membuat sebuah Pertanian produktif dengan menanam nanas. Kegiatan pertanian nanas ini dikelola oleh 12 anggota FORKOMPA yang saat ini berprofesi utama sebagai petani nanas dan menjadi bagian dari kelompok tani Tunas Makmur. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji pengelolaan lahan gambut oleh kelompok tani Tunas Makmur yang didasarkan pada indikator *Capacity Building* di Desa Kampung Jawa mengingat masih banyaknya yang dapat dikembangkan oleh perusahaan terhadap desa tersebut dan mengkaji ulang mengenai program pengembangan pertanian kawasan nanas terintegrasi yang telah diberikan agar dapat berkembang dengan baik lagi kedepannya.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian di luar berbagai tahapan berpikir kritis-ilmiah, di mana seorang peneliti mulai berpikir secara induktif, yang menangkap berbagai fakta atau fenomena sosial (Bungin, 2015), pengumpulan data yang dilakukan secara online, kemudian menganalisisnya dan kemudian mencoba menganalisis teori berdasarkan apa yang diperoleh. Lokasi penelitian difokuskan pada PT. Pertamina RU II Produksi Sungai Pakning yaitu Desa Kampung Jawa Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Capacity Building Dalam Pengelolaan Lahan Gambut Menuju Kemandirian Ekonomi Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

Capacity Building merupakan istilah yang digunakan untuk membangun suatu masyarakat melalui perubahan pada dirinya, misalnya peningkatan ilmu pengetahuan, skill, pengorganisasian program dan lain-lain. *Capacity Building* merupakan sebuah model proses perubahan, gerak perkembangan dan perubahan yang bertingkat secara individu, kelompok dan organisasi maupun perubahan pada pembentukan frame work sebuah sistem kearah yang lebih baik.

Menurut Milen dalam Muhamad Rizki, Diki. (2015) bahwa dalam upaya pencapaian penguatan kapasitas kelembagaan maka harus difokuskan pada 3 (tiga) tingkatan yaitu :

1. Tingkatan Individual seperti potensi-potensi individu, keterampilan individu, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan individu dalam organisasi.
2. Tingkatan Organisasi seperti struktur organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan dan jaringan organisasi.
3. Tingkatan Sistem seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan peraturan, kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu.

Sementara itu, D. Eade dalam Suhendri & Purnomo (2017) merumuskan peningkatan kapasitas kemampuan dalam tiga dimensi, yaitu:

1. Individu;
2. Organisasi; dan
3. Network.

Upaya penguatan kapasitas berbagai tingkatan sebagaimana yang diuraikan di atas, diilustrasikan melalui gambar berikut:



Tabel 3.1
Tingkatan Pengembangan Kapasitas
(Sumber: Soeprapto, 2006)

- a. Tingkatan individual adalah individu sebagai sumber daya manusia organisasi yang harus ditingkatkan kemampuan dan profesionalisme baik itu tingkat pengetahuan, kompetensi, keterampilan maupun etika kerja dalam meningkatkan kualitas kinerja.

Dalam pencapaian suatu tujuan organisasi sangat diperlukan dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non manusia (non-human resources). Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Untuk merespon kecenderungan tersebut, maka setiap organisasi dituntut untuk mampu meningkatkan mutu sumberdaya manusianya. Karena sesungguhnya kualitas SDM inilah yang diyakini secara langsung akan menentukan keberhasilan tujuan yang direncanakan.

Pada indikator ini bahwa sumberdaya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi baik secara kualitas maupun kuantitas. Setiap langkah yang diambil menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh organisasi yang telah ditetapkan secara bersama. Selain itu, sumberdaya financial dan waktu pun menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Dari hasil penelitian dapat dianalisis bahwa sumberdaya manusia petani nenas di kelompok tani tunas makmur di desa dapat dikatakan optimal. Selain secara praktis sebelum mengikuti pelatihan sudah memiliki pemahaman mengenai tanam-menanam. Tapi setelah mengikuti pelatihan tentang berbagai metode penanaman nenas, hasil dan produksi nenas menjadi lebih baik. Pelatihan yang dilakukan diantaranya adalah pelatihan penanaman metode tanam jarak legowo (dengan jarak tanam), pelatihan perawatan tanaman nenas, selain itu ada juga pelatihan pengolahan nenas menjadi produk camilan seperti keripik, manisan, dodol, dll, pelatihan lain seperti pelatihan desain kemasan produk, pemasaran, dan manajemen usaha.

Gambar 3.1 Pelatihan dan Hasil Tanaman Nenas Kelompo Tani Tunas Makmur



Sumber: PT. Pertamina RU II Sei Pakning

Hasil yang didapat dari pelatihan metode tanaman jarak legowo (dengan jarak tanam) mendapatkan hasil yang optimal. Sebelumnya, Hasil dari penanaman nenasnya pun kurang memuaskan. Sebelumnya mengikuti pelatihan, hasil nenas tersebut tergolong ke grade c. dengan ukuran panjang ≤ 9.90 cm dan bobot ≤ 0.40 kg dan harga jual biasanya lebih murah dibanding grade a dan grade b. harga jual grade a bisa sampai Rp.15.000,- an. Harga nenas dengan kualitas grade b bisa mencapai Rp.7.000.000,- sampai Rp. 10.000,-. harga nenas dengan grade c dibawah dari Rp.7.000,. tapi setelah dilakukannya pelatihan mengenai pembibitan nenas dan perawatannya. Hasil buah dari grade c sudah berkurang. Lebih banyak hasil grade a dan b panjang 10.00-13.90 cm dan bobot 0.40-0.69 kg. Harga jual gandeng 2 dari grade a bisa mencapai Rp.15.000,- rb . satu gandeng grade b nya Rp. 7-10 rb. Untuk pengolahan digunakan grade c. setelah adanya pelatihan grade c sudah berkurang. Sebelumnya grade c nya 50 persen. Sekarang sudah berkurang. (Perebedaan nenas grade a,b, dan c terletak pada besarnya ukuran buah. Grade a lebih besar dari grade b dan c).

Dalam hal waktu. Pelatihan yang dilakukan dalam peningkatan kapasitas dalam waktu 2-3 hari tergantung kebutuhan dari pelatihan tersebut. Optimalnya pelatihan bisa dilihat juga dari narasumber yang didatangkan dari luar daerah dan betul-betul paham mengenai tanaman nenas tersebut. Seperti dari Kota Pekanbaru, Jakarta, Jawa . dan lain-lain. selain itu, pengetahuan, skill dan keterampilan petani dalam mengelolah lahan menjadi nenas menjadi lebih baik. dapat dilihat dari hasil nenas yang diperoleh.

Dalam hal pendapatan yang didapat dari anggota kelompok tani sudah dapat dikatakan baik. sebelumnya, masyarakat dari anggota kelompok tani tersebut mendapat penghasilana yang rendah dari pekerjaan sebelumnya. Dari

adanya pengelolaan lahan dari kelompok tani sudah bisa mendapat kisaran 2.500.000.- (tergantung hasil panen dan produksi nenas).

- b. Tingkatan Organisasi merujuk kepada penentuan tujuan, struktur, proses organisasi yang akan mempengaruhi bagaimana organisasi-organisasi tersebut mencapai sasaran, menyusun struktur kerja, dan memberikan struktur insentif. Hal ini penting karena untuk mencapai tujuan organisasi akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik para agen pelaksananya. Selain itu, struktur pada organisasi pelaksana juga harus diperhatikan karena struktur yang rumit pada suatu organisasi dapat menjadi penghambat pelaksanaan tujuan secara efektif. Aspek struktur mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana. Kapasitas unsur pelaksana merupakan penunjuk dalam pelaksanaan program yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan. Aktivitas para pelaksana, keahlian yang dimilikinya, dedikasi pada tugas, dan akses sumber daya yang memadai akan meningkatkan kemampuan pelaksana dalam mengatasi berbagai tuntutan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya. Disisi lain, kemampuan para pelaksana dalam merumuskan tujuan akan menentukan dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan tujuan.

Dari hasil peneliti dapat dianalisis bahwa organisasi pada kelompok tani tunas makmur di dapat dikatakan sudah optimal dari pelaksanaan pekerjaan dan pembagian kerjanya. Tujuan dan sasaran yang di capai dalam kelompok tani sudah berjalan baik. dalam pengambilan keputusan dikelompok tani sudah dilakukan oleh kelompok dengan melaksanakan rapat, rapat rutin dilaksanakan sebulan sekali. Sehingga keputusan-keputusan dan langkah-langkah yang diambil berdasarkan kemampuan setiap anggota kelompok dalam mengetahui masalah dan solusi yang dilakukan. sementara rapat tahunan koperasi dilaksanakan di awal tahun untuk melaporkan keadaan kas serta strategi usaha koperasi.

Gambar 3.2 foto organisasi dan kegiatan rapat kelompok tani tunas makmur



Sumber: PT. Pertamina RU II Sei Pakning

Dalam hal manajemen kelompok, pengelolaan hasil lahan nenas di produksi dan di kumpulkan kelompok. Sehingga hasil pertanian yang di dapat dari 13 tiga belas bulan sekali panen dapat dibagi per/bulannya kepada anggota kelompok. Perkembangan pengelolaan lahan pun berkembang dengan baik. di awal pengelolaan lahan menjadi lahan nenas di tahun 2017. Awalnya kelompok tani menanam 5.000 bibit. Di tahun 2018 naik menjadi 10.000 bibit. Hingga tahun ini, perkembangan kemajuan dari lahan nenas cukup baik. dapat dilihat juga dari bertambahnya anggota kelompok hingga saat ini. Jumlah anggota di

kelompok tani di tahun ini berjumlah 11 orang. Bertambahnya anggota menunjukkan bertambahnya lahan yang akan dikelola dikarenakan tanah/lahan yang digunakan untuk menanam nenas merupakan tanah/lahan masyarakat. Jadi, bertambahnya anggota kelompok tani bertambah juga luas lahan yang dikelola sehingga produksi dan pendapatan kelompok bertambah pula.

Tabel 2. Kategori Penerima manfaat di Program Pengembangan Kawasan Pertanian Nenas Terintegrasi tahun 2021

Program Pengembangan Kawasan Pertanian Nenas Terintegrasi	
Jumlah Kelompok	1
Jumlah Anggota	31
Jumlah Anggota Laki-Laki	11
Jumlah Anggota Perempuan	20
Dokumen Kelembagaan	1
Aset yang dikelola	Rp.1.080.662.088

Sumber : PT. Pertamina RU II Produksi Sungai Pakning

Dari tabel diatas menunjukkan organisasi kelompok tani nenas yang jumlah anggotanya adalah 31 orang. Dengan jumlah laki-laki 11 dan perempuan 20 yang bisa dikatakan lebih banyak perempuan. Dari jumlah perempuan yang ada, laki-laki hanya 55% dari jumlah perempuan. Dalam aset yang dikelola, Program pengembangan kawasan pertanian nenas terintegrasi ini senilai Rp.1.080.662.008.

Selain kelompok tani yang bekerja sama dalam koperasi untuk proses pemasaran dan lainnya. Kelompok tani juga bekerja sama dengan Pertamina RU II Prod. Sungai Pakning, Badan Restorasi Gambut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bengkalis, Dinas Koperasi Kab. Bengkalis.

- c. Tingkatan Sistem merujuk bahwa suatu organisasi harus melakukan upaya proses perbaikan pada sistem, kebijakan dan berbagai aturan yang menjadi dasar berbagai program, aktivitas dan kegiatan pada organisasi.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengamanatkan bentuk kelembagaan pelaku utama meliputi Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan asosiasi atau korporasi. Selanjutnya dalam UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pasal 71 tertulis "Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) ini disebut lembaga atau kadang-kadang "Kelembagaan" (Syahyuti et al. 2014) menjelaskan organisasi petani mempunyai fungsi utama bagi pihak pemerintah adalah untuk memperlancar komunikasi dan memuluskan administrasi program. Sementara bagi petani, organisasi sangat penting untuk berbagai fungsi ekonomi kolektif, yakni meningkatkan skala usaha. Dari sisi politik, organisasi petani merupakan wadah untuk menjalankan partisipasi pembangunan dan juga sebagai fungsi perwakilan di hadapan kekuasaan.

Dalam hal ini, kelompok tani tunas makmur di desa kampung jawa sudah menjalankan tingkatan sistem dalam mengatur kelompoknya untuk tujuan pemerintah menjalankan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, dari segi ekonomi mandiri masyarakat. Kelompok tani dari segi menjalankan sistem peraturan dari dinas koperasi dan sudah terdaftar dalam dinas koperasi.

2. Faktor Pendukung Pengelolaan Lahan Gambut Menuju Kemandirian Ekonomi

1. Tersedianya alokasi dana

Kelompok tani tunas makmur mendapat alokasi dana dari program corporate social responsibility (CSR) melalui PT. Pertamina RU II Produksi Sungai Pakning dalam hal pengembangan kapasitas.

Tabel 4.1. Alokasi dana Capacity Building PT. Pertamina RU II Produksi Sungai Pakning dari tahun 2015 sampai tahun 2018

Capacity Building					
	Perencanaan	Persentasi	realisasi	keberhasilan	Penerima manfaat
2015	35.000.000	6 %	31.500.000	90%	159
2016	46.000.000	9%	46.000.000	100%	110
2017	300.000.000	16 %	393.195.000	131%	4.034
2018	350.000.000	16%	352.600.000	101%	3.994

Sumber : PT. Pertamina RU II Produksi Sungai Pakning

Dapat dilihat dari table diatas, bahwa dari tahun 2015 melalui program CSR PT. Pertamina RU II Produksi Sungai Pakning dalam Capacity Building sudah memberi alokasi dana. Dalam hal ini kelompok tani tunas makmur yang bergerak mulai tahun 2017 mendapat alokasi dana tersebut.

2. kualitas bibit

Kualitas bibit yang ditanam membuat hasil produksi dari tanaman nenas menjadi lebih baik. yang sebelumnya mendapat hasil nenas yang buahnya kecil. Dikarenakan bibit yang berkualitas mendapat hasil buah yang besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Capacity Building Dalam Pengelolaan Lahan Gambut Menuju Kemandirian Ekonomi di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dengan informasi yang telah didapatkan dari informan penelitian melalui virtual daring dan telah dianalisis, maka penelitan ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Capacity Building dalam pengelolaan lahan gambut yang diterapkan kelompok tani Tunas Makmur melalui program CSR PT. Pertamina Sei Pakning bahwa pertama, indikator sumber daya manusia sudah berjalan dengan baik dengan adanya pelatihan yang diberikan dengan berkembangnya pengetahuan dan keterampilan yang didapat petani. Dapat dilihat dari hasil nenas yang didapat berkualitas. Selain itu, dari pendapatan yang diperoleh dari pengolahan tersebut sudah bisa menopang ekonomi dari masing-masing anggota kelompok. Kedua, indikator organisasi dapat dikatakan optimal, mulai dari pengambilan keputusan yang dilakukan kelompok. Sehingga setiap masalah ataupun kemajuan kelompok tani dilakukan bersama. Perkembangan organisasi dari manajemen pengolahan sudah baik. dengan bertambahnya lahan yang dikelola, bertambahnya bibit yang ditanam dan bertambahnya anggota kelompok tani. Selain itu, kerjasama kelompok tani yang sudah dilakukan untuk kemajuan organisasi. Ketiga, indikator sistem. Sudah terdaftarnya kelompok tani di Dinas Koprasi dan telah mengikuti regulasi-regulasi yang ada dari Dinas Koprasi.
2. Faktor pendukung Capacity Building dalam pengolahan lahan gambut menuju kemandirian ekonomi di kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis dengan adanya alokasi dana dari program program CSR PT. Pertamina RU II Produksi Sungai Pakning dalam Capacity Building dan kualitas bibit bagus yang digunakan dilahan pertanian nenas.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya, Terimakasih kepada Bapak Didik Bahagia selaku General Manager Pertamina RU II, Bapak Dr. Adianto S. Sos, M. Si selaku Dosen Pembimbing, Laboratorium FISIP UNRI, Kelompok Tani Tunas makmur, Petani Nenas dan semua orang yang ikut mendukung penulis hingga akhirnya boleh menyelesaikan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2018). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Di Era Revolusi 4.0.
- Amboningtyas, D. (2018). Pengembangan Capacity Building Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Usaha Kecil Menengah Di Kecamatan Tugu, Semarang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 3(2).
- Anisa, D., Cahyanti, S. D., Awaliyah, N. F., & Sudrajat, A. R. (2019). Capacity building dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 3(1).
- Bungin, M. B. 2015. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Dinas Taman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. 2013. Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. 185 halaman
- Gunawan, H. (2020). Pengelolaan Lahan Gambut Tanpa Bakar: Inovasi Penyediaan Unsur Hara pada Lahan Gambut Basah. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 10(4).
- Gandara, R. (2008). Capacity Building Dosen pada Jurusan di Perguruan Tinggi Badan Hukum Miliki Negara. Bandung: Fakultas Ilmu Pendidikan UPI.
- Handoko, Hani. 2010. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. PT.BPFE, Yogyakarta.
- Masganti, M. (2013). Teknologi inovatif pengelolaan lahan suboptimal gambut dan sulfat masam untuk peningkatan produksi tanaman pangan. *Pengembangan Inovasi Pertanian*, 6(4), 187-197.
- Muhamad Rizki, Diki. (2015). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0
- Nasrul, B. (2010). Penyebaran dan potensi lahan gambut di Kabupaten Bengkalis untuk pengembangan pertanian. *Jurnal Agroteknologi*, 1(1), 1-7.
- Ratmini, N. S. Karakteristik dan Pengelolaan Lahan Gambut untuk Pengembangan Pertanian Characteristics and Management of Peatland for Agricultural Development.
- Ratnasari, J. D. (2013). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(3), 103-110.
- Santoso, S. (2009). Pemberdayaan Masyarakat untuk Kemandirian Ekonomi Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Pemberdayaan Masyarakat untuk Kemandirian Ekonomi Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tahun 2009 di RT 03/RW 36, Kelu.
- Suhendri, S., & Purnomo, E. P. (2017). Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 174-204.
- Syahyuti. 2012. Kelemahan konsep dan pendekatan dalam pengembangan organisasi petani: analisis kritis terhadap Permentan No. 273 Tahun 2007. *Anal Kebijakan Pertan*. 10(2):119-142

DIFUSI INOVASI PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT BERKELANJUTAN (Studi Kasus Program Arboretum Gambut Marsawa oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning

Agus Rinaldi, Tantri Leo Sani, Wahyu Andrean, Nilanda Rizky

FISIP Universitas Riau, Pekanbaru

Email: rinaldisinaga78@gmail.com, wahyuandreas39@gmail.com,
fahkrurifqi12@gmail.com, tantri.leo2411@student.unri.ac.id

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan bencana rutin yang dihadapi Provinsi Riau pada musim kemarau. Adapun penyebab dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut terbesar diyakini 90% terjadi karena perbuatan manusia dan sisanya 10% karena bencana alam. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam menangani kebakaran ini namun, masih terkendala dengan kearifan masyarakat lokal. Dimana, masyarakat lokal masih memiliki kepercayaan bahwasanya dengan membuka lahan dengan cara dibakar. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak dari tradisi ini menjadikan semakin banyaknya terjadi kebakaran hutan dan lahan. Maka dari itu diperlukan proses difusi inovasi dalam mengelola lahan gambut yang bisa mengurangi kebakaran lahan serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Setelah dilakukan penelitian, PT. Pertamina RU II Sungai Pakning melakukan sebuah inovasi pengelolaan lahan gambut dengan membuat Arboretum Marsawa yang melibatkan kelompok tani dan masyarakat peduli api (MPA). Adapun tujuan dari pembentukan arboretum ini untuk mengenalkan dan melindungi ekosistem asli gambut beserta isinya yaitu flora khas gambut yang juga ada flora langka terancam punah seperti kantong semar Sumatra. Selain itu juga sebagai wahana edukasi dan riset mengenai gambut.

Kata kunci: difusi inovasi, pengelolaan lahan gambut, CSR

PENDAHULUAN

Fenomena kebakaran hutan dan lahan gambut adalah salah satu bencana rutin yang dihadapi Provinsi Riau khususnya pada periode kemarau. Kebakaran ini terjadi hampir di seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Riau, bahkan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia juga merasakan dampaknya sehingga bencana ini tidak hanya dianggap sebagai bencana lokal tapi sudah menjadi bencana Nasional. Bencana kebakaran yang terjadi di lahan gambut dapat menimbulkan kabut asap yang dapat mengancam kesehatan masyarakat serta juga dapat menimbulkan kerugian dalam bidang ekonomi maupun sosial. Kebakaran lahan dan hutan ini menimbulkan kerugian baik materiil hingga korban jiwa. Kebakaran juga menyebabkan terjadinya degradasi lahan gambut yang menimbulkan besarnya emisi karbon yang lepas di udara dan juga hilangnya biodiversitas di sekitarnya. (Johansen, 2015).

Adapun penyebab dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut terbesar diyakini 90% terjadi karena perbuatan manusia dan sisanya 10% karena bencana alam. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi, kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau menjadi salah satu bencana tahunan yang disebabkan oleh perilaku manusia. Fakta di lapangan menyatakan bahwa terdapat tindak kesengajaan membakar hutan dan lahan. Dan tujuan pembakaran tersebut adalah melakukan pembersihan lahan dalam rangka mempersiapkan pembangunan perkebunan.

Melihat hal tersebut tentunya dibutuhkan solusi yang dapat menjawab serta mengatasi permasalahan ini. Salah satu yang harus dilakukan yaitu melakukan inovasi. Adapun inovasi yang dimaksud yaitu inovasi dalam mengelola lahan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan khalayak sasaran (Finley; McKenzie; Parisot; Sherry; Spoots dalam Sahin, 2006), yaitu masyarakat petani disekitar sungai Pakning.

PT. Pertamina Refinery Unit (RU) II yang merupakan salah satu perusahaan yang ada di Kelurahan Sungai Pakning bekerjasama dengan Masyarakat Peduli Api (MPA) serta Kelompok Tani melalui program Arboretrum Gambut Marsawa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Pengelolaan lahan gambut diindonesia dinilai berhasil sehingga menjadi contoh bagi Negara-negara lain di dunia (Bisnis.com). Adapun tujuan dari program ini yaitu untuk mengenalkan dan melindungi ekosistem asli gambut beserta isinya yaitu flora khas gambut yang juga ada flora langka terancam punah seperti kantong semar Sumatra.Selain itu juga sebagai wahana edukasi dan riset mengenai gambut.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan diatas, maka diperlukannya pengkajian yang lebih mendalam terkait proses difusi inovasi pengelolaan lahan gambutberkelanjutan pada program Arboretrum Gambut Marsawa yang dilakukan PT. Pertamina RU II Sungai Pakning.

Difusi Inovasi terbentuk dari dua padanan kata yaitu difusi dan inovasi. Rogers 1995 dalam Sciffman dan Kanuk (2010) menyebutkan difusi merupakan proses dimana keadaan suatu inovasi dikomunikasikan berdasarkan saluran tertentu dalam periode waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Selain itu, difusi juga dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perubahan sosial yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur sistem sosial.

Tujuan utama dari difusi inovasi yaitu adopsinya inovasi oleh anggota sosial tertentu (Nababan,2014;45).Adopsi dapat diartikan sebagai sebuah keputusan untuk menggunakan inovasi dan penolakan diartikan sebagai keputusan untuk tidak mengadopsi inovasi(Rogers,2003:17 ; Mardikanto dalam Levs,1996 : 21).Maka proses difusi inovasi merupakan proses komunikasi persuasif yang tujuan akhirnya tidak hanya berhenti pada tataran pengetahuan atau kognisi tapi diharapkan sampai pada terjadinya perubahan perilaku yaitu menerima dan menggunakan inovasi,dalam sistem sosial tertentu.

Menurut Rogers (2003) dalam proses difusi inovasi terdapat empat elemen pokok yaitu inovasi(*innovation*),saluran komunikasi (*communication channel*),waktu (*time*) dan sistem sosial (*social system*).Inovasi merupakan gagasan,tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang.Dalam hal ini,kebaruan inovasi diukur secara objektif menurut pandangan individu yang menerimanya.Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi untuk orang itu.Konsep 'baru' dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali

Saluran Komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima.Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidak perlu memperhatikan (a) tujuan diadakannya komunikasi dan (b) karakteristik penerima.Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien, adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal.

Jangka Waktu yaitu proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam proses pengambilan keputusan inovasi,keinovatifan seseorang: relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi,dan kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial.

Sistem Sosial adalah kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama(Rogers,2003 :23).Keputusan untuk menerima ataupun menolak sebuah inovasi dapat mempengaruhi dari tingkat adopsi inovasi tersebut (Rogers ,2003 : Wyne dalam

Vries et al.,2014).Dalam sistem sosial keputusan untuk menerima atau menolak sebuah inovasi dapat dilakukan oleh individu atau perorangan, secara bersama-sama dan secara koersif oleh pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih besar (Rogers 2003).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Berdasarkan dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata,dalam suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan pemanfaatan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Penelitian ini ingin mendapatkan gambaran mengenai proses difusi inovasi dalam pengolahan lahan gambut berkelanjutan pada program arboretrum gambut Marsawa yang dilakukan oleh PT.Pertamina Sungai Pakning RU II.Informan dalam penelitian ini yaitu Community Development Officer (CDO) PT.Pertamina dan ketua Masyarakat Peduli Api (MPA). Lokasi penelitian ini dilakukan di Arboretrum Marsawa yang terletak di Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Sedangkan waktu penelitian berlangsung dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi,wawancara dan dokumentasi.Adapun data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan informan.Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi kegiatan difusi inovasi pengolahan lahan gambut pada arboretrum marsawa di Sungai Pakning.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Arboretrum Gambut Sebagai Inovasi Pengelolaan Gambut Berkelanjutan

Arboretum gambut marsawa merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan gambut berkelanjutan yang dilatar belakangi dengan terjadinya kebakaran hutan serius yang dialami provinsi riau yang tidak hanya berdampak pada sosial ekonomi namun terhadap lingkungan khususnya pada flora khas gambut. Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI),Riau Riko Kurniawan dikutip dalam merdeka.com, menilai bahwa arboretum gambut marsawa merupakan kegiatan positif terkait aktivitas di lahan gambut yang tidak hanya menguntungkan masyarakat, namun sekaligus tidak merusak gambut itu sendiri.

Arboretum gambut marsawa sebagai destinasi wisata alam di kabupaten bengkalis serta pusat edukasi dan konservasi gambut di provinsi Riau bertujuan untuk melindungi dan mengenalkan ekosistem asli gambut beserta isinya yang berfokus pada flora khas gambut serta flora-flora yang terancam punah, salah satunya kantong semar sumatera.

Kondisi sebelum adanya arboretum gambut tersebut, masyarakat belum paham mengenai informasi tanaman yang ditemui dilahan gambut, sehingga masyarakat tidak mengetahui manfaat dan dampak dari gambut serta tanaman-tanaman tersebut. Dan setelah adanya arboretum tersebut telah terlaksana proses edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem gambut dengan datang dan melihat koleksi tanaman disana. Selain itu juga sekolah dasar didaerah tersebut yang tidak memiliki kurikulum lingkungan dapat belajar langsung di arboretum sebagai wadah pendidikan dan riset mengenai gambut sehingga mampu menunjang pelaksanaan kurikulum lingkungan khususnya gambut.

B. Saluran Komunikasi Arboretrum Gambut

Dalam proses difusi terdapat elemen saluran komunikasi yang digunakan agar inovasi tersebut dapat diterima dan terlaksana meliputi tujuan diadakannya komunikasi dan karakteristik penerima. Proses difusi inovasi arboretum gambut marsawa menunjukkan saluran komunikasi yang melibatkan kelompok masyarakat. Dalam hal ini koperasi tani tunas makmur dan beberapa anggota kelompok MPA.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, bentuk saluran komunikasi yang dilaksanakan pihak Pertamina merupakan kategori interpersonal, strategi komunikasi yang dilakukan awalnya dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh yang berpengaruh pada kelompok masyarakat disana dan setelah terjalinnya kerjasama maka dilaksanakan rapat kelompok, pemberian bantuan peralatan, berbagai pelatihan seperti pelatihan pengelolaan pariwisata, pengelolaan tanaman dan lain-lain. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut awalnya sudah terbentuk namun, dari kelompok serta sistem didalamnya belum berjalan dengan baik, dan setelah adanya keterlibatan dari pihak Pertamina mulai memberikan edukasi terkait pengelolaan kelompok kedepannya.

Namun, hasil dari komunikasi tidak selalu berjalan dengan apa yang diharapkan, hal ini terbukti dengan kurangnya partisipasi dari beberapa anggota kelompok yang mana berdasarkan observasi lapangan melihat bahwa beberapa anggota memiliki keinginan tersendiri yang belum dapat dipenuhi program tersebut. Salah satunya dalam hal ekonomi, dimana program arboretum ini tidak hanya mengangkat isu ekonomi tetapi juga isu lingkungan. Berdasarkan isu lingkungan kegiatan ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan namun dari sisi ekonomi kegiatan ini belum sepenuhnya memenuhi harapan anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rizal selaku Community Development Officer (CDO) PT. Pertamina, anggota kelompok terkesan terburu-buru untuk mendapatkan hasil ekonomis, dimana hasil yang didapatkan tentu tidak instan, sehingga anggota jadi kurang aktif dalam merawat programnya. Keadaan ini benar terjadi dibuktikan dengan hasil observasi peneliti yang melihat keadaan infrastruktur arboretum yang rusak dan terbengkalai, ditambah dengan situasi pandemi yang mana pengunjung ke arboretum juga semakin menurun sehingga memicu hasil ekonomis yang didapat melalui penjualan tiket, makanan, dan wahana di arboretum ikut menurun.

C. Jangka Waktu Difusi Inovasi Arboretrum Gambut

Dalam proses difusi juga terdapat elemen jangka waktu. Setiap proses keputusan inovasi mulai dari seseorang mengetahui sampai dengan memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sendiri sangat erat kaitannya dengan dimensi waktu.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait program arboretum memakan waktu sekitar 1 tahun untuk melakukan pemetaan sosial yang dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan terlebih dahulu sebelum jalannya program arboretum. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan arboretum sendiri dari mulai mencetuskan ide sampai dengan disahkan/dijetujui dan terlaksananya program arboretum ini memakan waktu sekitar 2 tahun, yakni dari 2016-2018.

D. Sistem Sosial

Sistem sosial merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat 2 unit yang berbeda secara fungsional dan bekerjasama dengan CSR Pertamina dalam program arboretum di Kampung Jawa, antara lain:

- 1) Koperasi Tani Tunas Makmur, terdapat 3 bidang antara lain :
 - a. UKM
 - b. Arboretum Gambut
 - c. Pertanian Nanas
- 2) MPA (Masyarakat Peduli Api)

Adapun cara agar kerjasama tersebut dapat berjalan dengan efektif yaitu dengan mengadakan rapat dan forum rutin di masyarakat untuk membahas permasalahan yang timbul. Rapat dan pertemuan memang sengaja dibuat agar semangat kelompok terjaga dan bisa tetap kompak dan konsisten untuk menjalankan program.

Hasil ataupun keputusan yang diambil pada saat dilaksanakannya rapat rutin antara lain adalah untuk lebih rutin lagi melakukan rapat, memetakan rencana untuk mengadakan gotong- royong rutin di arboretum, dan juga membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk membahas masalah-masalah yang muncul di arboretum.

KESIMPULAN

Arboretum gambut marsawa merupakan bagian dari program pengelolaan gambut berkelanjutan oleh CSR PT. Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning. Dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut muncul permasalahan ditengah kerjasama antara pertamina dan masyarakat, oleh sebab itu peneliti bertujuan menggambarkan bagaimana proses difusi inovasi arboretum gambut marsawa. Bentuk saluran komunikasi yang dilaksanakan pihak pertamina merupakan kategori interpersonal, strategi komunikasi yang dilakukan awalnya dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh yang berpengaruh pada kelompok masyarakat. Namun, dalam proses komunikasi partisipasi dari kelompok masyarakat juga berkurang yang mana keadaan ini berbenturan dengan keinginan beberapa anggota pada hasil ekonomis.

Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan arboretum sendiri dari mulai mencetuskan ide sampai dengan di sahkan/disetujui dan terlaksananya program arboretum ini memakan waktu sekitar 2 tahun, yakni dari 2016-2018. Pada sistem sosialnya ditemukan bahwa terdapat 2 unit yang berbeda secara fungsional dan bekerjasama dengan CSR Pertamina dalam program arboretum di Kampung Jawa yaitu koperasi tunas makmur dan kelompok MPA.

Ucapan Terima Kasih

Terima Kasih Peneliti ucapkan kepada PT. Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning selaku penyelenggara kegiatan research grant dan memberi kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini. Tak lupa juga peneliti ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan peneliti dalam penyusunan artikel ini, yaitu Bapak Didik Bahagia selaku General Manager PT. Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning, Bapak Rizal selaku *Community Development Officer* PT. Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning, Ibu Geovani Meiwanda, S.Sos, MPA selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini, Kak Vera Darasni Putri, dan Bapak Sadikin selaku Ketua MPA (Masyarakat Peduli Api) dan Pengelola Arboretum Gambut Sungai Pakning.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. D. (2020). Difusi Inovasi Program Pengolahan Lahan Basah Tanpa Bakar di Kalimantan Tengah. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*.
Armenia, R. (2013). Respon Masyarakat Terhadap Program Corporate Social

- Responsibility Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Universitas Gadjah Mada*. Carrol, A. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward The Moral Management of Organizational Stakeholders. *Business Horizons*.
- Disemadi, H. S. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*.
- Junaidy, A. (2019). Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Gambut dengan Menggunakan Metode Alat Penggal Air Insitu dan Peran Serta Masyarakat di Desa Rimbo Pnjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. *Jurnal Bappeda*.
- Kurnia, A. (2020). Sustainable Development dan CSR. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Masganti. (2017). Potensi dan Pemanfaatan Lahan Gambut Dangkal untuk Pertanian. *Jurnal Sumberdaya Lahan*.

INVENTARISASI ETNOEKOLOGI MASYARAKAT LAHAN GAMBUT DALAM PELESTARIAN BIODIVERSITAS BERBASIS KEARIFAN LOKAL: A case study di Kawasan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis

M Agung Alwanda, Muhammad Eizlan, Nayu Argustiya Ningsih

Tadris IPA, UIN SUSKA RIAU, Kota Pekanbaru

Email: agungalwanda541@gmail.com

Abstrak

Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki kawasan lahan gambut terbesar di Indonesia. Gambut mampu menampung hingga 30 % jumlah karbon dunia agar tidak terlepas ke atmosfer. Kemudian lahan gambut mempengaruhi perubahan iklim, bencana alam dan menunjang perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini tentu pelestarian biodiversitas sangat penting dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah menginventarisasi bentuk pelestarian biodiversitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal (etnoekologi) di sekitar kawasan gambut. Jenis penelitian ini adalah case study. Metode penelitian menggunakan in-dept interview, observasi, dan dokumentasi. Prosedur dimulai dari persiapan, survey lokasi penelitian, pengambilan data (data primer dan sekunder), dan menganalisis data. Subjek penelitian adalah tokoh masyarakat, perangkat desa dan masyarakat lokal di kecamatan bukit batu, Kab. Bengkalis. Analisis data menggunakan secara metode analisis miles-huberman untuk kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan membuat kesimpulan.

Kata Kunci: lahan gambut, masyarakat, etnoekologi

PENDAHULUAN

Berdasarkan dari data kerusakan hutan yang berada di Negara ini (Indonesia), laju penurunan atau kerusakan hutan dari tahun ke tahun semakin bertambah atau meningkat. Laju kehilangan areal hutan secara permanen jika dilihat data yang bersumber dari Baplan pada priode tahun 1997 – 2000 mencapai angka 2,83 juta / tahun. lahan gambut yang berada di kawasan negeri ini di perkirakan menempati urutan ke empat dengan luas sebesar 20 juta hektar, dan di atas Indonesia ada Negara seperti Negara uni soviet dan juga amerika. Lahan gambut di Indonesia ini yang paling banyak terdapat di pulau papua, Sulawesi, Kalimantan dan juga Sumatera. (Nugroho, 2013)

Di Pulau Sumatera terdapat Provinsi Riau yang memiliki lahan gambut terluas di pulau ini dengan luas berkisar 4 juta hektar atau sekitar hampir 56 % dari total luas lahan gambut yang berada di pulau sumatera ini (Wahyunto et.al., 2003). Dikarenakan provinsi Riau ini memiliki lahan gambut yang luas maka taidak heran masyarakat di Provinsi ini sangat memanfaatkan kondisi tersebut dengan menjadikan lahan ini sebagai lahan pertanian yang bisa di tanami tumbuhan seperti sayur mayur, nenas dan juga sawit dengan melihat ketebalan dari tanah tersebut. (Mario, 2002) Tanah gambut ini memiliki 2 ketebalan yakni ketebalan yang dalam dan dangkal, jadi ada tumbuhan yang bisa hidup di ketebalan yang dangkal dan ada pula yang bisa hidup di ketebalan yang dalam.

Akan tetapi lahan gambut yang berada di Provinsi Riau ini, sekitar kurang lebih 2,30 hektar telah terdegradasi. Walaupun begitu sebagian lahan gambut masih tetap bisa di manfaat kan oleh masyarakat setempat, sebagian besar dari mereka menjadikan lahan tersebut sebagai tempat budidaya tanaman tanaman perkebunan, seperti budidaya sawit, nenas dan juga karet yang memiliki hasil lumayan jika di jual. Bukan hanya itu mereka juga memanfaatkan untuk budidaya tumbuhan atau tanaman pangan seperti jagung, ubi jalar dan lain nya. Walaupun begitu masih banyak lahan gambut yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat, padahal lahan tersebut sangat menjajnikkan jika dimanfaatkan sebagai lahan pertanian (Ratmini, 2012).

Pemanfaatan lahan gambut tentu akan mempengaruhi penurunan dari biodiversitas asli di kawasan daerah tersebut. Nilai jasa biodiversitas ialah sebagai

pelindung keseimbangan siklus hidrologi dan juga tata air, penjaga kesuburan tanah, lingkungan laut melalui dari pasokan unsur hara dari serasah hutan; pencegah erosi, abrasi dan juga pengendali iklim mikro. (Agus, 2008) Manfaat biodiversitas sendiri memiliki nilai warisan yang sangat tinggi sehingga sangat penting untuk menjaga kelestarian biodiversitas untuk generasi yang akan datang. Biodiversitas ialah merupakan nilai pilihan yang menjadi penting di masa yang akan datang. Manfaat biodiversitas adalah nilai konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan pangan sandang dan papan. Nilai produktifnya berkaitan dengan perdagangan lokal maupun nasional dan juga internasional(Herman, 2016).

Etnoekologi adalah cabang ilmu yang mengkaji hubungan antar masyarakat suatu daerah dengan lingkungan sekitar nya. Masyarakat melakukan adaptasi dan interaksinya dengan alam dan kemudian mengembangkan budaya yang dimilikinya sehingga terjadi proses-proses perubahan ekosistem. Keanekaragaman pola adaptasi dan kawasan atau lingkungan hidup yang berada pada masyarakat di indonesia diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang mereka dan hal itu juga jadi pedoman dalam memanfaatkan suberdaya alam dan lingkungan sekitarnya yang dikenal sebagai kearifan lokal di sebuah daerah atau masyarakat. (Rachmiwiti, 2014). Dari kearifan lokal ini masyarakat bisa bertahan dari berbagai krisis, yang salah satunya yakni krisis kebudayaan dan juga ekonomi .Maka dari itu kearifan lokal sangat penting untuk dibahas dan dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan dengan lingkungannya sekaligus dapat melestarikan lingkungan sekitar nya. (Notoatmodjo, 2003)

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau yang memiliki lahan gambut cukup luas. Kabupaten Bengkalis ini mempunyai 111 kecamatan 136 Desa dan terbagi menjadi 19 Kelurahan. Di Kabupaten Bengkalis ini terdapat lahan gambut yang sudah di dimanfaatkan namun masih di temukan juga lahan lahan gambut yang belum dimanfaatkan. Masyarakat di provinsi ini juga mayoritas ber profesi sebagai petani dengan memanfaatkan lahan gambut yang mereka miliki untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Kemudian di Kabupaten ini juga banyak ditemukan keanekaragaman hayati yang salah satu nya yaitu masih di temukan nya pohon pohon bakau yang juga di dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat wisata. (Masganti, 2014). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi bentuk pelestarian biodiversitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal (etnoekologi) di sekitar kawasan lahan gambut yang berada di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis tepatnya di Desa Dompas dan Desa Kelurahan Sungai Pakning, Kampung Jawa

METODE

Penelitian ini di lakukan atau dilaksanakan pada bulan juli sampai dengan bulan agustus 2021. Dan juga penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bukit batu Kabupaten Bengkalis tepatnya di 2 Desa Yakni Desa Dompas dan juga Desa kelurahan Sungai Pakning, Kampung Jawa. Responden pada penelitian kali ini ialah 2 Petani sawit dan juga nenas serta perangkat desa dan juga tokoh masyarakat. Pemilihan desa yang di gunakan sebagai subjek penelitian ialah desa yang memiliki daerah dominan di tanami nenas dan juga desa yang dominan di tanami sawit oleh masyarakat sekitar. Untuk inventarisasi pelestarian biodiversitas oleh masyarakat local, teknik pemilihan responden atau narasumber berdasarkan rekomeendasi dari perangkat desa kemudian setelah itu dilakukan secara snowball sampling yaitu meminta saran dari responden sebelumnya.

Metode pengumpulan data yang di pakai atau yang digunakan pada penelitian kali ini ialah wawancara dan survey langsung ke lapangan. Populasi pada penelitian ini yakni kelompok keluarga yang berprofesi sebagai petani sawit dan juga nenas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif Hasil analisis data kualitatif

berupa pemaparan dalam bentuk uraian naratif mengenai situasi yang diteliti pada penelitian ini. Peneliti akan melakukan reduksi data dan memaparkan hasil serta penarikan kesimpulan menggunakan metode triangulasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Kecamatan Bukit Batu

Kecamatan Bukit batu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Bukit Batu luas wilayah 16200 KM². Kecamatan Bukit batu ini dulu nya sering di sebut sebagai kawasan yang di atasnya terdapat minyak dan di bawah nya terdapat juga minyak. Namun pada saat ini kawasan Bukit batu ini sudah banyak di tanami sawit, karet dan kelapa dan kecamatan ini juga memiliki kawasan hutan yang luas.

Kecamatan Bukit Batu memiliki beberapa Desa diantara nya yaitu Desa Dompas dan Juga Desa kelurahan sungai pakning Kampung Jawa yang merupakan daerah yang kami jadikan penelitian dikarenakan daerah tersebut memiliki mayoritas tanah gambut dan juga banyak warga nya yang melakukan pelestarian biodiversitas di tanah gambut tersebut. Berikut ialah gambaran umum dari Desa Dompas dan Desa Kelurahan Sungai Pakning Kampung Jawa



Gambar 1. Peta Kecamatan Bukit Batu

- **Desa Dompas**

Desa Dompas merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bukit Batu. Desa ini memiliki mayoritas tanah nya yaitu tanah / lahan gambut yang sudah banyak di manfaatkan oleh warga sekitar untuk di tanami tumbuhan tumbuhan yang bisa hidup di lahan gambut yang contoh nya yaitu nenas, sawit, nenas, buah naga dan juga jahe.

"Ya, mayoritas lahan gambut dan hampir semua lahan sudah di manfaat kan untuk menanam nenas, sawit, buah naga, jahe dan juga sawit" (Berlian, Perangkat Desa, 22 Juli 2021)

Dikarenakan daerah ini banyak lahan gambut nya maka warga sekitar memanfaatkan itu semua untuk dapat bisa menaikkan ekonomi mereka melalui pertanian. Banyak warga juga yang membentuk atau membuat kelompok tani untuk pelestarian biodiversitas disana. Rata rata mereka membuat kelompok tani nenas dan sawit.

Dan juga di Desa tersebut rutin diadakan penyuluhan atau sosialisasi tentang budidaya tumbuhan yang salah satunya ialah nenas.

Dan kegiatan tersebut di lakukan di balai desa dan juga terkadang langsung ke kelompok tani nya masing masing

"Iya pernah dari salah satu PT Di Singapura datang ke daerah ini untuk bertemu warga di balai desa dan memberi sosialisasi tentang budidaya nenas. Dan juga kebanyakan banyak orang yang memberi sosialisasi langsung datang ke kelompok tani nya masing masing" (Berlian, Perangkat Desa, 22 Juli 2021)

"Iyaa benar, karena banyak orang yang bekerja di lahan tersebut dan juga misalnya ada panen maka hasil panen nya di bagikan juga kepada masyarakat yang kurang mampu" (Berlian, Perangkat Desa, 22 Juli 2021)



Ganbar 1 Foto Kunjungan Wawancara ke rumah narasumber



Ganbar 2 Foto Kunjungan Wawancara ke rumah narasumber

- **Desa Kelurahan Sungai Pakning, Kampung Jawa**

Desa Kelurahan Sungai Pakning Kampung Jawa merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bukit Batu. Sama seperti Desa Dompas, Desa ini juga memiliki mayoritas tanah gambut, akan tetapi di Desa ini masih banyak dijumpai lahan gambut yang belum di pergunakan untuk pertanian. Kebanyakan lahan gambut disini belum dikelola dan masih berbentuk hutan atau semak belukar.

"iya masih dikarenakan banyak yang punya lahan disini tidak berdomisili disini maka dari itu lahan mereka dibiarkan begitu saja dan menjadi semak belukar dan ketika musim kemarau datang banyak lahan mereka terbakar dan membuat gambut nya habis" (Yusuf, Perangkat Desa, 23 Juli 2020)

Masyarakat di Desa ini mayoritas profesi nya yaitu sebagai petani dengan memanfaatkan lahan gambut tersebut menjadi lahan pertanian. Di lahan gambut tersebut mereka menanam sayur mayor, nenas dan juga sawit. Dan juga mereka sempat bekerja sama dengan PT Pertamina untuk budidaya nenas

"Untuk menanam sayur mayor, nenas, sawit. Kemaren juga ada kerja sama antara CSR Pertamina dengan masyarakat disini untuk budidaya nenas" (Yusuf, Perangkat Desa, 23 Juli 2020)



Gambar 3 Kunjungan ke kebun nenasumber



Gambar 4 Kunjungan ke kebun nenasumber

B. Pelestarian Biodiversitas lahan gambut di Desa Dompas dan Desa kelurahan Kampung Jawa

Biodiversitas merupakan semua kehidupan yang berada di permukaan bumi baik itu, tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme lain nya. Akan tetapi pada penelitian kami ini kami berfokus pada pelestarian salah satu biodiversitas yakni tumbuhan yang di budidaya pada lahan gambut, yakni sawit yang terletak pada Desa Dompas dan Nenas yang terletak di Desa Kelurahan Sungai Pakning Kampung Jawa.

• Pelestarian Biodiversitas di Desa Dompas

Di Desa Dompas ini sebenarnya banyak lahan gambut yang sudah di manfaatkan atau di kelola sebagai lahan pertanian, para masyarakat menjadikan lahan gambut ini untuk menanam sawit, nenas, buah naga dan baru baru ini mereka mencoba untuk menanam jahe di lahan gambut yang mereka punya.

Sebenarnya bukan hanya itu saja, di Desa Dompas juga terdapat pohon Bakau yang di jaga dan di rawat oleh masyarakat dan ada beberapa juga menjadikan wilayah pohon bakau tersebut menjadi tempat santai dan tempat berwisata, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat ataupun pendatang untuk mengunjungi desa tersebut.

• Pelestarian Biodiversitas di Desa Kelurahan Sungai Pakning Kampung Jawa

Biodiversitas di Kampung Jawa ini tidak sebanyak yang ada di Desa Dompas. Kampung Jawa memiliki banyak lahan gambut yang belum di manfaatkan dikarenakan para pemilik lahan banyak yang bukan orang setempat dan di biarkan begitu saja, sehingga menjadi hutan atau semak yang rentan dan sering juga terbakar.

Walaupun banyak lahan yang belum dimanfaatkan akan tetapi ada beberapa lahan yang sudah di manfaatkan untuk menanam tanaman hias, sayur mayor, sawit dan nenas dan mayoritas warga atau petani disini melakukan budidaya nenas. Maka dari itu kami melakukan penelitian nya lebih spesifik ke budidaya nenas nya saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat di ambil kesimpulan bahwa masyarakat Desa Dompas dan Desa Kelurahan Sungai Pakning melakukan pelestarian biodiversitas dengan cara budidaya flora yang ada di kawasan tersebut di antara nya yakni Bakau, Sawit dan Nenas. Selain Bakau, Sawit dan Nenas sebenarnya ada beberapa masyarakat juga melakukan budidaya atau pelestarian jenis tumbuhan yang lain, misalnya yaitu buah naga, jahe dan juga sayur mayor. Akan tetapi

hanya beberapa masyarakat saja dan di budidaya dalam bentuk yang sederhana saja, dan hasilnya kebanyakan untuk di konsumsi secara pribadi.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada para narasumber yang telah bersedia di wawancara dan kami juga mengucapkan terimakasih kepada para perangkat desa yang telah membantu kami selama melakukan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Herman. 2016. Upaya Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Gambut melalui Pengembangan Industri Perkebunan Sagu. Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah 1:54-61
- Notoatmodjo, S. 2003. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta
- Purwanto, Ign dan A.Ng. Gintings. 2011. Potensi Lahan Gambut Indonesia untuk Menyimpan Karbon. J. Hidrolitan 2(1):1-10.
- Mario. 2002. Peningkatan produktivitas dan stabilitas tanah gambut dengan pemberian tanah mineral yang diperkaya oleh bahan berkadar besi tinggi. Disertasi program pascasarjana, institute pertanian bogor.
- Agus dan Subiksa. 2008. Lahan gambut : potensi untuk pertanian dan aspek lingkungan. Balai Penelitian tanah dan world agroforestry centre (ICRAFT) Bogor, Indonesia
- Limin. 2016. Pemanfaatan lahan gambut dan permasalahan nya. Centre for international cooperation in management of tropical peatland. Workshop gambut 1 – 21
- Rachmiwati Yusuf, Ai dariah, Wahyunto. 2014. Karakteristik dan potensi Pemanfaatan lahan gambut terdegradasi di Provinsi Riau. Jurnal Sumber Daya Lahan Vol. 8 (1) : 59 – 66
- Fahmudin, Markus, Ali Jamil dan Masganti. 2014. Lahan gambut di Indonesia pembentukan karakteristik dan potensi mendukung ketahanan pangan. Badan penelitian dan pengembangan pertanian kementerian pertanian: Edisi Revisi
- Nugroho, Oksana, dan Aryanti. 2013. Analisis Sifat Kimia Tanah Gambut yang Didukung Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar. Jurnal Agroteknologi 4(1): 25 – 30
- Ratmini. 2012. Karakteristik dan Pengelolaan Lahan Gambut untuk Pengembangan Pertanian. Jurnal Lahan Suboptimal 1(2); 197 – 206

ANALISIS MODEL TRIPLE HELIX DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PERMATA HIJAU

Resa Vio Vani, Eka Putri Zulyani, Sania Octa Priscilia, Nadila Saumitri, Abdul Halim

Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau

Email: Resavani31@gmail.com, Eka.putri2412@student.unri.ac.id,
Sania.chilia21birthday@gmail.com, Nadila.saumitri0140@student.unri.ac.id,
Abdulhalim9288@gmail.com

Abstrak

Program Konservasi dan Revitalisasi Mangrove Permata Hijau PT Pertamina RU II Sungai Pakning merupakan program CSR pelestarian lingkungan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat (community development), tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran masing – masing stakeholder yang terlibat dalam program permata hijau dengan menggunakan konsep penta helix. Metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan studi pustaka, dengan menelaah berbagai sumber yang ada dan memberikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah model triple helix yang digunakan oleh PT Pertamina saat ini sudah maksimal, namun diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk melibatkan aktor lainnya seperti media dan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan program permata hijau.

Kata Kunci: triple helix, program pemberdayaan

PENDAHULUAN

Masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya pada pantai dan laut. Pantai dan laut menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, sehingga kualitas lingkungan pesisir harus dijaga kelestariannya. Penurunan kualitas lingkungan pesisir diindikasikan dengan kerusakan *mangrove*. *Mangrove* merupakan karakteristik dari bentuk tanaman pantai, estuari atau muara sungai, dan delta di tempat yang terlindung daerah tropis dan sub tropis. Dengan demikian maka mangrove merupakan ekosistem yang terdapat di antara daratan dan lautan dan pada kondisi yang sesuai mangrove akan membentuk hutan yang ekstensif dan produktif. Hutan mangrove memiliki nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi, tetapi sangat rentan terhadap kerusakan.

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu wilayah dengan penghasilan penduduk yang bergantung pada pesisir pantai. Di Indonesia wilayah Provinsi Riau memiliki luas *mangrove* mencapai 2,25% atau 206.292,642 hektar dan khususnya di daerah bengkalis mencapai 55.292,937 hektar (Heriyanto, 2012). Hal ini menjelaskan bahwa hampir sebagian besar masyarakat kabupaten bengkalis merupakan masyarakat pesisir yang bergantung kehidupan dengan keadaan pantai. Apabila keadaan ekosistem pesisir tidak mencapai kestabilan, maka hal tersebut akan mengganggu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Kerusakan hutan *mangrove* sebab abrasi, juga akan menyebabkan terganggunya penghasilan nelayan yang bergantung kehidupan dengan keadaan pantai. Program Permata Hijau merupakan salah satu program CSR (Corporate Social Responsibility) yang dicanangkan oleh Pertamina Sungai Pakning dalam mengatasi permasalahan ekosistem *mangrove* di Kabupaten Bengkalis.

Program tersebut memiliki 2 Inovasi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di sekitaran diantaranya: Ekowisata Mangrove dan TRIMBA (Triangle Mangrove Barrier). Dari adanya program tersebut mampu menghasilkan dampak layaknya pencegahan abrasi dengan meningkatkan sedimentasi pantai dalam upaya pemecah ombak, dan juga peningkatan pengelolaan ekowisata *mangrove* serta peningkatan ekosistem biota laut. Apabila dilihat dari sisi positifnya, maka program permata hijau cukup dikatakan efektif dalam membangun kembali kawasan hutan mangrove dan sosial perekonomian masyarakat setempat. Hingga kini pemahaman yang keliru bahwa rehabilitasi *mangrove* dapat dilakukan dengan mudah menggunakan pendekatan penanaman artifisial masih

kerap terjadi. Dampak yang timbul akibat pengupayaan menyebabkan kerugian besar dan kerusakan pada lahan *mangrove* semakin parah.

Di sisi lain, teknik rehabilitasi mangrove dengan pendekatan perbaikan hidrologi belum dapat diterima secara luas karena dipandang rumit, dan mahal. Pada situasi inilah proyek rehabilitasi mangrove yang diusulkan menjadi sangat penting. Menurut Lewis (1982a) semua habitat mangrove dapat memperbaiki kondisinya secara alami dalam waktu 15 – 20 tahun, jika paling tidak dua kondisi berikut dapat dipenuhi diantaranya kondisi normal hidrologi tidak terganggu dan ketersediaan biji dan bibit mangrove serta jaraknya tidak terganggu atau terhalangi. Maka dari itu, perlu adanya cara yang mampu memastikan keadaan tersebut untuk dapat mencapai program permata hijau (ekowisata mangrove) secara maksimal. Hal ini memerlukan keterlibatan pemerintah dalam berupaya memberikan suatu kebijakan khusus, atau bahkan pihak bisnis yang akan dirugikan di serta akademisi yang memahami permasalahan mangrove. Keterlibatan ketiga sektor tersebut berpengaruh terhadap serangkaian tindakan dalam mengatasi permasalahan masyarakat pesisir khususnya di Bengkalis. Hal ini berkaitan dengan penguatan kolaborasi dari ketiga sektor tersebut yang dilihat berdasarkan teori kolaborasi tripel helix.

Triple Helix merupakan penggerak lahirnya kreativitas, ide, dan ketrampilan (Aribowo et al., 2018). Cendekiawan dalam konteks ini memiliki peran menerapkan ilmu dan menularkannya. Tripel Helix melibatkan 3 sektor untuk dapat memberikan suatu inovasi terhadap pemecaan masalah atau fenomena disuatu daerah diantaranya Pemerintah, Bisnis dan juga akademisi. Adapun tiap peran dari sektor yang terlibat diantaranya: peran bisnis adalah sebagai entitas organisasi yang diciptakan untuk menyediakan barang atau jasa bagi konsumen. Bisnis umumnya dimiliki swasta dan dibentuk untuk menghasilkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran bagi pemiliknya, serta dapat berbentuk melalui kepemilikan tunggal, kemitraan, korporasi dan koperasi. Dan Lembaga yang memiliki otoritas pengembangan adalah government (pemerintah), baik pemerintah pusat maupun daerah.

Model pengembangan Triple helix didasarkan pada sebuah premis bahwa pentingnya kerjasama antara Universitas atau lembaga pendidikan, pemerintah dan industri atau kelembagaan terkemuka tradisional (bisnis). Kunci pengembangan Triple helix adalah meningkatkan sirkulasi antara universitas, industri dan pemerintah sebagai agen pembangunan dan sebaliknya, tersumbatnya sirkulasi adalah indikasi kegagalan masyarakat, keterbelakangan, ide ide dan inovasi. *Triple helix* sebagai aktor utama harus selalu bergerak sehingga terbentuk concensus space, ruang kesepakatan dimana ketiga aktor ini mulai membuat kesepakatan dan komitmen atas suatu hal yang akhirnya akan mengarahkan terbentuknya innovation space, inovasi yang dapat dikemas menjadi produk inovatif bernilai ekonomis. Pemanfaatan teori tersebut akan di komparasi dengan adanya program CSR (Corporate Social Responsibility) yang dikeluarkan oleh Pertamina RUU II Sungai Pakning yaitu Program Permata Hijau untuk dapat melihat sejauh mana tingkat partisipasi dan kesesuaian peran setiap sektor dalam mengelola Program Permata Hijau.

METODE

Jenis penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Kualitatif dengan tipe penelitian historis merupakan salah satu tipe dan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk merekonstruksi kembali secara sistematis, akurat, dan objektif kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi dimasa lampau dengan menggunakan pendekatan normatif dan interpretatif. Menurut Cohen (1980) (dalam Yusuf, 2014 : 346-347), apabila seseorang menggunakan tipe penelitian historis berarti ia melakukan penyelidikan, penilaian, menyintesis bukti, dan menetapkan lokasi secara sistemik

dan objektif untuk mendapatkan atau menetapkan fakta dan mengambil kesimpulan yang tepat tentang objek yang telah terjadi di masa lampau. Beberapa ciri khusus penelitian historis sebagai berikut :

- 1) Lebih banyak tergantung pada data yang ditulis, dicatat atau diobservasi oleh orang lain dari pada diobservasi oleh peneliti sendiri.
- 2) Berlainan dengan anggapan populer, peneliti historis haruslah tertib, ketat, sistematis, dan tuntas.
- 3) Tergantung pada dua macam data: primer dan sekunder.

Penelitian historis ini juga dapat disebut sebagai kajian literatur. Menurut (Afifuddin, 2012) bahwa kajian literatur adalah alat penting yang digunakan sebagai *contact review*, karena sangat berguna dan membantu dalam memberikan konteks dan arti di dalam sebuah penulisan yang sedang dilakukan dan juga melalui kajian literatur ini peneliti dapat menyatakan secara eksplisit dan pembaca juga mengetahui, mengapa hal tersebut harus diteliti, baik dari segi subjektif maupun dari sisi hubungan penelitian dengan penelitian lain yang relevan.

Menurut (Marzali, 2016) Kajian literatur adalah satu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai jenis buku dan jurnal, dan sejenisnya yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian guna untuk menghasilkan sebuah karya tulisan ilmiah, seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Penulis mencari literatur yang sesuai dengan topik dan pembahasan penelitian, tentang masyarakat dan wilayah penelitian, tentang teori-teori yang digunakan dan dihasilkan yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti, tentang metode penelitian yang digunakan dan seterusnya.

Kajian literatur dilakukan dengan kesadaran bahwa pengetahuan akan bertambah secara terus menerus (berakumulasi), bahwa topik dan daerah/wilayah penelitian yang akan kita lakukan sudah pernah dilakukan oleh orang sebelumnya, dan kita dapat belajar dari apa yang telah orang lain lakukan. Menurut Marzali (2016) tujuan utama dari kajian literatur adalah kajian literatur yang dilakukan guna menulis sebuah makalah untuk memperkenalkan kajian kajian baru pada topik tertentu yang penting untuk diketahui oleh orang yang bergiat dalam bidang penelitian tersebut, dan sewaktu-waktu makalah ini dapat diterbitkan untuk kepentingan umum, kedua untuk kepentingan penelitian sendiri. Dalam hal ini peneliti membuat kajian literatur dimaksudkan untuk memperkaya wawasan peneliti tentang topik bahasan tertentu serta menolong peneliti dalam memformulasikan masalah penelitian, dan menolong peneliti dalam menentukan metode-metode dan teori yang tepat digunakan dalam penelitian tersebut. Kajian-kajian dari penelitian orang lain dapat kita gunakan sebagai literatur dalam penelitian yang akan kita lakukan, khususnya bagi mahasiswa yang akan menulis karya ilmiah.

Kajian literatur merupakan alat yang penting sebagai *context review*, karena literatur sangat berguna dan sangat membantu dalam memberi konteks dan arti dalam penulisan yang sedang dilakukan serta melalui kajian literatur ini peneliti juga dapat menyatakan secara eksplisit dan pembaca mengetahui, mengapa hal yang ini ingin diteliti merupakan masalah yang memang harus diteliti, baik dari segi subjek yang akan diteliti dan lingkungan manapun dari sisi hubungan penelitian dengan tersebut dengan penelitian lain yang relevan.

Secara singkat, Fraenkel, Wallen, & Hyun (2012) mengemukakan batasan kajian pustaka atau referensi sebagai berikut. Kajian literatur adalah suatu kajian khazanah pustaka yang mendukung pada masalah khusus dalam penelitian yang sedang kita kerjakan. Kajian ini sangat berguna bagi peneliti, misalnya untuk memberikan gambaran masalah yang akan diteliti, memberikan dukungan teoritis konseptual bagi peneliti, dan selanjutnya berguna untuk bahan diskusi atau pembahasan dalam penelitian. Disamping itu, kajian pustaka atau literatur dapat membimbing peneliti untuk menyusun suatu hipotesis penelitian yang dikerjakannya.

b. Teknik dan instrumen pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya (Arikunto, 2010). Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah daftar *check-list* klasifikasi bahan penelitian, skema/peta penulisan dan format catatan penelitian.

c. Teknik analisis data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kritis. Analisis kritis adalah sebuah pandangan yang menyatakan peneliti bukanlah subyek yang bebas nilai ketika memandang penelitian. Analisis yang sifatnya kritis umumnya beranjak dari pandangan atau nilai – nilai tertentu yang diyakini oleh peneliti. Oleh karena itu keberpihakan peneliti dan posisi peneliti atas suatu masalah sangat menentukan bagaimana teks/data ditafsirkan. Paradigma kritis lebih kepada penafsiran karena dengan penafsiran kita dapatkan dunia dalam, masuk menyelimuti dalam teks, dan menyikapi makna yang ada di baliknya.

Adapun langkah – langkah strategis dalam penelitian analisis menurut Sanusi (2016), sebagai berikut :

1. Penetapan desain atau model penelitian. Disini ditetapkan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya.
2. Pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks sendiri. Sebagai analisis kritis, teks merupakan objek yang pokok, bahan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut.
3. Pencarian pengetahuan kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada di ruang hampa, tetapi terlihat kait – mengait dengan faktor – faktor lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori yang Relevan

Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan daya saing ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh inovasi yang ada didalam negara tersebut. Pengembangan inovasi yang dilakukan tentunya membutuhkan kolaborasi dengan pihak lain. Hal ini dilakukan agar pengembangan inovasi yang dilakukan bisa berjalan lebih cepat dan memberikan dampak atau konsekuensi yang capat pula. O'Flynn dan Wana mengartikan kolaborasi sebagai bekerja bersama atau bekerja sama dengan orang lain. Kata "collaboration" pada awalnya digunakan pada abad kesembilan belas dalam perkembangan industrialisasi, munculnya organisasi yang lebih kompleks, dan pembagian kerja dan tugas yang meningkat. Kondisi tersebut merupakan norma dasar utilitarianisme, liberalisme sosial, kolektivisme, saling membantu dan kemudin manajemen ilmiah dan teori organisasi hubungan manusia. (O'Flynn dan John, 2008). Ansell dan Gash menjelaskan collaborative governance adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik. (Afful-Koomson dan Kwabena, 2013). Kemudian Ansell dan Gash (2007) menyebutkan adanya 6 (enam) kriteria yang penting dalam collaborative governance, antara lain:

- 1) Forum; dimana forum diprakarsai oleh badan-badan publik atau lembaga.
- 2) Peserta forum termasuk pelaku non negara (lembaga privat).

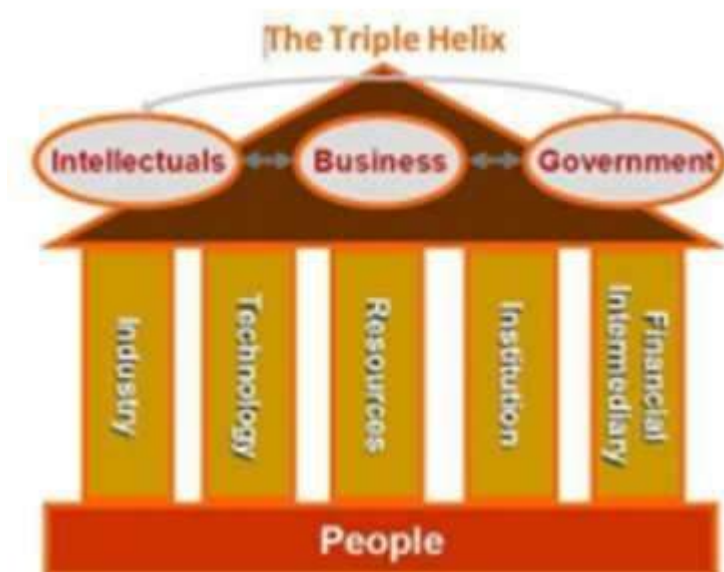
- 3) Peserta terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan serta tidak hanya berkonsultasi dengan lembaga publik. Forum terjadi secara resmi, terorganisir, dan bertemu secara kolektif.
- 4) Forum memiliki tujuan untuk membuat keputusan dengan kesepakatan bersama atau konsensus. Kebijakan berfokus pada kebijakan publik atau publik manajemen.

Kemudian dalam penciptaan inovasi dimulai dengan adanya konsep helix. Praswati (2017) mengatakan Konsep Helix didasarkan dalam gagasan bahwa inovasi merupakan hasil interaktif yang melibatkan berbagai jenis aktor. Masing-masing aktor berkontribusi sesuai fungsi kelembagaannya dimasyarakat. Model helix ini menetapkan dan memformalkan peran yang tepat untuk setiap bidang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui inovasi. Masyarakat yang semakin interaktif membuat peran pengetahuan diberbagai bidang harus disertakan dalam proses pembuatan inovasi.

Konsep Triple Helix ini kerap digunakan di negara-negara maju dalam mensinergikan antara akademisi, bisnis dan pemerintah. Kemudian teori Triple Helix ini dianggap sangat relevan dengan kondisi perkembangan pembangunan terutama sebagai kerangka normatif antara peneliti untuk pemahaman interaksi antara aktor kunci dalam inovasi sebuah sistem. Selain itu teori Triple Helix ini juga menjadi bagian dari upaya strategi yang digunakan pemerintah maupun lembaga yang mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam setiap gerak langkah serta kebijakan umumnya. Selanjutnya ketiga unsur itu dalam pelaksanaannya akan sesuai dengan kapasitas masing-masing lembaga (Hidayat 2021).

Etzkowitz dan Leydesdorff (1995) mengembangkan model Triple Helix yang mengadopsi model inovasi spiral (versus linier tradisional) yang menangkap beberapa hubungan timbal balik antara pengaturan kelembagaan (publik, swasta dan akademis) pada tahap yang berbeda dalam kapitalisasi pengetahuan "(Viale dan Ghiglione, 1998). Pendekatan baru interaksi ditandai oleh: i) peran kunci universitas sebagai produsen pengetahuan utama; ii) misi strategis perusahaan dalam menghasilkan inovasi melalui peningkatan proses organisasi dan penempatan produk dan layanan yang ada di pasaran; Dan iii) peran penting pemerintah dalam mendukung pengembangan teknologi berbasis sains dan dalam merumuskan kebijakan yang ditargetkan inovasi.

Penulis lain yaitu Supeni (2019) secara lebih sederhana mendefinisikan teori ini sebagai sebuah metode pembangunan kebijakan berbasis inovasi yang mengungkapkan Triple Helix sebagai aktor utama harus selalu bergerak melakukan sirkulasi untuk membentuk knowledge spaces, ruang pengetahuan dimana ketiga aktor sudah memiliki pemahaman & pengetahuan yang setara, yang akan mengarahkan ketiga aktor ini untuk membentuk concensus space, ruang kesepakatan dimana ketiga aktor ini mulai membuat kesepakatan dan komitmen atas suatu hal yang akhirnya akan mengarahkan kepada terbentuknya innovation spaces, ruang yang dapat dikemas menjadi produk kreatif bernilai ekonomis.



Gambar. 1 : Bagan Triple Helix

Sumber: Etzkowitz, H. *The endless transition: A "triple helix"*

Pelaksanaan inovasi yang dipayungi oleh hubungan antara swasta yang disini berposisi sebagai agent of change adanya suatu kemajuan yang bersifat positif. Pemerintah dan bisnis disebut dengan triple helix merupakan aktor yang menjadi penggerak lahirnya suatu kemajuan dalam industri kecil, ide, kreatifitas dan iptek bagi industri. Hubungan yang erat saling menunjang dan bersimbiosis mutualism antara ketiganya dalam kaitannya dengan landasan dal pilar-pilar dalam pengembangan industri yang menjadikan industri tumbuh kokoh dan berkesinambungan.

B. Penelitian Terdahulu

1. Intan Lukfia (2020): Sebuah Upaya Meningkatkan Kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Implementasi Program CSR PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Bandung Group), Hasil penelitiannya yaitu: menunjukkan bahwa PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Bandung Group dalam melaksanakan program CSR Sekolah *dreamable* di Kecamatan Bojongsoang, Bandung menggunakan pola strategi program kombinasi yaitu memadukan pola program sentralistik dan desentralistik. Dimana dalam perencanaan, penentuan dan pelaksanaan program melibatkan partisipasi dari berbagai stakeholder. Adapun bentuk pelaksanaan CSR yang telah dijalankan oleh PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Bandung Group tidak hanya berupa Charity seperti pemberian buku dan pelengkapan sekolah tetapi juga *Filantrophy* seperti pembangunan sekolah dan pengadaan *Mobil Homecare*, dan *community development* melalui peningkatan kapasitas Guru dan ABK.
2. Zukhruf Arifin (2020): Mewujudkan Kesejahteraan Petani: Studi Implementasi Program CSR PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu Terhadap Kesejahteraan Petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program CSR telah terlaksana dengan mencapai beberapa indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Melalui implementasi atau tahapan realisasi yang sesuai dengan pemberdayaan masyarakat. Namun perlunya adanya perbaikan dalam sosialisasi dan pemasaran produk sehingga dikenal lebih banyak masyarakat.
3. Dina., Dkk (2018): Pengaruh Penerapan Strategi Csr (Corporate Social Responsibility) Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Pada PT. Pertamina

- (Persero) Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program CSR telah terlaksana dengan mencapai beberapa indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Melalui implementasi atau tahapan realisasi yang sesuai dengan pemberdayaan masyarakat. Namun perlunya adanya perbaikan dalam sosialisasi dan pemasaran produk sehingga dikenal lebih banyak masyarakat.
4. Taufinal., Dkk (2018): Rehabilitasi Terumbu Karang Melalui Kolaborasi Terumbu Buatan Dan Transplantasi Karang Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang: Kajian Deskriptif Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Csr) PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (Mor) I – Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Teluk Kabung. Hasil penelitian menyatakan bila program rehabilitasi terumbu karang melalui kolaborasi terumbu buatan dan transplantasi karang di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang berhasil dilakukan dengan baik sebagai upaya menjaga kelangsungan ekosistem laut di sekitar terumbu karang.
 5. Rahadiyan Aditya (2019): Analisis Penta Helix dalam Melihat Keberlanjutan Program CSR Patratu Tahun 2017 di PT Pertamina RU III Plaju. Hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan memerlukan beberapa perbaikan agar program dapat berjalan dengan baik. Peran Perusahaan sebagai inisiator dan peran pemerintah sebagai pendukung kegiatan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi peran akademisi sebagai konseptor, peran Community atau komunitas sebagai jaring pengaman keberlanjutan program dan peran media sebagai katalisator perlu diperhatikan.
 6. Zukhruf Arifin (2020): Mewujudkan kesejahteraan petani: Studi implementasi program CSR PT. Pertamina (persero) Fuel Terminal Rewulu terhadap kesejahteraan petani. Hasil penelitian ini yaitu; Implementasi program csr telah terlaksana dengan Mencapai beberapa indikator keberhasilan pemberdayaan Masyarakat. Melalui implementasi atau tahapan realisasi yang Sesuai dengan pemberdayaan masyarakat. Namun perlunya Adanya perbaikan dalam sosialisasi dan pemasaran produk Sehingga dikenal lebih banyak masyarakat.
 7. Nana., Dkk (2019): Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan triple helix untuk pengembangan kompetensi wirausaha masyarakat desa mandiri energi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Peran masyarakat dalam upaya rehabilitasi kerusakan pesisir terkait ekosistem mangrove sudah relatif bagus. Pada umumnya mereka sadar bahwa kerusakan yang terjadi perlu segera ditanggulangi, karena kerusakan terhadap ekosistem mangrove dapat mengakibatkan degradasi lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas hidup mereka. Masyarakat memiliki peranan penting dalam pengelolaan dan perbaikan kualitas pesisir di kota semarang. Hal tersebut terjadi karena masyarakat setiap hari berinteraksi dengan lingkungan, sehingga pengelolaannya akan lebih efektif dan efisien. Selain itu, selanjutnya, pengelolaan lingkungan pesisir berkelanjutan memerlukan kelembagaan partisipatif yang melibatkan berbagai pihak dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek utama. Kegiatan tersebut membutuhkan koordinasi dari pemerintah kota semarang melalui instansi yang mempunyai kewenangan, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi kelestarian kawasan pesisir secara menyeluruh.
 8. Miftah., Dkk (2019): Relasi bonding dalam masyarakat binaan csr (studi deskriptif interpretif relasi sosial masyarakat binaan csr pt pertamina ru II sungai pakning di kabupaten bengkalis) (bonding relations in the community built by csr). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi bonding terdapat dalam pola-pola relasi dalam masyarakat binaan yang menunjukkan bahwa ikatan intra kelompok penting untuk diperhatikan guna menjaga kekompakan kelompok. Hasil ini

menunjukkan bahwa bentuk relasi sosial bonding memiliki dampak yang penting terhadap pelaksanaan csr di suatu perusahaan. Relasi ini penting untuk dijaga melalui kegiatan komunikasi dialogis yang bertujuan untuk pembangunan yang dilakukan melalui cara-cara yang lebih intensif, terbuka dan partisipatif guna melahirkan relasi sosial yang sehat dan berkelanjutan.

9. Utami., Dkk (2019): Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Triple Helix untuk Pengembangan Kompetensi Wirausaha Masyarakat Desa Mandiri Energi: hasil penelitian ini adalah Gagasan utama Triple Helix adalah tentang kekuatan antara akademisi, bisnis, dan pemerintah. Etzkowitz (2003) menyusun Model Triple Helix sebagai relasi antara universitas, industri, dan pemerintah dengan tujuan untuk menjelaskan peningkatan interaksi antara ketiga atmosfer tersebut. Sebelum suatu program pemberdayaan diimplementasikan, perlu dipahami terlebih dulu dasar dari konsep pemberdayaan (empowerment) itu sendiri, yaitu power atau kekuasaan.
10. Resa., Dkk (2020): Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa potensi wisata di Kota Pekanbaru dapat berkembang dengan pesat apabila seluruh stakeholder berkolaborasi dengan baik dilihat dari korelasi antar unsur model pentahelix.

C. Pembahasan

Pertamina sebagai salah satu perusahaan BUMN memiliki berbagai inisiatif CSR khususnya pada empat isu yaitu Pertamina Cerdas, Pertamina Sehati, Pertamina Berdikari dan Pertamina Hijau (Dewi & Rosilawati, 2020). Dilihat dari segi lingkungan dan konservasi sumber daya alam, program CSR Pertamina Hijau adalah program konservasi lingkungan yang berfokus kepada pelestarian mangrove. Salah satu unit PT. Pertamina yang melaksanakan program Pertamina Hijau adalah PT. Pertamina RU II Sungai Pakning melalui program Konservasi dan Revitalisasi Kawasan Mangrove Permata Hijau yang berlokasi di Desa Pangkalan Jambi, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Selain Program Permata Hijau, PT Pertamina RU II Sungai Pakning memiliki dua program lainnya yaitu Kampung Gambut Berdikari dan Pasmantap yang disusun menjadi 3 kluster besar program. Ketiga program ini dilaksanakan di 12 Desa yang terbagi dalam 3 Kecamatan yakni Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bandar Laksamana ("Pertamina RU II Sungai Pakning Paparkan Program CSR Pada Audiensi Forum CSR Bersama Bupati Bengkalis," 2021).

Program Konservasi dan Revitalisasi Mangrove Permata Hijau ini berbeda dengan program CSR perusahaan lain karena dilatarbelakangi isu yang berdampak secara langsung bagi kehidupan masyarakat. Fokus dalam Program Konservasi dan Revitalisasi Permata Hijau diwujudkan dengan kegiatan konservasi lingkungan, yaitu kawasan mangrove yang semakin memburuk dan lahan yang terdegradasi. Program ini juga memiliki kegiatan lain seperti budidaya ikan nila air payau dan pengolahan produk guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dikutip dalam Dewi & Rosilawati, (2020) Program Konservasi dan Revitalisasi Permata Hijau juga merupakan program pelestarian lingkungan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat yaitu infrastructure, capacity building dan community empowerment. Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah disampaikan Rudito dan Famiola, (2013) dalam (Dewi & Rosilawati, 2020) memberikan penjelasan bahwa CSR membuat perusahaan dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan komunitas lokal untuk mendapatkan relasi dan keuntungan sosial. Dalam hal ini, PT Pertamina RU II Sungai Pakning memerlukan penerimaan masyarakat sekitar yang terkena dampak operasional perusahaan. Dampak

yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan dapat merugikan masyarakat mulai dari polusi, limbah, serta infrastruktur. Oleh karena itu, program CSR merupakan jalan untuk mendapatkan social licence to operate atau lisensi sosial agar bisa tetap beroperasi dengan lancar dan tetap memiliki relasi yang baik dengan masyarakat setempat.

Program ini melibatkan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggagas rancangan kegiatan program sesuai dengan kebutuhan mereka. Atas dasar kebutuhan masyarakat terkait penyelesaian isu abrasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, PT Pertamina RU II Sungai Pakning melaksanakan Program Konservasi dan Revitalisasi Mangrove Permata Hijau dengan Kelompok Harapan Bersama sebagai penerima manfaat dan terdapat tiga kelompok kerja (Pokja) dalam kelompok tersebut yaitu Pokja Mangrove, Pokja Budidaya Ikan, serta Pokja Pengolahan. Pada pelaksanaannya, program CSR harus sesuai dengan pedoman atau acuan yang mereka buat pada saat rapat panitia. Pembuatan pedoman ini tentunya merupakan langkah yang tepat karena dapat menjadi petunjuk saat pelaksanaan Program Konservasi dan Revitalisasi Mangrove Permata Hijau. Sebelum implementasi, program ini membentuk kelompok binaan CSR yaitu Kelompok Harapan Bersama. Kelompok Nelayan Harapan Bersama telah terbentuk pada tahun 2004, namun pada saat itu kelompok hanya merupakan sebuah paguyuban nelayan dan belum memiliki pengetahuan mengenai pelestarian ekosistem laut. Kelompok Nelayan Harapan Bersama akhirnya menjadi kelompok binaan CSR PT Pertamina RU II Sungai Pakning pada tahun 2017 dengan terbentuknya 3 unit kelompok kerja beranggotakan 41 orang masyarakat desa Pangkalan Jambi.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Konservasi dan Revitalisasi Mangrove Permata Hijau ini berupa konservasi dan revitalisasi kawasan Mangrove, budidaya ikan nila air payau, serta pengolahan produk yang sesuai dengan kepentingan masyarakat nelayan melayu untuk menjaga ekosistem laut. Implementasi program dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, pembangunan infrastruktur serta bantuan keperluan program. Triple helix merupakan konsep kolaborasi yang mendukung dalam pembangunan maupun pelaksanaan program melalui hubungan dua arah antara government, business, dan academia. Peran government memiliki porsi yang lebih besar untuk mempersiapkan payung regulasi dalam perencanaan sektoral yang akan dilaksanakan oleh *business* dan *academia*.

Implementasi kolaborasi ini dapat terlihat dari peran masing-masing stakeholder sesuai dengan batasan masing-masing. *Government* dapat membuat kebijakan tentang pembangunan wisata bahari, serta kebijakan tentang sumbangan pihak ketiga dalam pembangunan dalam bentuk peraturan daerah. Melalui kebijakan tersebut, *business* mendapatkan legalisasi peran dalam bentuk *program Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR yang dilakukan oleh *business* tidak hanya terpaku pada program *charity*, namun juga empowerment untuk menjaga nilai keberlanjutan seperti program Permata Hijau yang dilakukan oleh Pertamina, namun karena keterbatasan dari Pertamina (bisnis) dalam menyediakan fasilitator yang akan memberdayakan masyarakat, diperlukan peran dari *academia* untuk menjadi pendamping pelaksanaan pemberdayaan tersebut. *Government* berperan dalam menyediakan kerangka regulasi (RPJM dan Perda); *business* memberikan bantuan finansial dalam program CSR; sedangkan *academia* menyusun *master plan* pemberdayaan sekaligus menjadi fasilitator dalam lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kontribusi perusahaan dalam membangun masyarakat diwujudkan melalui *program Corporate Social Responsibility* yang dikenal dengan program CSR. Konsep CSR dipengaruhi oleh pemikiran bahwa keberadaan perusahaan bergantung pada kehidupan lingkungan dan masyarakat di mana perusahaan tersebut hidup dan disesuaikan dengan permasalahan yang ada disekitar lokasi perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab kepada stakeholders dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya

memiliki kewajiban untuk melakukan program tanggung jawab kepada masyarakat, namun untuk memastikan dampak dan manfaat yang didapatkan masyarakat melalui program itu berkelanjutan (sustainability). Pelaksanaan program CSR juga meningkatkan hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar, atau dikenal melalui praktik hubungan komunitas atau biasa disebut dengan *community relations*. Komunitas dipahami sebagai sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan terkait dengan keberadaan perusahaan, serta secara geografis berada di wilayah sekitar perusahaan Grunig dan Hunt dalam Dewi (2020). Aktivitas perusahaan terutama pengelola sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi dan gas serta pertambangan memiliki dampak lingkungan yang besar seperti limbah, polusi, rusaknya infrastruktur umum, hingga kebisingan yang diakibatkan oleh aktivitas mesin. Hubungan antara perusahaan dan masyarakat berperan dalam pertahanan lingkungan yang mana baik perusahaan dan komunitas dapat bekerja sama dalam pelestarian lingkungan, di sisi lain dapat menjaga relasi antara kedua belah pihak.

1. Government (Pemerintah)

Pemerintah selaku pembuat kebijakan tentunya tidak bisa mengembangkan potensi masyarakat baik dalam sumber daya manusia maupun sumber daya alam tanpa bantuan maupun dukungan dari pihak lainnya, bersinergi untuk mencapai hingga titik paling ujung sebuah daerah. Hal ini yang dilakukan oleh PT Pertamina dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah, khususnya pemerintah desa yang bersinggungan langsung dengan aktifitas masyarakat lokal dalam melaksanakan program pemberdayaan.

Beberapa hal yang melatar belakangi tuntutan pada pemerintah agar mampu mendukung sinergitas antar aktor dalam mengembangkan potensi daerah adalah; 1) ketidakmapanan sebagian besar masyarakat terhadap pembangunan kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat dalam era globalisasi; 2) IPTEK perguruan tinggi belum secara sengaja ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat desa atau kelurahan; 3) potensi masyarakat maupun sumberdaya alam lingkungannya belum termanfaatkan dengan baik dan arif; serta 4) penatakelolaan fisik kewilayahan yang belum proporsional dan professional (Dimiyati, 2018).

2. Business (Perusahaan)

Program CSR Pertamina Hijau merupakan program konservasi lingkungan yang berfokus kepada pelestarian mangrove. Program ini merupakan program pusat yang dilaksanakan oleh seluruh unit operasi dan anak perusahaan PT. Pertamina. Fokus dalam Program Konservasi dan Revitalisasi Permata Hijau diwujudkan dengan kegiatan konservasi lingkungan, yaitu kawasan mangrove yang semakin memburuk dan lahan yang terdegradasi. Program ini juga memiliki kegiatan lain seperti budidaya ikan nila air payau dan pengolahan produk guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Konservasi dan Revitalisasi Permata Hijau juga merupakan program pelestarian lingkungan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat yaitu *infrastructure, capacity building dan community empowerment*. Pihak perusahaan menggunakan kearifan lokal ini sebagai salah satu media untuk bisa masuk dan berkomunikasi dengan kelompok masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih terbuka untuk menerima program Konservasi dan Revitalisasi Mangrove Permata Hijau. Program kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Konservasi dan Revitalisasi Mangrove Permata Hijau ini berupa konservasi dan revitalisasi kawasan Mangrove, budidaya ikan nila air payau, serta pengolahan produk yang sesuai dengan kepentingan masyarakat nelayan melayu untuk menjaga ekosistem laut. Implementasi program dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, pembangunan infrastruktur serta bantuan keperluan program.

CSR PT Pertamina menggunakan 11 aspek Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu Sosialisasi Program, Perencanaan Program, Proses Pelaksanaan Program, Kesesuaian Biaya Program, Jadwal Pelaksanaan Program, Sarana dan Prasarana Program, Fasilitator Program, Pemanfaatan Program, Dampak Ekonomi Program, Dampak Sosial Program, dan Dampak Lingkungan Program. Agar program ini berjalan dengan lancar sebagai upaya pelestarian lingkungan, maupun dalam peningkatan kapasitas masyarakat mengelola lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dibutuhkan komunikasi serta hubungan yang baik antara perusahaan dan *stakeholders* yang terlibat (masyarakat lokal, tokoh-tokoh masyarakat, LSM dan pemerintah lokal).

3. Academica (Akademisi)

Pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh academia di Indonesia terlihat dari implementasi salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian kepada Masyarakat. Akan tetapi, peran tersebut belum maksimal dilakukan karena belum banyak kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bentuk kolaborasi tersebut. Salah satu upaya pemerintah dalam “mengkondisikan” adanya peran itu adalah melalui panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu program yang sangat bermanfaat untuk mewujudkan hal itu yakni program research grant PT Pertamina sungai pakning yang bekerjasama dengan perguruan tinggi, menyampaikan maksud program CSR melalui strategi pengembangan sumber daya manusia oleh Mahasiswa maupun Dosen- Dosen peneliti sesuai keilmuan terkait.

PT Pertamina RU II Sungai Pakning memerlukan penerimaan masyarakat sekitar yang terkena dampak operasional perusahaan. Dampak yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan dapat merugikan masyarakat mulai dari polusi, limbah, serta infrastruktur. Oleh karena itu, program CSR merupakan jalan untuk mendapatkan *social licence to operate* atau lisensi sosial agar bisa tetap beroperasi dengan lancar dan tetap memiliki relasi yang baik dengan masyarakat setempat. Selain itu, program CSR PT Pertamina RU II Sungai Pakning juga memfokuskan ke peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mana sesuai dengan konsep *Triple Bottom Line* (TBL). Terdapat berbagai interaksi yang harus dilakukan PT Pertamina dengan masyarakat karena Program Konservasi dan Revitalisasi Mangrove Permata Hijau dengan Kelompok Harapan Bersama sebagai penerima manfaat dan terdapat tiga kelompok kerja (Pokja) dalam kelompok tersebut yaitu Pokja Mangrove, Pokja Budidaya Ikan, serta Pokja Pengolahan. Sehingga membutuhkan peran akademisi sebagai perpanjangan tangan baik dari segi riset dan pengembangan maupun menciptakan gagasan inovasi berkelanjutan.

KESIMPULAN

Setelah melihat dari ketiga indikator triple helix yaitu, adanya kolaborasi antar pemerintah, perusahaan, dan akademisi menghasilkan bahwa dibutuhkan aksi nyata untuk turun langsung ke lapangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya menjalankan atau ikut serta dalam program pemberdayaan secara berkelanjutan, sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat menghasilkan output yang dapat dikembangkan dan mengatasi permasalahan yang lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat membuka peluang pada pelaksanaan program permata hijau agar meningkatkan kolaborasi dengan model penta helix, dimana terdapat 2 stakeholder tambahan yaitu, media dan masyarakat. karena, masyarakat merupakan sasaran dari sebuah program yang harus diikutsertakan dalam membuat sebuah kebijakan terkait program itu sendiri. Serta media dimanfaatkan sebagai peluang publikasi yang merata hingga keseluruh negeri, meningkatkan literasi penduduk sekaligus memperkenalkan pengelolaan program secara berkelanjutan. Seperti Local Hero yang telah direalisasikan oleh PT Pertamina dalam proses edukasi maupun sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada PT. Pertamina RU II Sungai Pakning dan Laboratorium FISIP UNRI yang telah memberi kesempatan dan dukungan dana kepada penulis pada kegiatan Grant Research Pertamina tahun 2021. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Adiinto, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing penulis yang sudah membantu dalam kelancaran penelitian ini sehingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. (2019). Analisis Penta Helix dalam Melihat Keberlanjutan Program CSR Patratra pada Tahun 2017. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 149. <https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.5320>
- Afful-Koomson, T and Kwambena O.A. 2013. *Collaborative Governance in Extractive Industries in Africa*. Africa: Pixedit Limited
- Afifuddin. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. pustaka setia.
- Albury David. 2003., *Innovation in the Public Sector*. Discussion paper. London: The Mall
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Anggara, S. 2012. *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. CV Pustaka Setia.
- Aribowo, H., Wirapraja, A., & Putra, Y. D. (2018). Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik. *Jurnal Mebis (Manajemen Dan Bisnis)*, 3(1), 31–38. <https://doi.org/10.33005/mebis.v3i1.21>
- Arifin, Z., Aziz, A., Lii, P., & Zahara, Y. (2020). *EMPOWER: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Mewujudkan Kesejahteraan Petani: Studi Implementasi Program CSR PT . Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu Terhadap Kesejahteraan Petani Abstrak Berbagai upaya pembangunan berkelanjutan telah dilakukan d. 5(1), 43–63.*
- Creswell, John W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Terjemahan oleh Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Daulay, Z. A. A. (2018). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dengan Metode Triple Helix (Studi Pada UMKM Kreatif di Kota Medan). *TANSIQ: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(1).
- Dewi, A., & Rosilawati, Y. (2020). Studi Kasus Program CSR PT. Pertamina RU II Sungai Pakning pada Program Revitalisasi Kawasan Mangrove di Provinsi Riau. *Channel Jurnal Komunikasi*, 9(2), 151–160.
- Emzir, Prof. Dr. M.Pd. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Fadli, Yusuf, and Adie Dwiyanto Nurlukman. 2018. "Kolaborasi Pemerintah Dalam Pengembangan Terpadu Wilayah Pesisir Di Kabupaten Tangerang Melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan)." *Prosiding Seminar Nasional Unimus 1*: 517–29.
- Faisal, F., Lova, S. M., & Ananda, L. J. (2018). Potret Efektivitas Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Csr) Oleh Pt. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (Mor) I – Terminal Bahan Bakar Minyak (Tbbm) Teluk Kabung Melalui Program Bangun Industri Desa (Bid) Bisnis Perikanan Di Kecamatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 24(3), 770. <https://doi.org/10.24114/jpkkm.v24i3.11600>

- Farinha, L., & Ferreira, J. J. 2013. Triangulation of the triple helix: a conceptual framework. Triple Helix Association, Working Paper, 1.
- Fraenkel, W., & Wallen, N. E. H. (2012). How to design and evaluate research in education. marzali. (2016). menulis kajian literatur. Jurnal Etnosia, 1(2), 27-29
- Goldsmith, S., dan Donald F. K. 2009. Unlocking The Power of Networks: Key To Hight Performance Government. Wachington D.C: Brookings Institution Press. s. (2010). metode penelitian. rineka cipta.
- Heriyanto, M. (2012). Formulasi Kebijakan Pembangunan Pulau Terluar. 1-8.
- Hidayat, Syarif. 2021. "Implementasi Teori Triple Helix Sebagai Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ciamis Pada Sektor Wisata Sejarah Dan Budaya." Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan 2(1): 89-97.
- Hopkins, M. (2017). CSR and sustainability CSR and Sustainability (pp. 59-87): Routledge
- Setyanti, S. W. L. H. (2018). Peran Quadruple Helix untuk Meningkatkan Kreatifitas dan Kinerja Inovasi Industri
- Martini, L., Tjakraatmadja, J. H., Anggoro, Y., Pritasari, A., & Hutapea, L. (2012). Triple Helix collaboration to develop economic corridors as knowledge hub in Indonesia. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 52, 130-139.
- Mashur, Dadang. 2019. "Best Practice Program Corporate Social Responsibility (CSR)." Iapa Proceedings Conference: 230-44.
- Mashur, Dadang, Sofyan Husein, and Ridwan Manda. 2020. "Corporate Social Responsibility (CSR) and the Sustainability of PT. Pertamina RU II Production in a Mangrove Area of the Pakning River." 13(11).
- Nasution, R. A. (2021). Kajian Literatur Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 4(1), 199-207. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11033>
- Oktina, D. A., Sari, E. S., Sunardi, I. A., Hanifah, L. N., & Sanjaya, V. F. (2020). Pengaruh Penerapan Strategi Csr (Corporate Social Responsibility) Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Pada Pt. Pertamina (Persero) Tahun 2018. Competence : Journal of Management Studies, 14(2), 184-202. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v14i2.8962>
- Pertamina RU II Sungai Pakning paparkan Program CSR pada audiensi forum CSR bersama Bupati Bengkalis. (2021). Riau Kepri. <https://riaukepri.com/2021/06/22/pertamina-ru-ii-sungai-pakning-paparkan-program-csr-pada-audiensi-forum-csr-bersama-bupati-bengkalis/>
- Perrin, J. M., Kuhlthau, K. A., Gortmaker, S. L., Beal, A. C., & Ferris, T. G. (2002). Generalist and subspecialist care for children with chronic conditions. Ambulatory Pediatrics, 2(6), 462-.
- Praswati, Aflit Nuryulia. 2017. "Perkembangan Model Helix Dalam Peningkatan Inovasi." Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis: Perkembangan Konsep dan Riset E- Business di Indonesia: 690-705.
- Rahman, A. Z., & Warsono, H. (2019). Kolaborasi Triple Helix Dalam Pembangunan Wisata Bahari di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara), 7(1), 25-31.
- Rakhmadany, A., Tahsinurridlo, M., Fauziyah, L., Rahmawati, N. A., & Aidah, S. (2020). Stakeholder Analysis Program Jaminan Pangan Masyarakat (JAPANGMAS) oleh PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu. Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 5(1), 1-24. <https://doi.org/10.24235/empower.v5i1.6366>
- Rho, W.-J. 2014. Triple Helix for Social Innovation: The Saemaul Undong for Eradicating Poverty. Journal of Contemporary Eastern Asia, 13(1).
- Rudito, B., & Famiola, M. (2013). Corporate Social Responsibility. Rekayasa Sains. Shanbhogue, S. J., Sanusi, Y. S., Taamallah, S., Habib, M. A., Mokheimer, E. M. A., & Ghoniem, A. F. (2016). Flame macrostructures, combustion instability and

- extinction strain scaling in swirl-stabilized premixed CH₄/H₂ combustion. *Combustion and Flame*, 163, 494–5.
- Sugianto, A., & Hamidah, H. (2019). Implementasi Corporate Governance Guna Meningkatkan Sustainability Management Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25(4), 233. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v25i4.16061>
- Supeni, Endah. 2019. "Penerapan Model Triple Helix Dan Keunggulan Bersaing Pada Ukm Industri Kreatif Di Kabupaten Sidoarjo." *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) 2*: 1356–66.
- Tua, U. (2020). Pogram Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 53–77.

KAMPANYE GAMBUT BERBASIS GOVERNMENT-LED PROJECT DI KECAMATAN BUKIT BATU

Sumiati

Universitas Riau, Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis Prov. Riau

Email: sumis8009@gmail.com

Abstrak

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa ekosistem gambut merupakan bagian penting dari lingkungan hidup yang harus dilindungi dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan berbasis masyarakat dapat menggunakan teknik *government-led project* yaitu *mapping*, *konstruksi*, dan *governance*. Teknik ini dapat dimaknai sebagai peran kepala desa dalam membuat sebuah kebijakan terkait sistem tata kelola ekosistem gambut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pemerintah desa melakukan sistem tata kelola ekosistem gambut menggunakan tiga teknik tersebut. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui *in-depth interview* (wawancara mendalam). Hasil dari penelitiannya yaitu desa Sukajadi, desa Dompas, dan kelurahan Sungai Pakning adalah 3 desa yang memenuhi kriteria untuk membuat kampanye gambut berdasarkan indikator luas wilayah, program penunjang tata kelola gambut, dan keunikan.

Kata kunci: kampanye gambut, *government-led project*, konstruksi, dan *landscape governance*

PENDAHULUAN

Indonesia dalam aturannya dijelaskan pada pasal 28H ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan." Artinya pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap pengelolaan lingkungan hidup melalui peraturan perundang-undangan serta kebijakan tertentu dalam pemanfaatan lingkungan dengan cara pemetaan wilayah kawasan lindung, kawasan konservasi dan kawasan budidaya. Kemudian kawasan lindung yang dimaksud merupakan salah satu kawasan yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Oleh karena itu kawasan lindung yang harus dilestarikan adalah kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya sebut saja ekosistem gambut.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa ekosistem gambut merupakan bagian penting dari lingkungan hidup yang harus dilindungi dan dikelola dengan baik. Namun disayangkan, Ekosistem gambut mengalami kerusakan akibat pengelolaan lahan yang salah serta pemilihan komoditas bisnis yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan, pengurusan air gambut yang berakibat pada kekeringan (kering tak balik) hingga terjadinya kebakaran, kebakaran seringkali terjadi hampir setiap tahun dengan luasan semakin bertambah sehingga gambut tidak lagi dalam kondisi alamiah, Riau adalah kawasan yang sangat rentan terhadap kerusakan ekosistem gambut sejak 1997.

Oleh karena itu, ini menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian terkait Kampanye Gambut Berbasis *Government-Led Project* Di Kecamatan Bukit Batu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah desa melakukan sistem tata kelola ekosistem gambut melalui kampanye gambut menggunakan teknik *government-led project* di seluruh desa kecamatan Bukit Batu (Pangkalan Jambi, Dompas, Sejangat, Pakning Asal, Kelurahan Sungai Pakning, Sungai Selari, Batang Duku, Buruk Bakul, Bukit Batu, dan Sukajadi). Manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan secara teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian berkelanjutan. Sedangkan secara praktik dapat dijadikan *problem solving* bagi masyarakat yang daerahnya sebagai lingkungan ekosistem gambut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pemerintah desa

melakukan sistem tata kelola ekosistem gambut menggunakan teknik *government-led project* melalui tiga aspek yaitu mapping, konstruksi, dan *landscape governance* guna meminimalisir ekosistem gambut yang semakin tahun mengalami kerusakan.

Kampanye disini dimaknai oleh Rice dan Paisley sebagai keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Disebut juga sebagai kampanye politik yang berarti dilakukan oleh sekelompok orang, seseorang atau organisasi di waktu tertentu dengan maksud memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Namun menurut Rogers dan Storey (1987) kampanye adalah sejumlah tindakan komunikasi terencana yang bertujuan untuk menciptakan akibat atau efek tertentu kepada khalayak dalam jumlah yang besar dan dikerjakan secara terus menerus pada waktu tertentu. Pengertian ini termasuk paling banyak diterima oleh ilmuwan dan menjadi populer sehingga pada dasarnya kampanye adalah hal yang lumrah. Di dalam kampanye juga harus mengandung pesan agar suatu gagasan dan alasan-alasannya dapat dikonstruksikan dan dikomunikasikan dengan baik kepada khalayak ramai. Sedangkan *Government-Led Project* dapat disebut sebagai pola kepemimpinan kepala desa dalam menentukan keberhasilan suatu desa. Kepemimpinan dimaknai dengan sekumpulan dan serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian termasuk didalamnya kewibawaan untuk dijadikan sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpin agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan penuh rela, semangat, serta tidak merasa terpaksa. (Aksan, dkk : 2018). Kepala desa selaku *government led-project* harus memikirkan kebijakan yang harus ditetapkan dan dibangun demi terealisasi desa yang maju dan madani (surga desa). Contoh letak geografis desa seperti berapa luas laut di desa A, berapa hektar perkebunan di desa B, dan berapa luas letak ekosistem gambut (karena desa ini berpotensi besar ke arah ekosistem gambut). Menurut hemat penulis ekosistem gambut untuk kecamatan Bukit Batu memiliki potensi yang sama untuk itu kepala desa harus melakukan hal-hal berikut:

Mapping adalah bentuk kegiatan sederhana dalam menggambarkan keadaan suatu wilayah dalam bentuk simbol-simbol. Mapping atau peta dapat disebut sebagai ekspresi visual dari porsi-porsi yang ada di muka bumi. Tujuannya mempermudah untuk dimengerti oleh semua lapisan masyarakat. (Hanif dan Bangun, 2016). **Konstruksi** menurut Peter L Berger dalam teori konstruksi sosial atau *social construction* mengandung makna bahwa suatu kenyataan dibangun secara sosial. Bahwa banyak sekali kenyataan yang harus di bangun dalam sebuah desa berdasarkan pengetahuan yang menggiringnya. Dengan kata lain konstruksi sama halnya program-program yang telah dibentuk berdasarkan kenyataan-kenyataan di lapangan. **Landscape Governance** disebut sebagai kelembagaan pemerintahan desa dalam menjalankan pembangunan desa. Di dalam pemerintahan desa ditemukannya organisasi-organisasi yang turut serta dalam pembangunan desa. Organisasi ini sifatnya sudah mengakar dari zaman dulunya. Akan tetapi, *landscape governance* dapat direalisasikan apabila terdapat isu-isu yang memang membutuhkan *problem solving*. Seperti halnya pembentukan organisasi peduli gambut dengan tujuan penanganan cepat tanggap kebakaran di lahan gambut.

METODE

Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif menggunakan *in-depth interview* (wawancara mendalam) yang mana akan menjelaskan secara rinci teknik *government-led project* atau peran kepala desa dalam menangani kasus ekosistem gambut di desanya masing-masing. *In-depth interview* (wawancara mendalam) merupakan tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan responden menggunakan pedoman (guide) atau tidak dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama (Sutopo, 2006:72). Adapun data yang nantinya diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer dapat

ditemukan melalui teknik wawancara kepada *key informan* seperti kepala desa beserta kaur-kaur yang menjabat di desa tersebut. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka, referensi, majalah, jurnal, karya ilmiah, laporan, buku harian dan seterusnya. Dalam penelitian ini, data sekunder menjadi pendukung untuk menjelaskan secara detail permasalahan tentang ekosistem gambut di desa masing-masing. Misalkan keberadaan peta gambut, organisasi-organisasi yang dibentuk dalam penanggulangan bencana gambut beserta laporan-laporan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari desa yang ada di kecamatan Bukit Batu maka dapat dianalisis desa mana yang dapat dijadikan tuan rumah untuk menyelenggarakan kampanye gambut. Adapun indikator yang dapat dijadikan acuan dasar dalam penentuan kampanye gambut dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

TABEL 1.1

No	Nama Desa	Luas Wilayah Gambut	Program Penunjang Tata Kelola Gambut	Keunikan
1.	Desa Sukajadi	20.000 Ha	a. Hutan Lindung b. Perkebunan pepohonan jangka panjang (sawit, getah, jelutong, pulai rawa, sagu) c. Perkebunan sayur-sayuran (cabe, ubi, jahe merah, keladi) d. Penanaman serai wangi (belum direalisasikan) e. Pembuatan 17 buah kanal blocking f. Pembuatan belasan mbung (kolam besar)	Sudah menggunakan aplikasi Avenza dan Lancang Kuning
2.	Desa Dompas	Masih terbagi kedalam 2 perusahaan yaitu perusahaan Bukit Batu Hutan Alam dan Perusahaan Surya Dumai Agrindo	a. Reboisasi kayu jenis hutan sudah berjalan 5 tahun b. Penanaman kopi libirica sudah berjalan 2 tahun c. Penanaman buah nanas sudah berjalan 2 tahun d. Perkebunan sayur-sayuran seperti durian, jengkol, petai	Memiliki komunitas gambut yang dinamakan "Dompas Ghedang Cemerlang"
3..	Kelurahan Sungai	8000 Ha	a. Perkebunan	a. Memiliki

	Pakning		kelapa sawit & getah karet b. Perkebunan nanas c. Perkebunan pisang d. Memiliki 6 buah kanal blocking e. Memiliki 3 buah mbung (kolam besar)	arboretum yang terdiri dari pohon geronggang, kantong semar. b. Ikut tergabung ke dalam Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR)
4.	Desa Pakning Asal	20-30 Ha	a. Perkebunan sawit dan getah karet b. Kelompok pertanian skala rumahan yaitu menanam buah nanas c. Kelompok perkebunan palawija d. Beberapa mbung atau kolam darurat	Memiliki alat ukur panas / titik sinyal yang ditanamkan ke tanah karenanya desa ini range terdekat kilang minyak pertamina
5.	Desa Batang Duku	Kurang lebih 100 Ha	a. Perkebunan getah karet dan sawit b. Perkebunan sayur-sayuran (kangkung)	Inovasi kelompok pemuda bercocok tanam kangkung.
6.	Desa Pangkalan Jambi	200 Ha	a. Perkebunan sawit dan getah karet b. Kelompok perkebunan nanas c. Kebun desa (belum direalisasikan)	Tidak ada
7.	Desa Sejangat	16.000 Ha	a. Perkebunan kelapa sawit dan getah karet b. Perkebunan nanas	Tidak ada
8.	Desa Bukit Batu	500 Ha	a. Hutan alam b. Perkebunan kelapa saeit dan getah karet	Tidak ada

			c. budidaya hortikultura (belum direalisasikan)	
9.	Desa Sungai Selari	40,86 Ha	a. perkebunan kelapa sawit b. perkebunan pisang	Tidak ada
10.	Desa Buruk Bakul	2.400 Ha	a. perkebunan	Tidak ada

Berdasarkan tabel di atas desa Sukajadi, desa Dompas, dan kelurahan Sungai Pakning adalah 3 desa yang memenuhi kriteria untuk membuat kampanye gambut berdasarkan indikator luas wilayah, program penunjang tata kelola gambut, dan keunikan. Berdasarkan penelitian riil di lapangan, desa Sukajadi dikatakan cukup bagus terkait tata kelola ekosistem gambut. Ini dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka (MPA/MPB) seperti membuat kanal blocking, mbung, perkebunan, reboisasi, sosialisasi, dll. Lagipula, desa ini sudah tidak canggung lagi dalam menggunakan teknologi seperti penggunaan aplikasi *avenza* dan *lancing kuning* sebagai keberhasilan tata kelola ekosistem gambut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kampanye gambut dapat diselenggarakan oleh tiga desa yaitu desa Sukajadi, desa Dompas, dan Kelurahan Sungai Pakning. Tiga desa ini sudah dianalisis berdasarkan indikator-indikator seperti luas wilayah gambut, program penunjang tata kelola gambut serta keunikan. Tiga desa ini juga cukup baik dalam menggunakan teknik *government led-project* dimana kepala desa sangat berperan dan berpengaruh besar terhadap sebuah kebijakan seperti terkait tata kelola ekosistem gambut. Sebaiknya desa-desa yang lain dapat mencontohi tiga desa ini untuk melihat dari segi program penunjang tata kelola gambut. Dengan adanya kampanye gambut di kecamatan Bukit Batu maka dapat membentuk kohesi sosial yang bersifat positif antara desa satu dengan desa lainnya. Saling bertukar pikir dan saling bersinergi dalam menangani tata kelola ekosistem gambut. Guna memperbaiki lingkungan sekitar dengan upaya atau program yang menunjang keberhasilan dan kemajuan suatu desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagaimana telah diselenggarakannya hibah penelitian terkait Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat dengan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Pihak PT Pertamina RU II Sungai Pakning selaku pihak yang menyelenggarakan serta penyandang dana.
2. Pihak desa yang ada di kecamatan Bukit Batu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian dan wawancara mendalam terkait tata kelola ekosistem gambut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksan, dkk. Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. *Jurnal Neo Societal* vol 3 (1), 2018, 244-253 ISSN 2503-359X
- Alfiansyah, Muhammad Interview. 2021. "Tata Kelola Ekosistem Gambut di Desa Pakning Asal". Jl. Jendral Sudirman Sungai Pakning Gg. Sukajadi.
- Baharun, Interview. 2021. "Tata Kelola Ekosistem Gambut di Desa Sungai Selari". Jl. Bambu Kuning Sungai Pakning.

- Dodianto, Interview. 2021. "Tata Kelola Ekosistem Gambut di Desa Sejangat". Jl. SMA.
- Dwi Nikmatur Rohmah dan M. Arif Affandi. Konstruksi Masyarakat Desa Gayam Tentang Kebijakan Dana Alokasi Khusus Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Paradigma* Vol 5 (3) 2017
- Hanif Khairul Latif dan Bangun Muljo Sukojo. Analisa Ketelitian Geometric Citra Satelit Pleiades IA Metode Orthorektifikasi Rigoriorous Sebagai Dasar Pembuatan Peta Desa. *Jurnal Teknik ITS* Vol 5 (2), 2016 ISSN 2337-3539
- Jefferdin, Interview. 2021. "Tata Kelola Ekosistem Gambut di Desa Pangkalan Jambi". Jl. Jendral Sudirman Sungai Pakning-Pangkalan Jambi.
- Junaidi, Interview. "Tata Kelola Ekosistem Gambut di Desa Buruk Bakul". Jl. Jendral Sudirman Dumai-Sei.Pakning.
- Margaretha Badu. Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Labuan Bajo Kecamatan Lage Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie* vol 6 (1) 2016
- Poniman, interview. 2021. "Tata Kelola Ekosistem Gambut di Desa Dompas". Jl. Jendral Sudirman Sungai Pakning.
- Safri, Interview. 2021. "Tata Kelola Ekosistem Gambut di Desa Batang Duku". Jl. Jendral Sudirman Sungai Pakning-Batang Duku.
- Sandi, Heri Interview. 2021. "Tata Kelola Ekosistem Gambut di Desa Sukajadi". Jl. Murai Batu Desa Sukajadi No.83.
- Sari Marlina. Pengelolaan Ekosistem Gambut Pasca Kebakaran Lahan Gambut di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Media Ilmiah Teknik Lingkungan* vol 2 (1) 2017, 26-30
- Siti Fatimah. Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi Dalam Pemilu. *Jurnal Resolusi* vol 1 (1) 2018 ISSN 2621-5764
- Suhartono, Interview. 2021. "Tata Kelola Ekosistem Gambut di Desa Bukit Batu". Jl. Jendral Sudirman Dumai-Sei.Pakning Gg. Abdul Razak.
- Sulaiman, Interview. 2021. "Tata Kelola Ekosistem Gambut di Kelurahan Sungai Pakning". Jl. Jendral Sudirman Sungai Pakning Gg. Polsek.
- Zikri Suhada, dkk. Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Hukum Administrasi* vol 1 (3) 2020 , 207-223
- Zulfikar Irhas. Pencadangan dan Pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Hukum Syiah Kuala* Vol 1 (3) 2017, 106-118 ISSN 2580-9059

STRATEGI RESTORASI DAN MITIGASI BENCANA KEBAKARAN LAHAN GAMBUT DI KABUPATEN BENGKALIS

Hafizh Ayyasy Habibi, Alvin Asfareza, Fahrur Rifqi, Rifandra Akbari

Universitas Riau, Pekanbaru

Email: hafizhayyasy23@gmail.com

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan adalah keterdapatan api di hutan dan lahan yang menimbulkan kerusakan sehingga terjadi kerugian baik secara ekonomis maupun lingkungan. Salah satu daerah yang sering mengalami bencana kebakaran lahan gambut salah satunya adalah Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau. Bencana kebakaran lahan gambut sering terjadi dikarenakan kecenderungan masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar dimana hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya kebakaran lahan hutan gambut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Setelah dilakukan penelitian strategi restorasi dan mitigasi bencana kebakaran gambut yang dilakukan adalah masyarakat bekerjasama dengan PT. Pertamina Refinery Unit (RU) II Sungai Pakning membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA) sebagai wadah komunikasi MPA di tingkat kecamatan. Lalu strategi restorasi dan mitigasi bencana kebakaran gambut juga dengan menanam pertanian nanas *zero waste* yang dapat mengurangi kebakaran lahan, pengembangan Arboretum Gambut dan pengembangan Inovasi Sumur Hydran Portable dan Nuzul Gambut, serta Pertamina Sungai Pakning juga menginisiasi Kurikulum Sekolah Cinta Gambut dengan tujuan untuk menanamkan sejak dini rasa cinta terhadap gambut melalui kurikulum Lembaga yang sistematis.

Kata kunci: strategi, restorasi, mitigasi, lahan gambut

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Adapun salah satu bencana yang rutin menimpa Indonesia adalah kebakaran hutan dan lahan. Menurut BNPB, kebakaran hutan dan lahan adalah keterdapatan api di hutan dan lahan yang menimbulkan kerusakan sehingga terjadi kerugian baik secara ekonomis maupun lingkungan.

Kebakaran lahan dan kebun menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan perikehidupan manusia disektor kesehatan, sosial dan ekonomi (Peraturan Menteri Pertanian RI No 47/Permentan/OT.140/4/2014). Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan hilangnya aset dan kerusakan ekologi, dampak yang sangat menonjol dan dirasakan langsung oleh masyarakat adalah terjadinya kabut asap. Bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar, dan sistem transportasi yang mempengaruhi perekonomian, baik lokal, regional maupun internasional (PP Pertanian RI No 47/Permentan/OT.140/4/2014). BNPB (2013) mengemukakan bahwa asap yang ditimbulkan tidak hanya skala nasional tetapi juga menimbulkan kerugian bagi negara-negara disekitar wilayah Indonesia. Kerugian lainnya dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia adalah meningkatnya emisi gas rumah kaca (JICA, 2017). Emisi gas rumah kaca terutama adalah CO₂, N₂O dan CH₄ yang berkontribusi terhadap perubahan iklim (Peraturan Menteri Pertanian RI No 47/Permentan/OT.140/4/2014).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat diakses di sipongi.menlhk.go.id mengenai kebakaran hutan dan

lahan yang terjadi di wilayah Indonesia selama periode 2014-2019, bahwa luas hutan dan lahan yang terjadi kebakaran paling tinggi adalah saat musim kemarau panjang pada tahun 2015 dan tahun 2019. Pada tahun 2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 2.611.411,44 hektar, sedangkan pada tahun 2019 terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 1.592.010,00 hektar dengan jumlah titik panas pada tahun ini sekitar 27.758 titik.

Bahkan dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia menempati urutan ketiga dunia dalam hal pencemaran udara akibat pembakaran hutan, dimana sebelumnya menempati urutan ke-25, dimana yang terparah yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia adalah pada tahun 1997. Namun tahun 2015 juga merupakan salah satu tahun terburuk bencana asap atau kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia. Setidaknya lebih dari 43 juta jiwa terpapar kabut asap di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Data yang dihimpun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *World Resources Institute*, *Center for International Forestry Research*, *Global Fire Emissions Database* dan *National Aeronautics and Space Administration (NASA)* menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 505.527 jiwa terinfeksi penyakit saluran pernapasan, terdapat 115.940 titik api dimana ini yang terbanyak semenjak tahun 2003, dan lebih dari 22.000 personel gabungan diturunkan untuk memadamkan api di lapangan.

Kebakaran yang umumnya terjadi di wilayah Indonesia sebagian besar terjadi diluar wilayah hutan, sekitar 70-80 persen kebakaran terjadi diluar wilayah hutan, sedangkan sekitar 20-30 persen terjadi di dalam wilayah hutan. Kebakaran di wilayah Indonesia menjadi spesifik karena banyak yang terjadi di lahan gambut yang menimbulkan kabut asap (BNPB, 2013). Luas lahan gambut di Indonesia adalah 20,6 juta hektar, dimana lahan gambut dan vegetasi yang tumbuh diatas lahan gambut merupakan sumber daya alam yang berfungsi sebagai pelestarian sumberdaya air, peredam banjir, pencegah intrusi air laut, pendukung berbagai kehidupan keanekaragaman hayati, dan pengendali iklim (Wahyunto, dkk, 2004). Kebakaran pada lahan gambut dapat mengakibatkan hilangnya fungsi-fungsi tersebut.

Selain dampak negatif terhadap lingkungan, kebakaran lahan gambut juga berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan Ahmad Husairi, Nika Sterina Skripsiana dan Widya Nursantari tentang "Karakteristik Penyakit pada Masyarakat yang Terpajan Asap Kebakaran Lahan Gambut di Lahan Gambut". Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 tepatnya di Klinik Pratama TNI AU Syamsuddin Noor Banjarbaru ini menemukan bahwa kebakaran lahan gambut dapat menimbulkan berbagai macam penyakit pada tubuh manusia, diantaranya adalah penyakit saluran pernapasan yang terdiri dari ISPA, asma, bronkial, bronkitis dan pneumonia; penyakit mata yaitu konjungtivitis; penyakit THT yang terdiri dari tonsilitis, faringitis dan rhinitis; penyakit kulit yaitu dermatitis kontak; dan juga penyakit komorbid yang terdiri dari hipertensi dan diabetes mellitus.

Salah satu daerah di Indonesia yang juga sering mengalami bencana kebakaran lahan gambut adalah Kabupaten Bengkalis yang terletak di Provinsi Riau. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Arifudin, Almasdi Syahza, Osamu Kozan, dkk tentang "Dinamika Penggunaan, Kebakaran, dan Upaya Restorasi Lahan Gambut: Studi Kasus di Desa Tanjung Leban, Bengkalis". Penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya kecenderungan masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar dimana hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya kebakaran lahan gambut yang meluas. Ada sekitar 69% masyarakat yang mengaku membuka lahan dengan cara tebas kemudian dibakar, tebas bakar disini merupakan kegiatan menebas semak belukar dan pohon kayu yang ada terlebih dahulu, setelah itu kemudian dibakar.

Melihat berbagai macam dampak buruk yang diakibatkan kebakaran lahan gambut, baik itu dampak buruk terhadap lingkungan sekitar maupun terhadap masyarakat yang terpapar asap kebakaran, dirasa perlu adanya upaya bersama untuk mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran lahan gambut tersebut. Pada

dasarnya dalam upaya penanggulangan bencana baik itu kebakaran lahan gambut, Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Namun, dengan dibentuknya lembaga BNPB tersebut bukan berarti kita sebagai masyarakat boleh mengabaikan sebuah bencana dan menyerahkan semua upaya penanggulangannya kepada BNPB. Karena seharusnya penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab kita semua untuk melaksanakannya, setidaknya itulah yang sedang dilakukan oleh CSR Pertamina RU II Sungai Pakning. Dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran lahan gambut, Pertamina Sungai Pakning menjalin sinergi dengan masyarakat sekitar yang ditandai dengan adanya kerjasama dengan Masyarakat Peduli Api (MPA). Yang dimana peran Pertamina Sungai Pakning terhadap upaya penanggulangan bencana kebakaran lahan gambut ini berupa pemberian bantuan alat, melaksanakan edukasi mitigasi karhutla berbasis masyarakat serta pelatihan pemadaman api. Tak hanya sampai disitu, Pertamina Sungai Pakning juga mengembangkan program tersebut menjadi Kampung Gambut Berdikari, yang kegiatannya diperluas lagi dengan diadakannya pelatihan pemberdayaan ekonomi di lahan gambut yakni pertanian nanas, olahan nanas, budidaya ikan dan juga pengelolaan wisata Arboretum Gambut.

Sejak tahun 2016, Pertamina Sungai Pakning menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yaitu Kampung Gambut Berdikari, yang melibatkan 2.884 jiwa penerima manfaat dari berbagai kalangan usia dan status sosial. Adapun program tersebut terdiri dari berbagai kegiatan mulai dari donasi (*charity*), peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pembinaan (*capacity building*), peningkatan ekonomi masyarakat (*community empowerment*), hingga pembangunan infrastruktur. Program ini juga telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari berbagai ajang nasional seperti *Indonesian Sustainable Development Goals Awards* (ISDA), UNS SME Award, dan juga CSR Nusantara Award. Program tersebut juga mengantarkan PT Pertamina RU II Sungai Pakning menyabet predikat PROPER Emas.

Berdasarkan uraian tersebut, kami tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana strategi restorasi dan mitigasi bencana kebakaran lahan gambut yang dilakukan oleh PT. Pertamina RU II Sungai Pakning?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Berdasarkan dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang

dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata, dalam suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan pemanfaatan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Penelitian ini ingin mendapatkan gambaran mengenai proses difusi inovasi dalam pengolahan lahan gambut berkelanjutan pada program arboretrum gambut Marsawa yang dilakukan oleh PT. Pertamina Sungai Pakning RU II. Informan dalam penelitian ini yaitu Community Development Officer (CDO) PT. Pertamina dan ketua Masyarakat Peduli Api (MPA).

Lokasi penelitian ini dilakukan di Arboretrum Marsawa yang terletak di Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Sedangkan waktu penelitian berlangsung dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi kegiatan difusi inovasi pengolahan lahan gambut pada arboretrum Marsawa di Sungai Pakning.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Restorasi Gambut

Restorasi gambut adalah upaya untuk memulihkan fungsi ekologis lahan gambut juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak dari menyusutnya lahan gambut. Restorasi gambut merupakan upaya pemulihan ekosistem gambut reklamasi supaya kondisi hidrologis, fungsi dan strukturnya berada pada kondisi membaik. Untuk itu dilakukan upaya pembasahan kembali (*rewetting*) material gambut yang mengering akibat turunnya muka air tanah gambut.

Pada tahun 2015 terjadi kebakaran hebat di daerah Kampung Jawa. Kampung Jawa saat itu menjadi daerah yang terbakar terluas di Kecamatan Bukit Batu. Hal ini disebabkan oleh banyaknya lahan kosong yang tidak terpelihara. Akibat dari kebakaran tersebut, banyak sumber air yang rusak disekitar perkebunan masyarakat, sehingga banyak kebun sayur masyarakat mati dimana pada saat itu penghasilan utama dari masyarakat Kampung Jawa adalah sayuran dan menjadi suplai sayur terbesar untuk masyarakat di Kelurahan Sungai Pakning, sehingga masyarakat Kampung Jawa tidak memiliki pekerjaan. Berawal dari musibah kebakaran lahan yang sangat merugikan masyarakat Kampung Jawa tersebut, masyarakat Kampung Jawa berusaha untuk bangkit dari permasalahan tersebut. Maka masyarakat Kampung Jawa menjalin kerjasama dengan *Corporate Sosial Responsible* (CSR) PT. Pertamina (Persero) *Refinery Unit* (RU) II Sungai Pakning untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan dan untuk dapat memperbaiki perekonomian mereka, maka masyarakat dan PT. Pertamina melakukan restorasi lahan gambut menjadi pertanian nanas yang mana hal ini dilakukan setelah melalui riset dan penelitian berupa pemetaan lahan dan penentuan jenis restorasi yang sesuai dengan kondisi gambut serta didukung kemampuan masyarakat sebagai seorang petani.

1. Pertanian Nanas *Zero Waste*

Strategi yang dilaksanakan oleh Pertamina yaitu dengan revegetasi lahan gambut menjadi pertanian nanas. Dalam restorasi lahan gambut menjadi pertanian nanas, Pertamina menggandeng Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Kelompok Tani Tunas Makmur Sungai Pakning dalam kegiatan restorasi lahan gambut. Sampai saat ini kegiatan restorasi lahan gambut menjadi pertanian nanas dimulai dari 0,5 Ha pada tahun 2017 hingga saat ini sudah mencapai 25 Ha dengan kapasitas 250.000 buah/ Musim panen. Selain tanaman nanas, PT Pertamina juga mendorong dan mengajak masyarakat untuk menanam pohon khas lahan gambut pada lahan bekas terbakar yang

bertujuan untuk mengubah semak yang rawan terbakar menjadi lahan pertanian yang produktif. Tanaman yang menjadi pendamping selain nanas adalah tanaman seperti durian, matoa, jengkol dan sirsak. Dipilihnya nanas dan tanaman lainnya karena tanaman tersebut tidak perlu dilaksanakan pengolahan lahan dalam proses penanamannya. Selain itu, tanaman nanas juga salah satu tanaman yang dapat memiliki turunan pengolahan bernilai ekonomis.

Tanaman nanas yang ditanam di lahan gambut adalah nanas *zero waste* dimana semua bagian dari buah nanas tersebut dapat dimanfaatkan. Pertanian nanas *zero waste* ini juga mendapatkan 5 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) inovasi program. Yang dapat dijelaskan dalam berbentuk table sebagai berikut:

Tabel 1. Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Pertanian nanas *zero waste*

No	Bagian Nanas	Hasil Olahan	Hak Kekayaan Intelektual (Hki)
1.	Daun Nanas	Kerajinan Daun Nanas (Tas Anyaman)	1. HKI Kantong Seranas (000155530)
			2. HKI Pisau Seranas (000155529)
2.	Mahkota Nanas	Bibit Unggul	1. HKI Polijowo (ID5000003004)
3.	Kulit Nanas	Pupuk Kompos	1. HKI Pinepeat (EC00202032023)
4.	Daging Nanas	Olahan Nanas (Kerupuk Nanas, Kerupuk tepung nanas, dodol, sirup, manisan nanas)	1. HKI PH Separator

Dari penjelasan tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya semua bagian dari nanas tersebut dapat diolah menjadi olahan yang bermanfaat sehingga tidak menyisakan bagian nanas yang menjadi sampah atau ampas (*Zero Waste*) dimana hal ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung Jawa Kelurahan Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis.

Selain mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, pertanian nanas juga dapat mengurangi kebakaran lahan, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2021 dengan Bapak Sadikin sebagai Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA), beliau mengatakan bahwasanya pertanian nanas berfungsi sebagai sekat bakar antar lahan. Beliau mencontohkan apabila lahan A terbakar, maka yang menjadi pemutus api atau penghalang agar tidak menjalar ke lahan B yaitu pertanian nanas tadi. Jadi api yang hidup di lahan A akan mati secara alami dikarenakan pertanian nanas tadi.

Berdasarkan penjelasan diatas, strategi restorasi dan mitigasi bencana kebakaran lahan gambut di Kelurahan Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis melalui pertanian nanas dapat dikatakan telah berhasil, disamping meningkatkan perekonomian masyarakat pertanian nanas juga dapat mengurangi kebakaran lahan.

Yang menjadi kekuatan dari strategi ini adalah adanya rasa kekeluargaan yang kuat yang dimiliki Koperasi Tani Tunas Makmur sehingga kegiatan restorasi lahan gambut berjalan dengan baik. Dan yang menjadi kelemahan dari strategi tersebut adalah masih lemahnya manajemen koperasi dalam bagian pemasaran produk nanas dan masih lemahnya manajemen keuangan.

Adapun peluang yang tercipta dari restorasi lahan gambut ini adalah banyak pihak yang menawarkan kerjasama dan pendampingan. Dan yang menjadi tantangannya adalah kurangnya semangat dan tanggung jawab anggota koperasi sehingga hal tersebut akan berdampak kepada produktifitas dari pertanian nanas itu sendiri.

2. Arboretum Gambut

Strategi lain yang dilakukan dalam merestorasi lahan gambut adalah pengembangan Arboretum Gambut. Upaya pengembangan Arboretum Gambut ini bekerjasama dengan

Kelompok Tani Tunas Makmur dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Kelurahan Sungai Pakning. Arboretum Gambut berdiri diatas lahan asli seluas 1,1 Hektar yang terselamatkan dari bencana kebakaran. Di Arboretum Gambut masyarakat bersama PT. Pertamina RU II Sungai Pakning melakukan identifikasi tanaman endemik lahan gambut yang berada yang selamat dari kebakaran dan melakukan pembudidayaan tanaman khas gambut sehingga tidak terancam punah. Hasil dari identifikasi tersebut, ditemukan beberapa tanaman langka, diantaranya adalah Kantong Semar, Meranti, Jelutung, dan Palem Merah. Tanaman-tanaman tersebut dikategorikan sebagai tanaman endemik yang hanya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di lahan gambut. Selain sebagai upaya restorasi lahan gambut, Arboretum Gambut Sungai Pakning juga memiliki fungsi sebagai pusat edukasi gambut di Provinsi Riau dan menjadi laboratorium bagi para peneliti dari beberapa Universitas di Provinsi Riau. Selain itu, Arboretum Gambut Sungai Pakning juga menjadi Arboretum Gambut pertama di Kabupaten Bengkalis yang dikelola oleh swadaya masyarakat. Prestasi diperoleh oleh Arboretum Gambut selama berdiri sejak tahun 2018 adalah kunjungan beberapa petinggi daerah, seperti kunjungan dari Irjen Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta kunjungan Gubernur Riau pada November 2019 lalu (Sitorus, 2020).

Yang menjadi kekuatan dari strategi ini adalah adanya rasa kekeluargaan yang kuat yang dimiliki Koperasi Tani Tunas Makmur sehingga upaya pengembangan arboretum gambut dapat berjalan dengan baik. Dan yang menjadi kelemahan dari strategi tersebut adalah masih lemahnya kerjasama antar mitra dalam pengelolaan arboretum gambut sehingga arboretum gambut terlihat kurang terawat.

Adapun peluang yang tercipta dari restorasi lahan gambut ini adalah banyak pihak yang menawarkan kerjasama dan pendampingan pengelolaan arboretum gambut. Dan yang menjadi tantangannya adalah kurangnya semangat dan tanggung jawab anggota koperasi sehingga hal tersebut akan berdampak pada pengelolaan arboretum gambut. Selain hal itu, pandemi covid juga menyebabkan arboretum gambut sepi pengunjung.

b. Mitigasi Kebakaran Lahan

Mitigasi bencana merupakan upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sederhananya mitigasi bencana adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana. Di Sungai Pakning sendiri, PT. Pertamina bekerja sama dengan Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk meningkatkan potensi serta kemampuan lembaga tersebut dalam menanggulangi kebakaran lahan. Strategi yang dilakukan Pertamina Sungai Pakning diantaranya adalah memberikan pelatihan gabungan secara rutin tentang pemadaman api yang dihadiri juga oleh MPA se-Kecamatan Bukit Batu, Dinas Pemadam Kebakaran, serta TNI/POLRI dan juga pemberian bantuan alat pemadam kebakaran. Terbaru, pada Februari 2021 ini PT Pertamina RU II Sungai Pakning menggandeng Manggala Agni Provinsi Riau dalam Pelatihan Gabungan MPA se-Kecamatan Bukit Batu sebagai bentuk komitmen PT. Pertamina RU II Sungai Pakning dalam mendukung kelestarian lingkungan dalam bentuk penanganan kebakaran lahan dan hutan (Wawancara dengan Bapak Rizal Tim CDO Pertamina Sungai Pakning). Selain itu Pertamina Sungai Pakning juga membentuk suatu forum komunikasi yang bernama Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA), yang bertujuan sebagai wadah komunikasi bagi para anggota MPA se-Kecamatan Bukit Batu yang jika terjadi kebakaran di salah satu wilayah di Kecamatan Bukit Batu maka anggota MPA yang tergabung dalam FORKOMPA dapat dengan mudah menyampaikan informasi tersebut kepada pihak Dampak dan TNI/POLRI.

1. Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut

Strategi penanggulangan kebakaran lahan yang dilakukan oleh MPA bersama dengan Pertamina Sungai Pakning adalah dengan menciptakan berbagai inovasi alat

untuk memadamkan api. Salah satunya adalah pembuatan Sumur Hydran Portable, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua MPA Pak Sadikin dalam wawancara pada Kamis, 15 Juli bahwa Sumur Hydran Portable merupakan sumur bor dengan kedalaman kurang lebih 6 meter yang letaknya dekat dengan sumber api, penamaan portable sendiri adalah karena sumur ini dapat dipindahkan sesuai dengan keberadaan titik api dan dapat menyesuaikan dengan panjang selang air dengan titik api. Cara kerja pembuatan sumur Hydran Portable ini adalah dengan memancarkan pipa kedalam tanah gambut, lalu ditarik menggunakan pompa air dan air siap untuk memadamkan api. Inovasi selanjutnya dari Pertamina Sungai Pakning adalah Nuzul Gambut, yaitu suatu alat seperti selang yang dapat ditancapkan kedalam tanah, kegunaannya sendiri adalah untuk memadamkan api yang membakar lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 1 meter, karena selang biasa tidak dapat memadamkan api dengan kedalaman tersebut. Cara kerjanya sendiri adalah dengan menancapkan Nuzul Gambut kedalam tanah lalu air akan menyebar dan memadamkan api di lahan gambut yang terbakar dengan kedalaman lebih dari 1 meter.

Selain itu, MPA juga membangun embung, yang berfungsi menampung air yang nantinya bisa digunakan untuk memadamkan api ketika terjadi kebakaran. Pembuatan embung sendiri adalah dengan menggali lahan kosong di sekitaran gambut dan dengan sendirinya air akan mengisi embung tersebut. Di Sungai Pakning, pembuatan embung biasanya berada di sekitar lahan kosong tidak terawat yang jauh dari sumber air, hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi apabila terjadi kebakaran di wilayah tersebut. Namun yang paling penting dari semuanya adalah pembuatan Canal Blocking atau Sekat Kanal, yang berfungsi untuk menjaga ketinggian air dan mencegah penurunan permukaan air dilahan gambut, dengan cara menghambat jalannya air dari lahan gambut menuju keluar. Jadi tujuan pembuatan sekat kanal ini adalah menjaga agar lahan gambut selalu basah.

Yang menjadi kekuatan dalam strategi penanggulangan kebakaran lahan ini adalah adanya pola komunikasi antara anggota MPA yang terjalin dengan baik, adapun alat komunikasi yang digunakan adalah Hand Talking (HT) yang dirasa paling tepat untuk digunakan di Kelurahan Sungai Pakning. Karena, tingkat ekonomi masyarakat yang tergolong menengah kebawah, jadi tidak semua anggota MPA mampu membeli pulsa atau paket internet. Dengan adanya HT tersebut, komunikasi kelompok MPA semakin cepat dan baik. Jika ditemukan titik api di salah satu wilayah Kecamatan Bukit Batu, anggota MPA dapat langsung berkoordinasi dan mengirimkan personil mereka dalam upaya awal pemadaman api. Dan jika api semakin besar, maka anggota MPA dapat langsung berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk saling bekerja sama. Strategi ini dinilai berhasil dalam menurunkan tingkat kebakaran lahan gambut di Kecamatan Bukit Batu, tercatat kelompok MPA berhasil menurunkan tingkat kebakaran pada 2015 sebanyak 2972 titik api menjadi 156 titik api. Dan Kecamatan Bukit Batu telah berhasil mencapai Zero Fire dari tahun 2015 sampai sekarang. Sedangkan yang menjadi kelemahannya adalah ketidaktepatan waktu dalam pemberian insentif oleh pihak kelurahan dan juga jumlahnya yang tergolong sedikit.

Peluang dalam strategi penanggulangan kebakaran lahan ini adalah nantinya inovasi alat dapat diterapkan oleh kelompok MPA lain di seluruh wilayah gambut di Indonesia dan diharapkan dapat menurunkan angka kebakaran di Indonesia. Sedangkan ancaman dalam penerapan strategi ini adalah ketika terjadi kemarau berkepanjangan yang dapat mengakibatkan penurunan permukaan air dilahan gambut dan dapat memicu terjadinya kebakaran, karena jika permukaan air dilahan gambut menurun maka alat seperti Sumur Hydran Portable dan Nuzul Gambut sulit untuk digunakan dan embung tempat menampung air dilahan gambut akan mengering.

2. Penanaman Edukasi Cinta Lingkungan Gambut

Pertamina Sungai Pakning juga menginisiasi Kurikulum Sekolah Cinta Gambut sebagai strategi mitigasi bencana yang bertujuan untuk menanamkan sejak dini rasa cinta terhadap gambut melalui kurikulum lembaga yang sistematis sehingga diharapkan nantinya dapat melahirkan generasi yang cinta akan lingkungan. Kurikulum Sekolah Cinta Gambut ini telah diterapkan di 25 sekolah dan telah menjangkau 3.750 siswa, dalam pelaksanaannya Pertamina Sungai Pakning juga menggandeng kelompok-kelompok binaan yang lain sebagai lokasi pembelajaran bagi siswa seperti Arboretum Gambut, Pertanian Nanas Terintegrasi, dan juga Area Konservasi Mangrove. Selain itu Pertamina Sungai Pakning juga mengadakan Program Pertamina EcoCamp untuk anak-anak usia remaja, dalam program ini siswa SMA hingga mahasiswa diberikan materi terkait lingkungan khususnya pada lingkungan gambut. Harapannya adalah program tersebut dapat memberikan edukasi mengenai lahan gambut kepada anak-anak milenial sehingga menciptakan generasi milenial yang cinta lingkungan dan sadar akan bahaya serta potensi lahan gambut.

Kekuatan dalam penerapan strategi Kurikulum Sekolah Cinta Gambut ini adalah adanya dukungan dana yang kuat dari pihak Pertamina Sungai Pakning, dimana PT. Pertamina mengucurkan dana CSR sebesar Rp 625 jutayang disalurkan langsung ke sekolah dan siswa yang menerapkan Kurikulum Sekolah Cinta Gambut, dan juga didukung dengan adanya kerjasama dengan kelompok binaan CSR lain sebagai sarana pembelajaran siswa. Sedangkan yang menjadi kelemahannya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis belum bisa mengalokasikan jam pelajaran khusus untuk mata pelajaran Kurikulum Sekolah Cinta Gambut tersebut, sehingga penerapannya masih digabungkan dengan mata pelajaran lainnya, misalnya dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) disisipkan materi karakteristik ekosistem gambut dan juga dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) disisipkan materi tentang pencaharian masyarakat yang tinggal di wilayah gambut.

Peluang dalam penerapan strategi ini ialah saat ini Kurikulum Sekolah Cinta Gambut sedang dipersiapkan untuk hadir dalam platform digital yang berbasis *website* dan akan menjadi *E-Learning* lingkungan pertama di Indonesia. Yang harapannya adalah Kurikulum Sekolah Cinta Gambut yang diterapkan di berbagai Sekolah Dasar di Kabupaten Bengkalis ini dapat semakin luas dampak pemanfaatannya di berbagai daerah yang rawan terjadi kebakaran seperti di Provinsi Jambi dan beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan. Sedangkan ancamannya adalah dikarenakan jam pelajaran yang masih sangat terbatas, kemungkinan yang terjadi ialah materi yang disampaikan oleh guru masih sangat minim dan kurang mendalam, selain itu juga tidak adanya guru yang menjadi pionir untuk menerapkan kurikulum tersebut dan bisa-bisa nantinya materi tersebut tidak diajarkan lagi ke siswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan diatas Strategi Restorasi dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Gambut di Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis telah berhasil dilaksanakan, hal ini dapat dilihat bagaimana Pertamina memberdayakan kelompok Masyarakat peduli Api (MPA) sebagai garda terdepan disaat bencana kebakaran terjadi. Selain itu, Pertamina sungai pakning membentuk forum komunikasi yang Bernama Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA), sebagai wadah komunikasi bagi para anggota MPA dengan stakeholder dalam proses mitigasi bencana kebakaran hutan. Dalam restorasi lahan gambut, Pertamina menggandeng MPA untuk melakukan kegiatan penanaman pertanian nanas dan arboretum. Lalu dalam mitigasi bencana kebakaran gambut, terlahir inovasi-inovasi terbaru seperti sumur hydran dan nuzul gambut yang mampu membantu MPA dalam proses pemadaman bencana kebakaran hutan gambut di sungai pakning. Lalu Pertamina juga menginisiasi kurikulum

cinta gambut sebagai strategi mitigasi bencana yang bertujuan untuk menanamkan sejak dini rasa cinta terhadap gambut. [Cambria, 11 pt, spasi **tunggal**].

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan peneliti dalam penyusunan artikel ini, yaitu Kak Vera Darasni Putri, Bapak Rizal selaku *Community Development Officer* PT. Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning, Bapak Dr. Dadang Mashur, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini, Bapak Sadikin selaku Ketua MPA (Masyarakat Peduli Api) dan Pengelola Arboretum Gambut Sungai Pakning yang berjudul Strategi Restorasi Dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Gambut Di Kabupaten Bengkalis.

DAFTAR PUSTAKA

- BUMN. 2021. Pertamina Jalin Sinergi dengan Masyarakat untuk Cegah Karhutla di <https://bumn.go.id/media/news/pertamina-jalin-sinergi-dengan-masyarakat-untuk-cegah-karhutla> (di akses 3 agustus)
- Creswell, John W.; Ahmad Lintang Lazuardi; Saifuddin Zuhri Qudsy. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: MEMILIH DIANTARA LIMA PENDEKATAN. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- CSR News. 2019. Program CSR Pertamina RU II Sungai Pakning Ubah Musibah Menjadi Berkah di <https://www.pertamina.com/id/news-room/csr-news/program-csr-pertamina-ru-ii-sungai-pakning-ubah-musibah-menjadi-berkah> (di akses 3 agustus)
- Diki Agusnanda. 2021. Pertamina RU II Sungai Pakning Gelar Pelatihan Gabungan MPA se-Kecamatan Bukit Batu Bersama Manggala Agni Provinsi Riau di <https://camatbukitbatu.bengkalis.go.id/web/detailberita/565/pertamina-ru-ii-sungai-pakning-gelar-pelatihan-gabungan-mpa-se-kecamatan-bukit-batu-bersama-manggala-agni> (di akses 4 agustus)
- Energia News. 2019. Gubernur Riau Apresiasi Arboretum Gambut Binaan Pertamina Sei Pakning di <https://www.pertamina.com/id/news-room/energia-news/gubernur-riau-apresiasi-arboretum-gambut-binaan-pertamina-sei-pakning> (di akses 3 agustus)
- Fadillah, A., Sandhyavitri, A., & Sutikno, S. (2019). Model Hidrologi Untuk Prediksi Elevasi Muka Air Tanah Pada Gambut Tropis Sebagai Upaya Mitigasi Kebakaran di Kabupaten Bengkalis. *Sainstek (e-Journal)*, 7(2), 98-103.
- Miles, M dan Huberman, M. (2014). ANALISIS DATA KUALITATIF. UI-Press.
- News Release. 2019. Inovasi Pertamina Lahirkan Sekolah Cinta Gambut di <https://www.pertamina.com/id/news-room/news-release/inovasi-pertamina-lahirkan-sekolah-cinta-gambut> (di akses 3 agustus)
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Purwanto, W., Hidayat, R., Marcelino, H. D., & Widhagdha, M. F. (2021, March). Land and forest fire disaster management through the arboretum gambut and community empowerment of masyarakat peduli api (mpa) csr program pt pertamina (persero) ru ii sungai pakning. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 683, No. 1, p. 012082). IOP Publishing.
- Redaksi. 2019. Pertamina Inisiasi Sekolah Cinta Gambut di <https://majalahcsr.id/pertamina-inisiasi-sekolah-cinta-gambut/> (di akses 3 agustus)
- Saputra, W., Rosnita, R., & Yulida, R. (2017). Peran Kelompok tani Dan Masyarakat Peduli Api (Mpa) Dalam Mengelola Dan Mencegah Kebakaran Lahan Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Agribisnis*, 19(1), 57-71.

- Sitorus, S. H., & Hidayat, R. (2020, November). Strategi Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. In International Conference Communication and SosialSciences (ICCOMSOS) (Vol. 1, No. 1).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Yuliani, F., Saktioto, S., Rosnita, R., Pailis, E. A., Murniati, M., & Tjarsono, I. (2019, October). Sistem pengolahan lahan tanpa bakar dalam kebakaran hutan dan lahan pada kawasan gambut Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 1, pp. 645-651).

EVALUASI DAMPAK LIMBAH RUMAH TANGGA BAGI PENCEMARAN LAUT

Hendra, Afrizal

Jurusan Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Riau

Email: hendra.hamzarullah@gmail.com, afrizabty@gmail.com

Abstrak

Evaluasi dampak limbah rumah tangga bagi pencemaran laut (studi kasus pencemaran di Pelabuhan Panipahan Rokan Hilir). Observasi peneliti di lapangan terlihat bahwa beban sampah pada lingkungan pelabuhan Panipahan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Masih banyak persepsi masyarakat di Panipahan bahwa limbah bersifat padat maupun cair yang dibuang ke aliran sungai atau ke parit-parit tersebut yang terbawa sampai ke daerah pesisir pantai adalah suatu tindakan yang tidak berbahaya. Pemikiran tersebut sangat keliru karena apabila limbah dan sampah tersebut berada di laut justru berdampak pada pencemaran lingkungan dan berbahaya bagi pelayaran yang dapat menyebabkan kecelakaan kapal, disamping itu pemerintah daerah tidak sepenuhnya menerapkan Perda No.06 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan Perbup Nomor 92 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Rokan Hilir dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis. Oleh karena itu sudah menjadi hal yang sangat mendesak untuk melakukan upaya antisipasi terhadap pencemaran tersebut baik berupa pencegahan dan pengendalian terhadap dampak dan perbaikan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dari hasil penelitian ini bisa dilihat dampak yang ditimbulkan sampah limbah rumah tangga bagi pencemaran laut disekitar Pelabuhan Panipahan.

Kata Kunci: evaluasi dampak, pencemaran lingkungan, pelabuhan

PENDAHULUAN

Perkembangan penduduk yang semakin meningkat, menimbulkan berbagai masalah lingkungan hidup. Semakin bertambahnya penduduk semakin banyak pula limbah rumah tangga yang dihasilkan. Dengan jumlah penduduk yang tinggi akan mengakibatkan tingginya volume limbah yang dihasilkan dari rumah tangga. Undang undang No. 18 tahun 2008 menjelaskan bahwa sampah merupakan sisa dari proses kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Definisi ini seolah memberikan kesan sampah sebagai benda padat yang sudah tidak memiliki nilai guna bagi manusia, sehingga mayoritas masyarakat cenderung menganggap sampah merupakan benda yang harus segera disingkirkan bagaimanapun caranya. Pola pikir seperti inilah yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia.

Penyumbang sampah terbesar nasional 48% berasal dari sektor rumah tangga. Dengan terjadinya penambahan jumlah penduduk yang tinggi tentunya akan mengakibatkan terhadap tingginya volume limbah yang dihasilkan dari rumah tangga. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari didalam rumah tangga kecuali tinja dan sampah spesifik yang memerlukan pengelolaan khusus. Namun sebagian besar masyarakat belum mengetahui jika sampah yang mereka hasilkan masih dapat diolah untuk selanjutnya dimanfaatkan, sehingga dapat mendorong terwujudnya kawasan lingkungan yang bebas sampah (zero waste).

Masalah limbah rumah tangga merupakan masalah yang belum terselesaikan baik secara internasional maupun Nasional, perlu pengelolaan terhadap limbah tersebut agar tidak merusak lingkungan bahkan limbah bisa berdaya guna, namun hal tersebut tidaklah mudah, perlu sinergi semua pihak baik Pemerintah maupun semua lapisan masyarakat. Berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan kualitas

lingkungan hidup yang menurun telah mengancam lingkungan hidup dan kelangsungan kehidupan umat manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan, agar lingkungan jauh dari pencemaran yang dapat merusak tatanan lingkungan saat ini dan akan datang.

Laut yang bersih dan sehat akan menghasilkan banyaknya ketersediaan ikan laut dan tangkapan hasil laut lain yang dapat membantu meningkatkan pedapatan masyarakat. Namun yang terjadi sekarang semakin berkurangnya tangkapan laut nelayan, hal ini disebabkan terjadinya pencemaran pantai dan laut, perlu dilakukan pengendalian, karena dapat menimbulkan kerugian dalam usaha nelayan ini. Pencemaran ini disebabkan limbah-limbah baik dari rumah tangga maupun industri. Pencemaran ini menimbulkan dampak yang sangat besar baik pemerintah maupun masyarakat (nelayan). Untuk Pemerintah, pendapatan daerah berkurang karena objek wisata menjadi rusak dan tercemar sehingga wisatawan tidak mau berkunjung ke daerah ini. Dan untuk para nelayan akan berkurang pendapatannya karena rusaknya ekosistem laut yang berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan laut. Hal ini terjadi karena kebiasaan masyarakat yang tinggal ditepi pantai langsung membuang sampah dan limbah lain kelaut ditambah dengan sampah dan limbah yang berasal dari aliran sungai menuju ke laut. Untuk itu dibutuhkan suatu upaya pengembangan wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam pemeliharaan pantai dan laut.

Berbagai upaya dalam penanganan sampah untuk pengendalian lingkungan telah dilakukan Pemerintah. Di Rokan Hilir, pemeliharaan lingkungan terkait sampah limbah rumah tangga dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir.

Sampah di wilayah Rokan Hilir tiap hari diangkut oleh petugas kebersihan menggunakan mobil operasional Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rokan Hilir yang mencapai 4 ton/harinya. Sampah tersebut belum dipilah-pilah. Perlu adanya kesadaran semua pihak, karena sampah menjadi masalah nasional, jika tidak serius menanganinya bisa menimbulkan bencana. Dalam upaya penanganan masalah sampah di rokan hilir telah di atur oleh Perda No.06 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan Perbup Nomor 92 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Rokan Hilir dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis.

DLH Rohil menyediakan tong-tong sampah ke lokasi yang strategis di daerah Bagan Siapiapi maupun daerah Bagan Batu. Namun belum merata sampai keseluruh pelosok, diantaranya area pemukiman sekitar pelabuhan Panipahan. Banyak terjadi pembuangan sampah plastik rumah tangga ke laut atau pantai. Hal ini tentunya akan mengotori laut dan pantai tersebut. Makin banyak sampah plastik di lautan maka makin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut atau pantai. Begitu juga di Pelabuhan Panipahan, jumlah sampah selalu bertambah setiap harinya.

Panipahan merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Panipahan dijuluki sebagai "kota terapung" karena berada di atas laut . Kota Panipahan dihuni sekitar 20.000 jiwa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin pesat dan diiringi dengan semakin bertambahnya pemukiman di Panipahan akan berpengaruh terhadap jumlah buangan limbah Rumah Tangga yang ditimbulkan oleh aktifitas Rumah Tangga.

Tentunya berdasarkan hal tersebut semakin hari semakin banyak ditemukan Limbah Rumah tangga di pelabuhan Panipahan, padahal pelabuhan adalah tempat aktifitas untuk menunjang Roda perekonomian Masyarakat. Selain itu seharusnya

lingkungan pelabuhan baik darat maupun laut hendaknya dijaga kebersihannya maupun keindahannya, ini berhubungan dengan estetika selain tidak akan menimbulkan pencemaran juga akan membuat kenyamanan bagi semua pihak, bahkan apabila lingkungan pelabuhan dikelola dengan baik akan mampu menjadi daerah wisata yang akan mendatangkan *income* bagi daerah.

Observasi peneliti di lapangan, terlihat bahwa beban sampah pada lingkungan pelabuhan Panipahan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Masih banyak persepsi masyarakat di Panipahan bahwa limbah bersifat padat maupun cair di buang ke sungai atau ke parit-parit lalu mengalir bersama air parit dan sungai ke daerah pesisir pantai adalah suatu tindakan yang tidak berbahaya. Pemikiran yang keliru apabila limbah Rumah Tangga dibuang ke laut tidak berbahaya karena apabila berada di laut justru berdampak pada laut yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu sudah menjadi hal yang sangat mendesak untuk melakukan upaya antisipasi terhadap pencemaran tersebut baik berupa pencegahan dan pengendalian terhadap dampak dan perbaikan lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas dan fakta di lapangan, terlihat bahwa Kinerja DLH Rokan Hilir terkait penanganan sampah Rumah tangga disekitar pelabuhan Panipahan belum maksimal dan menimbulkan pencemaran di laut, maka terkait hal tersebut peneliti tertarik ingin meneliti tentang "Evaluasi Dampak Limbah Rumah Tangga Bagi Pencemaran Laut (Studi Kasus Pencemaran Di Pelabuhan Panipahan Rokan Hilir)".

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, menurut (Creswell, 2016), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang di anggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melihatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data.

Penelitian yang bermaksud untuk melakukan pengukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena sosial dengan cara memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan atau fakta di lapangan mengenai Dampak Limbah Rumah Tangga Bagi Pencemaran Laut (Studi Kasus Pencemaran Di Pelabuhan Panipahan Rokan Hilir).

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pelabuhan Panipahan Kabupaten Rokan Hilir. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini karena Desa Panipahan terdapat Pelabuhan dimana secara ekonomi, Pelabuhan Panipahan berfungsi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat di panipahan khususnya dan Rokan Hilir umumnya, dan menjadi fasilitas yang memudahkan distribusi hasil-hasil produksi serta, sebagai interface (titik temu) dua model transportasi, yaitu transportasi laut dan transformasi darat, namun masyarakat justru memberikan dampak Limbah terhadap lingkungan pelabuhan tersebut, hal ini ironi, seharusnya masyarakat berkewajiban ikut serta menjaga pencemaran lingkungan

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data, karena dari sumber data inilah kita bisa mendapatkan data seperti yang diharapkan, yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Jadi, sumber data adalah fakta-fakta atau keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian. Sumber data dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti secara langsung. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan utama dan informan tambahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat menunjang atau memperjelas data primer, diperoleh dari berbagai literatur yang dapat mempermudah peneliti dalam memahami data-data primer yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain-lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, internet, foto dan sebagainya.

Informan adalah orang pilihan yang dapat menerapkan dan memberikan informasi sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui tentang permasalahan penelitian yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rokal Hilir, Petugas Otoritas Pelabuhan di Panipahan dan aktivis lingkungan di Rohil serta tokoh masyarakat yang berada di sekitar Pelabuhan Panipahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak limbah rumah tangga terhadap aktivitas pelabuhan di Panipahan.

Aktivitas masyarakat Panipahan pada umumnya melakukan kegiatan sehari-hari berada di atas laut sehingga kebiasaan membuang sampah limbah rumah tangga tidak pernah menjadi perhatian karena kurangnya pemahaman kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke laut atau ke bibir sungai, sehingga pada saat air laut surut terlihat kota Panipahan bagaikan perkampungan kumuh yang dipenuhi dengan sampah limbah rumah tangga yang dapat dilihat dari bibir sungai dan pantai di Panipahan termasuk salah satunya Pelabuhan Panipahan.

Sebagaimana kita ketahui pelabuhan merupakan salah satu prasarana transportasi yang mendukung kelancaran sistem transportasi laut yang fungsinya berkaitan dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi namun dengan adanya dampak limbah rumah tangga kelancaran transportasi laut khususnya kapal mengalami masalah keterlambatan disebabkan sampah limbah rumah tangga yang ada di sekitar pelabuhan mengganggu aktivitas olah gerak kapal.

Dari gambaran di atas dapat kita lihat bahwa dampak limbah rumah tangga telah mempengaruhi aktivitas kapal yang melakukan olah gerak di sekitar pelabuhan termasuk kapal yang melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan Panipahan, dari pihak pemerintah sendiri dari Kementerian Perhubungan kantor UPP kelas III Panipahan melakukan edukasi ke masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan buang sampah ke laut dengan acara gerakan bersih laut, dengan motto 'laut bersih bikin baper', hal itu guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa dengan bersihnya laut masyarakat dapat menjaga kelestarian lingkungan dan biota laut yang ada di dalamnya dan secara tidak langsung akan memberikan hasil laut yang melimpah dan higienis terbebas dari bahan yang berbahaya.

2. Sarana dan prasarana

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka secara tidak langsung menyebabkan tingginya aktivitas masyarakat, sehingga sampah yang dihasilkan ikut bertambah, daerah Panipahan sebagai objek penelitian tidak menemukan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak peduli akan bahaya dari membuang sampah sembarangan ke alur sungai atau langsung ke laut, dengan demikian peran pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan harus menyediakan sarana dan prasarana yang sifatnya memberikan edukasi ke masyarakat mengenai pentingnya kebersihan lingkungan terutama lingkungan laut.

Peranan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih harus dibarengi dengan penyuluhan dan menyediakan sarana tempat pembuangan sampah

disekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat misalnya membuat tong sampah disetiap rumah tangga dan akan dijemput secara berkelanjutan dan terjadwal oleh petugas kebersihan kemudian dibawa ke TPA Tempat Pembuangan Akhir sesuai aturan yang telah dibuat, dengan demikian akan tercipta suasana menuju lingkungan bersih dari sampah.

3. Sumber daya manusia

Kurangnya sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat dalam membudayakan kebersihan lingkungan disekitar tempat tinggal mereka, hal ini dapat kita lihat didaerah Panipahan kec. Pasir Limau Kapas yang tidak tersentuh dengan penyuluhan masalah kebersihan lingkungan, karena dari dinas sendiri tidak menempatkan petugas kebersihan di daerah Panipahan, Kab. Rokan Hilir untuk menangani masalah persampahan di Panipahan.

Dengan menempatkan petugas kebersihan di Panipahan secara tidak langsung akan dengan sendirinya merubah kebiasaan masyarakat dari turun temurun membuang sampah langsung ke sungai atau ke laut, walaupun hal itu tidak bisa secara instan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan kebersihan lingkungan di Panipahan namun setidaknya dapat merubah pola pikir masyarakat untuk tidak membiasakan membuang sampah ke laut.

Penyuluhan dan pengawasan terhadap aktifitas pembuangan sampah limbah rumah tangga perlu terus digalakkan disetiap kepenghuluan Panipahan, guna memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terutama lingkungan disekitar pesisir Panipahan yang kehidupan dan matapencarian masyarakatnya dari hasil laut. Hal ini merupakan tugas dari pemerintah setempat apabila ingin menciptakan suatu perubahan untuk menjadi lebih baik.

KESIMPULAN

Evaluasi dampak limbah rumah tangga bagi pencemaran laut telah menimbulkan pencemaran disekitar lingkungan Pelabuhan Panipahan. Disebabkan peran dari dinas lingkungan hidup tidak merata dalam penerapan Perda No.06 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan Perbup Nomor 92 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Rokan Hilir dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis. Pelaksanaan Perda No.6 tahun 2017 hanya diterapkan di kota Bagansiapiapi sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir, tidak merata sampai ke daerah-daerah kecil di Rokan Hilir, termasuk daerah Panipahan sebagai bagian dari Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terbentur dengan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai dinas yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan di Kabupaten Rokan Hilir. Dengan menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat Panipahan secara administrasi akan mendapatkan income bagi pemerintah melalui retribusi kebersihan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan Y., dan Yudi Rusfiana. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta. 2016
- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abdurrahman, U. (2006). *Kinerja Sistem Lumpur Aktif pada Pengolahan Limbah Cair*. Surabaya
- Afifuddin dan Beni Ahmad. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta. 2017.

- Samodra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis, Cet.Ke-1*, Jakarta:Intermedia
- Santosa, Rizky W., 2013. *Dampak pencemaran lingkungan laut oleh perusahaan pertambangan terhadap nelayan tradisional*. Lex Administratum Vol.I/No.2/April-Jun/2013

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA KELURAHAN DI KECAMATAN MEDANG KAMPAI

Andre Aghasthian R. Purba
Universitas Riau, Pekanbaru
Email: andreaghashthian@gmail.com

Abstrak

Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Kelurahan telah dijalankan di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. Sebelumnya anggaran yang digunakan oleh pemerintah kelurahan dalam melaksanakan fungsi pelayanan sangat bergantung dengan anggaran Kecamatan. Dana Kelurahan digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kelurahan se-Kecamatan Medang Kampai telah menerima anggaran tersebut sejak 2019 melalui DAU Tambahan, dan di tahun 2020 melalui APBD Kota Dumai dan DAU Tambahan. Program dana Kelurahan ini merupakan sebuah harapan baru bagi Kelurahan untuk dapat meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh masyarakat Kelurahan. Aparatur Kelurahan sejauh ini mengalami kendala dalam pelaksanaan dikarenakan selama ini keterlibatan kelurahan dalam pengelolaan anggaran sangat minim sehingga pengalaman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program/kegiatan dalam kebijakan tersebut di Implementasikan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif Teknik pengumpulan data yang dipergunakan, wawancara, dokumentasi dan, Observasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Lingkup yang diteliti dalam implementasi kebijakan ini adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Organisasi pelaksana Kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dialami oleh aparatur kelurahan di Kecamatan Medang Kampai disebabkan kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis kepada aparatur kelurahan.

Kata kunci : implementasi, kebijakan, dana kelurahan, pembangunan, pemberdayaan

PENDAHULUAN

Belum lama ini Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Kelurahan telah di laksanakan di Indonesia. Sesuai dengan instruksi Pemerintah yang tertuang di dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi daerah yang tidak memiliki desa.

Sebelumnya anggaran yang digunakan oleh pemerintah kelurahan dalam melaksanakan fungsi pelayanan sangat bergantung dengan anggaran Kecamatan. Sementara itu, jumlah anggaran yang ada di Kecamatan pun termasuk yang terkecil diantara semua Perangkat Daerah. Padahal permasalahan perkotaan cukup kompleks seperti persoalan sampah, banjir, minimnya ketersediaan air bersih dan air minum, sanitasi yang tidak layak, serta buruknya penataan bangunan permukiman. Sehingga Kelurahan, selaku pimpinan kelurahan, memiliki wewenang yang sangat terbatas pada anggaran.

Besaran lima persen (5%) tersebut terbilang cukup besar untuk dikelola Kelurahan dalam waktu satu tahun. Tahun 2020, angka ini dapat mencapai lebih dari 1 Milyar rupiah untuk setiap kelurahan di Kota Dumai. Kebijakan tersebut adalah sebuah harapan baru bagi Kelurahan untuk dapat meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan kegiatan yang dikelola seutuhnya bersama dengan masyarakat Kelurahan.

Adapun anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Kelurahan se-Kecamatan Medang Kampai telah menerima anggaran tersebut sejak 2019 melalui DAU

Tambahan, dan di tahun 2020 melalui DAK dan DAU Tambahan. Kecamatan Medang Kampai bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Medang Kampai.

Dana Kelurahan diharapkan akan mendorong terlaksananya upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kapasitas dan kapabilitas masyarakat Kelurahan. Akan tetapi ditemukan ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan yang terjadi ketika seharusnya lembaga kemasyarakatan muncul sebagai pihak yang menjadi pendorong dan penggerak kegiatan masyarakat, utamanya yang mengarah pada pemberdayaan atau peningkatan kualitas hidup masyarakat, justru dalam perencanaan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat mendapatkan anggaran yang lebih kecil. Dalam hal ini Lembaga pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kelurahan (LPMK) lebih banyak memberikan usulan untuk kegiatan pembangunan fisik. Sementara Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat cenderung lebih sedikit.

Aparatur Kelurahan sejauh ini mengalami kendala dalam implementasi kegiatan dana kelurahan ini. Mulai dari tahapan perencanaan sampai pada tahapan pencairan Anggaran. Pada tahapan perencanaan, beberapa kegiatan yang sifatnya penting tidak dapat dilaksanakan karena Kegiatan tersebut tidak masuk kedalam Dokumen Perencanaan Daerah. Masalah ini merupakan hal kecil yang dampaknya cukup besar. Besarnya jumlah anggaran menimbulkan rasa takut bagi aparatur kelurahan dalam pengelolaannya. Kelurahan yang selama ini hanya melakukan kegiatan pelayanan, saat ini menjadi tugas tambahan bagi Kelurahan untuk mengelola anggaran sendiri. Tentunya aparatur kelurahan mengalami peningkatan beban kerja. Minimnya pengalaman teknis dalam pengelolaan keuangan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan Kegiatan Dana Kelurahan ini.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2006: 4), mendefinisikan Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan pada prinsipnya merupakan proses untuk merealisasikan kegiatan/program yang telah dibatasi dalam Peraturannya. Proses realisasi ini mencakup perencanaan Kegiatan, Penganggaran Kegiatan, serta Pertanggungjawaban Kegiatan. Tulisan ini menganalisis ketiga proses tersebut melalui variable yang dikemukakan oleh Edward III sehingga dapat diidentifikasi kekurangan dari setiap variable yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam proses Implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DANA KELURAHAN

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dialokasikan anggaran untuk Kelurahan di daerah kota yang tidak ada desanya paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Selanjutnya Peraturan Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 mengatur tentang pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi kelurahan. Kegiatan Dana Kelurahan digunakan untuk dua jenis Kegiatan yaitu :

1. Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan : digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kegiatan ini meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, Kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan di Kelurahan

2. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan: digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri, kegiatan ini meliputi Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan dan kebudayaan, Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM, lembaga kemasyarakatan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya;

Penentuan Kegiatan Dana Kelurahan dilakukan melalui musyawarah kelurahan untuk menampung usulan/aspirasi masyarakat kelurahan. Dengan tahapan perencanaan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pembangunan Kelurahan dan disepakati bersama dalam bentuk Berita Acara Musyawarah. Kegiatan tersebut disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA KELURAHAN

Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis Implementasi Alokasi Dana Kelurahan dalam hubungannya dengan variable yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III. Adapun Variable-variable nya adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya.. Komunikasi (pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Tiga indikator yang komunikasi dalam konteks kebijakan public yaitu:

a. Transmisi

Kebijakan yang diimplementasikan harus disampaikan kepada pejabat yang akan melaksanakan kebijakan ini. Dalam hal ini, Kebijakan dana Kelurahan disampaikan kepada pihak Kecamatan dan kelurahan. Penyaluran kebijakan dapat dilaksanakan dengan beberapa bentuk seperti sosialisasi dan bimbingan teknis.

Penyaluran Kebijakan Dana Kelurahan kepada Pihak Kecamatan dan Kelurahan pada lokasi penelitian dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Kota Dumai. Informasi disampaikan dalam bentuk rapat dengan mengundang para Lurah dan Camat se-Kota Dumai. Selain daripada rapat, penyaluran informasi juga dilaksanakan melalui media komunikasi online dengan membentuk Group *Whatsapp* Dana Kelurahan yang berisikan para Camat dan Lurah Se Kota Dumai. Didalam group juga menyertakan aparatur dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota dumai serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

b. Kejelasan

Pada pelaksanaan Rapat disampaikan hal-hal yang menjadi dasar pelaksanaan Kebijakan Dana Kelurahan ini. Maksud & Tujuan Kebijakan serta Sasaran kebijakan disampaikan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum. Informasi disampaikan dengan jelas sesuai dengan isi dari Permendagri 180 tahun 2018 tersebut.

Camat Medang Kampai, Bapak Muhammad Zakir, S.IP., M.IP. "Pada rapat di Kantor Walikota Dumai pada awal Dana Kelurahan ini diperintahkan untuk dipersiapkan, Pemerintah pusat menyalurkan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU Tambahan) kepada pemerintah Kota Dumai. Pemerintah Kota Dumai, maka kepada Lurah diminta untuk melaksanakan Musyawarah Bersama dengan LPMK dan Masyarakat untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian Kecamatan untuk mengkoordinir

semua kelurahannya” rapat dihadiri oleh Walikota, Kabag APU, BAPPEDA, BPKAD, Camat, dan Lurah se-Kota Dumai.

Rapat yang dilaksanakan tersebut menyampaikan informasi bahwa Dana Kelurahan akan segera dilaksanakan. Kejelasan informasi mengenai maksud dan tujuan serta sasaran kegiatan telah terpenuhi dan dipahami oleh pihak Kelurahan. Akan tetapi masih banyak informasi lain yang kurang disampaikan.

Lurah Teluk Makmur “Berita Acara Musrenbang Kegiatan Dana Kelurahan sudah lengkap dan sesuai dengan arahan dari Peraturan Dana Kelurahan, tapi pelaksanaannya kami kelurahan masih memiliki banyak kendala”. Sejalan dengan Lurah Teluk Makmur, Kelurahan lain juga berpendapat demikian.

Kendala yang dihadapi oleh pihak kelurahan salah satunya adalah penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Sebelumnya Kelurahan sangat jarang terlibat dalam penyusunan RKA, karena Anggaran di Kelurahan bergantung kepada Kecamatan dan disusun oleh Kecamatan.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Edward III yaitu salah satu alasan yang menyebabkan sebuah kebijakan tidak dirumuskan secara jelas yaitu kebijakan baru yang para perumus belum terlalu menguasai masalah. Kelurahan disini bertindak sebagai pelaksana Kebijakan juga sekaligus sebagai perumus kebijakan. Perumusan kebijakan oleh kelurahan berupa tindak lanjut dari Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan. Kelurahan membuat kebijakan berupa Program dan Kegiatan, namun Kemampuan Teknis SDM kelurahan sangat terbatas dalam merencanakan kegiatan pembangunan.

Komunikasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Dumai dalam rangka Implementasi Dana Kelurahan masih belum maksimal. Sebaiknya sebelum kebijakan ini sepenuhnya dirumuskan kembali oleh kelurahan, perlu adanya komunikasi dalam bentuk Bimbingan Teknis bagi Aparatur Kelurahan dan Kecamatan. Sehingga hal-hal bersifat administratif dan Teknis yang kurang dipahami oleh pelaksana dapat disampaikan dengan jelas dan dimengerti.

c. Konsistensi

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik, namun dengan perintah yang tidak konsisten akan membingungkan pelaksana. Aparat Kelurahan dalam Implementasi Dana Kelurahan melaksanakan perintah melalui Peraturan yang telah ditetapkan. Inkonsistensi yang terjadi dalam implementasi Dana Kelurahan menimbulkan beberapa kendala bagi Kelurahan.

Berdasarkan wawancara Bersama Ketua LPMK Kelurahan Pelintung bahwa “Harapan kami untuk Dana Kelurahan dalam Pembangunan di Kelurahan kami sedikit mengecewakan, karena tidak jelas Jumlah anggaran ini kami terima. Tahun 2019 yang awalnya 350 juta untuk kelurahan kami, ternyata tidak bisa kami gunakan semuanya, Tahun 2020 juga sama. dari 1 Milyar lebih yang kami sudah rencanakan, kami susun bersama kelurahan bahkan sampai lembur kami menyusun RKA, nyatanya ditarik kembali dengan alasan refocusing anggaran”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, inkonsistensi ini terjadi pada informasi yang diterima oleh masyarakat sebagai kelompok penerima manfaat kebijakan. Pada awal tahap perencanaan Kegiatan Dana Kelurahan Tahun 2020, masyarakat tahu bahwa anggaran Dana Kelurahan yang akan diterima sebesar 1 Milyar per kelurahan. Musyawarah untuk merencanakan kegiatan telah dilaksanakan, dan masyarakat telah menaruh harapan yang besar pada Dana Kelurahan ini untuk peningkatan sarana prasarana Kelurahan khususnya. Akan tetapi terjadinya refocusing Anggaran menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap Dana Kelurahan ini.

2. Sumber Daya

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia (kualitas dan kuantitas), sumber daya Informasi, sumberdaya fasilitas, dan sumberdaya kewenangan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor paling penting yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Jumlah dan Kemampuan sumber daya manusia harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam Implementasi dana kelurahan, terdapat beberapa stakeholder yang masing-masing memiliki peran yang berbeda satu sama lain dan harus dapat saling bekerjasama dengan baik sehingga tujuan dapat tercapai. Aparatur Kelurahan adalah salah satu SDM yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan Dana Kelurahan ini.

Dari segi kuantitas, Aparatur kelurahan pada umumnya cukup pada setiap kelurahan. Dari segi kualitas, Aparatur Kelurahan memiliki kapabilitas dalam melaksanakan kegiatan. Sekitar 90% aparatur kelurahan dengan kualifikasi Pendidikan Sarjana. Hanya saja anggaran kelurahan selama ini bergantung pada kecamatan membuat Kelurahan mengalami kendala dalam hal administrasi keuangan.

b. Informasi

Informasi berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan. Cara melaksanakan kebijakan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan adalah sumber daya yang penting bagi Kelurahan. Pemerintah Kota memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan dalam bentuk Peraturan Walikota. Peraturan ini menjadi petunjuk bagi kelurahan sekaligus menjadi kekuatan hukum dalam implementasi kegiatan.

c. Fasilitas

Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan. Tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam bergantung pada kebutuhan kebijakan. Pelaksanaan dana kelurahan sesuai dengan Permendagri 130 tahun 2018 menjelaskan Anggaran diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Berdasarkan informasi yang diterima penulis, dari BAPPEDA dan BPKAD kota Dumai bahwa Anggaran Dana Kelurahan tidak dapat digunakan untuk pengadaan sarana Kantor. Didalam Permendagri tersebut juga tidak memuat petunjuk yang menjelaskan penggunaan anggaran untuk sarana kantor lurah. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi kelurahan dalam Implementasi kebijakan. Anggaran yang cukup besar tersebut tidak dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat penting bagi kelurahan.

d. Kewenangan

Dalam Implementasi dana kelurahan, diperlukan pembagian kewenangan terhadap kelurahan dari pemerintah kota Dumai. Hal ini perlu karena hampir seluruh kegiatan yang diatur dalam Permendagri tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari Dinas dan Badan pada pemerintah kota Dumai. Dana Kelurahan ditujukan agar jangkauan pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah daerah lebih luas. Oleh sebab itu, pemerintah kota Dumai telah mengeluarkan Peraturan tentang pelimpahan kewenangan kepada camat sehingga kegiatan yang tadinya merupakan tanggungjawab Dinas teknis dapat dilaksanakan oleh kelurahan.

3. Disposisi/Sikap

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-

pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Unsur kognitif diperlukan untuk mengetahui yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pemahaman ini akan menghasilkan respon terhadap kebijakan. Ketika Pelaksana maupun Kelompok sasaran memahami tujuan dari kebijakan ini, maka akan menghasilkan respon positif maupun negatif terhadap kebijakan, untuk itu perlu memberikan pemahaman bagi pelaksana dan kelompok sasaran mengenai tujuan dari suatu kebijakan.

Kebijakan Dana kelurahan mendapat respon positif dan mendapat dukungan dari aparatur kelurahan dan Masyarakat kelurahan. Hal ini karena tujuan dari kebijakan telah dipahami oleh Pelaksana dan Kelompok sasaran. Respon ini merupakan unsur afektif yaitu Persepsi Aparatur Kelurahan dan Kelompok Sasaran terhadap Kebijakan. Baik pelaksana maupun kelompok sasaran kebijakan dana kelurahan menunjukkan respon yang baik terhadap pelaksanaan kebijakan ini.

Namun kebijakan ini juga memberikan efek yaitu bertambahnya kuantitas kerja pada aparat kelurahan. Tambahnya pekerjaan tersebut tidak didukung dengan feedback yang diterima oleh pelaksana dana kelurahan. Jumlah anggaran yang cukup besar mengakibatkan kemungkinan berhadapan dengan aparat penegak hukum menjadi salah satu efek yang mempengaruhi persepsi pelaksana kebijakan dana kelurahan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. perlu adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika perlu adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana,

Permendagri 130 tahun 2018 sudah memuat prosedur pelaksanaan dana kelurahan. Didukung juga dengan peraturan walikota Dumai no 18 tahun 2021 yang memuat tentang petunjuk pelaksanaan dana kelurahan. Kendala yang ditemukan dilapangan adalah kurangnya sosialisasi mengenai petunjuk teknis terhadap aparat kelurahan menyebabkan lambatnya pelaksanaan kebijakan dana kelurahan setiap tahun. Tahun 2019, pelaksanaan dana kelurahan di kecamatan medang kampai baru dimulai pada bulan juni dan penggunaan dana kelurahan hanya dilaksanakan sebanyak 50%. Hal ini karena anggaran dana kelurahan pada tahun 2019 berasal dari Pusat berupa Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU Tambahan), dan sesuai peraturan Menteri keuangan, penyaluran DAU Tambahan tahap 2 paling lambat bulan agustus dengan syarat menyampaikan laporan realisasi 50% dari DAU tambahan yang diterima. Namun keterlambatan pelaksanaan kegiatan menyebabkan kelurahan tidak dapat menyampaikan laporan realisasi penggunaan 50%. Hal ini menyebabkan DAU tambahan tahap 2 tidak disalurkan oleh pemerintah pusat. Permasalahan ini dialami oleh semua kelurahan se-Kota Dumai.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan dan Kelurahan di Kecamatan Medang Kampai telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Terdapat beberapa variabel yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan dana kelurahan yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan kebijakan. Variabel tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi.

1. Variabel Komunikasi

Kurangnya sosialisasi menyebabkan kendala yang cukup berpengaruh dalam implementasi kebijakan Dana Kelurahan. Sebelumnya Kelurahan sangat jarang terlibat

dalam penyusunan RKA, karena Anggaran di Kelurahan bergantung kepada Kecamatan dan di susun oleh Kecamatan. Pada kondisi ini, perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban menjadi terkendala.

2. Sumber Daya

Sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia (kualitas dan kuantitas), sumber daya Informasi, sumberdaya fasilitas, dan sumberdaya kewenangan. Pada Variable Sumber daya, Implementasi dana kelurahan di kecamatan Medang kampai terjadi di Kelurahan Mundam. Hal ini karena Jumlah Pegawai kelurahan yang kurang karena adanya salah satu jabatan yang kosong. Kekurangan fasilitas juga dialami semua kelurahan. Meskipun Anggaran cukup besar namun dana kelurahan tidak dapat dialokasikan untuk pemenuhan sarana dan prasarana kantor Lurah.

3. Disposisi/Sikap

Pada umumnya semua stakeholder yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan dana kelurahan, baik Aparat Kelurahan, LPMK, dan Masyarakat memberikan respon positif terhadap kebijakan ini. Namun kebijakan dana kelurahan ini menambah beban kerja aparatur kelurahan. Hal ini memberikan dampak yang cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan dana kelurahan.

4. Struktur birokrasi

Variable ini merupakan sebuah mekanisme yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, Permendagri 130 tahun 2018 sudah memuat prosedur pelaksanaan dana kelurahan. Didukung juga dengan peraturan Walikota Dumai no 18 tahun 2021 yang memuat tentang petunjuk pelaksanaan dana kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1990, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Mulyana, Deddy, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant Dwijodijoto, 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaukani, dkk, 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, Joko, 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi, 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) BERBASIS EKONOMI KREATIF

Anita

Universitas Riau, Pekanbaru
Email: anita7456@grad.unri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengembangan usaha produksi daur ulang sampah di Bank Sampah Dalang Collection di jalan gajah No 33 kelurahan Rejosari Tenayan Raya kota pekanbaru. Indikator penilaian pengembangan usaha yang digunakan meliputi dua aspek yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Tipe penelitian yang berlokasi di jalan jalan gajah No 33 kelurahan Rejosari Tenayan Raya kota pekanbaru ini adalah survey deskriptif, yaitu melakukan wawancara sebagai alai pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan ini kemudia di jadikan bahan baku utama untuk menganalisis objektif pada lokasi yang diteliti, terdapat satu orang sampel pada penelitian ini yaitu key informan berjumlah satu orang pemilik usaha Bank Sampah Dalang Collection. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik observasi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa pengembangan usaha Bank Sampah Dalang Collection di jalan gajah No 33 kelurahan Rejosari Tenayan Raya kota pekanbaru berada pada cakupan penilaian yang tidak lagi berjalan ditempat atau telah berkembang. Masukkan yang perlu dipertimbangkan dan dilihat lagi terkhusus bertepatan dengan hal-hal yang menjadi masalah dan hambatan dalam pengembangan usahadaur ulang sampah dapat tersampaikan, sehingga dapat tercapainya pengembangan usaha Bank Sampah Dalang Collection di kemudian hari.

Kata kunci: pengembangan usaha dan produksi

PENDAHULUAN

Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasibahkan sampai terhenti aktifitasnya pada tahun 1998. Namun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi.

UMKM bertujuan menumbuh kembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Hal ini mengandung makna, bahwa UMKM merupakan alat perjuangan nasional untuk menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki atas dasar keadilan bagi semua pemangku kepentingan.

Telah teruji dalam beberapa kali krisis ekonomi di Indonesia, sector UMKM maupun menjadi katup pengaman dari eksekutif akibat krisis. Walaupun harus diakui pula, setelah krisis ekonomi berlalu, UMKM tetap tidak mengalami perubahan kebijakan yang berarti. Kontribusi UMKM diakui juga di berbagai Negara, namun nasibnya berbeda di satu Negara dengan Negara lainnya. Perannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sangat besar. Pada banyak kasus diberbagai Negara, sector ini mampu menggerakkan sector riil pada berbagai lapangan usaha sehingga mampu memberikan kontribusi pada pembentukan PDB.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mampu memberikan pelayanan pelayanan ekonomi secara meluas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Sebagai salah satu pilar ekonomi nasional, UMKM harus memperoleh kesempatan utama, dukungan

perlindungan dan pengembangan seluas luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tersebut, yang diwujudkan melalui pemberdayaan UMKM.

Pada sektor industri di pekanbaru banyak memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tersebar hampir di setiap kecamatan. Usaha kecil menengah yang merupakan bentuk kemandirian masyarakat tersebut bergerak di bidang pertanian, perkebunan, kerajinan, peternakan, pertambangan dan sebagainya. Namun demikian, ada sejumlah persoalan.

Namun ada sejumlah persoalan umum yang dihadapi UMKM antara lain keterbatasan modal kerja atau investasi, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dalam dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, keterbatasan komunikasi dan biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya.

Pada sektor industri pengolahan, keunggulan potensi sektor ini banyak di topang oleh besarnya keberadaan industri rumah tangga (IRT) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah tahun 2017 di kota pekanbaru adalah :

Tabel I.1 Data Jumlah Masyarakat Pelaku UMKM di Kota Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan Dan Jenis Usahanya

No	Nama Kecamatan	Pengurusan Izin Tahun 2015	Pengurusan Izin Tahun 2016	Pengurusan Izin Tahun 2017	Klasifikasi	
					Kecil	Mikro
1.	Pekanbaru Kota	48	29	33	18	92
2.	Sukajadi	50	35	46	7	124
3.	Sail	90	9	75	7	167
4.	Lima Puluh	26	24	21	14	57
5.	Senapelan	314	52	300	39	627
6.	Rumbai	47	220	43	66	244
7.	Bukit Raya	76	60	27	22	252
8.	Tampan	179	267	145	135	456
9.	Rumbai Pesisir	134	145	77	16	340
10.	Payung Sekaki	58	138	62	14	244
11.	Marpoyan Damai	52	45	48	19	126
12.	Tenaya Raya	273	584	280	116	1021
Jumlah		1347	1608	1157	462	3650
TOTAL					4112	

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Pekanbaru 2017.

Pemerintah dinas Koperasi dan UMKM menyebutkan UMKM yang bergerak di bidang ekonomi kreatif atau biasa disebut industri kreatif di Kota Pekanbaru cukup banyak, Departemen Perdagangan (2008) menyebutkan industry kreatif adalah bagian tak terpisahkan dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dapat dikatakan sebagai sistem transaksi penawaran dan permintaan yang bersumber pada kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh sektor industri yang disebut industri kreatif, di Indonesia industry kreatif biasanya disebut juga dengan industry yang berbasis seni/budaya atau kreativitas. Industry kreatif tercipta dari pemanfaatan (karya) seni dan budaya serta keterampilan/ kecakapan yang dimiliki oleh setiap individu untuk bisa membuat atau menciptakan lapangan pekerjaan baru. Disamping itu industry kreatif diharapkan juga bisa menciptakan kesejahteraan ekonomi di daerah. Intinya adalah bahwa industry kreatif

merupakan hasil dari kreatifitas dan daya cipta setiap individu untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan pendapatan atau penghasilan. Pemerintah Indonesia telah mengelompokkan industri kreatif menjadi 16 subsektor melalui Badan Ekonomi Kreatif yang berfokus untuk dikelola dan dikembangkan. Ke 16 subsektor tersebut yaitu :

1. Periklanan

Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan dengan jasa periklanan yang berisi penyampaian pesan kepada masyarakat dalam mempromosikan produk. Sampai saat ini periklanan masih menjadi media paling efektif dalam mempublikasikan produk dan jasa.

2. Arsitektur

Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan dengan budaya dan pembangunan, yang mana dari segi budaya arsitektur diartikan sebagai karakter dari Negara Indonesia yang beraneka ragam. Sedangkan dari segi pembangunan arsitektur diartikan sebagai perencanaan dari sebuah pembangunan suatu kota.

3. Pasar Barang Seni

Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan dengan perdagangan berupa barang-barang yang mempunyai nilai estetika tinggi. Dengan cara melalui perlelangan, galeri, media sosial, dan swalayan. Seperti alat musik, ukiran dan lain-lain.

4. Kerajinan

Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan dengan keterampilan tangan yang dibuat oleh pengrajin dari mulai merancang, mengkreasikan hingga penyelesaian suatu produk yang dihasilkan memiliki nilai jual yang tinggi. Seperti : sulam, patung dan lain-lain.

5. Desain

Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan dengan grafis, interior. Dimana desain sebagai bentuk komunikasi penyampaian pesan melalui gambar, seperti : interior hunian dan hotel.

6. Fashion

Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan dengan gaya hidup yang menggambarkan suatu identitas diri, seperti pakaian, aksesoris. Dimana fashion menjadi salah satu kreatifitas desainer dalam mengkreasikan karya didalam masyarakat, seperti : desain pakaian, desain tas dan lain-lain.

7. Animasi, Film dan Video

Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan dengan kreasi produksi fotografis, film, video serta mengeksplorasikannya sehingga menjadi lebih hidup dan bernyawa agar informasi dapat tersampaikan.

8. Fotografi

Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan dengan industri untuk memproduksi suatu citra dari objek foto dengan menggunakan fotografi yang didalamnya terdapat media perekam cahaya, media penyimpanan berkas dan media untuk menampilkan informasi untuk menciptakan suatu kesempatan kerja.

9. Permainan Interaktif

Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan dengan teknologi dengan cara mengkreasikan, memproduksi serta mendistribusikan permainan computer dan video dengan tujuan sebagai hiburan dan sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi.

10. Music

Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan dengan komposisi, rekaman, distribusi serta pertunjukan suatu karya seni berbasis music.

11. Seni Pertunjukan

Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan dengan pengembangan suatu konten produksi kesenian yang diolah oleh perancang, pekerja teknis dan penampil dalam menyampaikan gagasan kepada audien yang biasanya dalam bentuk lisan, gerakan, music dan tata rupa dalam ruang dan waktu yang sama.

12. Penerbitan dan Percetakan

Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan dengan daya imajinasi dalam membuat konten seperti penerbitan buku, majalah, konten digital dan sebagainya, serta pencetakan uang kertas, perangko, surat saham dan surat-surat berharga.

13. Layanan Komputer dan Perangkat Lunak

Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan dengan pengembangan teknologi informasi seperti jasa layanan pengolahan data, computer, database, perangkat lunak, desain dan analisi system termasuk perawatannya dan lain-lain.

14. Televisi dan Radio

Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan dengan pengemasan informasi serta gagasan kepada penikmatnya melalui gambar serta suara, seperti : penyiaran, tranmisi konten serta aktivitas pemancaran kembali siaran radio dan televisi.

15. Riset dan Pengembangan

Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan dengan usaha inovatif yang bertujuan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan serta nilai tambah dengan penemuan ilmu, teknologi dan penerapan ilmu maupun teknologi dalam perbaikan produk dengan kreasi baru, alat baru, metode baru serta teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar.

16. Kuliner

Merupakan suatu aktivitas sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan dengan pengolahan, penyajian serta persiapan produk makanan dan minuman yang di jadikan unsur kreatifitas,tradisi dan estetika dengan tujuan untuk menarik daya beli serta pengalaman konsumen.

Salah satu UMKM berbasis ekonomi kreatif yang ada di kota pekanbaru adalah Bank Sampah Dalang Collection yang berdiri sejak tahun 2007 berlokasi di jalan gajah No 33 Kelurahan Rejosari Tenayan Raya Kota Pekanbaru, yang berada didalam pemukiman warga setempat. Bank Sampah Dalang Collection bergerak di bidang industri kerajinan yang mana mendaur ulang sampah atau limbah plastik rumah tangga menjadi barang yang mempunyai nilai jual yang menghasilkan uang. Sementara lokasi yang terbilang sedikit masuk kedalam membuat masyarakat kurang mengenal produk-produk yang dihasilkan oleh Bank Sampah Dalang Collection kecuali masyarakat sekitar. Namun dengan kreatifitas serta keaktifan pemiliknya sekarang Bank Sampah Dalang Collection dapat dikenal di kalangan masyarakat melalui media-media inspiratif seperti televisi swasta.

Bank Sampah Dalang Collection termasuk dalam sektor kerajinan. Dikarnakan Bank Sampah Dalang Collection itu sendiri menciptakan produk dengan keterampilan dari tangan pengrajin, yang mana mengolah bahan baku yang terbuang dan tak terpakai menjadi sebuah karya yang memiliki nilai jual di pasaran yang kemudian dapat dinikmati oleh para konsumen.

Bank Sampah Dalang Collection mempunyai anggota atau karyawan sebanyak 40 orang tapi sampai saat ini yang berada di Bank Sampah Collection yaitu sebanyak 10 orang yang mana itu terdiri dari ibu rumah tangga, dan Bank Sampah Dalang Collection untuk mendapatkan bahan baku daur ulang sendiri bank ini telah bekerjasama dengan kurang lebih 34 sekolah di kota Pekanbaru dan masyarakat disekitar pemukiman, Bank Sampah Dalang Collection ini juga membuka pelatihan atau kursus untuk ibu-ibu rumah tangga yang ingin mengasah kemampuan dalam hal kerajinan, barang daur ulang sampah yang dihasilkan bisa dijual dengan harga yang terjangkau atau relatif murah dan bisa disewakan kepada sekolah sekolah yang sedang mengikuti parade tahunan atau karnaval.

Tabel I.6 Data Penjualan Produk Bank Sampah Dalang Collection 2015 -2018

NO	TAHUN	JUMLAH PENJUALAN	OMSET
1	2015	2.484 unit	50.648.000
2	2016	2.802 unit	52.541.000
3	2017	2.671 unit	52.994.000
4	2018	2.789 unit	55.767.000

Sumber : Data Peneliti 2019

Semenjak berdirinya usaha Bank Sampah Dalang Collection yang berada di jalan Gajah No 33 Kelurahan Tenayan Raya Kota Pekanbaru ini bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat dalam memberikan kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran khususnya di Pekanbaru, Bank Sampah Dalang Collection merekrut siapa saja yang bersinegri tanpa melihat unsur suku dan lain lain, yang penting bisa bekerja sama dan mempunyai tanggung jawab, total keseluruhan karyawan di bank sampah dalang collection sebanyak 40 orang tenaga kerja yang mana dominan adalah ibu-ibu setempat yang ingin belajar mengasah kemampuan dan menambah penghasilan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa produk yang dihasilkan oleh bank sampah dalang collection adalah produk pakai (barang), selain itu bisa juga dijadikan cindera mata. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan beberapa fenomena yang terjadi dalam permasalahan tersebut yaitu :

- Bank sampah dalang collection merupakan bank sampah pertama dan yang masih aktif di Pekanbaru berbasis ekonomi kreatif.
- Dalam memenuhi kebutuhan produksi, Bank Sampah Dalang Collection memiliki sumber bahan baku yang banyak, seperti sekolah-sekolah di Kota Pekanbaru.
- Produk Bank Sampah Dalang Collection kurang dikenal masyarakat karena kurangnya promosi dan lokasinya yang kurang strategis.

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu : “ Bagaimanakah pengembangan usaha pada Bank Sampah Dalang Collection ?”.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ;” untuk mengetahui bagaimana pengembangan usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berbasis ekonomi kreatif pada Bank Sampah Dalang Collection kota Pekanbaru.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu tipe yang mengumpulkan, menyusun, mrnginterpretasikan dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap mengenai perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena peneliti ini berusaha untuk mengetahui pengembangan usaha Bank Sampah Dalang Collection melalui wawancara dengan pelaku usaha dan juga mengamati secara langsung bagaimana kondisi serta antusias konsumen terhadap Bank Sampah Dalang Collection. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu

data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak (Sugiyono, 2017:26).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas key informan merupakan kejelasan yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis yang berisi mengenai nama, umur, jenis kelamin serta pendidikan key informan untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan berikut :

Tabel V.1 : Distribusi Jumlah Key Informan Pemilik Usaha Bank Sampah Dalang Collection Kota Pekanbaru

No	Key informan	Umur (tahun)	Tingkat pendidikan	Jenis kelamin		Jumlah
				L	P	
1.	Soffia Seffen, SH	45	S1		1	1
	Jumlah				1	1

Sumber : data olahan peneliti, 2020

Dari hasil wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bawa Bank Sampah Dalang Collection berdiri tahun 2007, adapun awalnya dalam memulai usaha Bank sampah melalui sosialisai menggunakan modal sendiri untuk melakukan produksi. Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa perkembangan zaman menjadi salah satu faktor penentu Bank Sampah Dalang Collection untuk produksi produk dari daur ulang sampah yang mana kegiatan tersebut mendapat perhatian khusus dari berbagai elemen swasta dan pemerintah karna mempunyai nilai positif terhadap lingkungan khususnya kota pekanbaru, untuk produk itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat harga sesuai dengan kualitas barang. Pasngsa pasarnya disini jelas karna semua dapat memiliki produk Bank Sampah Dalang Collection karna kualitas dan harga yang ditawarkan bersahabat dengan kantong masyarakat umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Bank Sampah Dalang Collection Di Kota Pekanbaru, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Bank Sampah Dalang Collection telah mengalami pengembangan hal ini bisa dilihat dari beberapa faktor pendukung yaitu :

1. Awalnya jiwa kewirausahaan itu muncul bukan pada saat mendirikan Bank Sampah Dalang Collection tetapi jiwa kewirausahaan itu muncul pada saat telah berjalannya usaha tersebut selama tiga tahun Bank Sampah Dalang Collection tepatnya pada tahun 2010, untuk produksi sendiri terdiri dari berbagai bentuk atau desain produk yang dihasilkan seperti ; alas meja, tas, dompet, tempat tisu dan lain-lain. Untuk anggaran dana awalnya Bank Sampah Dalang Collection menggunakan modal sendiri yang mana digunakan untuk sosialisai, namun seiring berjalannya waktu ternyata banyak masyarakat merespon baik usaha ini dan itupun tidak luput dari pandangan perusahaan seperti BNI, PLN, Pemerintah Daerah. Maka dari itu merekapun ikut membantu memberikan fasilitas sarana prasarana dalam bentuk ; mobil transpotasi, motor, laptop, printer, mesin jahit, gudang, semua itu guna untuk mengembangkan produk yang di hasilkan Bank Sampah Dalang Collection
2. Perkembangan zaman salah satu faktor pendukung untuk Bank Sampah Dalang Collection mengembangkan produknya, karna tentu produk yang dihasilkan harus sesuai dengan minat konsumen sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut, dari produk yang dihasilkan telah menarik investor untuk ikut perpartisipasi dalam mengembangkan usaha daur ulang tersebut, dibalik itu juga lingkunganpun awalnya tidak semua mendukung usaha ini, karna berbau dengan

sampah tetapi semakin hari masyarakat semakin sadar dan peduli bahwa menjaga lingkungan itu sangatlah penting. Untuk harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas dan tingkat pembuatan produk daur ulang tersebut, mengenai pangsa pasarnya sendiri disini tidak melihat kalangan atas atau kalangan bawah, artinya semua orang dapat memiliki produk daur ulang tersebut karna produknya itu sendiri di bantrol dengan harga yang sangat terjangkau atau cocok di kantong masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma Buchari. 2011, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Alfabeta Bandung.
- Alma Buchari. 2014, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Alfabeta Bandung.
- Bank Dunia, 2005. "Mendukung Usaha Kecil dan Menengah", *PolicyBrief*. Tersedia pada : <http://www.worldbank.or.id> pada tanggal 20 Desember 2017.
- Daft, Richard L. 2006. *Manajemen*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Dewi, Ira Chrisyanti, 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*, Jakarta, PT: Prestasi Pustakarya.
- Freddy Rangkuti, 1997. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT* Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hasibuan, SP. Malayu, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, Jakarta. PT: Ghalia Indonesia.
- Kotler, Philip, 2005. *Manajemen Pemasaran*, Edisi Kesebelas Mid 1. Alih Bahasa Molan. Jakarta: Indeks.
- Hamim, Sufian. 2005. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*. UIR Press, Pekanbaru.
- Hasibuan, SP. Malayu, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, Jakarta. PT: Ghalia Indonesia.
- Kotler, Philip. 2009. *Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*. Erlangga, Jakarta.
- Rochaety, Ety., Dkk. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Siagian, Sondang. P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Erlangga.
- Silalahi, Ulbert .2005 .*Studi Tentang Ilmu Administarsi. Konsep, Dimensi*. Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen* .Erlangga, Jakarta.
- Subkhi, Akhmad. 2013. *Pengantar Teori & Prilaku Organisasi*. Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2002. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Sule E, Saufullah K. 2005. *Pengantar Manajemen* .Penerbit Prenada Media, Jakarta.
- Sule E, Saufullah K. 2005. *Pengantar Manajemen*. Penerbit Prenada Media, Jakarta.
- Sunyoto, Danang. 2015, *Strategi Pemasaran*. CAPS, Yogyakarta.
- Tjiptono Fandy. 2000. *Stategi Bisnis*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Widaningsih dan Ariyanti. 2018 *Aspek Hukum Kewirausahaan* .Malang : Polinema Press. Tersedia pada : <http://books.google.com/books>.
- Zulkifli. Awang, Azam dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Fisipol UIR.

EFEKTIVITAS PROGRAM SISTEM PELAYANAN TERPADU KEPENDUDUKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Angella Rosha Pangestu

Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru

Email: angella.rossha7668@grad.unri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini ingin melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan program Sistem Pelayanan Terpadu kependudukan (Sipenduduk) dalam menyelenggarakan layanan Disdukcapil pada masa pandemic covid-19. Penelitian berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota pekanbaru. Jenis penelitian ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa program Sipenduduk Disdukcapil masih belum efektif dalam menyelenggarakan layanan di Disdukcapil pada masa pandemi covid-19. Namun dapat dilihat memasuki tahun kedua penerapannya Sipenduduk terus melakukan evaluasi dan perbaikan.

Kata Kunci: efektivitas, Si Penduduk, Covid-19.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan sesuatu yang telah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Keperluan masyarakat untuk mengakses jasa dan sejumlah layanan merupakan suatu kesinambungan yang akan terus berjalan. Oleh karena itu sejumlah instansi baik pemerintah maupun non pemerintah menggenggam peranan penting dalam melaksanakan pelayanan publik. Salah satu akses pelayanan publik yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat ialah akses pengurusan dokumen kependudukan seperti pembuatan akta kelahiran, pengurusan KTP, akta kematian, Kartu Keluarga, surat pindah, dan lain sebagainya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pemerintahan yang memiliki permintaan akses paling banyak diantara sejumlah instansi pelayanan public lainnya seperti Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Terhitung sejak bulan Juni 2020 hingga Juni 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki permintaan akses layanan sejumlah 43.370 permintaan layanan mengungguli Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yakni sebesar 23.905 permintaan layanan. (Sumber: <https://mpp.pekanbaru.go.id> diakses pada 30 Juni pukul 16:55 WIB).

Namun pada bulan April tahun 2020 pemerintah pusat memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB disebabkan oleh penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Menanggapi kebijakan tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru pun turut memberlakukan kebijakan PSBB yang mengakibatkan pembatasan sejumlah kegiatan masyarakat di Kota Pekanbaru termasuk salah satunya pelayanan public. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2020 tentang pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Pekanbaru.

Disdukcapil Kota Pekanbaru turut menyikapi kebijakan tersebut dengan mengalihkan akses pelayanan publik yang sebelumnya dilaksanakan secara manual menjadi pelayanan public secara daring melalui Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 443.1/2978. Maka bagi masyarakat yang ingin memperoleh layanan dari Disdukcapil tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan pelayanan secara manual, melainkan cukup diakses lewat *website* Sistem Pelayanan Terpadu Kependudukan yang selanjutnya disingkat menjadi Sipenduduk. Hal ini tentunya dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 di Kota Pekanbaru.

Namun dalam penerapan pelayanan publik secara daring melalui Sipenduduk tersebut tersebut banyak keluhan masyarakat mengenai kualitas pelayanan. Mulai dari kesulitan untuk mendapat nomor antrian secara daring, ketersediaan kuota pelayanan yang terbatas, transparansi standar operasional prosedur, kerumitan mengakses situs, kendala jaringan dan gangguan system, hingga kesulitan mengunggah persyaratan, dan lain sebagainya.

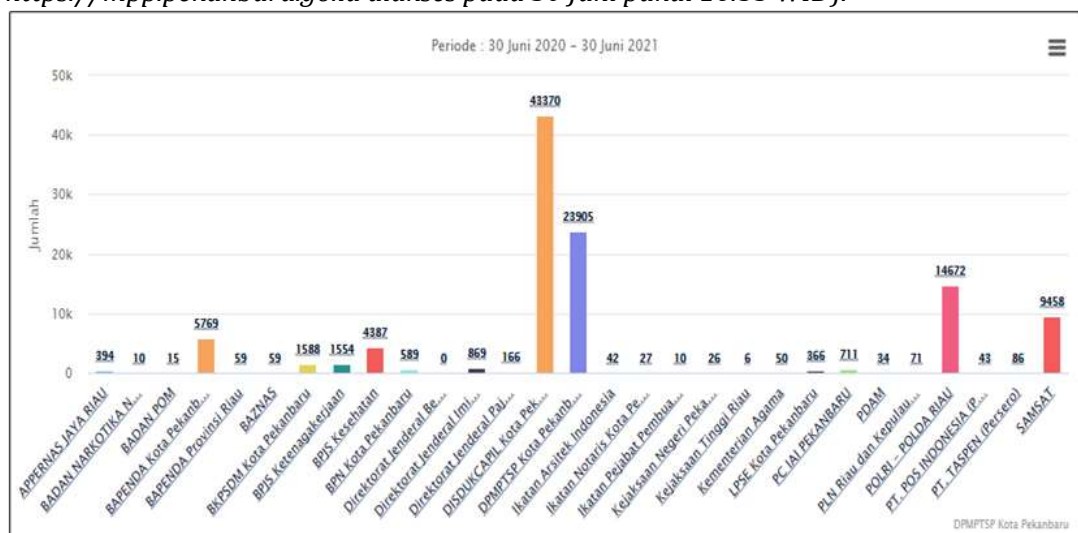
METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi bertempat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru mengingat Disdukcapil merupakan instansi pemerintah yang memiliki permintaan akses pelayanan public tertinggi di Kota Pekanbaru. Metode pengumpulan diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pelayanan Terpadu Kependudukan (Sipenduduk)

Sistem Pelayanan Terpadu Kependudukan atau yang disingkat menjadi Sipenduduk merupakan salah satu program inovasi yang diluncurkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru atau yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah salah satu unsur pelaksana pemerintahan di daerah yang mengurus permasalahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang berkedudukan dibawah tanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan data yang dihimpun dari situs jaringan Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru periode Juni 2020 sampai dengan Juni 2021, Disdukcapil merupakan instansi pemerintahan yang memiliki peringkat tertinggi dalam permintaan akses layanan publik yaitu sebesar 43.370 permintaan layanan mengungguli Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yakni sebesar 23.905 permintaan layanan (Sumber: <https://mpp.pekanbaru.go.id> diakses pada 30 Juni pukul 16:55 WIB).



Gambar 1 Layanan Disdukcapil Periode Juni 2020 - Juni 2021

Sumber: Statistik Pengunjung Disdukcapil Berdasarkan Loker Layanan diakses pada (<https://mpp.pekanbaru.go.id/statistik/>) 2021

Program inovasi Sipenduduk ini juga merupakan suatu bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam mempercepat penerapan *e-government* di Indonesia yang telah diatur

dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sejumlah layanan yang dapat diakses melalui *website* Sipenduduk meliputi beberapa kepengurusan dokumen seperti akta kependudukan yang meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian. Selanjutnya Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat menjadi KK meliputi KK Warga Negara Indonesia, KK yang hilang atau rusak, KK pindah alamat, pemecahan data, dan konsolidasi data. Kartu Tanda Penduduk atau yang lebih lanjut disebut dengan KTP meliputi pembuatan KTP elektronik, KTP elektronik hilang, rusak, atau urgen (Sumber: <https://sipenduduk.pekanbaru.go.id> diakses pada 31 Juni pukul 21:52 WIB).

Dalam penerapan inovasi Sipenduduk masyarakat banyak mengalami kendala seperti kesulitan untuk mendapat nomor antrian secara daring, ketersediaan kuota pelayanan yang terbatas, transparansi standar operasional prosedur, kerumitan mengakses situs, kendala jaringan dan gangguan sistem, hingga kesulitan mengungkapkan persyaratan, dan lain sebagainya. Hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan salah satu tujuan pembuatan Sipenduduk yakni untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan public secara daring. Maka dalam perjalanannya efektivitas program inovasi Sipenduduk mulai menjadi hal yang dipertanyakan.

Efektivitas Program Inovasi Sipenduduk

Pengertian efektivitas menurut Siagian dalam Amelia (2015:9) adalah memanfaatkan sumber daya, dan sarana prasarana yang sebelumnya telah ditetapkan dalam jumlah tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil dari upaya jasa yang ditempuhnya. Kemudian efektivitas tersebut dapat dikatakan berhasil apabila tujuan dan sasaran yang telah dituu sejak awal tercapai. Semakin sesuatu yang dihasilkan dengan tujuan, maka semakin besar nilai efektivitasnya.

Sedangkan menurut Budiani dalam Amelia (2015: 17-18) untuk mengukur efektivitas suatu program perlu dilihat dari beberapa indikator yaitu:

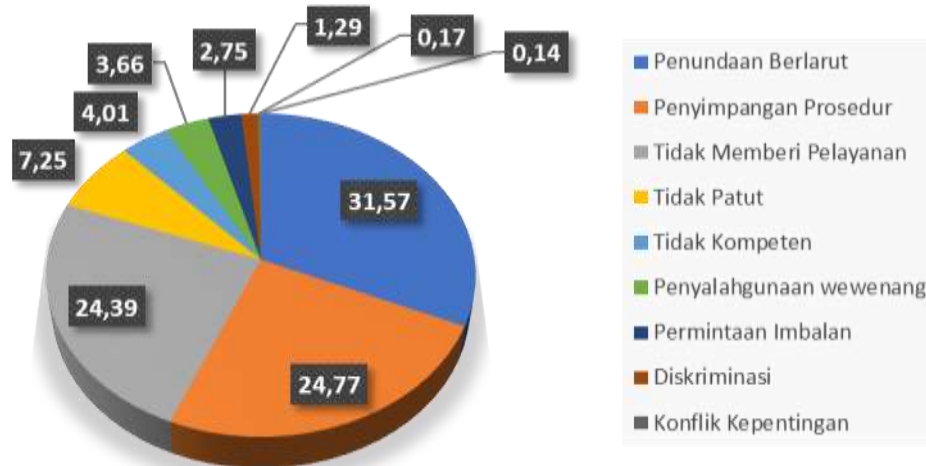
- a. Ketepatan sasaran program
- b. Sosialisasi program
- c. Pencapaian tujuan program
- d. Pemantauan program

A. Ketepatan Sasaran Program Sipenduduk

Dalam mengukur efektivitas suatu program perlu dilihat apakah program tersebut dibuat sudah tepat dan sesuai dengan sasaran. Apakah pembuatan program tersebut dilandasi oleh kebutuhan atau tidak. Pembentukan program inovasi Sipenduduk dilatar belakangi oleh upaya Disdukcapil Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan via daring sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan publik kapanpun dan dimanapun berada.

Pembentukan program ini juga tak luput oleh semangat *e-government* yang telah Kembali digencarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pembuatan program inovasi Sipenduduk ini secara langsung dapat mendukung nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan oleh *e-government* yakni meningkatkan kualitas pelayanan public di Indoensia. Mengingat kualitas pelayanan public di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan. Bahkan pada Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 terdapat sebanyak 7.204 laoran masyarakat yang mengeluhkan masyarakat dugaan maladministrasi pada pelayanan public yang dilaporkan melalui berbagai jenis wadah pengaduan (Sumber: *Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020*).

Persentase Laporan Masyarakat Berdasarkan Dugaan Maladministrasi



Gambar 2 Laporan Masyarakat Berdasarkan Dugaan Maladministrasi

Sumber: *Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020*

Maka melihat masih tingginya praktik maladministrasi di Indonesia program inovasi pelayanan publik seperti Sipenduduk ini tentu saja merupakan salah satu solusi dalam upaya menekan praktik maladministrasi tersebut. Pasalnya dengan pengadaan pelayanan publik secara daring banyak peluang praktik maladministrasi yang dapat dicegah seperti penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, pungutan liar, konflik kepentingan, calo, dan lain sebagainya.

Manfaat lainnya yang sangat berkaitan dengan kondisi saat ini ialah pada saat pembatasan kegiatan masyarakat di ruang publik yang diakibatkan oleh pandemi wabah covid-19 yang sedang melanda. Untuk dapat memutus rantai penyebaran virus covid-19 kegiatan pelayanan publik menjadi dialihkan secara daring. Meskipun sebenarnya program inovasi telah dirancang dan dibuat sebelum adanya pandemic covid-19. Namun dengan adanya program inovasi yang mampu memberikan pelayanan secara daring seperti ini tentunya sangat membantu kebijakan tersebut.

Maka berdasarkan sejumlah landasan diatas pembuatan program inovasi Sipenduduk telah dibuat tepat pada sasaran dengan mempertimbangkan beberapa manfaat yang dapat dihasilkan dengan adanya program inovasi ini seperti kesediaan akses layanan dimanapun dan kapanpun, mencegah dan menekan terjadinya praktik maladministrasi pada pelayanan publik, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus covid-19 di Kota Pekanbaru.

B. Sosialisasi Program Sipenduduk

Dalam mensosialisasikan pemanfaatan program inovasi Sipenduduk, Disdukcapil telah melakukan upaya penyebaran informasi melalui sejumlah media sosial seperti instagram, facebook, dan twitter. Informasi tersebut memuat tentang pengajuan permohonan layanan yang dialihkan ke situs <http://sipenduduk.pekanbaru.go.id> untuk seluruh jenis pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil diberlakukan sejak 13 April 2020. Informasi tersebut diunggah pada 15 April 2020 yang artinya penyampaian informasi tersebut berselang dua hari setelah pemberlakuan pelayanan secara daring.



Gambar 3 Pemberitahuan Peralihan Layanan Oleh Disdukcapil Melalui Instagram

Sumber: Akun Instagram Disdukcapil Kota Pekanbaru

(https://www.instagram.com/p/B_fwXQITkL/?utm_source=ig_web_copy_link)

Namun upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Disdukcapil belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat Kota Pekanbaru sehingga masih banyak masyarakat yang mengaku tidak mengetahui tentang informasi pengalihan tersebut. Bahkan berdasarkan hasil kajian cepat yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Pada Masa Pandemi Covid-19 menemukan bahwa dari lima responden kuesioner yang merupakan masyarakat pengguna layanan Disdukcapil kelima-limanya mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai Sipenduduk atau pelayanan secara daring selama pandemic covid-19 (Ombudsman, 2020).

Hal ini juga semakin dilemahkan oleh fakta bahwa tidak semua masyarakat Kota Pekanbaru merupakan pengguna aktif media sosial. Bahkan untuk Sebagian masyarakat ada yang bukan merupakan pengguna internet aktif disebabkan oleh berbagai alasan seperti tidak memiliki perangkat gawai, tidak ahli dalam menggunakan internet, tidak ahli menggunakan gawai, tidak memiliki paket data, kualitas sinyal atau jaringan, sibuk/tidak sempat, dan lain sebagainya (APJII, 2020). Maka jika upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil hanya terbatas pada penyebaran informasi di media sosial saja, upaya tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Pada akhirnya masih banyak masyarakat yang tidak memperoleh informasi atau sosialisasi berkaitan dengan Sipenduduk atau peralihan layanan secara daring selama pandemic covid-19.

C. Pencapaian Tujuan Program Sipenduduk

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya penerapan program inovasi Sipenduduk dalam perjalanannya banyak mengalami kendala. Terdapat sejumlah keluhan oleh masyarakat yang mengakses layanan Sipenduduk bahwa situs sering mengalami gangguan sehingga kegiatan pelayanan terpaksa ditutup atau diberhentikan sementara hingga situs telah mengalami pemulihan. Hal tersebut berdampak pada kepentingan masyarakat yang tertunda dalam mengurus dokumen kependudukan. Keluhan lain juga muncul dari masyarakat tentang masalah akses untuk

mendapatkan antrian. Nomor antrian diperoleh secara daring dengan mengakses situs jaringan Sipenduduk. Nomor antrian tersebut hanya dapat diakses pada pukul 06.00 WIB pagi hingga 06.35 WIB antrian sudah tidak dapat lagi diakses dikarenakan kuota yang tersedia sudah habis, sehingga masyarakat yang tidak kebagian kuota antrian terpaksa harus mencoba lagi keesokan harinya.

Mengenai pembatasan kuota juga termasuk salah satu hal yang menjadi kendala dalam mengakses pelayanan di disdukcapil. Semenjak pandemic covid-19 Disdukcapil membatasi kuota pelayanan Sipenduduk yakni untuk pengurusan akta sejumlah 80 kuota, KK sejumlah 100 kuota, dan KTP elektronik sejumlah 120 kuota. Sedangkan pada aplikasi Layanan Tunggu Dukcapil pelayanan KTP elektronik rusak tersedia sejumlah 50 kuota, KTP-el hilang 40 kuota, dan KTP urgen sejumlah 20 kuota saja.

Namun selain masalah antrian yang disebabkan oleh keterbatasan kuota yang diberikan, masyarakat juga dibuat bingung dengan alur, prosedur, dan tata cara perolehan nomor antrian. Pada awalnya untuk dapat mengakses layanan masyarakat diharuskan untuk mengakses antrian secara daring. Namun pada 28 Juni Disdukcapil mengunggah informasi pada akun instagramnya bahwa terhitung sejak 29 Juni 2020 pengambilan nomor antrian secara daring Disdukcapil sudah tidak diberlakukan lagi melainkan dialihkan menjadi nomor antrian manual yang kembali diperoleh di kantor Disdukcapil. Namun pada 8 Juli 2020 kembali diunggah informasi di akun Instagram Disdukcapil Kota Pekanbaru bahwasanya sejumlah pelayanan dokumen kependudukan seperti pengurusan akta (kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian), pengesahan anak, akta kutipan ke II, Surat Keterangan Pindah, dialihkan menjadi pelayanan manual dengan mengakses nomor antrian secara daring melalui situs <https://mpp.pekanbaru.go.id> dan bukan melalui <https://sipenduduk.pekanbaru.go.id>. Disdukcapil juga tidak mengunggah atau menginformasikan tentang bagaimana sebenarnya alur atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tetap dalam mengakses pelayanan. Sehingga hal ini makin menyebabkan kebingungan masyarakat.

Alur, prosedur, dan tata cara yang berubah-ubah dan berpindah-pindah ini menyebabkan keruwetan bagi masyarakat dalam mengakses layanan Disdukcapil secara daring. Hal ini pun pada akhirnya sudah sangat lari dari tujuan dan orientasi awal pembentukan program inovasi Sipenduduk.

D. Pemantauan Program Sipenduduk

Sejauh ini pelaksanaan program inovasi Sipenduduk masih terus dalam kondisi evaluasi dan pemantauan. Mengingat penerapan program ini baru memasuki tahun kedua, maka masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang perlu untuk disempurnakan. Dalam hal ini Disdukcapil terus melakukan terus memantau perkembangan pelaksanaan program dan terus melakukan upaya perbaikan. Seperti keluhan mengenai situs Sipenduduk yang sering mengalami gangguan, Disdukcapil terus berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu pula dengan masalah Standar Operasional Prosedur layanan kini telah diunggah di situs Sipenduduk, sehingga masyarakat tahu bagaimana alur dan tahapan pelayanan, kapan standar durasi pengurusan suatu dokumen dan lain sebagainya. Penambahan kuota juga telah dilakukan menjadi tak terbatas dan terbuka selama dua puluh empat jam. Informasi tersebut diunggah pada 19 Januari 2021 pada akun Instagram Disdukcapil pekanbaru.

KESIMPULAN

Sipenduduk merupakan salah satu program inovasi yang diluncurkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya Sipenduduk mendapat banyak keluhan dan masukan dari masyarakat. Jika dilihat dari empat indikator efektivitas suatu program menurut Budiani dalam Amelia (2015) dari segi Ketepatan Sasaran program,

Sipenduduk dibentuk telah sesuai dengan sasaran dan kebutuhan. Tujuan pembuatan program Sipenduduk bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Disdukcapil dengan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan secara daring, dimana program ini juga ikut mendukung pelaksanaan *e-government* di Kota Pekanbaru sebagai upaya memberantas kelemahan pelayanan public. Dari segi Sosialisasi Program, Disdukcapil masih belum mensosialisasikan program Sipenduduk secara menyeluruh, melainkan hanya melalui media sosial saja. Sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak tahu dan tidak paham dengan peralihan akses layanan semenjak pandemic Covid-19. Dari segi Pencapaian Tujuan Program masih banyak tujuan dan orientasi program yang belum tercapai seperti Situs Sipenduduk yang sering mengalami gangguan, kesulitan memperoleh nomor antrian, tidak adanya kejelasan SOP, alur prosedur yang berubah-ubah, ketersediaan kuota yang terbatas, dan lain sebagainya. Dari segi Pemantauan Program, Sipenduduk masih teris dalam pantauan dan terus berupaya untuk melakukan perbaikan. Sejumlah upaya perbaikan yang telah tampak seperti perbaikan situs Sipenduduk yang rusak atau mengalami gangguan, mengunggah SOP, dan tambahan kuota pelayanan menjadi tak terbatas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia berkontribusi dalam penulisan makalah ini yakni Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau yang telah bersedia memberikan sejumlah informasi terkait Tata Kelola Pelayanan di Disdukcapil Pada Masa Pandemi, serta dosen-dosen Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau yang telah memberikan saran, masukan, dan bimbingan, terhadap penyusunan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Rizcah. 2015. Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar. Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi. Universitas Hasanuddin, Makassar
- Nugroho, Tri Cahyo. 2021. *Implementasi Kebijakan Program Gerakan "Mappadeceng" Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Soppeng*. Tesis Prodi Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin, Makassar
- Creswell, W. John. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Misuraca, G. 2007. "e-Governance in Africa: From Theory to Action : A Handbook ICTs for Local Governance. Ottawa: IDRC
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offse
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- Kota pekanbaru Dalam Angka *Pekanbaru Municipality in Figures 2021*
- Laporan Hasil Analisis Kajian Cepat Tahun 2020 Mengenai Tata Kelola Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Pada Masa Pandemi Covid-19 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau
- Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020
- Laporan Data Statistik Sektor Kota Pekanbaru Tahun 2020

EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN BENGKALIS

Candra Kusuma, Benny Syofyan, Rumini

Universitas Riau, Pekanbaru

Email: candrakusuma7820@grad.unri.ac.id, bennysyofyanahmad1789@student.unri.ac.id,
rumini1791@student.unri.ac.id

ABSTRAK

Kecamatan Bantan memiliki potensi wisata yang perlu dikembangkan, salah satu pesona pariwisata yang ada di Pulau Bengkalis dan paling ramai dikunjungi wisatawan adalah pantai Selatbaru.. Pantai Selatbaru membentang sepanjang 5 km mulai daengan hamparan pasir yang keras dan bisa untuk bermain untuk para wisatawan, serta pantainya yang landai sangat cocok untuk bermain air atau berenang di Pantai. Keindahan Pantai Selatbaru yang menjadi kunci pengembangan wisata di pulau Bengkalis tersebut dan menjadi salah satu daerah unggulan wisata di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengevaluasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Pantai Selatbaru. Tipe penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teori William N Dunn. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa faktor eksternal yang paling mempengaruhi perkembangan objek wisata di Pantai Selatbaru adalah banyaknya peluang-peluang yang ada dimana salah satu peluang yang terbaik yaitu terletak disegitiga pertumbuhan antarnegara dan ancaman yang paling tinggi adalah kerusakan lingkungan. Adapun faktor internal yang paling utama dalam pengembangan adalah kekuatan dimana pantainya yang indah, panjang dan kawasan yang masih alami serta masih kental dengan adat dan istiadat sedangkan kelemahan yang menjadi hambatan dalam melakukan berkembangnya objek wisata adalah sarana dan prasarana yang masih belum memadai. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa masih kurangnya strategi atau belum tepatnya strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengembangan. Jika memanfaatkan secara maksimal segala kekuatan dan peluang sekaligus meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman dilakukan didukung oleh penerapan strategi pengembangan yang tepat maka objek wisata di Pantai Selatbaru akan mampu bersaing dalam tingkat Nasional maupun Internasional.

Kata kunci: evaluasi program, pengembangan, destinasi pariwisata,

PENDAHULUAN

Pariwisata di Kabupaten Bengkalis saat ini menjadi salah satu target untuk peningkatan pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan dan perekonomian masyarakat, khususnya pariwisata Pantai Selatbaru setiap hari maupun hari sabtu dan minggu maupun hari libur nasional banyak sekali wisatawan yang mengunjungi pantai Selatbaru. Pantai Selatbaru sangat cocok sekali menjadi salah satu pilihan tempat wisata karna lokasinya tidak jauh dari kota Bengkalis dan juga satu-satunya pantai paling cantik dan juga digemari masyarakat khususnya pulau Bengkalis. Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi ekonomi kerakyatan yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan secara menyeluruh dan merata sehingga perlu adanya pembinaan yang terarah dan terkoordinir.

Disamping itu, konsep pariwisata mencakup tentang upaya pemberdayaan, usaha pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta berbagai kegiatan dan jenis usaha pariwisata dalam meningkatkan hubungan dengan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar objek wisata. Pariwisata merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang berkaitan dengan cara penggunaan waktu luang atau waktu libur yang dimiliki seseorang. Selain itu juga pariwisata atau rekreasi telah menjadi kebutuhan hidup masyarakat saat ini, dengan berpariwisata dapat berkumpul dengan menghabiskan waktu dengan sanak saudara atau orang-orang yang disayangi untuk menambah wawasan pengetahuan pada anak-anak atau hanya sekedar penghilang

penat dari kesibukan pekerjaan yang ditekuninya. Pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal disitu untuk melakukan pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata merupakan dasar pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Pembangunan kepariwisataan diadakan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan mengedepankan keunikan, kekhasan budaya dan alam, keanekaragaman, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan diantaranya adalah pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional. Pariwisata sebagai suatu sector kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembngnan perekonomian bangsa-bangsa didunia, khususnya dalam 2 (dua) dekade terakhir yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa didunia ang semakin baik dan maju. Kamajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dan kebutuhan atau gaya hidup manusia.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 merupakan dasar pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkalis.

Dengan adanya dasar atau standar operasional tentang pariwisata tentunya mempunyai tujuan, prinsip dan juga syarat untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Bengkalis :

a. Tujuan :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.
- Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian di Kabupaten Bengkalis.
- Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif.
- Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan Industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal.

b. Prinsip :

- Untuk menjaga kualitas lingkungan
- Memberikan keuntungan bagi masyarakat local dan wisatawan
- Menjaga hubungan antara pariwisata dan lingkungan
- Menjaga keharmonisan antara masyarakat local, kebutuhan wisatawan dan lingkungan

c. Syarat :

- Menyediakan Informasi Kepariwisata, Perlindungan Hukum serta Keamanan dan keselamatan kepada Pariwisata.
- Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum.
- Memelihara, mengembangkan dan melestarikan Aset Nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali.

- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pengembangan kawasan Objek Wisata di Kabupaten Bengkalis akan dapat mendorong terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terciptanya lapangan pekerjaan, serta peluang-peluang lainnya untuk peningkatan pariwisata daerah serta peningkatan perekonomian masyarakat. Pengembangan Objek Wisata secara langsung atau tidak langsung akan mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah baik secara fisik maupun secara Sosial Budaya dan Ekonomi.

Alasan utama perlunya pengembangan destinasi pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal, regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Dengan kata lain, pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak (Yoeti,A.Oka,2008).

Dalam buku Suwartono (2004) mengemukakan lima unsur pokok dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata yaitu :

1. Objek dan daya tarik wisata
2. Prasarana wisata
3. Sarana wisata
4. Tata laksana/infrastruktur
5. Masyarakat/lingkungan

Pengembangan tidak lepas dari suatu upaya dan usaha dalam melakukan kerja atau peningkatan dari objek yang sudah dibangun. Disinilah letak pentingnya kontrol terhadap apa yang sudah dibangun supaya tetap bisa berkembang terus kedepannya.

Menurut Bakaruddin Objek wisata alam adalah Objek wisata yang benar-benar belum dibentuk oleh kreativitas tangan manusia. Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada didaerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang ketempat tersebut. Bakarudin(2009)

Dalam Sumarno objek wisata dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal sebagai berikut:

1. Dimanfaatkan sebagai sosial dan pariwisata. Objek wisata dapat dimanfaatkan sebagai ciri khas suatu daerah tertentu sehingga perjalanan sejarah dapat dirasakan sampai kapanpun. Bagi daerah yang memiliki bangunan sejarah diperlukan untuk mengelola bangunan tersebut agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas.
2. Dimanfaatkan untuk pendidikan. Wisata sejarah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan bagi peserta didik di sekolah, perguruan tinggi, ataupun masyarakat umum. Dengan adanya objek wisata sejarah, dapat dipelajari bagaimana asal mula daerah itu terbentuk, baik dari segi sosial, wilayah, budaya dan ekonominya.
3. Dimanfaatkan untuk kebudayaan. Banyaknya objek wisata yang ada, mudah mencari bukti dari kehidupan yang ada dimasa lampau dan dari situlah peradaban kebudayaan dapat dipelajari. Dengan belajar pada kebudayaan dimasa lampau maka kita sebagai manusia yang hidup di era globalisasi dapat menghindarkan diri dari yang ada dimasa lampau Sumarno (2008).

Menurut Wiliam Dunn (1998) evaluasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan metode-metpde analisis kebijakan yang lainnya. Karakteristik yang membedakan ini terbagi menjadi empat sebagai berikut :

1. Fokus Nilai

Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang transtisipasi dan tidak transtisipasi

2. Interdependensi Fakta Nilai

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun nilai untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau terendah, diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi semua individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara actual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau

Tuntutan evaluasi berbeda dan tuntutan adfokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil dimasa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan.

4. Dualitas Nilai

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenan dengan nilai yang ada, dan dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi tujuan-tujuan lain).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif Desain penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Mahmud (2011) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat terhadap sesuatu fakta dan sifat objek tertentu yang diteliti. Konsep istilah deskriptif bukan sekedar pengumpulan data, tabulasi dan penuturan data. Sebenarnya sebagai metode penelitian deskriptif memiliki penelitian yang lebih luas dari ciri khas yakni memusatkan diri pada masalah masa sekarang dan actual serta data yang diperoleh disusun, dijeleaskan dan dianalisis ini disebut metode analitik.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sugiyono (2012)

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini dengan jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Menurut Sugiyono (2009) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/trigulasi. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 dengan Ibu Kotanya Bengkalis. Luas wilayah Kabupaten 8.403,28 km² yang terdiri dari Pulau-pulau dan Lautan sebanyak 15 Pulau utama. Secara administrasi Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2019 terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan dan 155 Desa/Kelurahan. Adapun kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan terletak di Pulau Bengkalis, Kecamatan Rupat dan Rupat Utara terletak di Pulau Rupat, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan

Bandarlaksamana dan Kecamatan Siak Kecil terletak di Pesisir Pulau Sumatera serta Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau terletak di daratan Pulau Sumatera.

Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata. adapun tugas instansi ini adalah : “Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pariwisata Daerah”.Visi yang dimaksud dalam konsep ini adalah cara pandang jauh kedepan kemana Dinas Pariwisata harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, produktif dan inovatif dalam menghadapi tantangan tugas dimasa depan dalam rangka perwujudan harapan yang ingin diwujudkan dalam jangka tertentu.

Dengan konsep tersebut diatas dan mengacu kepada Visi Kabupaten Bengkalis yakni, “ Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bersih, Efektif, Religius, Cepat, Aman, Harmonis, Agamis, Berbudaya dan Sejahtera, maka perlu dirumuskan visi Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis

Keadaan geografis Kecamatan Bantan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, tepatnya berada di pulau bengkalis, dengan luas wilayah 424,40 Km² . Secara geografis terletak pada posisi 102 0 .00 Lintang Utara – 102 0 30’29” dan 1 0 .15 Bujur Timur – 1 0 36’43” Lintang Utara. Bentuk wilayah kecamatan bantan berbentuk datar sampai berombak. Kecamatan Bantan memiliki 23 desa. Daerah ini terletak pada ketinggian 2-5 Meter di atas permukaan laut, beriklim tropis dengan suhu udara berkisar 26 0 C – 30 0 C. Keadaan curah hujan setiap tahun dengan rata-rata 189.1 M2 / Tahun. Berdasarkan data dari Kantor Camat Bantan, luas wilayah kecamatan Bantan adalah 424 km², dimana desa terluas adalah Teluk Pambang dengan luas 114 km² atau 26,89% dari luas keseluruhan kecamatan Bantan, diikuti oleh desa Selat Baru 63 km² (14,86%) dan Bantan Tengah 51 km² (12,03%). Desa dengan jarak lurus terjauh dari ibukota kecamatan Bantan adalah desa Teluk Lancar dengan jarak lurus 37 km. Dan jarak terdekat adalah desa Selat Baru sebagai ibu kota kecamatan Bantan.

Desa Selatbaru adalah salah satu desa yang terlatak di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Daerah ini merupakan pusat Pemerintahan Kecamatan Bantan, Desa selatbaru ini terletak disebelah utara pulau Bengkalis. Desa ini Terkenal dengan adanya pantai yang memiliki ciri khas unik karena bibir pantainya yang landai, melebar jauh ketepi laut hingga ± 1000 m pada saat air laut surut. pantai ini terletak disebelah utara pusat desa, tepatnya di Parit I(Satu) Dusun Pantai Indah, Pantai Desa Selatbaru juga dijadikan salah satu icon Pariwisata Kabupaten Bengkalis.

Masyarakat Desa Selatbaru terdiri dari berbagai macam suku yaitu. Jawa, Melayu, Minang, Aceh, Batak, China (Toing Hoa), Sunda, Betawi. namun mayoritas penduduk Desa Selatbaru bersuku Jawa, dan memiliki Agama/Aliran kepercayaan mayoritas Muslim (Islam) sedangkan minoritas beragama Budha, dan Keristen.

Desa Selatbaru memiliki luas wilayah 2300 Ha, Luas Pemukiman ± 168 Ha Perkebunan ± 1170 Ha Hutan Mangrov ± 962 Ha. Letak Desa Selatbaru Berbatasan dengan :

Utara Berbatasan dengan Selat Malaka
Selatan Berbatasan dengan Desa Resam Lapis
Barat Berbatasan dengan Desa Deluk
Timur Berbatasan dengan Desa Berancah

Adapun program pengembangan destinasi pariwisata yang terdapat di Pantai Selatbaru antara lain:

1. Pembangunan taman di objek wisata Pantai Indah Selatbaru Kecamatan Bantan
2. Pembangunan pendopo suku adat objek wisata Pantai Indah Selatbaru Kecamatan Bantan
3. Pembangunan paving blok di Pantai Indah Selatbaru Kecamatan Bantan

4. Semenisasai Jalan Masuk Pantai Indah Selatbaru Kecamatan Bantan
5. Pemasangan lampu taman di objek wisata Pantai Indah Selatbaru Kecamatan Bantan
6. Pembangunan plang nama Pantai Indah Selatbaru Kecamatan Bantan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat terhadap pengembangan destinasi pariwisata di Pantai Selatbaru masih banyak kendala-kendala dan masalah dilapangan seperti belum sepenuhnya objek wisata yang bisa dibangun oleh pemerintah Daerah dikarenakan keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat atau wisatawan tentang kebersihan, kurangnya kesadaran pemilik warung dalam membayar retribusi serta hal lain yang menyangkut pesona Pantai Selatbaru.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa, Program pengembangan destinasi pariwisata Pantai Selatbaru oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis telah berjalan sesuai dengan sistem yang ada, namun terdapat masalah-masalah yang membawa dampak negatif sehingga pada pelaksanaannya masih belum optimal dalam mengembangkan pariwisata Pantai Selatbaru. Pada target pelaksanaan juga belum terselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Perhatian, komitmen, dana, lokasi dan waktu menjadi masalah pada saat proses pelaksanaan, sehingga hal itu mempengaruhi hasil yang diharapkan. Seharusnya bidang pariwisata ini menjadi prioritas utama dalam pembangunan, karena ini merupakan potensi daerah yang paling bisa dibanggakan dan bisa meningkatkan PAD guna meningkatkan perekonomian daerah dan menyerap tenaga kerja

Penyediaan sarana dan prasarana yang merupakan poin yang tidak bisa dikesampingkan, belum tersedia lengkap di lokasi objek wisata. Itu semua merupakan kebutuhan wisatawan yang tidak seharusnya diabaikan, hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kemajuan pariwisata daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakaruddin, 2009. *Anatomi Pariwisata : Memahami Pariwisata Sebagai Sistem Linkage*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Suwantoro, 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta.
- Sumarno, 2008. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta.
- William N Dun 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Edisi dua, Gadjah Mada University Press

KEBIJAKAN RESPONSIF SEBAGAI INSTRUMEN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK PADA MASA PANDEMI COVID-19

Ernalko, Ilyas Riski, Sri Mutiara Rizki

Pascasarjana Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Email: ernalko11@gmail.com, ilyasriski10@gmail.com, sri.mutiara@student.unri.ac.id

Abstrak

Sejumlah kebutuhan publik terhadap pelayanan publik mengalami perubahan sangat mendasar. Hal ini memerlukan respon dari pihak penyelenggara pelayanan publik, berupa inovasi pelayanan yang sesuai dengan bentuk, jenis, dan sifat kebutuhan publik yang telah mengalami perubahan tersebut. Ketika suatu lembaga penyelenggara pelayanan publik menjadi bagian dari struktur pemerintah dan/atau pemerintah daerah, maka diperlukan suatu kebijakan publik yang memayungi inovasi yang diciptakan. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap pelayanan perpajakan pada Unit Pelayanan Teknis Pengelola Pendapatan Daerah (UPT-PPD) Malang Selatan, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, menunjukkan bahwa: (1) pada masa pandemi ini telah terjadi perubahan kebutuhan publik terhadap jenis pelayanan publik terutama pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor; (2) para petugas penyelenggara pelayanan publik memerlukan sejumlah cara baru dan sumberdaya pendukung guna merespon perubahan kebutuhan publik tersebut; (3) untuk menjaga dan meningkatkan efektifitas pelayanan publik di masa pandemi Covid-19, telah diciptakan inovasi pelayanan dengan nomenklatur "Jelajah Lintas Desa" (Jelita); (4) temuan tersebut menguatkan teori Bromley (1989) tentang Hierarchy of Policy Formulation; dan sejalan dengan asumsi teori Bromley ini pula peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Daerah merespon fenomena tersebut dengan mengambil kebijakan yang responsif, didahului dengan melakukan analisis kebutuhan (assessment) dan menetapkan kebijakan pada tingkat operasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan merumuskan standar operasional prosedur (yang dalam teori Bromley disebut sebagai "institutional arrangements"); agar dapat memayungi inovasi pelayanan yang telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, sekaligus dapat menjadi instrumen dalam rangka melakukan transformasi pelayanan publik guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa pandemi Covid-19 ini.

Kata Kunci : transformasi, pelayanan publik, kebijakan responsif, pandemi covid-19.

PENDAHULUAN

Dunia saat ini sedang diguncang oleh muncul dan berkembangnya virus Corona yang kemudian menyebabkan terjadinya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Pandemi ini membawa dampak signifikan terhadap perubahan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tidak saja pada tingkat nasional di Indonesia, akan tetapi juga pada tingkat dunia. Mulai dari keadaan makro pada sektor kehidupan ekonomi, sosial-budaya, dan lain-lain sampai dengan keadaan mikro pada sektor-sektor kehidupan sehari-hari masyarakat, hampir dapat dipastikan tidak ada yang bisa terhindar dari dampak pandemi Covid-19 ini; tidak terkecuali sektor pelayanan publik (Andhika, 2020). Pendek kata, pandemi Covid-19 tercatat sebagai suatu realitas sosial yang memiliki implikasi luas, bukan hanya di sektor kesehatan yang diukur dari besarnya jumlah korban yang terinfeksi dan yang meninggal dunia, namun juga luasnya dampak negatif yang ditimbulkannya (Haryati, 2020). Pada konteks ini penyelenggaraan pelayanan publik menjadi salah satu kegiatan yang sangat terguncang oleh pandemi Covid-19.

Sebagai contoh, dengan adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2020); dimana Surat Edaran ini memberlakukan work from home (WFH) yaitu bekerja dari rumah secara bergantian bagi para pegawai di lingkungan instansi pemerintah; telah menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat, sebab beberapa lembaga penyelenggara pelayanan

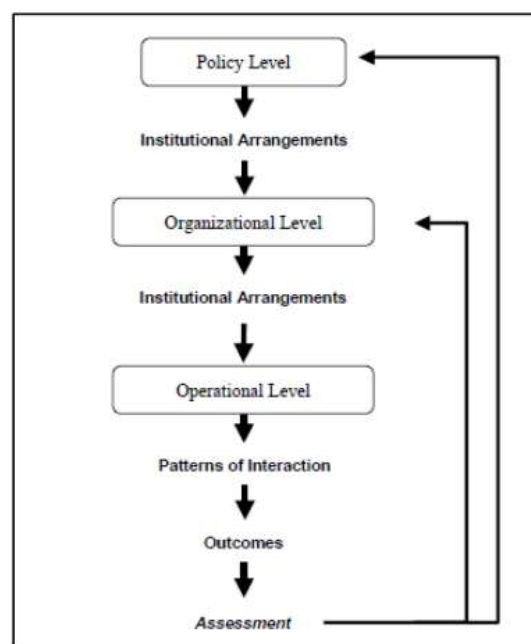
publik tidak dapat melayani masyarakat secara langsung sehingga penyelenggaraan pelayanan publik (pemenuhan kebutuhan publik) tidak dapat dilakukan secara optimal. Guna merespon kondisi pandemi Covid-19 dan dalam rangka menekan penyebaran virus Corona-19, pada tanggal 31 Maret 2020 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Implikasi atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini amat luas; beberapa wilayah di tanah air memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan lembaga pendidikan dan tempat kerja diliburkan, kegiatan keagamaan atau ibadah bersama dibatasi dan kegiatan-kegiatan di tempat umum atau fasilitas publik juga dibatasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kerumunan banyak orang pada suatu tempat, membatasi interaksi dengan orang lain, mengurangi transaksi dengan uang secara fisik dan lain-lain; agar risiko penularan virus Corona-19 dapat ditekan, sesuai dengan substansi protokol kesehatan yang diberlakukan di masa pandemi Covid-19. Pemberlakuan PSBB membawa dampak besar pada aksesibilitas pelayanan publik sekaligus menciptakan suatu dilema baik bagi penyelenggara pelayanan publik maupun bagi pengguna pelayanan publik. Di satu sisi penyelenggara pelayanan yang biasanya melakukan pelayanan secara konvensional yakni dengan bertatap muka secara langsung di suatu tempat, pada masa pandemi Covid-19 ini mengambil langkah melakukan pembatasan jumlah pelayanan pada tiap-tiap harinya. Pada sisi yang lain publik yang biasanya menjadi pengguna pelayanan, juga memiliki perasaan ragu/takut untuk mengunjungi tempat-tempat penyelenggaraan pelayanan publik, meskipun mereka memerlukan pelayanan itu. Dilema ini menjadi titik awal sekaligus sinyal bahwa sesungguhnya kebutuhan publik akan bentuk dan jenis serta sifat pelayanan publik telah mengalami perubahan. Perubahan kondisi sosial masyarakat serta perubahan kebutuhan publik tampaknya tidak boleh diabaikan; artinya bahwa perubahan tersebut perlu mendapat respon dan perlu diakomodasi menjadi salah satu masukan bagi para penyelenggara pelayanan publik dan para penentu kebijakan.

Perubahan kebutuhan publik, disamping disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid19, juga disebabkan oleh kemajuan teknologi komunikasi. Kondisi semacam ini dalam pandangan Anderson (1979) mengharuskan para pembuat kebijakan untuk mau dan mampu bersikap responsif dan adaptif, baik terhadap bentuk dan jenis kebutuhan publik yang telah mengalami perubahan akibat suatu kondisi sosial tertentu maupun responsif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan publik sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang sedang terjadi. Meskipun harus diakui bahwa salah satu kendalanya adalah bahwa secara umum pembahasan suatu permasalahan menuju perumusan suatu kebijakan yang responsive dan adaptif tersebut membutuhkan waktu yang lama, baik pada saat identifikasi masalah serta pada saat menyusun alternatif solusinya serta pada saat proses formulasi dan pembahasan rancangan kebijakan (Mulyani, 2019). Pada masa pandemi Covid-19 yang ditandai dengan berubahnya kebutuhan publik ini, tampaknya para penyelenggara pelayanan publik dipandang perlu menciptakan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan agar pelayanan tidak terhambat. Menyikapi kondisi yang demikian ini, Rachel Silcock (Silcock, 2001 dikutip Lumbanraja, 2020) menyarankan agar para penyelenggara pelayanan publik meresponnya dengan melahirkan kebijakan yang responsif terhadap perubahan kebutuhan publik dengan cara melakukan inovasi yang berbasis teknologi (egovernment), adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses dan pengiriman layanan pemerintah untuk memberi manfaat bagi warga negara, mitra bisnis, dan karyawan.

Selain penggunaan teknologi juga diperlukan sikap responsif-inovatif untuk melakukan pengembangan model pelayanan publik baru di mana suatu lembaga

penyelenggara pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang modern, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan publik yang dilayani. Berhubungan dengan konteks pencapaian tujuan suatu kebijakan dan pemecahan masalah publik, Anderson (1979) menerangkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Berdasarkan teori yang dikemukakan Bromley dalam Tachjan (2006), kebijakan publik memiliki tiga tingkatan yang berbeda berdasarkan hierarki kebijakan, yaitu: policy level, organizational level, operational level. Dalam suatu negara demokratis policy level diperankan oleh lembaga yudikatif dan legislatif, sedang organizational level diperankan oleh lembaga eksekutif. Selanjutnya operational level dilaksanakan oleh satuan pelaksana seperti kedinasan, kelembagaan atau kementerian. Pada masing-masing level, kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk institutional arrangement atau peraturan perundangan yang disesuaikan dengan tingkat hierarkinya. Sementara pattern interaction adalah pola interaksi antara pelaksana kebijakan paling bawah (street level bureaucrat) dengan kelompok sasaran (target group) kebijakan yang menunjukkan pola pelaksanaan kebijakan yang menentukan dampak (outcome) dari kebijakan tersebut. Hasil suatu kebijakan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan akan ditinjau kembali (assesment) untuk menjadi umpan balik (feedback) bagi semua level kebijakan yang diharapkan terjadi sebuah perbaikan atau peningkatan kebijakan.



Gambar 1. Hirarky Kebijakan Model Bromley (1989)

Berangkat dari penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, maka dipandang perlu melakukan penelitian ini, dengan judul “Kebijakan Responsif Sebagai Instrumen Transformasi Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19”, studi terhadap pelayanan pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan Teknis Pengelola Pendapatan Daerah (UPT-PPD) Malang Selatan, Penelitian ini bersandar pada tiga konsep, dan inilah yang membedakan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (1) Juaningsih, Consuello, Tarmidzi, & NurIrfan (2020) berjudul Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia; (2) Lumbanraja (2020) berjudul Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui EGovernment Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi.

Tiga konsep yang dijadikan sandaran penelitian ini, meliputi: (1) memperhatikan dan merespon pemberlakuan protokol kesehatan dan perubahan tata kehidupan masyarakat di masa pandemi Covid-19; (2) merespon perkembangan teknologi; (3) memperhatikan hirarki kebijakan yang berlaku. Penelitian ini memfokuskan pada masalah: **"Bagaimanakah respon UPT-PPD Malang Selatan dalam rangka melakukan transformasi pelayanan publik di masa pandemi Covid-19?"**; untuk selanjutnya penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan program/kebijakan responsif-inovatif dalam rangka melakukan transformasi pelayanan publik di masa pandemi Covid-19; (2) mendeskripsikan faktor pendukung program/kebijakan responsif-inovatif yang diciptakan; (3) hasil yang dicapai atas implementasi program/kebijakan responsif-inovatif tersebut; (4) hal-hal apa yang diperlukan agar implementasi program/kebijakan responsif-inovatifnya dapat menjadi instrumen dalam melakukan transformasi pelayanan publik guna meningkatkan kepuasan masyarakat.

METODE

Penelitian merupakan penelitian deskriptif (Hidayat, 2010), yang menjelaskan program/kebijakan yang diciptakan oleh UPT-PPD Malang Selatan dalam merespon perubahan kebutuhan publik di masa pandemi Covid-19; dengan pendekatan kualitatif (Miles & Huberman, 1992) penelitian ini menjelaskan bagaimanakah respon UPT-PPD Malang Selatan dalam rangka melakukan transformasi pelayanan publik di masa pandemi Covid-19. Terdapat tiga metode pengumpulan data yang digunakan, meliputi: (1) wawancara, meliputi wawancara mendalam dengan seorang informan kunci, wawancara dengan dua orang petugas pelayanan, dan wawancara dengan 12 orang wajib pajak; (2) observasi dengan melihat secara langsung pelaksanaan inovasi pelayanan; (3) studi dokumen dengan mengkaji sejumlah dokumen yang dimiliki UPT-PPD Malang Selatan, khususnya dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Data hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para wajib pajak merupakan data yang peneliti jadikan sebagai bahan melakukan triangulasi.

Teknik analisis kualitatif model interaktif (Miles & Huberman, 1992), yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi; menjadi teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis program/kebijakan responsive-inovatif yang diciptakan oleh UPTPPD Malang Selatan dalam rangka melakukan transformasi pelayanan publik di masa pandemi Covid-19

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Pokok dan Fungsi UPT-PPD

Unit Pelayanan Teknis Pengelola Pendapatan Daerah (UPT-PPD) Malang Selatan ini merupakan salah satu UPT-PPD dari 35 UPT-PPD yang berada di bawah struktur kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Tugas pokok dan fungsi UPT-PPD ini diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Gubernur Jawa Timur Republik Indonesia, 2018).

UPT-PPD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, UPT-PPD mempunyai fungsi: (1) penyusunan perencanaan program dan kegiatan teknis UPT; (2) pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah; (3) pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Bersama Samsat; (4) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat; (5) pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan

Pendapatan Asli Daerah; (7) pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat; (8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan UPT; dan (9) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kontribusi Pendapatan Daerah Terhadap APBD Jawa Timur

UPT-PPD sebagai pelaksana pelayanan pembayaran pajak oleh masyarakat, memegang peran yang sangat penting dalam struktur kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Ini karena pendapatan daerah Adapun dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 yang sebelumnya Rp 33,519 triliun dan kemudian ditingkatkan menjadi sebesar Rp 37,985 triliun itu, yang Rp. 19,721 triliun masuk melalui pintu Badan Pendapatan Daerah, yang digawangi oleh 35 buah UPT-PPD se Jawa Timur. Ini berarti bahwa 51,91% dari APBD Provinsi Jawa Timur dikontribusi oleh pendapatan daerah yang masuk melalui pintu UPT-PPD (Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Data Sekunder, 2019).

Tabel 1. Penerimaan Pajak 2019 Provinsi Jawa Timur

No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	% berdasarkan target
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp. 6.350.000.000.000	Rp. 6.890.439.193.872	108,51%
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp. 3.750.000.000.000	Rp. 4.232.540.305.900	112,72%
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rp. 2.400.000.000.000	Rp. 2.374.099.329.438	99,75%
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	Rp. 3.862.000.000.000	Rp. 4.232.540.305.900	109,6%
5	Pajak Rokok	Rp. 2.190.000.000.000	Rp. 1.992.207.318.173	83,78%
	Jumlah	Rp. 18.552.000.000.000	Rp. 19.721.826.453.283	106,307%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Data Sekunder, 2019

Berdasarkan dokumen yang diserahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada DPRD melalui Rapat Paripurna DPRD, Rabu tanggal 19 Agustus 2020, terdapat koreksi anggaran. Dari total APBD 2020 sebesar Rp35,1 triliun, realisasi anggarannya ditargetkan hanya sebesar Rp33,14 triliun atau sekitar Rp1,9 triliun. Dari jumlah tersebut ditargetkan sebesar Rp12,3 triliun diperoleh dari pendapatan asli daerah (37,11%).

Permasalahan UPT-PPD di Masa Pandemi

Hasil wawancara dengan informan kunci (Kepala UPT-PPD) Malang Selatan menunjukkan bahwa pada masa pandemi Covid-19 pembayaran pajak melalui Pintu UPT-PPD Kabupaten Malang mengalami penurunan sekitar 305 dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2019. Hal ini dapat dipahami, mengingat di Jawa Timur diberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat serta diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam kurun waktu 2x14 hari; serta menyikapi peningkatan secara drastis jumlah pasien yang dinyatakan positif terpapar virus Corona-19 di Jawa Timur, termasuk di wilayah Kabupaten Malang, khususnya Malang Selatan.

Sekurang-kurangnya terdapat lima permasalahan yang menyebabkan turunnya penerimaan pajak sampai dengan triwulan kedua tahun 2020 yang dihadapi oleh UPT-PPD Malang Selatan di masa pandemi Covid-19, meliputi: (1) diberlakukannya work from home (WFH), yang membuat para pegawai tidak bekerja penuh; (2) keharusan untuk melaksanakan protokol kesehatan di tempat pelayanan publik (termasuk di UPT-PPD) membuat secara psikologis timbul rasa cemas dan mengalami keterbatasan cara berkomunikasi, baik yang dialami oleh pegawai (sebagai petugas pelayanan publik) maupun oleh publik (sebagai wajib pajak); (3) pada masa pandemi Covid-19 masyarakat secara umum (termasuk wajib pajak) mengalami penurunan penghasilan yang membuat secara ekonomi terjadi penurunan daya beli atau daya bayar.; (4) para wajib pajak yang berdomisili di wilayah terpencil dan/atau berjarak relatif jauh dari kantor UPT-PPD maupun dari unit-unit pos pelayanan pembayaran pajak, mengalami kesulitan untuk

meelakukan pembayaran pajak karena terkendala oleh rasa cemas atau takut untuk menggunakan jasa transportasi umum. (5) belum semua wajib pajak dapat meng-akes fasilitas pelayanan pembayaran pajak online yang disediakan oleh UPT-PPD.

Permasalahan tersebut, apapun alasannya, merepresentasikan kinerja UPT-PPD Malang Selatan sebagai agen pelayanan publik di bidang pelayanan pembayaran pajak. Dua fenomena yang perlu mendapatkan perhatian dalam hal ini adalah: (1) telah terjadi perubahan jenis, bentuk dan sifat kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang harus diberikan oleh UPT-PPD; (1) belum adanya regulasi yang mengatur tentang bentuk, jenis dan sifat pelayanan publik baru yang sesuai dengan perubahan kebutuhan publik.

Inovasi Pelayanan (Wujud Responsibilitas UP-PPD)

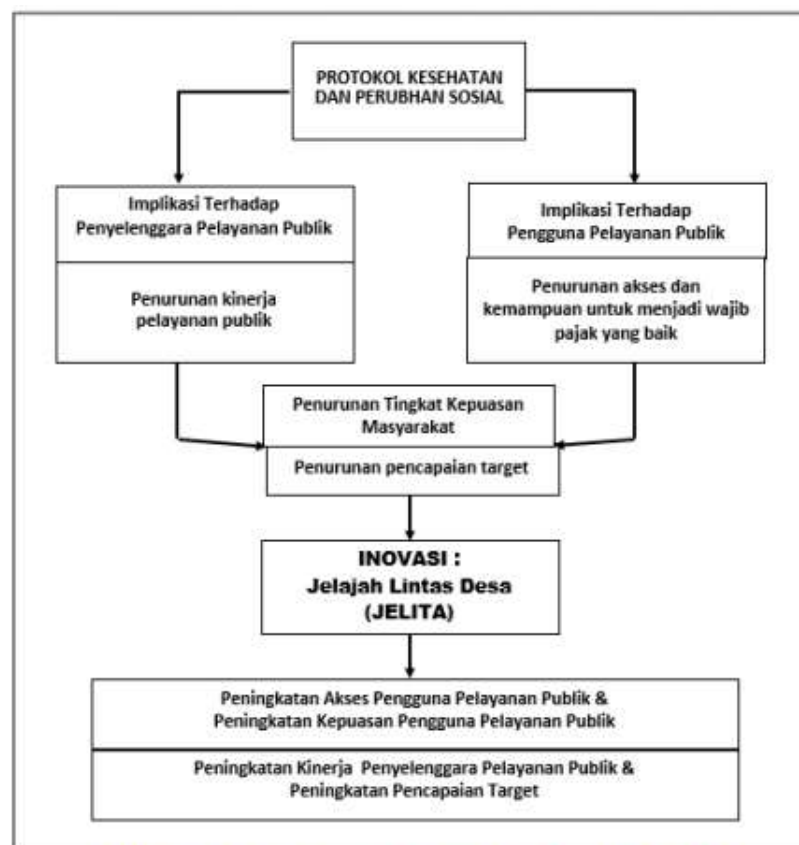
Program Jelajah Lintas Desa (JELITA) merupakan inovasi pelayanan pada UPT-PPD Malang Selatan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan perubahan kebutuhan publik di masa pandemi Covid-19. Permasalahan dimaksud, berawal dari meluasnya Covid-19, menyusul diberlakukannya protokol kesehatan, yang substansinya sebagai berikut:

1. Perkantoran dan perusahaan diwajibkan membatasi jarak pekerjaannya, termasuk meja kerja dan tempat duduk minimal 1 meter.
2. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area pekerja seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja.
3. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak.
4. Lokasi tempat kerja juga harus bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan berkala dengan pembersih dan disinfektan yang sesuai selama 4 jam sekali, terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan bersama, area dan fasilitas umum.
5. Pekerja dan perusahaan harus menjaga kualitas udara tempat kerja, menyediakan sarana cuci tangan, menyediakan penyanitasi tangan dengan kandungan alkohol minimal 70 persen di tempat-tempat yang diperlukan
6. Selalu jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan hand sanitizer atau menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Cara mencucinya pun harus sesuai dengan standar yang ada, yaitu meliputi bagian dalam, punggung, sela-sela, dan ujung-ujung jari.
7. Hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut yang menjadi jalan masuk bagi penularan virus.
8. Terapkan etika batuk dan bersin. Dengan cara tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Bisa juga menutup mulut dan hidung menggunakan kain tisu yang setelahnya harus langsung dibuang ke tempat sampah.
9. Pakai masker. Jika menggunakan masker medis, maka hanya bisa digunakan 1 kali dan harus segera diganti. Buang masker medis di tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan setelahnya. Bagi yang menggunakan masker kain, jangan lupa untuk rutin mencucinya.
10. Jaga kesehatan dengan konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup dan rajin berolahraga, agar imun tubuh tetap terjaga.
11. Isolasi mandiri di rumah bagi yang merasa tidak sehat, dan jangan memaksakan mendatangi tempat kerja, atau tempat umum lainnya.

Adapun wujud program Jelajah Lintas Desa (JELITA) ini, adalah: (1) petugas pelayanan mendatangi desa-desa, dengan prioritas pada desa yang terpencil atau yang jaraknya jauh dari kantor UPT-PPD; (2) sarana dan prasarana yang dibawa: 2 unit motor yang lengkap dengan vasilitas yang diperlukan, seperti : jaringan wifi, computer, printer dengan segala perangkat yang diperlukan; (3) ditugaskan 2 orang petugas pelayanan ke lokasi program JELITA. Konsep yang dikembangkan dalam program Jelita adalah: (1)

menjemput pelanggan atau mendekatkan pelayanan ke tempat domisili pelanggan/pengguna pelayanan; (2) menghindari terjadinya kerumunan (sesuai dengan protokol kesehatan); (3) menciptakan efisiensi bagi pelanggan baik efisiensi dari segi biaya transportasi, waktu perjalanan maupun tenaga; (4) menjalin hubungan informal silaturahmi antara petugas penyelenggara pelayanan dengan pelanggan sebagai pengguna pelayanan; (5) petugas yang terjun ke desa-desa dalam program JELITA ini juga melakukan komunikasi-informasi-edukasi kepada publik sedemikian rupa agar mereka termotivasi untuk dapat melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu; (6) petugas program JELITA juga melakukan komunikasi konsultatif dengan pihak pelanggan (wajib pajak), guna mendapatkan masukan dan saran untuk bahan pengambilan kebijakan penyempurnaan kualitas pelayanan publik bagi UPT-PPD di masa pandemi ini.

Gambar berikut ini melukiskan skema Inovasi Pelayanan Publik pada UPT=PPD Malang Selatan dengan nomenklatur program Jelajah Lintas Desa (JELITA).



Gambar 2. Bagan Inovasi Pelayanan Publik pada UPT-PPD Malang Selatan

Faktor Pendukung Program JELITA

Terdapat sejumlah faktor pendukung terhadap efektifitas program JELITA yang dirancang sebagai bentuk respon positif atas perubahan kebutuhan publik pengguna jasa pelayanan pembayaran pajak pada UPT-PPD, yaitu: (1) ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten; (2) tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan berupa motor trail dengan segala perangkat IT nya; (3) animo publik terhadap program ini relatif bagus, dan bahkan terjadi komunikasi yang konstruktif antara wajib pajak sebagai pengguna pelayanan dan para petugas sebagai perwakilan penyelenggara pelayanan.

Hasil yang Dicapai Melalui Program JELITA

Tujuan utama program JELITA adalah membantu memenuhi kebutuhan publik akan pelayanan pembayaran pajak yang telah mengalami perubahan, serta membantu

publik (terutama yang bertempat tinggal di daerah terpencil, pelosok, dan jauh dari lokasi UPT-PPD Malang Selatan) untuk mengatasi persoalan pembayaran pajak. Hasil lain yang dicapai adalah meningkatnya realisasi penerimaan pembayaran pajak UPT-PPD, terutama pada pajak kendaraan bermotor (PKB) meskipun berada pada masa pandemi Covid-19.

Hal-Hal Yang Diperlukan untuk Pengembangan Inovasi

Mengingat hasil dari program ini sangat positif, maka perlu didesiminasi ke wilayah desa lain secara massif supaya makin luas jangkauannya, tidak saja di wilayah kerja UPT-PPD Malang Selatan akan tetapi juga di wilayah UPT-PPD lain di Provinsi Jawa Timur. Untuk itulah diperlukan tambahan sumberdaya manusia, tambahan sarana prasarana berupa unit motor trail beserta perangkat IT lengkap. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya assessment untuk kemudian disusun suatu rekomendasi guna melahirkan kebijakan dan melakukan penataan kelembagaan (institutional arrangements) sebagaimana direkomendasikan oleh Bromley.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa inovasi yang berupa layanan Jelajah Lintas Desa (JELITA) yang memberikan layanan baru dengan cara mendekatkan unit pelayanan kepada pengguna layanan yang berada di desa-desa terpencil ternyata mampu menjawab perubahan kebutuhan akan jenis, bentuk dan sifat pelayanan pembayaran pajak yang diperlukan oleh masyarakat. Keberhasilan ini didukung oleh ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten dan sarana-prasarana yang memadai.

Hasil inovasi ini adalah peningkatan realisasi pembayaran pajak dan peningkatan kepuasan masyarakat. Pada masa mendatang diperlukan penataan kelembagaan melalui suatu regulasi sedemikian rupa agar inovasi ini implementasinya dapat diperluas ke banyak desa terpencil lainnya, dan untuk itu perlu diterbitkannya kebijakan sebagai panduan, baik pada tataran policy level maupun pada tataran operasional; dengan demikian inovasi pelayanan JELITA ini dapat menjadi entry point lahirnya kebijakan yang responsif, sebagai instrumen untuk melakukan transformasi pelayanan publik di masa pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (1979). Public Policy Making. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Andhika, J. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Retrieved from <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dampak-pandemi-covid-19-bagipenyelenggaraan-pelayanan-publik>
- Gubernur Jawa Timur Republik Indonesia. Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (2018).
- Haryati, E. (2020). Transformasi Tata Kelola Menuju Pemulihan Sektor Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19: Strategi Kabupaten Banyuwangi dalam Mengkolaborasi Potensi, Inovasi, dan Aksi. In Merdeka Berpikir - Catatan Harian Pandemi Covid-19 (pp. 121–127). Surabaya: Unitomo Press.
- Hidayat, A. A. A. (2010). Metode Penelitian Kesehatan Paradigma Kuantitatif. Surabaya: Health Books Publishing.
- Homecare24.id. (2020). Ini Protokol Kesehatan Selama New Normal Agar Terhindar Covid-19. Retrieved from <https://medium.com/@homecare24.blog/ini-protokol-kesehatan-selamanew-normal-agar-terhindar-covid-19-bb26df7911a8>
- Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). ptimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, 7(6), 495–508. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15325>

- Lumbanraja, A. D. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2).
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah (2020). Indonesia.
- Miles, M., & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif. (T. R. Rohidi, Trans.). Jakarta: UI Press.
- Mulyani, S. (2019). Kebijakan Responsif dan Adaptif Perlu Untuk Menyesuaikan Perubahan. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kebijakan-responsif-danadaptif-perlu-untuk-menyesuaikan-perubahan/>
- Pemerintah Republik Indonesia. Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (2020). Indonesia.
- Tachjan, H. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Truen RTH.

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

Herniyati, Irvan, Suryanto

Magister Ilmu Administrasi, Universitas Riau, Pekanbaru
Email: herniyati7818@grad.unri.ac.id, irvan1908@student.unri.ac.id,
suryanto1909@student.unri.ac.id

Abstrak

Penanganan Fakir Miskin oleh Kementerian Sosial dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin KUBE dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin. Implementasi program KUBE sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. KUBE di Kecamatan Bengkalis hingga saat ini berjumlah 83 unit, dari jumlah KUBE tersebut terdapat 64 KUBE yang masih aktif dan 19 KUBE yang sudah terhenti dan tidak berjalan lagi. Permasalahan yang terjadi saat ini antara lain: 1) belum terbangunnya jaringan lintas sektoral untuk pendampingan pemberdayaan KUBE pasca pembentukan. 2) belum optimalnya pembentukan KUBE dengan sasaran keluarga miskin. 3) belum adanya pembiayaan berkelanjutan bagi peningkatan usaha KUBE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bengkalis? dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi program pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bengkalis?. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif. Dengan pemilihan informan menggunakan prosedur *purposive sampling*.

Kata Kunci: Implementasi, Program Fakir Miskin, KUBE

PENDAHULUAN

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bengkalis tahun 2020 mencapai 67,12 jiwa per km². Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis termasuk kategori penduduk sangat jarang. Kabupaten Bengkalis juga merupakan salah satu daerah yang mempunyai persoalan sosial yaitu masalah kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa beban hidup penduduk miskin semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Bengkalis adalah efek inflasi, dimana garis kemiskinan terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis berupaya mensukseskan program dari pusat khususnya dari Kementerian Sosial yang merupakan salah satu Kementerian yang terlibat dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah membuat Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan mendekatkan mereka dari akses permodalan usaha.

Kementerian Sosial melaksanakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin KUBE yang diarahkan kepada upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah melalui 1) peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE yang sebagian besar merupakan masyarakat miskin secara bersama dalam kelompok; 2) peningkatan pendapatan; 3) pengembangan usaha dan 4) pemberdayaan masyarakat miskin. Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Riau melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis memberikan bantuan berupa dana rangsangan kepada KUBE untuk pengembangan UEP dan pendampingan agar keberadaan KUBE tetap hidup tanpa mengalami penurunan atau pembubaran. Sehingga tujuan diharapkan kesejahteraan sosial anggota KUBE dapat terwujud.

Program Kelompok Usaha Bersama mulai dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009 melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) yang dianggarkan melalui Dana APBN. Pada Tahun 2010 KUBE mendapatkan bantuan langsung pemberdayaan dalam wadah KUBE (Kelompok Usaha Bersama) oleh Dinas

Sosial Kabupaten Bengkalis. Di Kabupaten Bengkalis terdapat 216 unit KUBE yang masih aktif yang berada di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Bantan berjumlah 57 KUBE, Kecamatan Bukit Batu berjumlah 16 KUBE, Kecamatan Bandar Laksamana berjumlah 7 KUBE, Kecamatan Mandau berjumlah 8 KUBE, Kecamatan Bathin Solapan berjumlah 32 KUBE, Kecamatan Rupert dan Rupert Utara berjumlah 32 KUBE dan Kecamatan Bengkalis berjumlah 64 KUBE.

Dalam perjalanannya, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang terdapat di Kecamatan Bengkalis hingga saat ini berjumlah 83 unit dengan tahun berdirinya masing-masing dan jenis usaha yang berbeda-beda. Dari jumlah KUBE tersebut terdapat 64 KUBE yang masih aktif dan 19 KUBE yang sudah terhenti dan tidak berjalan lagi. Ketidakberhasilan KUBE tersebut tidak terlepas dari masalah internal KUBE itu sendiri, antara lain masalah keanggotaan kelompok, komitmen kelompok, tujuan kelompok, struktur organisasi kelompok, manajemen kelompok dan lain-lain. Memang terlihat adanya ketimpangan dalam pendekatan ini, dimana anggota masyarakat diupayakan untuk terhimpun dalam suatu wadah kelompok KUBE tetapi, kemampuan dan keterampilan anggota kelompok dalam hal manajerial kelompok masih terbatas, latar belakang pendidikan rendah, pengalaman dalam pengorganisasian kelompok terbatas, sekalipun mereka memiliki pengalaman individual yang lumayan. Tentu hal ini menjadi suatu problematik dalam kelompok tersebut.

Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sebagai pelaksana program mengalami kendala dengan terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan program KUBE seperti melakukan pembekalan dan bimbingan kepada anggota KUBE sebagai penerima bantuan, pelatihan untuk peningkatan kapasitas pendamping maupun anggaran untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dari observasi yang dilakukan di Kecamatan Bengkalis, dalam pelaksanaannya masih terdapat Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang sudah terhenti dan tidak berjalan lagi. Permasalahan yang terjadi saat ini antara lain: 1) belum terbangunnya jaringan lintas sektoral untuk pendampingan pemberdayaan KUBE *pasca* pembentukan. 2) belum optimalnya pembentukan KUBE dengan sasaran keluarga miskin. 3) belum adanya pembiayaan berkelanjutan bagi peningkatan usaha KUBE.

METODE

1. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan format desain deskriptif kualitatif. Format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Format deskriptif kualitatif studi kasus memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Penelitian ini bersifat mendalam dan menelusuri sasaran penelitian (Bungin, 2011).

Metode ini dianggap relevan dan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu memperoleh pemahaman yang sebenarnya mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bengkalis. Pendekatan kualitatif ini juga dapat mengungkap secara komprehensif proses kebijakan publik (dari tahap awal hingga tahap akhir) bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bengkalis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung di wilayah Kecamatan Bengkalis khususnya dan Kabupaten Bengkalis pada umumnya. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena merupakan daerah yang memiliki garis kemiskinan yang tinggi.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan yang akan diwawancarai sesuai dengan sasaran penelitian yaitu pejabat di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

khususnya Di Bidang Sosial dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan. Secara spesifik informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Plt. Kabid Pemberdayaan pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis
- 2) Kasi Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis
- 3) Staf Seksi Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis
- 4) Pendamping KUBE
- 5) Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penerima bantuan yaitu masyarakat fakir miskin yang menjadi anggota KUBE.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. adapun sumber data penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Adapun data primer dalam penelitian ini berupa wawancara terkait variabel penelitian. Data yang dimaksud adalah semua hal yang berkaitan dengan implementasi program pemberdayaan fakir miskin pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bengkalis.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan berhubungan dengan:

- a. Jenis-jenis Program Kerja KUBE
- b. Anggaran yang tersedia untuk KUBE
- c. Kondisi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program KUBE.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

6. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif Milles dan Hubberman. Analisis ini menggunakan logika deduktif verifikatif. Yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah logika induktif abstraktif. Suatu logika yang bertitik tolak dari "khusus ke umum". Konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar "kejadian" (*incidence*) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung.

KESIMPULAN

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang difokuskan lebih spesifik dan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil analisa selanjutnya merupakan jawaban dari persoalan penelitian yang telah ditetapkan.

Verifikasi dilakukan peneliti dengan menggunakan triangulasi data (teknik pengujian keabsahan data dilakukan dengan memeriksa kabsahan data yang diperoleh peneliti pada pihak-pihak lainnya yang dipercaya) untuk mendapatkan data yang falid dan mengecek kebenaran informasi yang didapat dilapangan.

Dengan demikian maka apabila ditemukan atau terdapat perbedaan keterangan antara informan yang memberikan informasi mengenai program pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bengkalis, maka peneliti akan kembali menanyakan perbedaan keterangan atau informasi tersebut kepada informan yang lainnya yang dianggap relevan guna memperoleh suatu kebenaran data.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Leo.(2020), *Dasar-dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*, Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Adhitya Andrebina Agung.

- Heriyanto, Meyzi, Adianto dan Hasim As'ari. (2019). *Program CSR di Indonesia*. Taman Karya: Pekanbaru.
- Pasolong, Harbani. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Rusli, Zaili. (2014). *Pemeriksaan Masyarakat Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rusli, Zaili. (2017). *Tata Kelola Pembangunan Kawasan*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Soetomo. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edit. (2013). *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sjoraida, D. F. (2015). *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat*. *Sosiohumaniora*.
<https://doi.org/10.24198/Sosiohumaniora.v17i3.8338>
- Subarsono, (2005). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, teori dan Proses*, Jakarta: Media Pressindo.
- Soetomo, (2018). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tahir, Arifin. (2020). *Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Widodo, Joko. (2018). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Kreatif

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PADA UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN (UKP) DI MASA PANDEMI COVID-19

Ita Lestari, Jevi Alen Miswanto, M. Mukhlis

Universitas Riau, Pekanbaru

Email: lestariita355@gmail.com, jevalenmiswanto10@gmail.com,
mukhlisriau89@gmail.com

Abstrak

Pemerintahan pada hakekatnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada masa Pandemi COVID-19 untuk memutus rantai penyebaran kegiatan masyarakat dan pemerintahan dibatasi termasuk pelayanan di PUSKESMAS Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang peneliti dapatkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi PUSKESMAS Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dalam Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) masih kurang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diukur melalui kualitas pelayanan yaitu, Keandalan (*reliability*), Ketanggapan (*responsiveness*), Keadilan (*assurance*), Daya Tanggap (*emphaty*), dan Berwujud (*tangible*). Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) pada masa Pandemi COVID-19 disebabkan oleh faktor psikologi, sikap, komunikasi, dan sumber daya manusia. Semua itu menjadi faktor yang cukup mendasar yang belum terlihat dengan baik, dan bahkan karena pengaruh faktor-faktor ini mengakibatkan layanan tidak tercapai.

Kata kunci: Pelayanan, TIK, Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)

PENDAHULUAN

Diera globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisien, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau disebut e-government dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Melalui *e-government* peningkatan pelayanan publik dapat terwujud. Menurut Dwiyanto (2011:181) bahwa birokrasi pemerintah dapat mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun manfaat *e-government*, yaitu pertama mengurangi biaya, alasannya karena melalui sistem *online* maka biaya administrasi dan sebagainya berkurang. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan pemerintah sudah dilakukan. Ketiga, meningkatkan pelayanan publik karena masyarakat akan lebih mudah mengakses (keterbukaan informasi dan partisipasi) pelayanan publik tanpa harus secara fisik datang ke kantor instansi pemerintah.

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pelayanan yang dilakukan pemerintah sering juga disebut sebagai pelayanan umum yaitu pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna

memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Dengan demikian yang dapat memberikan pelayanan umum kepada masyarakat luas bukan hanya instansi pemerintah-melainkan juga pihak swasta. Pelayanan umum yang dijalankan oleh instansi pemerintah bermotif sosial dan politik, yakni menjalankan tugas pokok serta mencari dukungan suara. Sedangkan pelayanan umum oleh pihak swasta bermotif ekonomi, yakni mencari keuntungan.

Peran Puskesmas perlu diperkuat dalam hal prevensi, deteksi dan respon sesuai dengan kewenangannya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Namun di sisi lain, Puskesmas juga memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal bagi masyarakat yang tidak boleh ditinggalkan selama masa pandemi ini berlangsung. Puskesmas harus mampu mengelola, memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien dalam memutus mata rantai penularan, baik di level individu, keluarga dan masyarakat.

Kejadian Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia saat ini telah berdampak pada berbagai sektor kesehatan maupun nonkesehatan. Masing-masing negara menyikapinya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka memutus mata rantai penularan dan mengurangi dampak yang terjadi. Kekuatan sistem kesehatan nasional kita pun saat ini diuji seiring dengan eskalasi kasus COVID-19 yang telah melanda seluruh provinsi di Indonesia. Fasilitas pelayanan kesehatan menjadi garda terdepan dalam menghadapi masalah kesehatan di masyarakat akibat COVID-19. Puskesmas yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan untuk menjangkau masyarakat di wilayah kerjanya semakin penting perannya untuk penanggulangan COVID-19.

Peran Puskesmas perlu diperkuat dalam hal prevensi, deteksi dan respon sesuai dengan kewenangannya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Namun di sisi lain, Puskesmas juga memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal bagi masyarakat yang tidak boleh ditinggalkan selama masa pandemi ini berlangsung. Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) merupakan suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat (*faster*), lebih baik (*better*) dan lebih murah (*cheaper*), maka dibutuhkan bantuan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Peran media internet merupakan entitas dari bentuk teknologi informasi yang memungkinkan pemerintah agar berinteraksi secara langsung dengan masyarakatnya tanpa terkendala ruang dan waktu. Masa Pandemi Covid-19 saat ini sangat penting khususnya Puskesmas sebagai *front line* dalam melakukan prevensi, deteksi dan respon di dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Hal ini merupakan bagian yang akan di lakukan bersama baik itu masyarakat dan tenaga medis agar dapat mengendalikan jumlah kasus. Puskesmas harus mampu mengelola, memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien dalam memutus mata rantai penularan, baik di level individu, keluarga dan masyarakat. tetap berjalan dengan baik.

Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) pada masa pandemi COVID-19, Puskesmas mengimplementasikan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Puskesmas menyampaikan informasi terkait pembatasan atau penundaan pelayanan UKP untuk mengurangi risiko penularan COVID-19. Informasi tersebut dapat disampaikan secara tertulis

menggunakan media cetak atau media komunikasi lainnya. Puskesmas juga dapat memanfaatkan teknologi informasi seperti pendaftaran daring sebagai bentuk pembatasan pelayanan.

Sebagai bentuk dari pemberian layanan dengan lebih cepat (*faster*), lebih baik (*better*) dan lebih murah (*cheaper*), maka dibutuhkan bantuan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Pemanfaatan teknologi informasi dalam *e-government* umumnya dipakai untuk mengolah data, mencakup proses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan demi kepentingan publik yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Peran media internet merupakan entitas dari bentuk teknologi informasi yang memungkinkan pemerintah agar berinteraksi secara langsung dengan masyarakatnya tanpa terkendala ruang dan waktu.

PUSKESMAS Kecamatan Logas Tanah Darat dalam memberikan pelayanan pada Masa Pandemi Covid-19 memanfaatkan teknologi informasi seperti pendaftaran dalam jaringan (daring) sebagai pembatas pelayanan untuk Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) melalui aplikasi Whatsapp. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu keterlambatan respon saat pendaftaran daring oleh petugas PUSKESMAS, masyarakat merasa kesulitan saat pendaftaran daring dalam pelayanan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) karena masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki handphone.

METODE

Guna memudahkan penulis dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Fokus dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penghambat pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di masa Pandemi COVID-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata 'Manfaat', yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal yang berguna baik di pergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.

Selain itu Dennis juga mengatakan ada dua hal yang mendorong munculnya suatu pemanfaatan, yaitu :

1. Adanya oposisi terhadap pandangan deterministik tentang efek media massa.
2. Sedangkan yang kedua yaitu adanya keinginan untuk lepas dari debat yang berkepanjangan tentang selera media massa.

Dan jika dikaitkan dengan masalah penelitian ini, maka pemanfaatan disini berarti menggunakan atau memakai suatu hal yang berguna yang dalam hal ini adalah menggunakan atau memakai teknologi sebagai media dalam menyampaikan informasi kepada publik. Dari pemanfaatan teknologi sebagai media dalam menyampaikan informasi kepada publik, diharapkan dapat memberikan hasil berupa pengetahuan tentang prosedur pelayanan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) melalui aplikasi Whatsapp.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.

TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung pengertian luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.

Menurut Hardiyansyah (2011) teknologi yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan publik adalah e-mail, WAN (Wide Area Network), internet, mobile computing (HP, laptop, PDA) dan berbagai teknologi lain yang berfungsi untuk menyebarkan informasi dan memberi pelayanan elektronik dalam 18 berbagai bentuk. Penerapan teknologi dalam pemerintahan sudah mulai ditemui dalam proses melayani masyarakat. Penggunaan teknologi membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik dengan baik. Waktu yang lama dalam memperoleh pelayanan dikarenakan lamanya proses karena masyarakat harus datang ke suatu dinas dan masih menggunakan cara manual bisa dipercepat dengan adanya jaringan internet dimana masyarakat bisa mengakses pelayanan melalui website. Sedangkan menurut Wibawa (2014) Teknologi digunakan untuk mengolah data, mendapatkan, menyusun, menyimpan, menganalisis data guna mendapatkan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Selanjutnya informasi ini dapat disebarkan secara cepat dan luas melalui teknologi komunikasi berupa telepon, SMS, televisi dan internet, e-mail, situs, portal, blog dan video stream.

Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

PUSKESMAS wajib berpartisipasi dalam penanggulangan bencana, wabah penyakit menular dan penyakit lain yang ditetapkan oleh tingkat nasional dan daerah serta dalam melaksanakan program prioritas pemerintah. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) merupakan suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

Tugas dan fungsi penanggung jawab UKP :

1. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan perorangan (UKP) termasuk di dalamnya pelayanan rawat jalan, rawat inap, kefarmasian dan laboratorium.
2. Menyusun Rencana Bisnis Anggaran pelayanan UKP.
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan UKP sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran.
4. Menyusun kebijakan operasional penyelenggaraan pelayanan UKP.
5. Menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, kefarmasian dan laboratorium, dapur gizi dan laundry.
6. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen pelayanan UKP.
7. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan UKP
8. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan UKP.
9. Menerima pendelegasian wewenang dari kepala puskesmas.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain bidangnya yang diberikan oleh Kepala Puskesmas

UKP meliputi setiap kegiatan yang dilakukan oleh PUSKESMAS untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta memulihkan kesehatan perorangan. UKP mencakup upaya-upaya promosi kesehatan perorangan, pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, pembatasan dan pemulihan kecacatan yang ditujukan terhadap perorangan. Pada Masa Pandemi Covid-19 pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di PUSKESMAS Kecamatan Logas Tanah Darat dimodifikasi untuk mencegah penularan Covid-19, antara lain dengan menerapkan triase/skrining terhadap setiap pengunjung yang datang, mengubah alur pelayanan, menyediakan ruang pemeriksaan khusus ISPA, mengubah posisi tempat duduk pasien, saat pelayanan (jarak

dengan petugas diperlebar), dan menggunakan sekat pembatas transparan antara petugas kesehatan dan pasien.

Menurut Zeithaml dkk, indikator mengukur kualitas pelayanan publik dilihat dari lima dimensi, yaitu sebagai berikut:

1. **Kehandalan (*reliability*)**. Pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat sebagaimana ketentuan pelayanan prima, di masa Pandemi COVID-19 demi memutuskan rantai penularan wabah virus tersebut untuk dapat memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kepentingan pelanggan/masyarakat. Tetapi, kenyataan sebagaimana hasil peneliti khususnya di pelayanan Upaya Kesehatan Perseorangan di PUSKESMAS Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau belum menunjukkan kehandalan dalam memanfaatkan teknologi sebagaimana yang diharapkan. Padahal, ketentuan dan aturan-aturan telah diketahui, tetapi dari hasil wawancara peneliti pemahaman pegawai yang melakukan pelayanan belum memahami dengan jelas peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur Upaya Pelayanan Perseorangan (UKP) di masa Pandemi COVID-19.
2. **Ketanggapan (*responsiveness*)**. Menunjukkan bahwa pegawai yang ada di PUSKESMAS Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tersebut tingkat ketanggapan masih kurang. Hal ini bila dianalisis bahwa setiap pegawai belum memahami benar tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di masa Pandemi COVID-19 untuk memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan.
3. **Keadilan (*assurance*)**. Kehadiran setiap pengunjung atau orang-orang yang berkunjung ke PUSKESMAS Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, belum menunjukkan keyakinan yang penuh untuk dilayani dengan baik. Karena hal ini terkait dengan kurangnya pengetahuan pegawai dan masyarakat tentang menggunakan teknologi. Sehingga itu, peneliti merasa bahwa untuk menciptakan keyakinan maka setiap pegawai perlu memahami kondisi pihak yang dilayani, karena hal ini akan memberikan kesan yang baik dan tentu akan menimbulkan kepercayaan publik atas pelayanan yang diberikan.
4. **Daya Tanggap (*emphaty*)**. Hasil interview menunjukkan bahwa kesan yang diterima oleh pengguna jasa layanan (masyarakat) merasa belum diperlakukan dengan sikap-sikap yang diinginkan oleh pengguna, dan menunjukkan bahwa pelayanan yang ada masih sifatnya biasa dan belum pada tahap memberikan kepuasan kepada pengguna jasa. Walaupun pelayanan dilakukan secara daring (dalam jaringan) melalui aplikasi Whatsapp masyarakat umumnya lebih memilih belum merasa nyaman dalam melakukan urusan-urusan pelayanan khususnya sikap empati yang ditunjukkan oleh pengguna jasa masih relatif kurang. Atas dasar tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa sikap empati bagi setiap pengguna jasa masih relatif kurang, karena sikap dan perilaku pelayan jasa belum menunjukkan sikap-sikap pelayanan yang profesional sesuai dengan tanggung jawab dan tuntutan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di masa Pandemi COVID-19.
5. **Berwujud (*tangible*)** Pelayanan yang diberikan oleh pegawai PUSKESMAS Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi belum berjalan dengan baik, artinya wujud keseriusan pemerintah untuk melakukan pelayanan kepada pengguna jasa layanan sudah baik, tetapi pegawai sendiri yang melakukan belum memahami benar fungsi tanggung jawab sebagai seorang pelayan.

Peneliti menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di PUSKESMAS Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, yaitu sebagai berikut :

1. **Psikologi pelayan**. Yang dimaksudkan faktor psikologi ini adalah secara umum mencakup semua hal, akan tetapi peneliti lebih menekankan pada faktor kepribadian seseorang. Artinya bahwa kepribadian yang memahami tentang

eksistensi diri sebagai pelayan belum dipahami benar oleh pelayan. Dimana tanggungjawab sebagai seorang pelayan tidak dilaksanakan dengan baik. Dalam konteks kasus penelitian ini, pegawai masih kurang memiliki kepribadian seperti yang dimaksudkan diatas, sehingga yang terjadi adalah ketidakpuasan pengguna jasa layanan terhadap kegiatan pelayanan yang ada.

2. **Sikap.** Sikap prinsipnya melihat hal yang mendasar pada setiap individu seperti etika. Etika itu menunjukkan bahwa perilaku seseorang dapat menunjukkan pekerjaannya. Dalam konteks ini, peneliti menjadikan sebuah problem utama bila melihat para pelayan yang ada di PUSKESMAS Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, karena pemahaman etika masih kurang, sehingga proses pelayanan yang terjadi hanya didasarkan pada prosedur dan petunjuk teknis, tetapi sikap dan perilaku belum ditunjukkan dengan baik, jelas kesan dan respon pengguna jasa kurang menerima dengan baik, sehingga itu terjadi pelayanan yang belum memberikan kepuasan.
3. **Komunikasi.** Baik psikologi, sikap maupun komunikasi memiliki peran penting dalam kegiatan pelayanan. Semua ini menjadi aspek penentu apakah pelayanan itu bisa memberikan kesan baik maupun buruk. Kemampuan berkomunikasi pelayan yang ada di PUSKESMAS Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau masih relatif kurang.
4. **Sumber Daya Manusia.** Peneliti menemukan bahwa masih kurangnya sumber daya manusia yang memadai di PUSKESMAS Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau sehingga untuk memanfaatkan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam bidang pelayanan belum terlaksana.

KESIMPULAN

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di masa Pandemi COVID-19 pada PUSKESMAS Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau belum terlaksana dengan baik. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) disebabkan faktor psikologi, sikap, komunikasi, dan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya. Airlangga University Press
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Devito, Joseph A. 2011. *Komunikasi Antar Manusia*. Tangerang. Publishing Group.
- Effendy, Onong Uchjana. 2005. *Ilmu Komunikasi*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media. Yogyakarta
- Lukman, Sampara. 1999. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. STIA LAN Press. Jakarta
- Sinambela, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Jakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Taufiqurokhman dan Satispi. 2018. *Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. UMJ Press. Jakarta
- Tjiptono, Fandy. 2008. *Service Management, Mewujudkan Layanan Prima*. Yogyakarta.

PERAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR DALAM PENANGGULANGAN WABAH *COVID-19*

Meiherayenti

Universitas Riau, Pekanbaru
Email: yenti.mamaulong@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam penanggulangan *Covid-19* dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam penanggulangan *Covid-19*. Adapun konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Menurut Kovner (dalam Trisnantoro 45:2005) dalam konteks *good governance* peran pemerintah di sektor kesehatan dengan indikator peran sebagai regulator, pemberian dana, dan pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam penanggulangan *Covid-19* sudah cukup baik ditinjau dari 3 indikator peran pemerintah dibidang kesehatan dalam konteks *good governance*, namun disamping itu masih terdapatnya faktor penghambat dalam penanggulangan *Covid-19* yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan atau 3M (Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan).

Kata kunci: Peran, Dinas Kesehatan, Covid-19

PENDAHULUAN

Pada tahu 2019 lalu dunia digemparkan dengan penyebaran wabah *Covid-19* (*Corona Virus Disease*) yang mana virus ini di temukan pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok. Dari kejadian tersebut menyebabkan hampir seluruh negara terpapar hingga menyebabkan banyaknya jumlah korban jiwa yang berjatuhan.

Hingga pada pertengahan tahun 2021 ini pandemi *Covid-19* masih belum usai, bahkan di beberapa negara wabah ini semakin melonjak dan membuat angka kematian semakin meningkat. Dari pantauan situs *Worldometers* tercatat sebanyak 180.331.914 orang diseluruh dunia telah terinfeksi virus *Covid-19* (24/6/2021).

Di Indonesia pelonjakan kasus virus *Covid-19* itu sendiri menempatkan dirinya berada di peringkat ke 4 terbanyak di Asia. Menurut data dari situs *covid19.go.id* pada tanggal 24 Juni 2021 terkonfirmasi bahwa terdapat 2.053.995 jiwa yang berstatus positif *Covid-19* dengan jumlah kematian sebanyak 55.949 jiwa. Tak terkecuali dengan provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi penyebaran wabah *Covid-19* terbesar di Indonesia dan bahkan dalam catatan data statistik pemerintahan Riau (*corona.riau.go.id*) pada tanggal 24 Juni 2021 tercatat sebanyak 68.759 orang yang telah terkonfirmasi positif. Hal ini meningkat sebanyak 295 orang dari hari sebelumnya dengan total kesembuhan sebanyak 63.958.

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari Tim Gugus Tugas *Covid-19* Kampar juga menunjukkan mengenai perkembangan kasus konfirmasi positif *Covid-19*, bahwa Kabupaten Kampar tercatat menduduki posisi kedua tertinggi setelah kota Pekanbaru yaitu dengan jumlah kasus kumulatif sebanyak 4.834 orang yang terkonfirmasi. Hal ini dikarenakan letak geografis kabupaten Kampar yang berbatasan langsung dengan kota Pekanbaru dibagian utara dan juga sebelah barat juga berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Barat. Sehingga secara tidak langsung kabupaten Kampar juga menjadi jalur perlintasan antar provinsi yang dapat menjadi salah satu faktor pemicu penyebaran kasus *Covid-19* dikarenakan jumlah populasi manusia yang cukup banyak yang melintasi jalur ini tanpa adanya pemeriksaan yang intensif terkait warga yang keluar masuk dari kabupaten Kampar ini.

Oleh sebab itu, dikarenakan semakin melonjaknya pertumbuhan kasus *Covid-19* di kabupaten Kampar ini, maka diperlukan sesosok pelopor dan penggerak yang dapat menjadi sarana informasi, edukasi, dan resolusi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar merupakan salah satu sosok yang harus menjadi elemen penting dalam penanggulangan kasus *Covid-19* ini, di karenakan Dinas Kesehatan adalah salah satu wadah dari instansi pemerintahan yang menyediakan kebutuhan informasi dan pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat.

Dalam hal praktisnya Dinas Kesehatan merupakan suatu institusi yang bergerak dalam hal pelayanan, pengawasan, dan penanggulangan dibidang kesehatan yang mana tugas, kewajiban, fungsi, kinerja, serta secara tidak langsung bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat daerah tersebut.

Berdasarkan beberapa latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Dalam Penanggulangan *Covid-19*".

METODE

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Raco, 2010) metode kualitatif memiliki beberapa sifat khasnya, yaitu penekanan pada lingkungan yang alamiah (*naturalistic setting*), induktif (*inductive*), fleksibel (*flexible*), pengalaman langsung (*direct experience*), kedalaman (*indepth*), proses, menangkap arti (*Verstehen*), keseluruhan (*wholeness*), partisipasi aktif dari partisipan dan penafsiran (*interpretation*). Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif, dimana data-data yang didapatkan berupa peristiwa atau gejala yang dikumpulkan dalam bentuk foto, dokumen, atau lapangan pada saat penelitian (Sugioyono, 2016:11).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Dalam Penanggulangan *Covid-19*

1) Regulator

Berikut beberapa kebijakan yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam penanggulangan *Covid-19* di Kabupaten Kampar:

a. Menghimbau Masyarakat Untuk Tetap Menjalankan Protokol Kesehatan

Dalam hal ini Dinas Kesehatan juga berperan aktif dalam menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Adapun protokol kesehatan yang harus dijalankan yaitu dikenal dengan program 3M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, dan menjaga jarak).

Dalam menghimbau masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan, Dinas Kesehatan melakukan beberapa inovasi terkait penginformasian melalui media sosial, media cetak, dan media elektronik. Adapun inovasi tersebut seperti pembuatan video kreatif yang dapat menarik dan mengajak masyarakat untuk melaksanakan 3 M tersebut.

Selain hal tersebut, Dinas Kesehatan juga giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti bekerja sama dengan puskesmas yang ada di kecamatan untuk melaksanakan sosialisasi keliling kampung dengan mobil menggunakan pengeras suara. Secara tidak langsung hal ini dapat menghindari kerumunan dan juga sekaligus dapat menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat. Agar informasi yang diberikan tidak hilang begitu saja, Dinas Kesehatan juga menghimbau masyarakat melalui baliho atau spanduk yang di letakkan di tempat yang strategis, sehingga dapat dibaca oleh seluruh masyarakat.

b. Membuat Posko Pemantauan dan Pengawasan *Covid-19*

Penyebaran *Covid-19* dapat dikatakan relatif cepat dan menuntut semua pihak untuk mengupayakan dalam rangka menghentikan penyebaran wabah tersebut.

Dalam mewujudkan hal tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk membuat posko pemantauan dan pengawasan *Covid-19*. Adapun pendirian beberapa posko tersebut hampir terdapat di seluruh

kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, berikut beberapa posko yang telah dibuat:

1. Posko Batu Bersurat
2. Posko Kuok
3. Posko Bangkinang Kota
4. Posko Bangkinang
5. Posko Tapung
6. Posko Tapung Hulu
7. Posko Tapung Hilir
8. Posko Siak Hulu
9. Posko Kampar
10. Posko Kampar Timur
11. Posko Kampar Kiri Hilir
12. Posko Kampar Kiri

Dari 12 titik posko diatas merupakan gerbang pertama yang dapat dijadikan oleh masyarakat sebagai sarana informasi dan pengaduan terkait kasus *Covid-19*. Selain letak dari posko yang cukup strategis yang diletakkan di wilayah perbatasan antar kecamatan dan provinsi, posko tersebut juga berfungsi untuk mendata penduduk luar yang datang ke wilayah tersebut untuk di isolasi baik secara mandiri maupun di tempat isolasi yang telah disediakan selama 14 hari.

2. Pemberian Dana

Wabah yang ditimbulkan *Covid-19* ini mengharuskan setiap lapisan masyarakat baik pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk saling bekerjasama dalam menanggulangi penyebaran virus tersebut. Tentunya akibat yang ditimbulkan oleh wabah ini salah satunya yaitu meningkatnya jumlah anggaran yang dibutuhkan, terutama di bidang kesehatan.

Menurut Sekda Kabupaten Kampar memaparkan mengenai total kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk penanganan *Covid-19* dapat menghabiskan anggaran sebanyak Rp. 72 miliar. Dalam hal ini dirincikan bahwa Rp. 19 miliar dari Dinas Kesehatan yang berguna untuk pembelian vitamin, alat-alat kesehatan, penyemprotan disinfektan, dan kebutuhan lainnya pada bidang kesehatan. (kominfosandi. kamparkab.go.id, 2020)

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan anggaran dalam menangani wabah ini memerlukan anggaran yang cukup banyak, dan dapat dilihat juga bahwa peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar juga telah berpartisipasi aktif dalam mengucurkan dana yang tidak sedikit terkait penanganan *Covid-19* ini.

3. Pelaksana

Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar berperan sebagai pelaksana dimana kegiatan atau upaya yang dilakukan ialah terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana terkait fasilitas kesehatan di Kabupaten Kampar. Adapun fasilitas kesehatan tersebut dapat berupa rumah sakit, puskesmas, dan lembaga kesehatan lainnya yang dapat dijadikan sebagai rujukan masyarakat setempat terkait permasalahan kesehatan yang dialami terutama masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh *Covid-19*. Berikut upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam penyediaan sarana dan prasarana:

a. Menyediakan Tempat Isolasi Bagi Warga yang Terkonfirmasi

Dalam rangka penanggulangan *Covid-19*, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar merupakan satu-satunya institusi yang memiliki ruang isolasi khusus untuk pasien yang terkonfirmasi *Covid-19*. Pada tahun 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

juga dijadikan sebagai dinas percontohan oleh institusi di daerah lainnya dalam hal penanganan dan penanggulangan virus *Covid-19* ini.

Penyediaan ruang isolasi ini bertujuan untuk menampung warga yang sudah terkonfirmasi untuk dirawat dan diobati oleh tenaga medis setempat dan juga untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus ini di kalangan masyarakat. Adapun pasien yang dirawat di tempat ini merupakan golongan pasien yang terkonfirmasi gejala ringan dan OTG (Orang Tanpa Gejala), dalam masa perawatan ditempat ini semua pasien akan mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis, sedangkan jika ditemukan kondisi pasien yang memiliki gejala yang cukup berat maka akan di rujuk ke ruang rawatan pinere Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, Berikut beberapa tempat isolasi pasien yang terkonfirmasi:

1. Isolasi Stanum
2. Isolasi PMI
3. Isolasi Tapung
4. Isolasi Batu Bersurat
5. Isolasi Kampar Kiri Hilir
6. Isolasi Kota Garo

b. Mensiagakan Puskesmas Sebagai Tempat Vaksinasi

Menurut data yang didapat dari situs Kominfo Kabupaten Kampar (30 Mei 2021), bahwa untuk menghindari laju penyebaran wabah *Covid-19* ini maka perlu diadakannya vaksinasi masyarakat setempat pada 31 puskesmas yang telah disediakan, dan setiap harinya akan divaksin sekitar 100 orang, sehingga dari total yang ada maka jumlah masyarakat yang akan di vaksin perharinya berjumlah 3.100 orang.

Pengadaan vaksin ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kekebalan tubuh pada manusia sehingga penyebaran virus ini dapat di entas kan nantinya.

2. Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Covid-19

Adapun faktor penghambat Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam penanggulangan *Covid-19* adalah sebagai berikut:

Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mematuhi 3 M

Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar secara giat telah mensosialisasikan mengenai konsep 3M (Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Memakai Masker) kepada masyarakat untuk mematuhi program tersebut. Namun kondisi dilapangan masih terdapat masyarakat yang acuh tak acuh akan hal tersebut, tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa virus ini tidak benar-benar ada, hal ini disebabkan karena pola pikir masyarakat awam yang masih belum terbuka terkait kasus pandemi ini.

Sehingga hal ini menjadi penghambat bagi pihak terkait termasuk Dinas Kesehatan dalam menanggulangi virus *Covid-19* dikarenakan kesadaran masyarakat yang minim akan dampak yang ditimbulkan jika tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

Pentingnya kesadaran masyarakat akan menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker merupakan suatu pondasi awal untuk memberantas atau mengurangi peredaran wabah *Covid-19* ini di Kabupaten Kampar khususnya, dan umumnya di Indonesia.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan pemaparan dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam penanggulangan *Covid-19* sudah cukup baik jika ditinjau dari indikator teori yang digunakan pada penelitian ini, yaitu menggunakan teori Kovner yang mana dalam indikator tersebut lebih menekankan pada regulator, pemberian dana, dan sebagai pelaksana.

2. Adapun yang menjadi faktor penghambat pada penelitian ini yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi 3M (Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, dan Memakai Masker).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kampar dan jajarannya, Bapak/Ibu dosen Pasca Sarjana FISIP UNRI, dan semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan paper ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhlisin, Z, Anhar, D, Febriyanita, F, Peranan Dinas Kesehatan Dalam Menanggulangi Penularan Penyebaran Cepat Covid-19 Di Kota Banjarmasin, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik FISIP UNISKA*, 2020
- Rachmadi, T. (2015). Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus -Acquired Immuno Deficiency Syndrome (Hiv-Aids) Sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Di Kabupaten Kebumen). 2015. Vol. 1 No. 1 Edisi Maret 2015
- Raco, J R (2010) Metode Penelitian Kualitatif Grasindo
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Administrasi, ALFABETA, cv. Bandung
- Trisanto, Antonius, (2020), Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Wabah Difteri Di Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2020, 8 (1): 205-218
- <https://covid19.go.id>, diakses pada 24 Juni 2021
- <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/2020/04/03/sekda-kampar-teleconfren-bersama-sekda-provinsi-riau-terkait-pergeseran-anggaran-dalam-rangka-penanganan-covid-19>
- <https://www.worldometers.info/coronavirus>, diakses pada 24 Juni 2021

PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PENYEDIAAN LOGISTIK DI PUSKESMAS KOTA PEKANBARU

Rina Gusti Ayu, Jon Kenedi, Syafrisar Masri Limart

Universitas Riau, Pekanbaru

Email: rina.gusti7816@grad.unri.ac.id, sipengantarsurat@gmail.com
masri.limart@gmail.com

Abstrak

Kesehatan sangat berperan penting dalam upaya pembangunan sebuah negara, berhasilnya pembangunan kesehatan menjadi acuan yang sangat berguna dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Berhasilnya pembangunan dalam hal pelayanan kesehatan harus diiringi dengan sarana prasarana pendukung lainnya yang kompatibel. Permasalahan yang terjadi pada Puskesmas Kota Pekanbaru yaitu masih kekurangan dari segi bahan logistik berupa obat-obatan dan juga bahan medis habis pakai. Dengan terjadinya hal tersebut menjadikan masyarakat banyak yang mengeluh karena ingin mendapatkan pelayanan yang layak namun adanya keterbatasan logistik menjadikan pelayanan tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan dalam rangka menyediakan logistik bagi puskesmas di Kota Pekanbaru. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif guna memperoleh hasil yang akurat sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Dengan menggunakan lembaga puskesmas penelitian ini menarik sebuah simpulan bahwa infrastruktur seperti gedung, alat tulis, dan kendaraan dinas sudah membaik, namun apabila ditinjau dari segi fasilitas masih belum maksimal dikarenakan sering terjadinya kehabisan bahan logistik seperti obat-obatan dan bahan medis habis pakai. Terjadinya hal tersebut dipengaruhi oleh lambatnya pembayaran dana dan juga seringnya terjadi keterlambatan pengiriman material logistik kesehatan yang dilakukan pemerintah melalui instansi yang bergerak di bidang kesehatan yaitu Dinas Kesehatan, yang mana harus berupaya meningkatkan pelayanan kepada warga sipil dalam hal pengadaan logistik pelayanan kesehatan supaya sistem layanan kesehatan yang ada menjadi handal dan berkualitas tinggi dalam melayani masyarakat.

Kata Kunci: peran, Puskesmas, logistik

PENDAHULUAN

Upaya meningkatkan layanan kesehatan menjadi bagian penting dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu SDM untuk membuat sebuah kemajuan yang dikembangkan di bidang kesehatan secara menyeluruh. Upaya yang dilakukan oleh struktur dan organisasi haruslah optimal serta efisien, Puskesmas yang menjadi unit pelaksana Dinas Kesehatan memenuhi kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan tingkat dasar di wilayahnya masing-masing dalam hal layanan kesehatan sesuai dengan kapasitasnya yakni sebagai unit yang menitikberatkan kepada layanan kesehatan, penguatan keluarga dan masyarakat, dan memiliki peran yang esensial, sehingga wajib memberikan sebuah layanan kesehatan yang berkualitas dalam upaya menangani kebutuhan masyarakat dan diperolehnya kualitas pelayanan yang baik.

Fungsi utama Puskesmas adalah membina kesehatan wilayah dalam arti luas yaitu menyehatkan wilayah kerjanya dan menyehatkan penduduk dalam wilayah tersebut. Untuk melaksanakan fungsi utama tersebut, Puskesmas melaksanakan tiga sub-fungsi sebagai berikut:

1. Mengobati penduduk yang sakit secara perorangan yang disebut Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
2. Mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan orang sakit yang disebut Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Melaksanakan fungsi manajemen untuk mendukung butir (1) dan (2).

Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 tahun 2014 terkait pusat kesehatan masyarakat menyatakan "bahwa masyarakat salah

satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional khususnya subsistem upaya kesehatan". Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "dinas kesehatan kabupaten/kota adalah satuan kerja pemerintahan kabupaten/kota yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota". Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe No 45 tahun 2014 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas kesehatan pasal 2 menyatakan bahwa dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Dinas Kesehatan yang menjadi pelaksana urusan pemerintah daerah selaras dengan asas otonomi dan juga kewajiban pembantuan dalam bidang kesehatan di lingkungan daerah atau kabupaten kota harus mengerjakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah serta pelayanan umum pada lingkup medis atau kesehatan di ruang lingkup kabupaten kota sebagai pelaksanaan dan pembinaan kerja dalam bidang layanan, usaha kesehatan masyarakat, serta sumber daya kesehatan lingkup kabupaten kota juga menjadi pelaksana fungsi yaitu dalam hal bidang kesehatan yang diberikan oleh Walikota dengan tugas pokok serta fungsinya sehingga Dinas kesehatan juga mampu menjadi andalan Puskesmas dalam hal penyediaan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kebutuhan logistik dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh setiap puskesmas yang berada pada setiap wilayah agar terwujudnya pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan yang kompatibel dan maksimal dan dapat menjangkau segala lapisan masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat pasal 9 ayat (4) menyatakan bahwa "Pendirian puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium" salah satu komponen penting di sebuah puskesmas dan juga pusat kesehatan masyarakat lainnya adalah ketersediaan alat kesehatan dan fasilitas penunjang yang memadai dan profesional. Inilah yang nantinya akan mensukseskan kegiatan pelayanan kesehatan dan juga kesehatan masyarakat di lingkungannya.

Berkaca pada apa yang terjadi pada Puskesmas yang ada di kota Pekanbaru saat ini tentang kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas menjadi sebuah tolak ukur berhasil tidaknya sebuah pelayanan kesehatan yang ada pada Puskesmas tersebut hal ini terjadi disebabkan oleh minimnya atau kurang memadainya logistik kesehatan berupa obat-obatan, bahan habis pakai, dan kurangnya sistem gas medik. Masyarakat yang berkeinginan untuk memperoleh layanan yang layak namun masih terdapat beberapa yang merasa belum puas terhadap layanan yang ada disebabkan terbatasnya logistik kesehatan yang ada di puskesmas, Puskesmas dengan fasilitas yang kurang memadai seperti ini tidak mampu berbuat banyak dikarenakan seharusnya logistik harus selalu ada dan tersedia, dan hal tersebut merupakan faktor utama bagi layanan kesehatan masyarakat. Disebabkan hal tersebut tentunya berdampak kepada masyarakat untuk lebih memilih pergi ke apotek guna memperoleh obat dan mendapatkan pelayanan yang cepat dibandingkan di puskesmas. Puskesmas sebagai Garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat diharapkan mampu menjadi pengganti rumah sakit serta klinik kesehatan yang tentunya memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat, namun yang terjadi kebutuhan akan ketersediaan logistik di puskesmas Kota Pekanbaru masih belum memadai sehingga tidak akan ada yang dapat dilakukan oleh Puskesmas terhadap pasien dengan kasus yang harusnya mendapat penanganan pertama di puskesmas terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit umum daerah guna memperoleh penanganan yang lebih maksimal dan intensif.

Instansi pemerintah yang bergerak pada bidang kesehatan khususnya Dinas Kesehatan harus tanggap dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dengan lebih memaksimalkan layanan kesehatan kepada masyarakat yang ada di kota Pekanbaru

khususnya dalam memenuhi ketersediaan logistik dan peralatan kesehatan, dengan mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana fisik sebagai penunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara profesional dan memperhatikan proses tahapan perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyaluran dan penggunaan. Penggunaan dalam hal pengadaan logistik kesehatan bagi sipil.

Adapun tahapan penyaluran logistik yaitu dengan cara Puskesmas menyampaikan rencana kebutuhan obat dan rencana alat kesehatan bahan medis habis pakai kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota lalu Dinas Kesehatan lewat instalasi Farmasi Dinas Kesehatan melakukan verifikasi dan melakukan proses pembelian obat atau alat kesehatan kepada perusahaan besar farmasi (PBF) lewat mekanisme yang berlaku. Apabila obat-obatan tersebut sudah berada di gudang maka Puskesmas akan membuat surat perintah yang berisikan rencana kebutuhan obat yang diperlukan dan Puskesmas akan melakukan pembayaran belanja obat-obatan serta mengambil obat tersebut di gudang instalasi farmasi. Dalam hal ini yang menjadi faktor penghambat yaitu dalam hal disalurkanannya obat-obatan masih terjadi keterlambatan pengiriman dari gudang Farmasi ke dinas kesehatan hal ini membuat ketersediaan logistik yang ada di Puskesmas kurang mencukupi. Dinas Kesehatan harus selalu berkoordinasi dengan puskesmas supaya dapat menciptakan penyaluran kesehatan dan pelayanan yang baik dan optimal terhadap masyarakat, disebabkan tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan menjadikan pemerintah semakin perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ada. Pemerintah harus mampu mengatasi permasalahan kesehatan di berbagai lini sehingga pemerintah yakni selaku Dinas Kesehatan mampu menangani segala hambatan yang terjadi dalam hal penanganan layanan kesehatan yang ada di puskesmas dan menjadikan Puskesmas sebagai layanan kesehatan yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan menciptakan instansi yang handal dan bermutu dalam melayani pasien pasiennya.

METODE

Penelitian ini berangkat dari sebuah rumusan masalah dan diselaraskan terhadap tujuan apa yang ingin diperoleh, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif pada dasarnya digunakan oleh peneliti dalam hal pengamatan dan penelitian sosial. Penelitian juga berfokus untuk mengetahui tentang bagaimana peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam hal penyediaan logistik kesehatan pada obat-obatan, bahan habis pakai, dan sistem gas medik di Puskesmas Kota Pekanbaru. Fokus penelitian yang digunakan adalah teori Mustikasari 2007 (103) dengan melihat dari proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyaluran, dan penggunaan.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat serta absah, dibutuhkan berbagai ragam informasi yang penting yakni melalui beberapa penelitian terdahulu serta jurnal yang dikumpulkan dari berbagai macam situs website yang ada di internet sehingga dapat ditemukan beberapa keterangan yang berkaitan dengan peran Dinas Kesehatan dalam pengadaan logistik di Puskesmas Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa hal yang menjadi prioritas pemerintah daerah Kota Pekanbaru yakni berupa pembangunan pada bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pada bidang kesehatan instansi pemerintah yang berwenang dalam layanan kesehatan yaitu Dinas Kesehatan, instansi inilah yang bertanggung jawab dalam hal pelaksana urusan pemerintahan dalam urusan bidang kesehatan, lalu Puskesmas yang menjadi unit pelaksana Teknis Daerah. Puskesmas merupakan ujung tombak utama yang bergerak melayani masyarakat dalam bidang kesehatan sehingga upaya pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan yang baik dan optimal telah menjadikan Puskesmas sebagai garda terdepan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki

kesehatan yang baik dan memperoleh pelayanan yang maksimal. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan peneliti menemukan beberapa peran Dinas Kesehatan dalam hal penyediaan logistik di Puskesmas Kota Pekanbaru, dari hasil observasi dan studi pustaka berikut hasil penelitian yang peneliti dapatkan :

1. Tahapan perencanaan dan penganggaran

Perencanaan merupakan sebuah upaya untuk merencanakan pemenuhan suatu kebutuhan yang dalam proses pelaksanaannya semua calon pemakai dan kemudian diajukan berdasarkan aturan yang berlaku di masing-masing organisasi atau instansi. Perencanaan pengadaan logistik kesehatan di kota Pekanbaru dapat dilihat dari :

a. Penyusunan program kerja puskesmas

Dari hasil studi pustaka yang peneliti lakukan bahwa dalam hal perencanaan penyusunan program kerja di Puskesmas bahwa pada awal tahun Puskesmas mengadakan sebuah perencanaan dan penyusunan program kerja dalam hal melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan pada akhir tahunnya Puskesmas melakukan evaluasi tentang bagaimana kinerja Puskesmas terhadap capaian program yang telah terlaksana ataupun belum terlaksana atau sementara sedang dilaksanakan, serta juga melihat beberapa permasalahan yang terjadi selama proses pelaksanaan program ataupun program yang sedang berjalan, salah satunya yaitu tentang masalah logistik kesehatan.

Karena tidak tercapainya logistik kesehatan yang mendukung hal ini menimbulkan sebuah permasalahan sehingga tidak terlaksana dan berjalannya program dengan baik. Seharusnya dalam hal penyusunan program harus dijabarkan dan disesuaikan dengan baik, dapat dilihat juga dari laporan yang dilakukan pihak Puskesmas tidak sistematis menguraikan terhadap obat yang digunakan secara terperinci, serta potensi kebutuhan obat yang diinginkan masyarakat yang membuat proses penyusunan program ini harus dilaksanakan secara tersusun dengan meninjau tahapan penyusunan yang diselaraskan dengan waktu yang diberikan, kebutuhan dan anggaran yang dibutuhkan harus sesuai dalam keputusan Menteri Permenkes No 82 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan alokasi khusus serta sarana dan prasarana penunjang untuk bidang sarpras kesehatan tahun anggaran 2016 pada pasal 3 ayat 2 huruf d tentang penyajian alat kesehatan di puskesmas atau logistik penggunaannya sesuai dengan pengklasifikasian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui APBN. Lalu pada pasal 7 ayat 1 Permenkes nomor 85 tahun 2015 menyatakan bahwa dalam proses penyaluran dana kesehatan harus dilakukan pelaporan secara berjenjang dengan skala setiap 3 bulan, dan hal ini belum mampu dilaksanakan oleh Puskesmas Kota Pekanbaru dengan baik.

b. Penyusunan proposal serta mengajukan belanja logistik kesehatan

Peneliti mendapatkan beberapa kebijakan yang dibuat oleh Puskesmas diantaranya dalam hal melakukan rapat perencanaan Puskesmas dan pembentukan tim keuangan serta tim perencanaan. Fungsi dari tim keuangan yaitu sebagai pengatur pagu anggaran keuangan yang nantinya dipakai untuk berbelanja kebutuhan logistik, dan fungsi dari tim perencanaan yaitu sebagai penyusun proposal terkait pengajuan bahan logistik apa saja yang diperlukan oleh Puskesmas. Namun pengajuan proposal belanja logistik kesehatan yang diajukan oleh Puskesmas tidak dapat disetujui secara langsung oleh instansi terkait atau Dinas Kesehatan, tetapi dalam proses peninjauan nya akan dilakukan berapa revisi sehingga, akan dapat diajukan kembali untuk disesuaikan terhadap keuangan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan, hal ini tentunya membuat beberapa bahan logistik yang diajukan oleh Puskesmas akan dikurangi sesuai dengan kesanggupan Dinas Kesehatan.

Berdasarkan data di atas menunjukkan sebuah permasalahan yaitu kekurangan logistik yang terdapat di Puskesmas juga dipengaruhi oleh kesanggupan dari Dinas Kesehatan dalam memenuhi logistik yang dibutuhkan oleh setiap Puskesmas sehingga logistik yang

seharusnya dibutuhkan Puskesmas seringkali tidak terpenuhi dengan sempurna, dengan hal tersebut maka pentingnya transparansi jumlah alokasi dana yang ada berdasarkan APBD maupun APBN karena sejauh ini transparansi pembelian kebutuhan anggaran di bidang kesehatan belum tersaji secara sistematis.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan bahwa dalam hal pengajuan proposal yang dilakukan oleh Puskesmas yang diteruskan kepada Dinas Kesehatan kemudian Dinas Kesehatan akan melanjutkan kepada pemerintah terkait untuk menyetujui proposal prioritas kebutuhan logistik sesuai dengan anggaran yang telah disusun oleh Puskesmas dan dokumen perencanaan (RKA), peneliti masih menemukan beberapa permasalahan yaitu diantaranya bahwa proposal pengadaan logistik kesehatan yang diajukan oleh Puskesmas masih belum saling mengkonfirmasi antara berapa ketersediaan anggaran dan kebutuhan yang harus dilengkapi oleh pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengalokasian berapa nilai anggaran yang ada lalu kurangnya evaluasi dan laporan pertanggungjawaban yang belum disajikan secara sistematis tentang penggunaan bahan logistik di Puskesmas Kota Pekanbaru hal ini berdampak kepada pengadaan logistik dan menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Kesehatan dan pemerintah terkait untuk menyetujui proposal yang telah diajukan dan akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk merevisi kembali proposal yang diajukan supaya sesuai terhadap kebutuhan anggaran yang ada.

Berdasarkan data yang telah disampaikan yakni Puskesmas Kota Pekanbaru pada umumnya membuat sebuah perencanaan pengadaan bahan logistik kesehatan guna menunjang kualitas pelayanan Puskesmas supaya pelayanan sesuai dengan prosedur dan untuk menunjang standar dalam pelayanan yang ada dan lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat tapi sayangnya seringkali belum mampu melampirkan laporan pertanggungjawaban penggunaan logistik dengan baik.

2. Tahapan pengadaan dan penyaluran

Pengadaan merupakan sebuah kegiatan guna memperoleh jasa ataupun barang yang dibutuhkan secara efektif, transparan, dan efisien, selaras dengan kebutuhan dan keperluan dari penggunaannya. Pengadaan ataupun penyimpanan logistik kesehatan di Puskesmas Kota Pekanbaru dapat dilihat dari beberapa tahapan diantaranya:

a. Alokasi dana Puskesmas

Dana menjadi salah satu poin utama demi terciptanya bermacam program serta layanan kesehatan di Puskesmas. Supaya terpenuhinya kebutuhan Puskesmas dan ditingkatkan dengan pendanaan yang memadai pendanaan yang ada biasanya di dapatkan dari pemerintah maupun pihak swasta. Apabila membahas mengenai alokasi Dana Puskesmas, terdapat 3 alokasi dana yang akan diperoleh Puskesmas diantaranya yaitu yang pertama alokasi dana yang berasal dari pemerintah daerah (dana alokasi umum dan dana alokasi khusus), dana tersebut digunakan untuk biaya gaji, serta biaya kinerja pegawai. Yang kedua yaitu alokasi dana dari APBN atau dana pusat serta DAK non fisik, dana tersebut berasal dari pemerintah pusat yang kemudian difungsikan sebagai dana transportasi dan belanja barang habis pakai, seperti obat-obatan, peralatan medik, dan fasilitas-fasilitas medis lainnya. Serta yang ketiga yaitu BPJS yang dipergunakan untuk penerima kartu BPJS, atau dana tersebut berdasarkan jumlah peserta BPJS, kemudian dana dari BPJS ini akan dipergunakan sebagai dana kapitasi pada pasien rawat jalan, pasien rawat jalan yaitu pasien yang termasuk Peserta BPJS kesehatan dan dana non kapitasi pada pasien rawat inap alokasi dana Puskesmas digunakan untuk masyarakat yang tergolong sebagai pengguna BPJS

Salah satu permasalahan yang biasa terjadi di daerah adalah lambatnya realisasi BOK (DAK non-fisik) dan dana kapitasi. Rata-rata dana DAK non-fisik baru terealisasi pada bulan Mei-Juni. Hal ini karena pemerintah daerah menganggap DAK non-badan dan dana kepala sebagai bagian dari APBD. Oleh karena itu, dana DAK non fisik dan kapitasi hanya

dapat digunakan setelah RAB disetujui oleh DPRD. Keterlambatan realisasi mengakibatkan menumpuknya dana kepala di kas daerah.

Dari uraian yang telah disampaikan terkait dengan alokasi dana Puskesmas peneliti menemukan beberapa masalah dalam hal pengalokasian dana tersebut bahwa seringkali terjadi keterlambatan dana, dan kurang transparan nya terkait jumlah anggaran yang ada dan model pembiayaan serta tata cara pencairan dana sering tidak menentu sehingga menyulitkan pihak Puskesmas dalam menjalankan program yang telah dicanangkan mengakibatkan program tidak terealisasi dengan baik dan menjadi hambatan dalam proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

b. Penyaluran atau distribusi

Penyaluran yaitu sebuah kegiatan ataupun usaha dalam mengatur pemindahan barang dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Penyaluran bahan logistik kesehatan telah menjadi tanggung jawab dari dinas kesehatan, penyaluran logistik dilakukan di semua wilayah kerja Dinas Kesehatan yang ada di Kota Pekanbaru yang berjumlah 21 Puskesmas. Dinas Kesehatan akan menyalurkan bahan logistik kesehatan setiap 3 bulan sekali atau 1 tahun sebanyak 4 kali sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari setiap Puskesmas, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk Puskesmas yang sudah tidak memiliki atau kehabisan bahan logistik (BMHP) Untuk mengajukan proposal kembali kepada Dinas Kesehatan. Pada dasarnya Dinas Kesehatan Akan mengirim barang logistik kepada Puskesmas namun ada pula sebaliknya, Puskesmas yang datang langsung ke dinas kesehatan. Apabila dilihat dari proses pendistribusian atau penyaluran bahan logistik kepada Puskesmas, Dinas Kesehatan senantiasa mendistribusikan bahan logistik sesuai dengan kebutuhan atau permintaan yang diajukan oleh Puskesmas namun penulis melihat saat ini bahwa masih terjadinya keterlambatan, dikarenakan manajemen penyaluran yang masih belum memiliki kejelasan data pada setiap tanggal berapa waktu penyaluran logistik akan disalurkan, hal ini berdampak terhadap penyaluran logistik yang tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan dan seringkali terjadi di kehabisan obat yang berimbas pada kualitas pelayanan yang ada di puskesmas.

3. Tahapan penggunaan

Pada tahapan ini penggunaan logistik yang berupa obat-obatan dan sarana-prasarana, prosesnya sesuai dengan kebijakan yang terdapat di Dinas Kesehatan. Yakni dalam proses pemanfaatannya harus sesuai dengan kapasitas yang telah diatur berupa prosedur dan langkah-langkah yang yang disahkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Logistik yang telah disiapkan dan disediakan Puskesmas telah sesuai dengan penyaluran yang diberikan oleh Dinas Kesehatan menurut alokasi anggaran yang ada. Tahap penggunaan logistik ini juga berasal dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pasien yang berada dalam tahapan perawatan. Pada saat Dinas Kesehatan telah menjalankan proses penyaluran logistik ke Puskesmas maka hal tersebut telah menjadi tanggung jawab dari pihak Puskesmas dalam hal mengatur dan memanfaatkan logistik tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan pasien dalam hal ini juga dibarengi dengan sarana prasarana yang dimiliki oleh Puskesmas. Peneliti juga menemukan bahwa di Puskesmas Kota Pekanbaru bangunan ataupun gedung Puskesmas telah sesuai dengan standarisasi pelayanan.

Yang menjadi sebuah permasalahan internal di Puskesmas yaitu dalam hal manajemen logistik bahwa logistik mempunyai fungsi yang sangat penting salah satunya yaitu dalam hal memastikan ketersediaan logistik yang ada agar lancarnya fungsi layanan kesehatan yang diberikan. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah tahapan penggunaan logistik yang dijadikan sebuah pilar penyangga pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat. Bukti dari semua itu yakni permasalahan obat-obatan dan persediaan kesehatan yang menjadi komponen utama pada saat melakukan

layanan kesehatan yang pada umumnya terbengkalai dan belum tepat waktu dalam penyaluran nya yang berdampak kepada proses pelayanan kesehatan masyarakat sering menjadi terhambat.

KESIMPULAN

1. Tahapan perencanaan dan penganggaran logistik kesehatan Puskesmas telah direncanakan sejak awal oleh Puskesmas yang ada di kota Pekanbaru dengan cara pembentukan 2 tim kerja yaitu tim keuangan serta tim perencanaan guna melaksanakan perencanaan atau penganggaran logistik kesehatan yang nantinya diajukan ke dinas kesehatan kota Pekanbaru.
2. Pada tahapan pengadaan dan penyaluran logistik kesehatan, pemenuhan logistik kesehatan Puskesmas yang ada di kota Pekanbaru memperoleh penyaluran dan pengadaan logistik dari pemerintah kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan, disalurkan logistik kesehatan tersebut pada setiap 3 kali atau dalam waktu 1 tahun sebanyak 4 kali ke Puskesmas yang ada di kota Pekanbaru, namun Puskesmas juga diperbolehkan untuk mengajukan penambahan dana ataupun logistik sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
3. Tahap penggunaan logistik kesehatan selaras dengan manajemen ataupun prosedur pemanfaatan yang diatur berdasarkan kebijakan dari dinas kesehatan yang dapat dimanfaatkan berdasarkan keperluan masyarakat yang memerlukan pengobatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Moha, Aditya Anugrah. 2016. *Ekonomi Politik Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia.
- Muis, Abd. 2016. *Peran Dinas Parawisata dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Studi Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Penajam Paser Utara)*. Universitas Mulawarman.
- Mustikasari. 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. SNA X Makassar : 1-41.
- Raco, R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rivai V. 2006. *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan: dari Teori ke Praktis. Edisi ke dua*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryani, Nurul Dwi dan Solikhah. 2013. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) di Wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu Provinsi NTB. *KESMAS*.
- Widodo, Muhammad Dedi, Reno Renaldi, and Oppi Selvia Andaresta. 2019. "Analisis Sistem Perencanaan Logistik Obat Di Puskesmas Simpang Tiga Kota Pekanbaru Tahun 2018." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI* 8 (2): 59-63.
- Yoesuf, RachmanNovrialdy. 2019. "Peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Dalam Mewujudkan Puskesmas Berakreditasi Di Kota Pekan Baru Tahun 2019" 7.

INOVASI BUMDES KUALA ALAM DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA KUALA ALAM KECAMATAN BENGKALIS

Rima Sanriana, Zulfan Heri, Zulkifli Anwar

Magister Ilmu Administrasi, Universitas Riau, Pekanbaru

Email: rima.sanriana7819@grad.unri.ac.id, zulfan.heri1980@studen.unri.ac.id

zulkifli.anwar1814@grad.unri.ac.id

Abstrak

BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dimana rata-rata BUMDes hanya menjalankan UED-SP sebagai unit usahanya. Beberapa inovasi yang dilakukan BUMDES di Kabupaten Bengkalis banyak yang tidak aktif lagi. BUMDes Kuala Alam telah melakukan inovasi dalam unit-unit usahanya. beberapa masalah yang dialami diantaranya masih kurangnya dana modal dari pemerintah desa Kuala Alam selama tahun 2020 dimana dari dana tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan PAD yang diharapkan. Permasalahan lain yang dihadapi BUMDes Kuala Alam dalam inovasi pengelolaan unit usaha dimana kepercayaan masyarakat masih kurang terhadap BUMDES dalam menerapkan hal baru. Hal ini tidak luput juga dari peranan sumberdaya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana inovasi dan kendalanya dalam inovasi BUMDes Kuala Alam dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif.

Kata Kunci: Inovasi, BUMDes, Perekonomian Desa

PENDAHULUAN

Pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa dengan penyaluran Dana Desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Tujuan BUMDes seperti dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 adalah, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Kabupaten Bengkalis adalah merupakan induk dari tiga kabupaten yang baru (Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti) dan satu Kota yaitu Dumai di Provinsi Riau. Visi Kabupaten Bengkalis yaitu “terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah maju dan sejahtera”. Salah satu Misi Kabupaten Bengkalis “mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, SDA dan SDM yang efektif dalam memajukan perekonomian”. Beberapa program Kabupaten Bengkalis untuk memajukan ekonomi diantaranya: 1) penguatan peran BUMDes dalam peningkatan potensi pendapatan asli desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, 2) Penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan menjamin keberlangsungan usaha masyarakat dan, 3) membangun kekuatan ekonomi masyarakat menghadapi resesi akibat krisis atau pandemi melalui penerapan teknologi dan inovasi baik dari aspek produksi, pengelolaan, pemasaran, permodalan dan transaksi keuangan.

Kecamatan di Kabupaten Bengkalis berjumlah 11 Kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 136 Desa. Setiap desa memiliki 1 (satu) unit Usaha BUMDes. Keseluruhan BUMDes di Kabupaten Bengkalis masih tergolong aktif. Dari jumlah tersebut posisi BUMDes rata-rata masih pada posisi cluster BUMDes rintisan. Ciri BUMDes rintisan

ditandai dengan sistem manajemen masih secara tradisional, SDM yang masih terbatas serta pemasaran yang belum memadai. Dimana rata-rata BUMDes hanya menjalankan UED-SP sebagai unit usahanya. Beberapa inovasi yang dilakukan BUMDES di Kabupaten Bengkalis banyak yang tidak aktif lagi. Hanya beberapa unit usaha inovatif yang bertahan.

Desa Kuala Alam adalah desa yang terletak di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Desa ini didominasi oleh lahan kosong yang dapat memicu kebakaran saat musim kemarau tiba. Desa Kuala Alam, Bengkalis, Provinsi Riau memiliki berbagai macam potensi yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Potensi alam yang dimiliki desa Kuala Alam adalah lahan kosong seluas 400 hektar, lahan perkebunan 30 hektar dan lahan hutan mangrove dan sungai seluas 200 hektar. BUMDes “Kuala Alam” merupakan salah satu BUMDes yang berada di Desa Kuala Alam Kecamatan Bengkalis. BUMDes Kuala Alam yang dibentuk melalui musyawarah desa pada tanggal 17 November 2015 tentang pembentukan BUMDes kuala alam melalui perdes no 3 tahun 2015. Terdapat 11 UMKM dan usaha perorangan yang menjadi binaan BUMDes yang berhasil diberikan pelatihan terkait pemasaran, proses produksi dan standarisasi produk sehingga dapat bersaing dengan produk lainnya. Adapun produk yang berhasil dibina BUMDes tersebut adalah usaha pembuatan kerajinan dan olahan makanan.

Untuk mempertahankan dan mengembangkan suatu usaha dibutuhkan inovasi. Pentingnya inovasi dilakukan menurut Keeh, Mai, & Ping (2007) yaitu: 1. Perubahan teknologi yang sangat cepat seiring dengan adanya produk, proses dan layanan baru dari pesaing, 2) efek perubahan lingkungan terhadap siklus hidup produk semakin pendek, 3) konsumen semakin pintar dan menuntut pemenuhan kebutuhan, 4) mudahnya duplikasi ide, produk, dan jasa dikarenakan semakin terbukanya pasar dan teknologi, 5) Inovasi bisa menghasilkan pertumbuhan lebih cepat, meningkatkan segmen pasar dan menciptakan posisi korporat yang lebih baik. (Novanda dkk, 2019:73-74).

Hasil penelitian Nursetiawan (2018) dalam mengungkapkan ada 3 (tiga) sektor yang menjadi fokus dalam usaha realisasi kemandirian sebuah desa, yakni: (a) potensi ekonomi; (b) potensi sosial; dan (c) potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Dimana ketiga hal tersebut tidak terlepas dari adanya inovasi yang diimplementasikan.

Perlunya dukungan dari dinas terkait dalam mendukung usaha BUMDes. Dinas Ketahanan Pangan telah memfasilitasi MOU kerja sama secara tertulis antara Bumdes Kuala Alam dengan Bulog yang ada di Kabupaten Bengkalis. Dari MOU tersebut Bumdes Kuala Alam mendapatkan fasilitas kemudahan untuk mendapatkan beras yang ada di Bulog, sehingga Bumdes Kuala Alam bermitra dengan banyak kelompok pengrajin UMKM di dalam mengolah pangan lokal.

Beberapa masalah yang dialami diantaranya masih kurangnya dana modal dari pemerintah desa Kuala Alam selama tahun 2020 dimana dari dana tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan PAD yang diharapkan. Permasalahan lain yang dihadapi BUMDes Kuala Alam dalam inovasi pengelolaan unit usaha dimana kepercayaan masyarakat masih kurang terhadap BUMDES dalam menerapkan hal baru. Hal ini tidak luput juga dari peranan sumberdaya manusia. Setiap unit memiliki tanggung jawab dan peranan masing-masing yang membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelolanya. Keterbatasan sumberdaya manusia masih menjadi masalah utama dalam pengelolaan unit usaha. Masalah lain yaitu masalah birokrasi antara BUMDES dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis melalui unit yang dibentuk BUMDES Kuala Alam dalam membantu masyarakat mendapatkan Surat Izin Usaha ke Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dalam upaya legalitas unit UMKM di Desa Kuala Alam, namun masih banyak izin yang belum diterbitkan oleh Dinas terkait.

A. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Inovasi

Schumpeter (1934) merupakan ahli yang pertama kali mengemukakan konsep inovasi. Menurut Schumpeter dalam Dewanto (3:2014) "inovasi didefinisikan sebagai kombinasi baru dari faktor-faktor produksi yang dibuat oleh pengusaha dan pemikiran inovasi adalah kekuatan pendorong yang penting (critical driving force) dalam pertumbuhan ekonomi. Konsep inovasi Schumpeter melibatkan inovasi produk, inovasi proses, inovasi pasar, penggunaan bahan baku tersebut dengan cara-cara dan inovasi pada organisasi.

Menurut Everett M. Rogers (2003) inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi.

Berbagai macam pemikiran tentang makna dan konsep inovasi yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat disimpulkan bahwa inovasi tidak lepas dari (Adianto, 2020:27-28):

1. Pengetahuan baru. Sebuah inovasi hadir sebagai pengetahuan baru bagi masyarakat dalam sebuah sistem sosial tertentu. Pengetahuan baru yang muncul akan memberikan dampak perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat dalam sistem sosial tertentu.
2. Ide dan gagasan baru. Sebuah inovasi hadir sebagai pemikiran baru yang disampaikan oleh agen pembaharu kepada individu atau kelompok orang dalam suatu sistem sosial tertentu. Ide dan gagasan baru disebarkan oleh agen pembaharuan dalam upaya memberikan perubahan-perubahan dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh individu dan kelompok orang dalam suatu sistem sosial tertentu.
3. Cara baru. Sebuah inovasi hadir sebagai cara baru bagi individu atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah tertentu. Cara baru ini merupakan pengganti cara lama yang sebelumnya berlaku didalam lingkungan masyarakat dalam sistem sosial tertentu.
4. Objek baru. Sebuah inovasi hadir sebagai objek baru bagi penggunanya, baik berwujud (*tangible*), maupun yang tidak berwujud (*intangible*). Objek baru yang muncul akan dijadikan fondasi bagi masyarakat untuk melakukan perubahan, baik secara sosial ataupun ekonomi.
5. Teknologi baru. Sebuah inovasi hadir sebagai kemajuan teknologi baru. Kemajuan teknologi dilihat dari sebuah produk teknologi yang inovatif biasanya dapat berlangsung dikenali dari fitur-fitur yang melekat pada produk tersebut.
6. Penemuan baru. Sebuah inovasi yang hadir sebagai penemuan baru. Sangat jarang ada kasus inovasi hadir sebagai kebetulan. Inovasi merupakan produk dari sebuah proses yang sepenuhnya bekerja dengan kesadaran dan kesengajaan.

Rogers (1983) mengemukakan lima karakteristik inovasi (Adianto, 2020:107):

1. *Relative advantage* atau keuntungan relatif. Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Keuntungan tidak hanya terbatas pada segi ekonomi saja, tetapi juga mencakup keuntungan bertambahnya pengetahuan, pemenuhan kebutuhan fisiologis, psikologis, maupun kebutuhan sosiologis.
2. *Compatibility* atau kesesuaian. Inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Inovasi yang ditawarkan juga memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, pengalaman sebelumnya, serta nilai, norma, dan adat setempat.
3. *Complexity* atau kerumitan. Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi

sebelumnya. Inovasi baru yang mudah untuk dimengerti dan disampaikan, baik dalam arti mudahnya bagi komunikator maupun mudah untuk dipahami oleh komunikan, akan diadopsi lebih cepat.

4. *Trialability* atau kemungkinan di coba. Inovasi hanya dapat diterima apabila telah diuji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama.
5. *Observability* atau kemudahan diamati. Sebuah inovasi harus juga dapat diamati dari segi cara kerjanya dan cara menghasilkan suatu yang lebih baik. Hal itu karena suatu inovasi akan mudah diadopsi oleh individu apabila dapat dilihat dan diamati secara langsung oleh individu tersebut.

Dalam model inovasi Rogers (2003) terdapat beberapa proses tahapan yaitu:

1. Pengetahuan

Dalam tahap ini, seseorang belum memiliki informasi yang lengkap mengenai inovasi. Oleh karena itu, inovasi perlu disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, bisa melalui media elektronik, media cetak, maupun komunikasi interpersonal diantara masyarakat. Hal ini diharapkan para calon adaptor mengetahui informasi yang lengkap terkait inovasi tersebut.

2. Persuasi

Pada tahap ini individu tertarik pada inovasi dan aktif mencari informasi secara detail mengenai inovasi. Tahap kedua ini terjadi lebih banyak dalam tingkat pemikiran calon pengguna/adaptor. Dalam tahap ini akan muncul rasa menyenangkan atau tidak senang terhadap inovasi, dimana rasa senang atau tidak senang tersebut dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri, seperti: (1) kelebihan inovasi, (2) tingkat keserasian, (3) kompleksitas, (4) dapat dicoba dan (5) dapat dilihat.

3. Keputusan

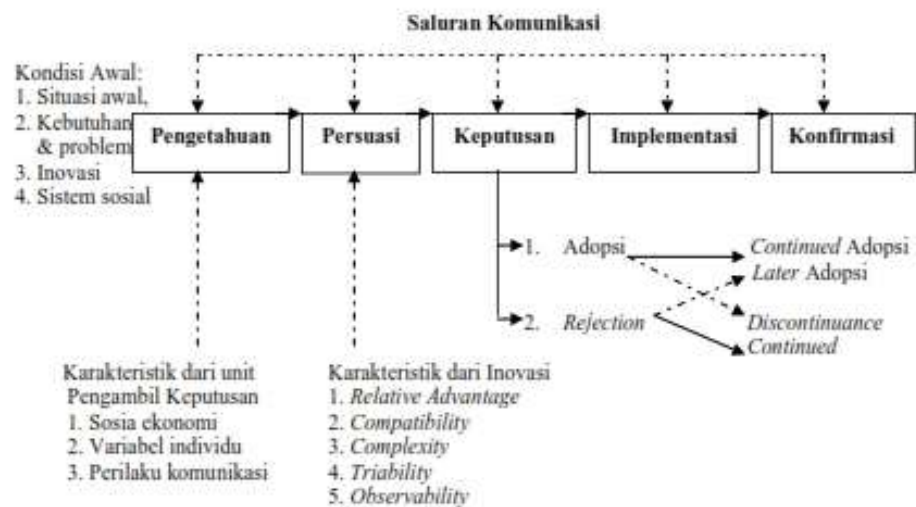
Setelah mengalami tahan persuasi yang menimbulkan rasa senang atau tidak senang terhadap inovasi, calon pengadopsi inovasi akan mengali tahap pengambilan keputusan inovasi. Pada tahap ini individu mengambil konsep inovasi dan menimbang keuntungan/kerugian dari menggunakan inovasi dan memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Ada dua macam penolakan inovasi, yakni: (a) penolakan aktif yaitu penolakan inovasi setelah melakukan melalui proses mempertimbangkan untuk menerima atau mencoba inovasi terlebih dahulu dan (b) penolakan pasif yakni penolakan inovasi tanpa pertimbangan sama sekali.

4. Implementasi

Pada tahap implentasi, pengadopsi mulai mengadopsi inovasi tersebut. Pengguna inovasi akan menentukan kegunaan dari inovasi dan dapat mencari informasi lebih lanjut tentang hal itu. Tahap ini merupakan tahap dimana pengadopsi akan mengambil keputusan untuk mengadopsinya terus menerus hingga menjadi sebuah rutinitas atau hanya diimplentasikan sementara waktu.

5. Konfirmasi

Setelah sebuah keputusan dibuat, seseorang kemudian akan mencari penguatan terhadap keputusan mereka. Tidak menutup kemungkinan seseorang kemudian mengubah keputusan yang tadinya menolak jadi menerima inovasi setelah melakukan evaluasi atau malah sebaliknya, yang awalnya menerima kemudian berhenti/menolak inovasi dengan alasan – alasan tertentu



Gambar 2.1
Proses Keputusan Inovasi (Rogers 2003)

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari hasil kekayaan dan potensi desa (Sulaeman dkk :3).

Secara garis Besar BUMDes memiliki 2 manfaat yaitu komersil dan pelayanan publik (Putra,2019:51-50): 1) Komersil. Sebagai lembaga komersil BUMDes mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarkat meingkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Pemuda desa yang memilki potensi akan memperoleh pekerjaan di desa sehingga mengurangi urbaniasi. 2) Pelayanan Publik. BUMDes tidak hanya bergerak dibidang bisnis saja, tetapi BUMDes juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya dibidangn pelayanan sosial.

3. Perekonomian Desa

Pengertian Ekonomi Desa adalah berbagai macam aktivitas yang mengandung unsur ekonomi yang dapat dijadikan sebagai tumpuan perputaran perekonomian di wilayah desa. Dalam kajian aktivitas bukan saja sebatas pada profesi petani. Di sampaikan dalam buku Geografi Pedesaan sebuah Antologi yang di susun oleh suhardjo (2008) dalam Suleman (2020:8) dan ini dianggap sesuai dengan gambaran masyarakat pedesaan untuk saat sekarang ini.

UU No. 06 tahun 2014 mengamanatkan bahwa pengertian Ekonomi Desa adalah seluruh kegiatan konsumsi, produksi dan penanaman modal pada masyarakat pedesaan yang ditentukan oleh keluarga secara bersamaan. Kegiatan perekonomian pada masyarakat pedesaan bertujuan untuk kesejahteraan keluarga. Oleh sebab itu aktivitas yang mengandung prinsip ekonomi bisa dikatakan berawal dari lingkup rumah tangga keluarga, dan dapat meluas hingga ke kalangan yang bukan keluarga seperti kalangan pemerintah, pedagang dan berbagai profesi lainnya (Suleman, 2020: 8).

Kemajuan perekonomian pedesaan yang satu dengan perekonomian pedesaan yang lain sangat berhubungan, sehingga diperlukan upaya nyata dalam rangka memajukan perekonomian pedesaan. Upaya nyata perlu dengan cepat dan tepat dilakukan sehingga dapat menciptakan akselerasi kemajuan perekonomian di tiga desa penelitian. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan

program Alokasi Dana Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa Minimal dan Alokasi Dana Desa Proporsional. Upaya ini sejalan dengan maksud dari program Alokasi Dana

Desa, yaitu memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDesa). Dengan demikian sumber APBDesa terdiri dari PADesa ditambah Alokasi Dana Desa, dan meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Program Alokasi Dana Desa akan memberikan manfaat, sehingga desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Ar Royyan, Dkk, 2018:87).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menganalisis Inovasi Bumdes Kuala Alam Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Bengkalis (Studi Di Desa Kuala Alam). Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Apa yang dihadapi dalam penelitian adalah dunia sosial kehidupan sehari-hari. Penelitian seperti ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan melekatkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh peneliti selama di lapangan termasuk dalam suatu posisi yang berdasarkan kasus atau ideografi yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu. (Bungin. 2017:124).

Dengan demikian sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang mendukung penelitian. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Namun, ketiga tahapan tersebut berlangsung secara simultan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adianto. (2020). *Inovasi Sosila Praktek Adopsi Inovasi yang Memberikan Dampak Kesejahteraan*. Pekanbaru: Taman Karya Ar Royyan, dkk. (2018). *Ekonomi Desa: Analisa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa*. Banda Aceh: Natural Aceh
- Nainggolan, Benny Rojeston Mamaek SE, M.Si dan Tetty Tiurma Uli Sipahutar, SE.M.Si. (2020). *Penerapan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*. Suamtera Barat: CV. Insan Cendikia Mandiri.
- Birkinshaw, Julian and Michael Mol. (2006). *How Management Innovation Happens*. MIT Sloan Management Review, 47(4), pp. 81-88.
- Bungin, Burhan. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontenporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cooper, J. R.(1998). *A Multidimensional Approach to the Adoption of Innovation*. *Management De-cision*, 36(8): 493-502.
- Creswell, J.C. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches, Third Edition*. First Published 2013.
- Dhewanto dkk. 2014. *Manajemen Inovasi Peluang Sukses Menghadapi Perubahan*. Yogyakarta:CV. Andi Offset.
- Ellitan, Lena, Lina Anatan. (2008). *Manajemen Strategi Operasi Teori dan Riset di Indonesia*. Bandung: Afabeta

- _____. (2009). *Manajemen Inovasi Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia*. Bandung: Afabeta.
- Firdaus, Raudhatul. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kec. Manding Kab. Sumenep. *Jurnal Inovasi Penelitian*: Vol. 1 No. 7 Tahun 2020, ISSN: 2722-9475
- Halvorsen, Thomas et.al. (2005). *Innovation in the Public Sector: On the differences between public and private sector*. Oslo. Publin Report No. D9
- Kresnawati. (2019). Strategi Inovasi Bumdes Dalam Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Seluma Dengan Metode Criterium Plus– Ahp. *Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen* ISSN1978-3884 (Printed). Volume 14. No.2, Oktober 2019: 195-209
- Machmud, Amir. (2016). *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Erlangga.
- Manggu, Blasius. (2020). *The Impact Of Village-Owned Enterprises (Bumdes) In Strengthening Local Economy In The Border Village Of Sebente, Bengkayang Regency PRIMANOMICS : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS - VOL. 18. NO. 3*
- Nasution, Arman Hakim & Herman Kartajaya. (2018). *Inovasi*. Yogyakarta: Andi
- Sukmadi. (2016). *Inovasi dan Kewirausahaan (Edisi Paradigma Baru Kewirausahaan)*. Bandung: Humaniora Utama Perss
- Suleman, Abdul Rahman dkk. (2020). *BUMDES Menuju optimalisasi ekonomi Desa*, Yayasan Kita Menulis.
- Sujarweni, V.Wiratna. (2019). *Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)* Yogyakarta: PT. Pustaka Baru Pers.
- Swan, J., Newel, H., Scarbrought, & Hislop. (1999). *Knowledge Management and Innovations: Networks and Networking*. *Journal of Knowledge Management*, 3(4): 262–275.
- Novanda, Ridha Rizki dkk. (2019). *Jejak Membangun BUMDes: Belajar dari BUMDes Mart Sumber Rejo*. Jakarta: PUSDATIN BALILATFO.
- Najib, Mohammad dkk. (2019). *BUMDES : Pembentukan dan Pengelolaanny*. Jakarta: PUSDATIN BALILATFO.
- Putra dkk. (2019). *Mengukur Kinerja BUMDesa*. Jakarta: PUSDATIN BALILATFO
- Rachim. Abd H.. Prof.Dr.AF. SE.MSi. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Ridlwani, Zulkarnain. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 3 Juli-September 2014 hal 424-440 ISSN 1978-5186
- Rogers, M Evertt. (2003). *Diffusion of Innovation Edition 5th*. New York: Free Press.
- Rusli, Zaili SD. H. Dr.Msi. (2014). *Pemeriksaan Masyarakat Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo, Prof. Dr. SE, M.Phil, (2019). *Manajemen dari Fungsi Dasar ke Inovasi*. Depok: Rajawali Pers.
- Winarsi Sri, Agus Widyantoro and Oemar Moechthar, (2018). *The Law Principles for Village-Owned Enterprises (BUMDes) Management in Indonesia to Improve the Village's Economy olume 1; Issue 2; 2018, Page:130-136 ISSN 2615 – 8809 E ISSN 2615 - 8795* <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/sjj>
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2015 tentang pembentukan BUMDes Kuala Alam <https://rri.co.id/bengkalis/daerah/976290/bumdes-kuala-alam-dinilai-mampu-berkolaborasi-dan-bersinergi-dukung-program-pemerintah>

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN VAKSINASI COVID-19 PADA TENAGA PENDIDIK YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM X DI KOTA PEKANBARU

Shafira Amalia Ramadhani

Ilmu Administrasi, Pascasarjana Fisip Universitas Riau, Pekanbaru

Email: shafiraamaliaramadhani15@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan vaksinasi di Kota Pekanbaru khususnya pada Yayasan Pendidikan Islam X. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif mengacu pada program vaksinasi di Yayasan Pendidikan Islam X. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer, peneliti menggunakan metode observasi, diskusi terfokus dan wawancara, dan untuk data sekunder mengacu pada literatur buku, jurnal, dan internet. Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.84 Tahun 2020 tentang Program Vaksinasi, menjelaskan pada pasal 8 ayat 4 bahwa sasaran utama penyuntikan vaksin adalah beberapa kelompok prioritas, yaitu: tenaga kesehatan, tokoh masyarakat/pemuka agama, pelaku perekonomian strategis, guru dan tenaga pendidik, aparatur pemerintahan, masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, dan masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya. Berdasarkan hal ini, berarti jelas bahwa tenaga pendidik Yayasan Pendidikan Islam X di Kota Pekanbaru tergolong dalam kelompok prioritas penerima layanan vaksinasi. Adapun tujuan dari hal tersebut tentunya untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan pandemi Covid-19. Dukungan teori yang kuat dalam melaksanakan kebijakan, Vaksinasi dibutuhkan, untuk mewujudkan herd immunity dilingkungan masyarakat. Dengan demikian, dengan vaksinasi diharapkan angka penyebaran covid-19 dapat ditekan, dan kondisi sosial ekonomi kembali pulih, Implementasi kebijakan pelaksanaan program vaksinasi covid-19 secara umum didasarkan pada Peraturan Presiden No 99 Tahun 2020. Namun, dalam proses implementasinya, bukan berarti harus ada paksaan atau intimidasi, karena menurut UU No.36 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 3 bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Kata kunci : vaksinasi, yayasan, implementasi.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, dunia sedang diguncang oleh pandemik hebat bernama Covid-19 (Corona Virus Disease). Peningkatan dari hari kehari jumlah pasien terinfeksi virus Covid-19 sudah sulit dikendalikan diperlukannya suatu perencanaan yang jelas dan lugas dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini. Coronavirus sendiri merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales (Yunus & Rezki, 2020). Virus ini dapat menyerang hewan dan juga manusia dan pada manusia gejalanya berupa infeksi yang serupa dengan penyakit SARS dan MERS, hanya saja Covid-19 bersifat lebih masif perkembangannya. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terdampak wabah yang satu ini. Oleh karena itu, perlu tindakan pemerintah dan kesadaran penuh dari masyarakat agar angka penyebaran virus ini dapat ditekan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Arum, 2020), Pemerintah Indonesia masih hanya melakukan penanganan berupa pembatasan sosial saja (social distancing). Padahal banyak kalangan yang menganggap bahwa lebih efektif menerapkan sistem karantina wilayah atau lockdown untuk mencegah penyebaran virus ini agar tidak menginfeksi lebih banyak orang (Nurhalimah, 2020), sedangkan pembatasan sosial masih rawan penyebarannya disebabkan banyak masyarakat yang tidak mau mengikuti karena pada hakikatnya hal tersebut hanya sekadar imbauan dan tidak ada sanksi berat yang bisa membuat masyarakat patuh. Selaras dengan itu, penelitian dari (Telaumbanua, 2020) menyebutkan bahwa pemerintah dituntut untuk menangani ancaman nyata Covid-19.

Jawaban sementara pemerintah terhadap tuntutan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait Keekarantinaan Kesehatan. Keputusannya adalah pemerintah pusat tidak memberlakukan karantina wilayah atau lockdown melainkan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 dan juga melakukan tindakan tes massal menggunakan alat rapid test yang jika seseorang dinyatakan hasil tesnya reaktif maka akan dilakukan swab test untuk memastikan orang tersebut positif atau negatif Covid-19.

COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus.⁹ Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian.¹⁰ Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.^{5,11} Per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, yaitu 11,3%.

Indonesia memiliki jumlah penduduk 270.203.917 jiwa berdasarkan sensus penduduk 2020. Menurut kementerian kesehatan pada 4 Juni 2021 tercatat secara nasional jumlah yang terinfeksi covid-19 adalah 1.840.000 jiwa dan sebanyak 51.095 jiwa meninggal dunia. Data di Provinsi Riau sendiri total kasus hingga hari ini adalah 61.502 kasus, dan Kota Pekanbaru berjumlah 27.372 jiwa diketahui terpapar covid-19. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru 983.356, maka persentasenya tergolong cukup banyak sebanyak 2,78% penduduk kota Pekanbaru positif Covid-19. Sehingga sebenarnya upaya yang harus dilakukan adalah diperlukannya vaksinasi COVID-19 yang merata di Kota Pekanbaru. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, karena ditakutkan, negara tidak mampu lagi menangani kasus pasien terutama dengan gejala parah, begitu pula halnya dengan di Pekanbaru.

Apabila kondisi dan kenaikan kasus terus meningkat secara drastis, dikhawatirkan fasilitas kesehatan tidak lagi mampu menampung pasien. Maka sebab itu, berangkat dari kekhawatiran yang terus ada, ditemukanlah salah satu solusi, yaitu dengan membangun *hard immunity* masyarakat melalui program vaksinasi. Hal ini menuai pro-dan kontra dikalangan masyarakat, sebagian merasa senang dengan program ini, namun sebagian dari masyarakat sendiri merasa masih meragukan program vaksinasi tersebut, terkhususnya di Kota Pekanbaru. Pro dan kontra tersebut disinyalir karena perdebatan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan vaksin aman atau tidak, halal atau tidak, seras banyaknya berita di media elektronik dan media sosial, yang memberitakan bagaimana efek samping dari penggunaan vaksin tersebut. Menyebarnya berita ini ditanggapi dengan serius oleh masyarakat dengan cara menolak untuk di vaksin.

Seperti yang telah diketahui, vaksin untuk Covid-19 sampai sejauh ini masih belum ditemukan. Para ilmuwan masih mencoba mengembangkan vaksin untuk virus yang satu ini. Amerika Serikat sedang mencoba meneliti vaksin yang berbasis RNA juga DNA, sedangkan negara Perancis mencoba melakukan modifikasi vaksin untuk penyakit campak sehingga bisa dipakai untuk menangani Covid-19. Vaksin dipastikan akan hadir tidak dalam waktu dekat-dekat ini, karena vaksin harus melewati serangkaian uji klinis agar terlihat daya kuratifnya (Mardhia et al., 2020). Sambil menunggu adanya vaksin dan jika mengacu pada prediksi dari Sarah Gilbert (Profesor Vaksinologi Oxford University), yang percaya 80 persen vaksin Covid-19 akan ditemukan pada bulan September 2020 menurut yang dilansir oleh CNBC (2020). Pemerintah Indonesia selain mengadakan kegiatan Rapid Test di berbagai daerah, juga aktif memberlakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR), tes ini berupa pemeriksaan imunoglobulin sebagai upaya tes screening terhadap Covid-19. Bedanya dengan Rapid Test, tes PCR dilakukan dengan pengambilan

spesimen lendir, dahak, atau cairan pada nasofaring yang kemudian diteliti dengan cara mengubah RNA menjadi DNA sehingga alat PCR bisa memproses amplifikasi (perbanyak materi genetik) sehingga mampu mendeteksi RNA virus corona, sedangkan Rapid Test dilakukan hanya dengan mengambil sedikit sampel darah untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG yang diproduksi tubuh untuk melawan Covid-19. Namun kalau soal sensitivitas, PCR masih unggul dibanding Rapid Test karena mungkin saja IgM dan IgG yang terbentuk itu karena adanya infeksi virus lain yang bukan Covid-19, akan tetapi PCR membutuhkan waktu yang cukup lama dan metodologi di laboratorium yang rumit (Elvina, 2020; Long et al., 2020)

Saat ini di Indonesia penanganan covid-19 memasuki situasi baru, termasuk di Kota Pekanbaru. Setelah selesai uji klinis terhadap vaksin covid-19. Program vaksinasi sebagai upaya menekan dan melawan penyebaran covid-19 di lingkungan masyarakat sudah dilakukan. Vaksin yang saat ini telah beredar dan disuntikkan ke sebagian masyarakat di Indonesia merupakan vaksin yang diperoleh melalui tiga perusahaan dari China, yaitu Cansino, G42/Sinopharm, dan SinoVac.

Dilanjutkan dengan peraturan dari pemerintah melalui penetapan peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No.84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi yang diatur dari tahap persiapan hingga pengimplementasian. Vaksinasi dilakukan bertujuan untuk menurunkan transmisi covid-19, mengurangi angka kesakitan hingga kematian yang disebabkan oleh corona virus, tercapainya *herd immunity*, hingga meminimalisir dampak sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh virus ini. Berdasarkan peraturan tersebut, diketahui sasaran pelaksanaan vaksinasi ini ada 6 kelompok masyarakat, salah satunya adalah tenaga pendidik TK,SD,SMP,SMA sederajat hingga perguruan tinggi.

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di sidang umum PBB pada 23 September 2020 menyatakan bahwa vaksin ini bakal menjadi pengubah permainan (game changer) dalam upaya memerangi pandemi covid 19 (CNNIndonesia, 2020). Sikap optimisme kepala negara atas jalan yang akan ditempuh dalam memberantas penyebaran covid 19 yang tentu saja perlu dilihat bagaimana perwujudan kebijakan yang akan diambil nantinya. Soal vaksin covid 19 memang menjadi wacana kekinian yang kurang lebih ditunggu banyak orang, setelah dilanda pandemi covid 19. Virus ini berhasil memaksa setiap orang menahan diri dari aktivitas sosial. Virus ini juga berhasil memaksa pemerintah menggunakan kekuasaan negara yang dalam pengertian Max Weber, bahkan, bisa menggunakan kekerasan fisik secara sah (Gerth & Mills, 1958; Budiardjo, 2008). Pemerintah juga mengatur ketertiban terhadap masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan dan karenanya diberikan kekuasaan memaksa (MacIver, 1926 dalam Budiardjo, 2008). Meski ada kerangka pengamanan diri dan orang lain yang terus dikampanyekan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya, tetapi itu bukan dianggap solusi untuk menjalankan aktivitas sosial secara bebas. Dalam persoalan inilah Indonesia bahkan diprediksi akan menjadi sentrum pandemi covid 19 setelah Wuhan (Sari, 2020) sebagai penilaian atas kelambanan pemerintah didalam menangani penyebaran.

Melihat tingginya kasus penyebaran covid-19 di lingkungan kita, masalah serius ini sudah saatnya untuk diatasi dengan kajian serius pula, upaya menangani hal ini adalah melalui vaksinasi massal, yang sudah diadakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru sejak beberapa minggu terakhir ini. Program vaksinasi gratis yang diadakan oleh pemko Pekanbaru, menjadi bukti upaya pelayanan yang pemerintah berikan dalam melindungi masyarakatnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 Tahun 2020, meminta kepada segala lini masyarakat, termasuk pemangku kepentingan untuk mendukung dan mensukseskan program vaksinasi sebagai bentuk pelayanan kepada publik dalam menyikapi masalah ini.

Namun, meskipun demikian, diketahui bersama, bahwa hingga saat ini, masyarakat khususnya di Kota Pekanbaru, masih meragukan vaksin dan program vaksinasi covid-19 sehingga hal ini dinilai menghambat program pemerintah dalam memulihkan kondisi pandemi covid-19. Hal ini juga terjadi pada tenaga pendidikan Yayasan Pendidikan Islam X di Kota Pekanbaru, Secara struktur Yayasan Pendidikan Islam di Indonesia berada dibawah naungan Kementerian Agama. Maka, berdasarkan peraturan vaksinasi, pimpinan lembaga, instansi, maupun pemuka masyarakat, memiliki wewenang untuk berupaya mengajak pegawai/karyawannya dalam program vaksinasi demi mewujudkan visi dan misi pemerintah. Dalam upaya pengimplementasian, berbagai instansi memiliki cara masing-masing, begitupun yayasan pendidikan islam X di Kota Pekanbaru.

Model yang digunakan dalam pembahasan ini adalah model Mazmanian dan Sabatier (1986:268). Menurut model ini, ada 6 indikator utama dalam berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan implementasi, yaitu : tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas, dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan, Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas, komitmen pada pelaksanaan kebijakan, dukungan stakeholder, stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Kebijakan yang dibuat, saat tidak sesuai dengan implementasinya, maka perlu dikaji ulang tentang kinerja sumberdaya manusia yang ada. Sumber daya manusia (SDM) sebagai aspek terpenting di dalam sebuah organisasi, karena sumber daya manusia yang dalam teori 4M dikenal sebagai *man* adalah objek utama yang akan berinteraksi dengan komponen lainnya seperti *materials*, *method*, dan *Mechanice*.

Menurut Snyder (1989) sumber daya yang paling berharga adalah manusia, agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, sumber daya yang paling berharga ini harus mampu mengendalikan perilakunya sesuai yang di harapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Nawawi (2003:37) Sumber daya manusia memiliki dua pengertian dilihat dari dua sudut pandang yaitu makro dan mikro, secara makro sumber daya manusia diartikan sebagai seluruh warga negara atau penduduk di suatu wilayah yang telah mencapai usia kerja, meskipun mereka belum mendapatkan lapangan pekerjaan, sementara secara mikro sumber daya manusia diartikan sebagai seseorang yang tergabung didalam sebuah organisasi yang disebut sebagai karyawan, pegawai, atau tenaga kerja

Fenomena yang ditemukan dalam implementasi kebijakan pelayanan publik di Yayasan Pendidikan Islam X di Kota Pekanbaru adalah, adanya paksaan untuk mengikuti vaksinasi, yang di sertai dengan ancaman yang berupa di non-job kan dan di dikeluarkan dari aplikasi guru kemenag. Oleh karena itu, maka dalam penulisan karya tulis ini, penulis tertarik untuk membahas tentang implementasi kebijakan pelayanan publik dalam program vaksinasi di Yayasan Pendidikan Islam X di Kota Pekanbaru.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2016:11) mendefinisikan metodologi pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Selain itu, beberapa yang dikumpulkan kemungkinan sebagai kunci atas apa yang sudah diteliti. Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, penelitian diskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2003:11), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi yang dilakukan adalah di Yayasan Pendidikan Islam X di Kota Pekanbaru. Pengumpulan data dilakukan dengan data primer, dan data sekunder. Data diperoleh melalui informan yang merupakan tenaga pendidik di yayasan tersebut.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan berdasarkan filsafah postpositivisme, digunakan saat meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, dengan analisis data bersifat induktif/kualitatif. Hasilnya akan lebih menekankan pada pemahaman tentang makna, dan menggambarkan fenomena penelitian dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017; 26)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No.84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksin merupakan salah satu bentuk kebijakan implementasi yang top-down, program tersebut tersentralisasi dari level pusat hingga kepada pemerintah daerah, dan dilanjutkan oleh level-level bawah hingga ke RT/RW.

Berdasarkan indikator kebijakan pelayanan publik menurut Mazmanian dan Sabatier yang kemudian kita hubungkan dengan kenyataan fenomena yang di temukan, sebagai berikut :

a. Tujuan atau Sasaran Kebijakan yang Jelas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.84 Tahun 2020 tentang Program Vaksinasi, menjelaskan pada pasal 8 ayat 4 bahwa sasaran utama penyuntikan vaksin adalah beberapa kelompok prioritas, yaitu: tenaga kesehatan, tokoh masyarakat/pemuka agama, pelaku perekonomian strategis, guru dan tenaga pendidik, aparatur pemerintahan, masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, dan masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya. Berdasarkan hal ini, berarti jelas bahwa tenaga pendidik Yayasan Pendidikan Islam X di Kota Pekanbaru tergolong dalam kelompok prioritas penerima layanan vaksinasi. Adapun tujuan dari hal tersebut tentunya untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan pandemi Covid-19.

b. Dukungan teori yang kuat dalam melaksanakan kebijakan.

Vaksinasi dibutuhkan, untuk mewujudkan herd immunity dilingkungan masyarakat. Dengan demikian, dengan vaksinasi diharapkan angka penyebaran covid-19 dapat di tekan, dan kondisi sosial ekonomi kembali pulih.

c. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas.

Implementasi kebijakan pelaksanaan program vaksinasi covid-19 secara umum didasarkan pada Peraturan Presiden No 99 Tahun 2020. Namun, dalam proses implementasinya, bukan berarti harus ada paksaan atau intimidasi, karena menurut UU No.36 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 3 bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, dan Pasal 8 bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan, selanjutnya Pasal 56 ayat 1 bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Berdasarkan landasan hukum ini, seharusnya proses implementasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan rencana seharusnya di persiapkan lebih baik lagi agar sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Apabila hal ini terus dilakukan, maka yang akan terjadi adalah justru munculnya sikap apatis terhadap vaksinasi, selain hal tersebut, transparansi vaksinasi pun harus ditingkatkan, karena itu merupakan hak warga negara, untuk mengetahui obat berjenis apa yang telah dimasukkan ke tubuhnya.

d. Komitmen pada pelaksanaan kebijakan

Implementasi kebijakan publik, harus dilakukan dengan komitmen dan konsistensi pada yayasan pendidikan islam X di kota Pekanbaru komitmen ini dilakukan oleh kementerian agama selaku pengawas dan pembina yayasan pendidikan islam di

Indonesia. Berdasarkan keterangan informan bahwa, terjadi ancaman dan intimidasi dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator pada pembahasan ini hampir seluruh aspek dinilai baik dan terpenuhi, namun pada proses implementasi yang dinilai kurang tepat dan melanggar hak dan kebebasan individu atas dirinya sendiri. Adapun saran yang dapat diberikan adalah dengan memberikan pemahaman secara mendalam tentang vaksinasi dan cara kerja vaksin kepada para tenaga pendidik dan masyarakat luas, agar nantinya muncu; kesadaran sendiri tentang pentingnya vaksin dan manfaat vaksin lebih besar dari pada dampak buruknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afendi, A. H. (2020). Dampak Pandemi Novel-Corona Virus Disiase (Covid-19) Terhadap Psikologi
- Akbar, dkk, 2021, *Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Surabaya*, Jurnal Publicuho Vol4 No.2 Dan Pendidikan Serta Kebijakan Pemerintah. Jurnal PGSD, 6(1), 39–49.
- Bungin, Burhan. 2011. *Analisis & Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers. Jakarta
- Mokola, Juniarti, 2020, *Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara*
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 Tentang *Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19)*.
- Peraturan Pemerintah Republk Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 *Tentang Pelaksanaan UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*
- Wiryanto Wisber, 2020, *Initiative and Implementation Of The Public Service Innovation By Regional Government In Indonesia*, Journal of Government and Local Public Vol.2 No.2.

PENGARUH COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Bella Fitrianti

Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau
Email: bellafitrianti06@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih lanjut tentang permasalahan yang di alami masyarakat secara umum khususnya masyarakat Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi pada masa pandemi seperti saat ini. Peneliti juga ingin melihat bagaimana keadaan ekonomi masyarakat untuk bertahan/beradaptasi dengan keadaan pandemi. Penelitian ini menemukan bahwa (1) Covid-19 ini telah berdampak ke seluruh dunia dan termasuk Indonesia, yang mana Covid-19 ini telah berdampak terhadap aktivitas ekonomi hampir di seluruh wilayah Indonesia, baik kota besar maupun pelosok desa termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi. (2) untuk mengatasi masalah perekonomian pada saat ini masyarakat melakukan penghematan pengeluaran untuk menghemat keuangan yang ada dengan membeli keperluan seperlunya saja, baik diperoleh sendiri maupun bantuan pemerintah.

Kata kunci: Covid-19, masalah ekonomi, solusi ekonomi

PENDAHULUAN

Virus corona (Covid-19) pertama kali ditemiakan di kota wuhan, china pada tanggal 30 desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di china dan beberapa negara, termasuk Indonesia. Virus corona menyerang saluran pernafasan manusia. Seseorang dapat terinfeksi dari penderitaan covid 19 penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. (Bustami, A. W. (2020)). Dengan merebaknya wabah Virus Corona pergerakan roda ekonomi makin hari makin melambat bahkan bukan lambat lagi dari hari ke hari terus mengalami kemunduran. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi selalu mengalami kenaikan jumlah pasien yang terkontaminasi dengan virus corona, dan tidak sedikit pula yang telah dinyatakan sembuh. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka mempermudah dan mempercepat penanganan covid-19 ini.

Pembatasan tersebut meliputi meliburkan sekolah-sekolah, kampus- kampus, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan di tempat/fasilitas umum, pembatasan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya yang dapat menyebabkan timbulnya keramaian/ perkumpulan. Hal demikian itu dilakukan semata-mata bukan untuk membatasi ruang gerak dari berbagai yang berkepentingan, melainkan metode jitu dalam memutus rantai penyebaran covid-19 ini. Kebijakan tersebut meningkatkan resiko sektor industri menghadapi gangguan signifikan dari sisi rantai pasok, tenaga kerja, kesinambungan bisnis hingga arus kas usaha mereka. Dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya daerah Teluk Kuantan adalah jam malam dalam penerapannya. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memberlakukan jam malam serta pembatasan dalam proses jual beli yang biasanya tempat-tempat makan serta taman ramai dikunjungi, sekarang sudah dibatasi dan dikurangi jumlah orang yang bisa makan ditempat. setiap orang dilarang beraktivitas di luar rumah, termasuk aktivitas usaha/dagang/hiburan, ataupun aktivitas sosial lainnya, sejak pukul 21.00 sampai 04.00 WIB.

Karena jika dilakukan lockdown dapat secara langsung membahayakan orang-orang di kondisi ekonomi menengah dan rendah mengalami penurunan pendapatan yang relatif rendah, karena kebanyakan dari mereka tidak dapat lagi menjual sebagai pedagang kaki lima seperti jus, pecel lele, siomay, pedagang bakso, dan pedagang kaki lima lainnya. Dengan keadaan pandemi seperti ini banyak pedagang yang kehilangan pendapatan secara langsung akibat lockdown. pemerintah harus siap untuk memberikan Bantuan Tunai (BLT) yang diberikan secara langsung kepada masyarakat selama masa pandemi. dengan adanya pandemi secara langsung mencegah kegiatan ekonomi mikro dan makro ekonomi.

METODE

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2005:6), metode penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), artinya data-data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta dilapangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu masyarakat desa Tegalmati kecamatan Petarukan. yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Teknik Pengolahan dan Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. untuk peneliti yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dimana setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagian besar profesi penduduk di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu petani dan pedagang. ketika adanya pandemi covid-19 banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan kebingungan karena penularan yang sangat cepat. Oleh karena itu dengan adanya pandemi covid-19 mengakibatkan masyarakat di desa setempat menjadi panik dan takut karena pandemi covid-19 ini menyebabkan perekonomian masyarakat turun bahkan sampai tidak ada pemasukan. Oleh karena itu pandemi seperti membuat masyarakat menjadi kebingungan dengan adanya pandemi covid-19 yang berkepanjangan. oleh karena itu masyarakat banyak yang tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk dirumah saja karena tidak ada pemasukan sama sekali membuat warga setempat kebingungan. keadaan yang seperti ini membuat para pekerja buruh terpuruk dengan kondisi perekonomiannya yang semakin hari berkurang antara pengeluaran dengan pemasukan sangat tidak sebanding.

Seperti yang dikatakan oleh narasumber kami bahwa "Penjualan menurun banget dek. Sebelum ada corona penghasilan saya dari berjualan bisa buat memenuhi kebutuhan keluarga, tapi semenjak ada corona perekonomian keluarga saya jadi susah, dan kadang saya malah rugi karena dagangan ngga laku". Selain itu Narasumber juga banyak kebingungan karena dengan adanya jam malam pembeli sepi karena pada saat malam biasanya banyak masyarakat yang mencari makanan akan tetapi disaat pandemi dan jam malam pembeli semakin menipis tidak sebanding dengan pengeluaran sehingga membuat masyarakat kebingungan untuk mencari keuangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari. Seperti yang kita lakukan wawancara rata-rata

pedagang yang bukanya pada sore sampai malam seperti penjualan es kopi, pecel lele, martabak, gorengan, jus yang bukanya mulai sore sampai jam malam. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan jam malam membuat pedagang penghasilannya menurun karena tidak ada pemasukan sama sekali.

Diakhir wawancara mereka juga menyampaikan keresahan terhadap nasib dagangannya jika pandemi ini belum usai. "Sampe sekarang masih khawatir, takut kalau dagangan saya sepi terus menerus apalagi kita ngga tau kan ya sampe kapan virus ini bakal selesai". Dan untuk seorang petani pada masa pandemi seperti ini memang susah untuk mencari keungan "apalagi kita seorang petani yang mendapatkan uang setiap musim panen membuat kesusahan dan bingung karena harga padi saat panen itu menurun dan banyak hama sehingga pemasukan keuangan juga ikut menurun".

KESIMPULAN

Akibat Covid-19 banyak masyarakat Teluk Kuantan yang profesinya rata-rata sebagai pedagang kebingungan karena tidak ada pemasukan dalam kehidupannya sehari-hari. Banyak masyarakat yang bingung mencari uang untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, oleh karena itu masyarakat harus mencari keuangan yang lain yang penting halal dan bisa untuk mencukupi kebutuhan dalam sehari-hari. Pandemi covid-19 menyebabkan masyarakat Teluk Kuantan bingung harus bertindak seperti apa karena pandemic ini berkepanjangan dan bingung untuk mencukupi kebutuhannya supaya tidak terlilit hutang hingga membuat masyarakat resah dan bingung tidak adanya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu banyak masyarakat yang tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap dirumah saja karena pendapatan tidak sebanding dengan pengeluaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustami, Alek Wissalam. Pengaruh Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Desa Pondok Kecamatan Bukit Kerman. Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Al-Dzahab Vol. 1 (1) 2020.
- Fatoni, Ahmad. 2020. Dampak Covid-19 dan Kebijakan PSBB Pemerintah Terhadap UMKM di Wiyung Surabaya. Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah. Volume 3 Nomor 1.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KOTA DUMAI

Habsari Hastaningsih, Mirza Ghulam Ahmad, Nanda Ade Putra

Program Pascasarjana Universitas Riau Pekanbaru

Email: hastaningsihhabsari@gmail.com

Abstrak

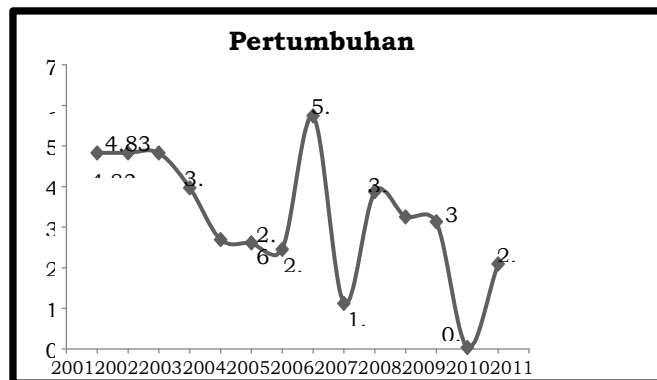
Sebagai kota pesisir yang sedang berkembang di sektor industri, Kota Dumai juga sedang mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan. Perkembangan kegiatan industri yang dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk bisa dipastikan akan meningkatkan hasil buangan yang pada akhirnya akan menambah masalah pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air. Pencemaran ini mempengaruhi kualitas sumber air baku untuk air bersih dan minum baik itu air permukaan (sungai dan danau) maupun air tanah. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas lingkungan yang sehat akan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan juga produktifitas masyarakat. Dengan adanya beberapa kasus indikasi pencemaran air didukung oleh hasil analisa laboratorium yang menunjukkan indikasi tercemarnya beberapa air sungai di Kota Dumai maka pengendalian pencemaran air dianggap penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kolaborasi yang dilakukan pihak pemerintah Kota Dumai beserta *stakeholdersnya* dalam pengendalian pencemaran air di Kota Dumai. Dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi secara *purposive sampling* dan dianalisa secara interaktif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan teori Ansell dan Gash dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam pengendalian pencemaran air di Kota Dumai belum dapat dilaksanakan secara baik, hal tersebut dikarenakan proses *face to face*, *trust building*, *commitment to process* dan *shared understanding* belum dilaksanakan secara rutin dan perlu dibentuk sebuah peraturan daerah sebagai alat legitimasi pelaksanaan kolaborasi pengendalian pencemaran air di Kota Dumai.

Kata kunci: *collaborative governance*, pengendalian pencemaran air

PENDAHULUAN

Memiliki luas daratan 204.674 Ha dan wilayah perairan seluas 71.393 Ha, terletak pada posisi antara 101° 0' 38" - 101° 43' 33" Bujur Timur, 01° 26' 50" - 02° 15' 40" Lintang Utara, Kota Dumai berada di pesisir pantai timur Sumatera sesuai dengan letak geografisnya. Posisi Kota Dumai yang berada di wilayah pesisir menjadikannya sebagai salah satu kota yang memiliki potensi besar di sektor perdagangan dan industri. Hal tersebut diwujudkan dengan dibangunnya beberapa Kawasan Industri yaitu Kawasan Industri Dumai Pelintung, Kawasan Industri Lubuk Gaung, Kawasan Industri *Dock Yard*, Kawasan Industri Bukit Kapur dan Kawasan Industri Bukit Timah. Dengan dibangunnya kawasan industri di Kota Dumai maka banyak berdiri pabrik-pabrik yang bergerak di bidang tangki timbun, pengolahan minyak sawit dan turunannya, jasa penyediaan penginapan, rumah makan dan fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan pabrik.

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar yang berkaitan dengan wilayah. Perkiraan mengenai kependudukan menurut berbagai karakteristik jumlah dan komposisi penduduk pada suatu wilayah merupakan *input* dari pembangunan yang sangat penting bagi rencana-rencana seperti permintaan barang atau jasa pelayanan dan kebutuhan lahan di masa yang akan datang. Keterkaitan antara kependudukan dengan limbah atau buangan sangat erat, dimana jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan jumlah buangan yang dihasilkan. Jumlah penduduk di Kota Dumai secara umum mengalami pertambahan setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2002 sampai dengan 2015 yang signifikan.



Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Dumai
Sumber: RPJMD Kota Dumai 2016-2021

Pelaksanaan pengendalian pencemaran air di Kota Dumai perlu dilakukan secara berkesinambungan. Karenanya diperlukan dialog secara rutin antara *stakeholders* mengenai perencanaan program kegiatan maupun teknis pelaksanaannya. Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Afdal Syamsir, ST, MT pada Senin, 7 Oktober 2019 saat menerima kunjungan dari PT. Sinarmas terkait informasi izin limbah domestik bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu sebab minimnya dialog antara *stakeholders* dan sosialisasi program pengendalian pencemaran air di Kota Dumai. Belum terbentuknya Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota yang menjadi dasar pelaksanaan kolaborasi pengendalian pencemaran air juga menjadi salah satu faktor kolaborasi belum bisa dilaksanakan dengan baik, pihak Pemerintah Kota Dumai masih mengandalkan peraturan yang disahkan dari pemerintah pusat baik itu Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Dumai secara *general*.

Lemahnya dorongan dari masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi dalam kolaborasi menjadi sebab terjadinya pencemaran air di Jalan Sultan Syarif Kasim Kota Dumai yang drainasenya dipenuhi oleh sampah botol bekas minuman kemasan dan plastik bahkan kabel telekomunikasi milik Telkom dalam kondisi semrawut. Posisinya melintang di saluran air tersebut. Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai melakukan pembersihan saluran air dengan menggunakan satu unit alat berat untuk mengeruk sampah yang menumpuk didalam saluran air. Sejumlah petugas tampak membuka satu per satu penutup saluran air yang terbuat dari beton dengan bantuan linggis. Selain sampah didalam saluran tersebut juga banyak endapan, karenanya dilakukan pengerukan dalam rangka antisipasi mencegah terjadinya banjir, demikian tulis Fernando di media TribunDumai.com pada Selasa 6 November 2018.

Informasi yang disampaikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai melalui Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan indikasi pencemaran air di Kota Dumai diperkuat dengan hasil analisa laboratorium sampel air sungai pada tahun 2017 sampai dengan 2019 yang menunjukkan beberapa parameter melebihi Baku Mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air untuk kategori kelas air Kelas Dua, yaitu kelas air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Parameter-parameter yang melebihi Baku Mutu tersebut antara lain BOD, COD dan Total *Coli*.

Salah satu contoh pencemaran air yang diakibatkan oleh aktifitas industri terjadi pada Jumat, 17 Januari 2020 dengan ditemukannya dugaan pencemaran lingkungan oleh PT. Eka Dura Indonesia yang membuang air sisa pencucian tangki truk *Crude Palm Oil* dan pemandian pekerja ke parit tanpa dikelola terlebih dahulu. Dari hasil investigasi lapangan ditemukan bahwa minyak hitam tersebut berasal dari pencucian tangki *Crude Palm Oil* tulis Abdul Razak di Media Antara. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dianggap belum maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air. Institusi pemerintah sebagai pemangku, pelaksana dan pengawas kebijakan terkesan tidak dianggap keberadaannya oleh para pelaku usaha dan menjadi *powerless* sehingga menghambat komunikasi yang pada akhirnya menimbulkan konflik.

Pada kesempatan lain pada saat menangani kasus indikasi pencemaran tugas penyelidikan dan penyidikan dilimpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau atau Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Wilayah Sumatera selaku perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di wilayah Sumatera dikarenakan sumber daya yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai tidak memadai dan tidak memenuhi syarat sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup maupun Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Novita Listiyani dan Hasanuddin dalam jurnalnya yang berjudul Kebijakan Pemerintah Kota Dumai Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai Tahun 2013 yang menyimpulkan bahwa lemahnya pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran lingkungan salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia atau pejabat pengawas lingkungan disamping juga belum ada peraturan yang jelas mengenai pengendalian pencemaran air di Kota Dumai baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota.

Menurut Ansell dan Gash (2008) *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan diluar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik. Fokus *collaborative governance* ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus diantara para pemangku kepentingan. *Collaborative governance* merupakan salah satu model strategi baru dari pemerintahan yang melibatkan berbagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersamaan didalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa dihadapi sendirian oleh pemerintah itu sendiri.

Collaborative governance dalam pengendalian pencemaran air adalah bagaimana pemerintah dapat mencapai tingkatan kolaborasi tertinggi dalam penerapan pengendalian pencemaran air dengan melakukan komitmen formal untuk bekerja secara kolektif antara pihak pemerintah dan non-pemerintah dengan cara yang berbeda, menggunakan proses tertentu untuk menetapkan hukum dan aturan untuk kepentingan publik. Pemerintah sebagai pelayan publik dituntut untuk membagi kewenangannya kepada pihak swasta dan masyarakat. Pemerintah wajib memberikan pelatihan dan ketegasan hukum kepada masyarakat dan swasta untuk menangani masalah pengendalian pencemaran air. Swasta berpengaruh besar dalam masalah ini karena swastalah yang sebenarnya memiliki kepentingan, tetapi kepentingan tersebut juga tidak lepas dari peningkatan perekonomian masyarakat, swasta juga harus bekerja sama dalam menangani masalah pengendalian pencemaran air baik dalam hal sosial maupun ekonomi. Sedangkan masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan, tentu peranan ini tidak jauh dari kontrol perkembangan penanganan masalah tersebut, untuk itu hal terpenting dalam kolaborasi ini yaitu komunikasi antar *stakeholders*, karena jika komunikasi ini terjalin dengan baik maka jaringanpun akan ikut membaik, pada akhirnya semua permasalahan pengendalian pencemaran air akan teratasi.

METODE PENELITIAN

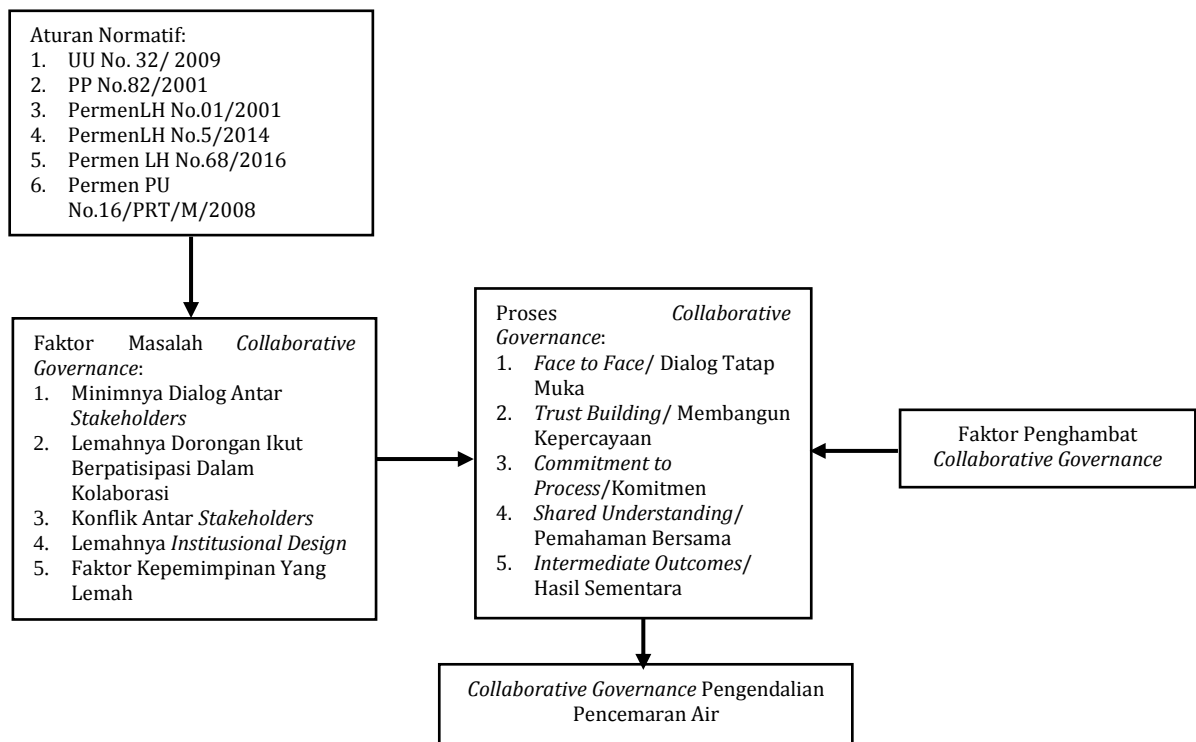
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Yang mana akan dilakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, aktifitas dan proses kolaborasi dalam pengendalian pencemaran air di Kota Dumai. Dipilihnya Kota Dumai sebagai lokasi penelitian karena Kota Dumai merupakan kota industri yang sedang berkembang seiring dengan perkembangan jumlah penduduknya yang pada akhirnya akan berbanding lurus dengan besaran jumlah buangan yang menjadi potensi sumber pencemaran air. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* karena informan dianggap memahami dan memiliki sangkut paut yang erat terhadap pengendalian pencemaran air di Kota Dumai. Untuk mendapatkan data penulis melakukan observasi deskriptif dan wawancara mendalam yang kemudian data dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan sebagaimana yang disampaikan oleh Miles dan Huberman (1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ansell dan Gash mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama. Dari definisi tersebut ditekankan enam kriteria yaitu; (1) forum diinisiasi oleh institusi publik; (2) partisipan dalam forum harus mencakup aktor non-pemerintah; (3) partisipan harus terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak sekedar “berkonsultasi” dengan pihak pemerintah; (4) forum harus terorganisasi secara formal dan ada pertemuan secara rutin; (5) kebijakan yang diambil harus berdasarkan konsensus; dan (6) kolaborasi fokus pada kebijakan publik atau manajemen publik. Tujuannya adalah untuk melaksanakan kebijakan dan mengelola program dan sumber daya secara bersama.

Dari enam kriteria tersebut dapat ditarik kesimpulan ada empat dimensi utama yang disampaikan dalam teori model *collaborative* Ansell dan Gash (2008). Pertama, proses kolaborasi (*collaborative process*) sebagai inti dari *collaborative governance*. Kedua, terdapat tiga dimensi lainnya yang mempengaruhi yaitu kondisi awal (*starting condition*), desain kelembagaan (*institutional design*) dan kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*). Keempat dimensi tersebut dianalisis dan dilaksanakan sehingga diperoleh keluaran (*outcome*) *collaborative governance* yang didasarkan pada keputusan yang berorientasi konsensus dan bersifat formal.

Definisi hampir serupa disampaikan oleh Balogh (Astuti, 2020) bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja. Dilanjutkan oleh Robertson dan Choi (2010) dalam Kumorotomo (2013) yang mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan didalamnya memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan dan setiap pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut.



Gambar Kerangka Berfikir
Collaborative Governance Dalam Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Dumai

Dari kerangka berfikir penulis yang menyadur teori dari Ansell dan Gash dapat dijelaskan:

1. Dialog tatap muka antara *stakeholders*, menurut informan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai bahwa dialog tatap muka antara *stakeholders* telah dilakukan pada saat pengajuan izin lingkungan. Yaitu pada kegiatan konsultasi publik pada saat sidang AMDAL. Dimana pihak pemerintah, swasta dan masyarakat duduk dalam suatu forum untuk membicarakan tentang rencana pelaksanaan suatu kegiatan serta dampak yang akan ditimbulkannya. Dari kegiatan tersebut nantinya akan disusun suatu kesepakatan yang akan dituangkan dalam bentuk izin lingkungan yang berisi poin-poin kesamaan misi, visi, niat, target, tujuan dan arah yang jelas dalam mendefinisikan suatu pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran air dan pengendalian dampak lingkungan pada umumnya;
2. Rasa saling percaya antara *stakeholders*, membangun rasa saling percaya antara *stakeholders* dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air di Kota Dumai dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Proses itu telah dirintis sejak Pemerintah Kota Dumai resmi melaksanakan operasi roda pemerintahan yaitu pada tahun 1999. Melalui beberapa komitmen yang dituangkan kedalam Rencana Pembangunan baik jangka panjang dan menengah disertai dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Terdapat pemahaman bersama antara *stakeholders*, dari proses membangun rasa saling percaya maka disepakati adanya komitmen antara *stakeholders* dalam rangka melaksanakan program pengendalian pencemaran air, hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan proses izin pengelolaan air limbah bagi perusahaan-perusahaan ataupun kegiatan yang menghasilkan buangan dimana hal tersebut dapat dikategorikan sebagai hasil sementara yang dicapai dari proses kolaborasi pengendalian pencemaran air di Kota Dumai.

KESIMPULAN

Collaborative governance dalam pengendalian pencemaran air di Kota Dumai dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kolaborasi pengendalian pencemaran air di Kota Dumai telah dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan non-pemerintah namun dirasakan belum maksimal dikarenakan proses yang dilaksanakan tidak berjalan secara kontinyu namun dilakukan hanya pada saat proses pengajuan izin lingkungan dan izin penyertanya;
2. Dalam pelaksanaan kolaborasi masih ditemukan beberapa kendala diantaranya adalah keterbatasan anggaran dalam rangka sosialisasi program pengendalian pencemaran air serta terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten;
3. Belum ada legitimasi baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota terkait pelaksanaan kolaborasi pengendalian pencemaran air yang dapat dijadikan dasar saran tindak bagi pihak pemerintah maupun non-pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A, 2008, *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory.
- Astuti, R, S., Warsono, H., Rachim, Abd., 2020, *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Kumorotomo, Wahyudi, dkk, 2013, *Transformasi Pelayanan Jakarta Commuter Line: Studi Tentang Collaborative Governance di Sektor Publik*. Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM.
- Listiyani, Novita & Hasanuddin, 2013, *Kebijakan Pemerintah Kota Dumai Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai Tahun 2013 (Studi Pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai)*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Volume 1 Nomor 2. ISSN: 2355-6919.
- Matthew B. Miles., Huberman, Michael. A, 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terjemah: Tjetjep Rohendi, Mulyarto. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA DUMAI

Erni Darlis, Meiga Wirson, Hendri

Program Pascasarjana Universitas Riau Pekanbaru

Email: ernidarlis112@gmail.com

Abstrak

Perubahan wajah Kota Dumai oleh faktor industrialisasi dan letaknya yang strategis dalam konstelasi wilayah mendorong terjadinya proses urbanisasi yang menyebabkan terjadinya pergeseran perkembangan permukiman dari permukiman kota nelayan menjadi permukiman kota industri. Percepatan pertumbuhan permukiman yang berlangsung secara sporadis melalui penguasaan lahan yang tidak terkendali serta pembangunan sarana prasarana kota yang tidak memadai, menimbulkan kesemrawutan (ketidakteraturan) pada perkembangan struktur ruang kota. Sebuah kota seharusnya mempertimbangkan keberadaan ruang terbuka hijau untuk ditingkatkan fungsi serta perannya bagi masyarakat untuk melakukan interaksi sosial antar sesama warga, disamping menciptakan keseimbangan lingkungan wajah perkotaan. Mengingat pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau untuk menjaga keseimbangan lingkungan di perkotaan dan telah adanya regulasi mengenai penyediaan ruang terbuka hijau kemudian membuat pertanyaan muncul seberapa besar perhatian pemerintah Kota Dumai dalam mengatur penyediaan ruang terbuka hijau dan seperti apa pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan studi literatur yang bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi serta dianalisa secara interaktif.

Kata kunci: ruang terbuka hijau

PENDAHULUAN

Kota merupakan pusat dari berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat seperti pemerintahan, perindustrian, perdagangan, transportasi, pendidikan, dan lain - lain. Pemusatan kegiatan di perkotaan membuat tingkat kepadatan penduduk terus bertambah, keadaan tersebut kemudian sejalan dengan semakin meningkatnya laju pembangunan sebagai upaya pemenuhan sarana infrastruktur yang harapannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan.

Meskipun pembangunan merupakan salah satu sarana bagi pencapaian taraf kesejahteraan, namun demikian setiap pembangunan tidak terlepas dari adanya dampak yang merugikan terhadap lingkungan. Pesatnya laju pembangunan seolah menjadi penghalang bagi keberlanjutan ekosistem lingkungan hidup di perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan lingkungan hidup mendapat tekanan yang cukup berat sehingga lahan kritis cenderung meningkat, penyusutan keanekaragaman hayati, kondisi pesisir mencemaskan, pencemaran tanah, air dan udara bertambah. Kenyataan tersebut berdampak kepada sulitnya masyarakat di perkotaan mendapat lingkungan yang bersih dan nyaman dan meningkatnya kebutuhan ruang publik sebagai sarana masyarakat melakukan interaksi maupun kegiatan sosial.

Koordinator Kampanye dan Advokasi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Cut Nurhayati dalam wawancara dengan VOA Indonesia menyebutkan ruang terbuka hijau di sebagian kota di tanah air masih minim, mengingat kebanyakan kegiatan pembangunan di kota - kota yang ada di Indonesia direncanakan tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Lingkungan perkotaan hanya berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Kualitas ruang publik, terutama ruang terbuka hijau pada 30 tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat signifikan (Media Hijau & Permukiman, 2012).

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang berbentuk jalur atau area mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman,

baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa ruang terbuka hijau yang terdiri dari 20% ruang publik dan 10% privat. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, contohnya taman kota, hutan kota, sabuk hijau (*green belt*), ruang terbuka di sekitar sungai, pemakaman dan rel kereta api. Sedangkan ruang terbuka hijau privat adalah ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah atau Gedung milik masyarakat atau swasta yang sengaja ditanami tumbuhan. Tujuan penyediaan ruang terbuka hijau antara lain untuk (1) menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, (2) menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, dan (3) meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

Dengan adanya ruang terbuka hijau baik secara alami dan buatan diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai (1) fungsi ekologis, antara lain paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan dalam udara, air dan tanah serta penahan angin, (2) fungsi sosial budaya, antara lain menggambarkan ekspresi budaya lokal, media komunikasi dan tempat rekreasi warga, (3) fungsi ekonomi, antara lain sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun dan sayur-mayur. Beberapa juga berfungsi sebagai bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain, (4) fungsi estetika, antara lain meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik skala mikro (halaman rumah atau lingkungan permukiman) maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan), menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun. Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan, kepentingan dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologis dan konservasi hayati.

Menurut fungsi manfaat ruang terbuka hijau dibagi dalam kategori (1) manfaat langsung, dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*, yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga dan buah) dan (2) manfaat tidak langsung, berjangka panjang dan bersifat *intangible*, yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemelihara kelangsungan sumber air tanah dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati dan keanekaragaman hayati).

Langkah-langkah strategis pemerintah Kota Dumai menuju ruang terbuka hijau 30% diantaranya dengan menyusun rencana induk ruang terbuka hijau dan melegalisasi peraturan daerah tentang ruang terbuka hijau, menentukan daerah yang tidak boleh dibangun, menghijaukan bangunan dan menambah luasan ruang terbuka hijau baru. Selain itu meningkatkan partisipasi masyarakat, mengembangkan koridor hijau, mengakuisisi ruang terbuka hijau privat dan meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang bersifat deskriptif. Peneliti akan melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, aktifitas, literatur dan peraturan perundang-undangan terkait pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Dumai. Dipilihnya Kota Dumai sebagai lokasi penelitian karena Kota Dumai merupakan kota industri yang sedang berkembang dengan potensi tata guna lahan yang beragam sehingga pengembangan ruang terbuka hijau menjadi

sangat penting dalam rangka menyeimbangkan fungsi ekologi Kota Dumai. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* karena informan dianggap memahami dan memiliki sangkut paut yang erat terhadap pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Dumai. Untuk mendapatkan data penulis melakukan observasi deskriptif dan wawancara mendalam yang kemudian data dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan sebagaimana yang disampaikan oleh Miles dan Huberman (1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah lingkungan hidup yang sering terjadi diantaranya ketidaktersediaan ruang terbuka hijau, pencemaran udara dan air. Walaupun pemerintah telah membuat peraturan tertulis maupun himbauan kepada masyarakat tentang aturan-aturan mengenai lingkungan, namun bila penduduk kota tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pembangunan kotanya, tidak diberi kesempatan untuk bertindak secara aktif memberikan cap pribadi atau kelompok pada lingkungannya, tidak memperoleh peluang untuk membantu, menambah, merubah, menyempurnakan lingkungannya, akan kita dapatkan masyarakat kota yang apatis, acuh tak acuh dan mungkin agresif.

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilannya memerlukan kebijakan yang tepat, perencanaan, pembelajaran dan viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahan dan kegiatan dunia usahanya (Soemarwoto, 2004). Pembangunan berkelanjutan dielaborasi oleh Stren, While dan Whitney (1992) sebagai suatu interaksi antara tiga sistem: sistem biologis dan sumberdaya, sistem ekonomi dan sistem sosial. Pembangunan berkelanjutan tidak terpancang pada lingkungan semata.

Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (*evolution*) dan perubahan secara bertahap. Menurut Seels dan Richey dalam Alim Sumarno (2012) pengembangan berarti proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk fitur fisik. Pengembangan secara khusus berarti proses menghasilkan bahan-bahan pembelajaran. Sedangkan menurut Tessmer dan Richey dalam Alim Sumarno (2012) menyatakan pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisis kontekstual. Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan. Pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, terencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan- kemampuan, sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal serta pribadi mandiri (Iskandar Wiryokusumo, 2011).

Roger Trancik (1986) dalam bukunya "*Finding Lost Space*" mengungkapkan bahwa menurut sifatnya ruang terbuka kota dapat dibagi menjadi (1) *hard space*, yaitu ruang terbuka yang secara prinsip dibatasi oleh dinding arsitektural dan biasanya sebagai kegiatan sosial. Ruang terbuka jenis ini tidak tertutup oleh massa bangunan namun tertutup oleh pengerasan seperti ubin, aspal, plesteran, paving stone, dan lain-lain; (2) *soft space*, yaitu ruang terbuka yang didominasi oleh lingkungan alam. Pada setting kota, *soft space* berbentuk taman (*park*) dan kebun (*garden*) serta jalur hijau (*greenways*) yang dapat memberikan kesempatan untuk berelaksasi (santai).

Ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau kemudian lebih lanjut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan ruang terbuka hijau antara lain meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, dan bersih serta sebagai sarana pembangunan lingkungan perkotaan yang dapat menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Dari hasil identifikasi dan observasi yang dilakukan ruang terbuka hijau di Kota Dumai terbagi menjadi: (1) ruang terbuka hijau wilayah, yaitu kawasan suaka margasatwa di Kecamatan Sungai Sembilan dan Hutan Wisata di Kecamatan Bukit Kapur. Jika dibandingkan luas ruang terbuka hijau wilayah Kota Dumai dengan luas Kota Dumai, maka ruang terbuka hijau di Kota Dumai telah memenuhi syarat yaitu sebesar 30%, (2) ruang terbuka hijau perkotaan yaitu ruang terbuka hijau yang terdapat di kawasan perkotaan yang berupa area tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau perkotaan yang terdapat di kota Dumai berupa lapangan bola dan lapangan golf, (3) ruang terbuka hijau lingkungan perumahan yaitu ruang terbuka hijau yang terdapat di setiap lingkungan perumahan, baik berupa pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, dan taman atap bangunan. Ruang terbuka hijau di Kota Dumai tersebar di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 3.555,64 Ha, Kecamatan Dumai barat dengan luas 581,16 Ha dan Kecamatan Dumai timur dengan luas lahan 27,76 Ha (Dokumen RPJMD Kota Dumai 2016-2021).

Dalam pelaksanaan pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Dumai pihak pemerintah masih berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dari pemerintah pusat. Hal ini sangat disayangkan mengingat pentingnya peranan dan fungsi ruang terbuka hijau bagi keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menjadi catatan penting bagi pihak pemerintah Kota Dumai untuk dapat merencanakan dan menyusun peraturan-peraturan daerah terkait pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Dumai. Demi terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan ruang publik bagi masyarakatnya.

KESIMPULAN

Keberadaan ruang terbuka hijau menjadi sangat penting mengingat Kota Dumai merupakan kota industri yang diiringi dengan laju pertumbuhan penduduknya. Luasan ruang terbuka hijau saat ini meskipun dianggap telah memenuhi ketentuan 30% luasannya dari total luas wilayah kota, masih dianggap perlu untuk melakukan pengembangan. Hal tersebut dalam rangka mengimbangi dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan industri yang ada di wilayah Kota Dumai berupa pencemaran udara dan suara. Faktor legalitas berupa peraturan daerah maupun peraturan walikota penting untuk disusun sebagai bentuk keseriusan pihak pemerintah dalam pengembangan ruang terbuka hijau di wilayahnya. Disamping juga faktor anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau yang perlu untuk ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo, Eko, 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Penerbit Alumni, Bandung.
Media Hijau dan Pemukiman, 2012.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021.
Sumarno, Alim, 2012. *Perbedaan Penelitian dan Pengembangan*.
<http://blog.elearning.unesa.ac.id/alim-sumarno/perbedaan-penelitian-dan-pengembangan>. Diakses 15 Maret 2021.

- Trancik, Rogers, 1986. *Finding Lost Space*. Theories of Urban Design. Van Nostrand Reinhold Company, New York. <https://elibraryarchitecture.files.wordpress.com/2015/03/finding-lost-space.pdf>. Diakses 15 Maret 2021.
- Wiryokusumo, Iskandar,dkk, 1982. *Kumpulan-Kumpulan Pemikiran Dalam Pendidikan*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Zahnd, Markus, 1999. *Perancangan Kota Secara Terpadu: Teori Perancangan Kota dan Penerapannya*. Semarang: Kanisius.

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat

Pekanbaru, 25 Agustus 2021

Penerbit
Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
bekerjasama Laboratorium FISIP Universitas Riau dan PT. Pertamina RU II Sungai Pakning

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

“Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat”

Steering Committee

: Dr. Syafri Harto, M.Si
Dr. Harapan Tua RFS, M.Si
Dr. Febri Yuliani, M.Si

Organizing Committee

Ketua : Dr. Adianto, S.Sos, M.Si
Wakil Ketua : Dr. Hasim As'ari, S.Sos, M.Si
Sekretaris : Dr. Dadang Mashur, S.Sos, M.Si
Bendahara : Dr. Mayarni, S.Sos, M.Si
Seksi Kesekretariatan : Abdul Sadad, S.Sos, M.Si
Risky Arya Putri, S.Sos, M.Si
Bamba Indalis, SP, MP
Sinsi Ana, S.IP, M.Si
Seksi Acara : Geovani Meiwanda, S.Sos, MPA
Seksi Konsumsi : Mimin Sundari Nasution, S.Sos, M.Si
Seksi Publikasi : Zulkarnaini, S.Sos, M.Si
Dedi Kusuma Habibie, S.IP, MPA
Seksi Sarana dan Prasarana : Khairul Amri, S.Sos, M.Si
Budi Hartono, ST, M.Si
Suryadi Haryono, S.IP

Reviewer

Prof. Dr. Sujianto, M.Si
Dr. Zaili Rusli, M.Si

Editor

Zulkarnaini, S.Sos, M.Si
Dedi Kusuma Habibie, S.IP, MPA

Layout :

Arnain'99

Desain cover:

Rahmanul

Penerbit:

Prodi Ilmu Administrasi Publik
bekerjasama Laboratorium FISIP UNRI
dan PT. Pertamina RU II Sungai Pakning

Alamat Penerbit:

Kampus Binawidaya Simpang Baru, Pekanbaru 28293
Telp (0761) 63267; Fax (0761) 65804
E-mail: admpublik@unri.ac.id

Cetakan I, September 2021

All rights reserved
Do not reproduce this paper in the form and
In any way without the written permission of the publisher

ISSN 2808-1536

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah_Nya prosiding ini dapat diterbitkan pada waktu yang sudah ditentukan. Prosiding ini berasal dari Seminar Nasional bertema *Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan Berbasis Masyarakat* yang diselenggarakan atas kerjasama Program Studi Administrasi Publik FISIP UNRI, Laboratorium FISIP UNRI, dan PT. Pertamina RU II Sungai Pakning. Kegiatan seminar ini diadakan pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 yang berlangsung secara daring.

Tata kelola ekosistem gambut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Hal tersebut menjadi dasar bagi PT. Pertamina RU II Sungai Pakning dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang sekaligus menjadi program tata kelola lahan gambut di wilayah Sungai Pakning, Kabupaten Bengkalis. Program tersebut tergabung dalam Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina RU II Sungai Pakning.

Berbagai program pemberdayaan masyarakat tersebut diantaranya pertanian nanas terpadu, mitigasi karhutka berbasis MPA, arboretum gambut, sekolah cinta gambut, posyandu SEHATI, budidaya ikan nila salin, revitalisasi dan konservasi kawasan mangrove dan budidaya madu hutan gambut. Ke delapan program CSR diharapkan dapat memberdayakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia secara lebih optimal, khususnya dalam hal pengelolaan lahan gambut.

Berbagai program CSR yang telah dijalankan tentunya harus mendapatkan feedback dari berbagai pihak, salah satunya dari kalangan akademisi. Perlunya berbagai riset dilakukan guna sebagai bahan evaluasi serta perbaikan program kedepannya. Oleh karena itu, diadakan seminar nasional yang berfokus pada tata kelola ekosistem gambut berbasis masyarakat.

Adapun yang menjadi sub topik riset yang akan diseminarkan adalah:

1. Pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan gambut
2. Pelestarian dan perlindungan biodiversitas ekosistem gambut
3. Penguatan kohesi sosial masyarakat di Desa gambut

Seminar nasional yang dilakukan bertujuan agar menghasilkan riset-riset yang berkualitas tentang tata kelola lahan gambut di Kabupaten Bengkalis. Riset terpilih akan mendapat hibah pendanaan dari PT. Pertamina RU II Sungai Pakning. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan korporasi dan akademisi diharapkan akan menghasilkan kebaharuan dalam tata kelola lahan gambut berkelanjutan.

Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan dimaksud sampai dengan terbitnya prosiding ini ke tangan pembaca sekalian.

Pekanbaru, September 2021

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	iv

DAFTAR JUDUL UTAMA

Kohesifitas Aktor Non Negara dalam Tata Kelola Ekosistem Gambut Berkelanjutan <i>Alfian, Tito Handoko, Nursiwan.....</i>	1
Keanekaragaman Hayati di Arboretum Gambut Marsawa Sungai Pakning Tahun 2021 <i>Wahyu Purwanto, David M Haryanto, Arini Kusuma Putri</i>	11
Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Jejaring Antar Organisasi (<i>Inter-Organizational Network</i>) bagi Pengendalian Karhutla pada Lahan Gambut <i>Febri Yuliani.....</i>	18
Pengelolaan Wilayah Gambut melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Riau <i>Dio Prama Sutra, Adnan Aban.....</i>	24
Strategi Pengelolaan Lahan Gambut Untuk Pengembangan Perekonomian Masyarakat <i>Elida Sahni Siregar.....</i>	30
Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Lingkungan Gambut <i>Helda Khairiyah.....</i>	37
Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Lingkungan Gambut <i>Mela Wirga Astika.....</i>	41
Pelaksanaan Inovasi Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (Si Peka) di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai <i>Nanda Aristika, Ulil Amri, Wan Dodi Ihsan.....</i>	48
Restorasi Gambut Berbasis Pemberdayaan Masyarakat <i>Netalia Marliza.....</i>	55
Karakteristik Spasial dan Temporal Kebakaran Lahan Gambut di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Pulau Rangsang <i>Nur Hidayati, Sigit Sutikno, Nurul Qomar.....</i>	58
Pemetaan Lahan Gambut Rawan Kebakaran melalui Pemberdayaan Masyarakat di Sungai Pakning Riau <i>Parasian Manurung.....</i>	68
Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Pertanian dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bengkalis <i>Septi Riana Putri, Uci Wulandari.....</i>	76

Peran Modal Sosial dalam Pemberdayaan Petani di Lahan Gambut Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana - Bengkalis <i>Tri Gunawan & Lie Othman</i>	82
<i>Capacity Building</i> dalam Pengelolaan Lahan Gambut Menuju Kemandirian Ekonomi di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis <i>Wifa I Lumbangaol, Ruth Aldiz Khatarine, Monica Rosiana Sitorus, Jefri Fujima Sianturi, Alexius</i>	92
Difusi Inovasi Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan (Studi Kasus Program Arboretum Gambut Marsawa oleh PT. Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning <i>Agus Rinaldi, Tantri Leo Sani, Wahyu Andrean, Nilanda Rizky</i>	102
Inventarisasi Etnoekologi Masyarakat Lahan Gambut dalam Pelestarian Biodiversitas Berbasis Kearifan Lokal: A Case Study di Kawasan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis <i>M Agung Alwanda, Muhammad Eizlan, Nayu Argustiya Ningsih</i>	108
Analisis Model Triple Helix dalam Implementasi Program Permata Hijau <i>Resa Vio Vani, Eka Putri Zulyani, Sania Octa Priscilia, Nadila Saumitri, Abdul Halim</i>	114
Kampanye Gambut Berbasis Government-Led Project di Kecamatan Bukit Batu <i>Sumiati</i>	128
Strategi Restorasi dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Bengkalis <i>Hafizh Ayyasy Habibi, Alvin Asfareza, Fahrur Rifqi, Rifandra Akbari</i>	134
DAFTAR JUDUL PENYERTA	
Evaluasi Dampak Limbah Rumah Tangga Bagi Pencemaran Laut <i>Hendra, Afrizal</i>	143
Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan di Kecamatan Medang Kampai <i>Andre Aghasthian R & Purba</i>	150
Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif <i>Anita</i>	157
Efektivitas Program Sistem Pelayanan Terpadu Kependudukan pada Masa Pandemi Covid-19 <i>Angella Rosha Pangestu</i>	164
Evaluasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bengkalis <i>Candra Kusuma, Benny Syofyan, Rumini</i>	171
Kebijakan Responsif Sebagai Instrumen Transformasi Pelayanan Publik pada Masa Pandemi Covid-19 <i>Ernalko, Ilyas Riski, Sri Mutiara Rizki</i>	177

Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) di Kecamatan Bengkalis <i>Herniyati, Irvan, Suryanto</i>	186
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di Masa Pandemi Covid-19 <i>Ita Lestari, Jevi Alen Miswanto, M. Mukhlis</i>	190
Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 <i>Meiherayenti</i>	196
Peran Dinas Kesehatan dalam Penyediaan Logistik di Puskesmas Kota Pekanbaru <i>Rina Gusti Ayu, Jon Kenedi, Syafrisar Masri Limart</i>	201
Inovasi BUMDES Kuala Alam dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Kuala Alam Kecamatan Bengkalis <i>Rima Sanriana, Zulfan Heri, Zulkifli Anwar</i>	208
Implementasi Kebijakan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 pada Tenaga Pendidik Yayasan Pendidikan Islam X di Kota Pekanbaru <i>Shafira Amalia Ramadhani</i>	215
Pengaruh Covid-19 terhadap Perekonomian Masyarakat Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi <i>Bella Fitrianti</i>	221
<i>Collaborative Governance</i> dalam Pengendalian Pencemaran Air di Kota Dumai <i>Habsari Hastaningsih, Mirza Ghulam Ahmad, Nanda Ade Putra</i>	224
Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Dumai <i>Erni Darlis, Meiga Wirson, Hendri</i>	230

ISBN 978-602-90161-2-7



9 786025 016127